



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dan untuk menyesuaikan kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih tahun 2025-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; dan
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd
BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dari sisi perencanaan pembangunan daerah. Dengan dilantikannya Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025, maka diperlukan adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan prioritas Kepala Daerah terpilih, serta program nasional berupa Asta Cita. Hal tersebut merupakan amanat yang termuat pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/Sj tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada SE tersebut juga disampaikan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mendasarkan kepada hasil pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 tahun 2025.

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dan merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tema “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan”. Secara hukum positif, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini masih mengacu kepada RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026. Namun sesuai dengan amanat dari SE Mendagri tersebut di atas, maka dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ini disusun untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih tahun 2025-2030.

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan karena adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (*unaudited*) pada APBD TA 2024. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025 juga menjadi dasar perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan RKPD 2025 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Perubahan RKPD 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
4. Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan penyusunan RKPD Perubahan 2025 yang komprehensif dan partisipatif, Pemerintah Kota Semarang dapat lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan serta lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43)
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

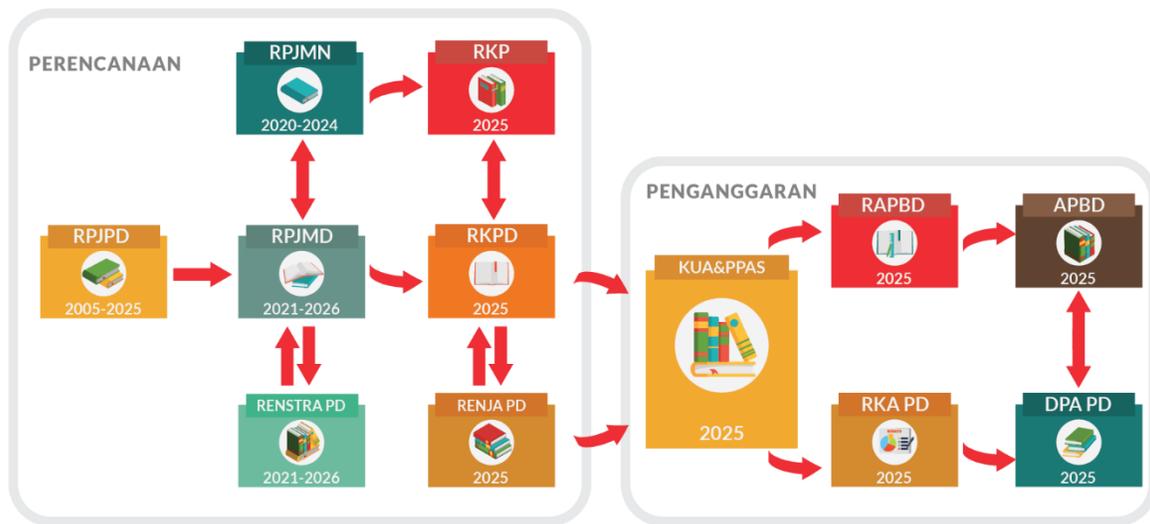
1.3.1 Integrasi Dokumen Perencanaan dalam Penyusunan Perubahan RKPD 2025

Dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan jangka panjang yang termaktub dalam RPJP nasional dan daerah dimana di dalamnya menjelaskan terkait visi, misi, arah, dan sasaran pembangunan nasional dan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJP ditorehkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau 5 tahunan pada RPJM nasional dan daerah yang kemudian dijabarkan kedalam tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahapan dalam bentuk RKPD. Sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD yang menjadi pedoman penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Berikutnya, dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota dan DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2025 triwulan 1. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk menjamin akuntabilitas dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Semarang menggunakan sistem berbasis website yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait di Kota Semarang.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mempedomani RKP Tahun 2025, RPJMN Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2025-2030. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan kebijakan pembangunan

Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang. Penyusunan RKPD ini mengacu juga kepada nomenklatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2025

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai upaya memastikan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025, serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan penyesuaian arah kebijakan berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan Triwulan I untuk menjadi pedoman kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah di sisa Tahun 2025. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD-Perubahan Tahun 2025 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKPD dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang di Tahun 2025;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2025;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Kota Semarang 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan RKPD.
- BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**
Berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat penjelasan tentang capaian kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 (yoy), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi keterkaitan prioritas di tingkat kota, provinsi dan nasional.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI PENUTUP**
Memuat penegasan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai instrumen untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dengan arah kebijakan, visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2025-2030.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menggambarkan kinerja Kepala Daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan strategis yang diyakini mampu menjawab permasalahan dan isu di daerah, dan memberi daya ungkit terhadap perwujudan visi dan misi pembangunan. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Semarang kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Semarang
Kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD
			Target (Induk)	Realisasi s.d. Triwulan I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	84,80-85,80	85,24	100,00		ST	Koord Bappeda (Capaian 2024)
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	Persen	66,2	72,98	100,00		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,31-5,61	5,82	96,26		ST	Koord Dinas Tenaga Kerja (Capaian 2024)
4	Angka Kemiskinan	Persen	3,74-3,98	4,03	98,74		ST	Koord Bappeda
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	5,8-6,5	5,62	96,90		ST	Koord Bappeda (Capaian 2024)
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)	Juta Rupiah	104,8	156,5	100,00		ST	Koord Bappeda (Capaian 2023)
7	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (29.277.435)	18,85 (7.223.003)	61,00		R	Koord DPMPSTP
8	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Persen	6	5,95	99,17		ST	Koord Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Indeks Demokrasi	Nilai	73,2	89,72	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Capaian 2024)
10	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	95,9	96,37	100,00		ST	Koord DP3A (Capaian 2024)
11	Persentase Penurunan Gangguan	Persen	9,28	0,93	100,00		ST	Satpol, 16 Kec

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD
			Target (Induk)	Realisasi s.d. Triwulan I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Keamanan dan Ketertiban							
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	64,89	59,41	91,55		T	DLH (Capaian 2024)
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	Nilai Indeks	85,5	91,61	100,00		ST	Koord Bappeda
14	Persentase Kawasan Banjir dan Rob terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	3,04	3,29	91,78		ST	Koord DPU
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	78	89,21	100,00		ST	Koord Bag. Organisasi Setda (Capaian 2024)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	89	90,59	100,00		ST	Koord Bag. Organisasi Setda (Capaian 2024)
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00		ST	Koord Inspektorat (Capaian 2024)

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

*) : Indikator pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dari sebanyak 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Semarang yang dijadikan ukuran keberhasilan, sampai dengan triwulan I terdapat 10 indikator yang telah mencapai target tahun 2025 dan 7 indikator lainnya mempunyai predikat Akan Tercapai atau mempunyai tingkat pencapaian kinerja dalam rentang 50% sampai dengan 99,99% dari target yang ditetapkan tahun 2025, karena memang evaluasi ini masih dalam proses pencapaiannya (*On Going* evaluasi). Tiga Belas indikator yang diukur masih menggunakan data kinerja tahun 2024 (karena pengukuran dan publikasinya dilakukan satu kali setiap tahun dan publikasi hasilnya pada periode tahun setelahnya). Selain itu, berdasarkan predikat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, dari 17 IKU terdapat 16 indikator yang memiliki kriteria Sangat Tinggi (ST). Namun, masih terdapat 1 indikator yang berkriteria Rendah (R) yaitu Persentase peningkatan nilai investasi.

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah di Kota Semarang. Adapun kinerja sampai dengan kondisi triwulan I tahun 2025 pada indikator kinerja daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Kondisi sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35	0,18	51,43		R	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,5	5,62	96,90		ST	Koord Bappeda (Capaian 2024)	
3	Laju inflasi	%	2,3	0,7	100,00		ST	Koord Bappeda	
4	Kontribusi kategori- kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,91	29,70	100,00		ST	Koord Bappeda (Capaian 2024)	
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,74	28,35	98,64		ST	Koord Bappeda (Capaian 2024)	
	Fokus Kesejahteraan Sosial								
6	Indeks Pembangunan Manusia	nilai indeks	84,80- 85,80	85,24	100,00		ST	Bappeda (Capaian 2024)	
	a	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp/thn	16.300	16.990	100,00		ST	Bappeda (Capaian 2024)
	b	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,59	78,24	100,00		ST	Dinas Kesehatan (Capaian 2024)
	c	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,63	11,05	100,00		ST	Dinas Pendidikan (Capaian 2024)
	d	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,62	15,57	99,68		ST	Dinas Pendidikan (Capaian 2024)
7	Angka Kemiskinan	%	3,74-3,84	4,03	98,74		ST	Dinas Sosial/ Bappeda	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,31-5,61	5,82	96,26		ST	Dinas Tenaga Kerja/ Bappeda (Capaian 2024)	
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	99,97	100,00		ST	Dinas Pendidikan	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I				
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	66,2	72,98	100,00		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib							
1	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.01	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	97,75	97,75		ST	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)							
	a	%	100	101,5	100,00		ST	Dinas Pendidikan
	b	%	100	99,5	99,50		ST	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	83,58	83,58		T	Dinas Pendidikan
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,6	79,55	100,00		ST	Dinas Pendidikan
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,5	79,55	100,00		ST	Dinas Pendidikan
6	Angka Partisipasi Kasar							
	a	%	81,85	81,85	100,00		ST	Dinas Pendidikan
	b	%	100	103,1	100,00		ST	Dinas Pendidikan
	c	%	100	105,5	100,00		ST	Dinas Pendidikan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I				
7	Angka Partisipasi Murni							
a	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	91,03	100,00		ST	Dinas Pendidikan
b	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	85,18	100,00		ST	Dinas Pendidikan
8	Angka Putus Sekolah							
a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	100,00		ST	Dinas Pendidikan
b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,02	0,01	100,00		ST	Dinas Pendidikan
9	Angka Kelulusan							
a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99,83	99,83		ST	Dinas Pendidikan
b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100,00		ST	Dinas Pendidikan
10	Angka Melanjutkan (AM)							
a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	102,4	100,00		ST	Dinas Pendidikan
11	Fasilitas Pendidikan							
a	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97	87,76	90,47		T	Dinas Pendidikan
b	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,4	93	93,56		ST	Dinas Pendidikan
12	Rasio Guru / Murid perkelas Rata-rata							
a	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18	100,00		ST	Dinas Pendidikan
b	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32	100,00		ST	Dinas Pendidikan
c	Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17	100,00		ST	Dinas Pendidikan
d	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30	100,00		ST	Dinas Pendidikan
13	Guru berkualifikasi S1/D-IV							
a	Jenjang PAUD	%	99	62,02	62,65		R	Dinas Pendidikan
b	Jenjang SD/MI	%	100	96,83	96,83		ST	Dinas Pendidikan
c	Jenjang SMP/MTs	%	100	96,21	96,21		ST	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,39	0,35	89,74		T	Dinas Kesehatan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I				
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	96,8	94,74	97,87		ST	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	29,2	29,20		SR	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	29,86	29,86		SR	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	34,1	34,10		SR	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100	38,21	38,21		SR	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100	56,6	56,60		R	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100	41,82	41,82		SR	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100	41,52	41,52		SR	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100	40,75	40,75		SR	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	41,2	41,20		SR	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	42,62	42,62		SR	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100	45,33	45,33		SR	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100	40,07	40,07		SR	Dinas Kesehatan
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100,000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,31	71,61	99,58		ST	Dinas Kesehatan
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,05	7,25	80,17		T	Dinas Kesehatan
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/100,00 0 pddk	6,86	8,96	69,39		S	Dinas Kesehatan
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	79	97,5	100,00		ST	RSWN
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+	83,79	100,00		ST	RSWN
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	97,42	97	99,57		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,59	97,25	97,65		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	85,5	83	97,08		ST	Dinas Pekerjaan Umum
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100	99,8	99,80		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	92,72	99,1	100,00		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,5	93	98,41		ST	Dinas Pekerjaan Umum
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	66,9	83,5	100,00		ST	Dinas Penataan Ruang
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43	65,43	100,00		ST	Dinas Pekerjaan Umum
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,54	33,62	92,01		ST	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	16	18,78	82,63		T	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30	28,01	93,37		ST	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 4 jiwa)*	%	-	99,8	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Capaian 2024)

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I					
1.04									
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	30	10	33,33		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	84 unit	0	0,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	(84 X 431,54 Ha = 362,502 Ha)	67,82	92,89		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1,000	22	2,20		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	(10 perumahan)	0	0,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	20,07	6,26	31,19		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	25	25,00		SR	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70	70	100,00		ST	Satpol PP
	3	Indeks Resiko Bencana	%	107	99,41	92,91		ST	BPBD
	4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	25	25,00		SR	BPBD
	5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	25	25,00		SR	BPBD

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
	6		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	25	25,00		SR	BPBD
	7		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100	117,6	100,00		ST	Dinas Pemadam Kebakaran
	8		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,8	98,04	100,00		ST	Dinas Pemadam Kebakaran
1.06			Sosial							
	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100,00		ST	Dinas Sosial/ Bappeda
		a	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00		ST	Dinas Sosial
		b	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00		ST	Dinas Sosial
		c	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100,00		ST	Dinas Sosial
		d	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00		ST	Dinas Sosial
	2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100,00		ST	Dinas Sosial
		a	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	1.143	100,00		ST	Dinas Sosial
		b	Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100	92	92,00		ST	Dinas Sosial
2			Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.07			Tenaga Kerja							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75	80,95	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja
	2		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	(140 kasus)	70,63	70,63		S	Dinas Tenaga Kerja
2.08			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,95	48,9	100,00		ST	DP3A
	2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,011	0,01	90,91		T	DP3A
	3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	Rasio	11,44	7,68	100,00		ST	DP3A
	4		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100,00		ST	DP3A
	5		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,71	73,86	98,86		ST	DP3A
	6		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	68,1	71,36	100,00		ST	DP3A
	7		Rasio KDRT	%	0,021	0,03	57,14		R	DP3A
	8		Persentase LPM aktif	%	100	100	100,00		ST	DP3A
2.09			Pangan							
	1		Persentase cadangan pangan masyarakat	%	255,83	421,9	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan
	2		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	2	0	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan
	3		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,2	92,18	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan
	4		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	82,5	82,5	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan
2.10			Pertanahan							
	1		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58	100	100,00		ST	Dinas Penataan Ruang
	2		Tersedianya tanah untuk masyarakat,	%	60	99,29	100,00		ST	Dinas Penataan Ruang
2.11			Lingkungan Hidup							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	64,89	59,41	91,55		ST	Dinas Lingkungan Hidup
a	Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	57,71	45,56	78,95		T	Dinas Lingkungan Hidup
b	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	82,63	86,9	105,17		ST	Dinas Lingkungan Hidup
c	Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	44,43	32,35	72,81		S	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota							
a	Persentase pengurangan timbulan sampah	%	30	28,01	93,37		ST	Dinas Lingkungan Hidup
b	Persentase penanganan timbulan sampah	%	70	71,34	100,00		ST	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	86	80,95	94,13		ST	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	77	71,53	92,90		ST	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,8	98,4	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100	100	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100	100	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,6	98,49	98,89		ST	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase LPM aktif	%	100	100	100,00		ST	DP3A
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2	1,72	86,00		T	Dinas Pengendalian Penduduk

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
								dan Keluarga Berencana		
	2		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7,52	5,13	68,22		S	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	77,34	77,49	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15			Perhubungan							
	1		Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	17.611.420	2.940.556	16,70		SR	Dinas Perhubungan
	2		Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	1	1	100,00		ST	Dinas Perhubungan
	3		Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	2010	495	24,63		SR	Dinas Perhubungan
2.16			Komunikasi dan Informatika							
	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
	2		Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
	3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,34	78,65	100,00		ST	Diskominfo
	4		Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
	5		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No,14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
2.17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	1		Persentase koperasi aktif	%	77,5	82,57	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
	2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	15	17,42	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	3		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	56	18,86	33,68		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.18			Penanaman Modal							
	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	595	315	52,94		R	DPM PTSP
	2		Persentase peningkatan investasi	%	7	7	100,00		ST	DPM PTSP
	3		Nilai investasi	Rp (dln juta)	29.277.435	7.223.003	24,67		SR	DPM PTSP
2.19			Kepemudaan dan Olah Raga							
	1		Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	51	10	19,61		SR	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,96	0,96	100,00		ST	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	3		Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043	0,04	93,02		ST	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.20			Statistik							
	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
	2		Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	30	30,00		SR	Diskominfo
2.21			Persandian							
	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	94,26	94,26		ST	Diskominfo
	2		Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	85	100	100,00		ST	Diskominfo
2.22			Kebudayaan							
	1		Terlestarikannya Cagar Budaya	%	91,57	129,22	100,00		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I					
	2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	465	524	100,00		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	698	100,00		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	14	11	78,57		T	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	40,83	16,75	41,02		SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23		Perpustakaan							
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	49	69,59	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	32	83,17	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	61	71,58	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2.24		Kearsipan							
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	81	80,76	99,70		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	60	64,3	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	152.200	150.108	98,63		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
3		Layanan Urusan Pilihan							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I					
3.25									
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
	1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.249,54	1.794,85	24,76	▼	SR	Dinas Perikanan
	2	Konsumsi ikan	Kg/Kapi ta/thn	40,20	44,18	100,00	●	ST	Dinas Perikanan
	3	Produksi Ikan Olahan	Ton/Ta hun	17.808,00	4.470,61	25,10	▼	SR	Dinas Perikanan
	4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ tahun	3.169,37	793,55	25,04	▼	SR	Dinas Perikanan
	5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ tahun	4.080,17	1.001,3	24,54	▼	SR	Dinas Perikanan
3.26		Pariwisata							
	1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6	5,94	99,00	▶	ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2	Tingkat hunian akomodasi	%	48,52	55,36	100,00	●	ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19	20,7	100,00	●	ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27		Pertanian							
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/ tahun	6,38	6,71	100,00	●	ST	Dinas Pertanian
	2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	-25,53	100,00	●	ST	Dinas Pertanian
	3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelura han	162	177	100,00	●	ST	Dinas Pertanian
	4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	7	6	85,71	▶	T	Dinas Pertanian
3.30		Perdagangan							
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	74	18	24,32	▼	SR	Dinas Perdagangan
	2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	91	19,61	21,55	▼	SR	Dinas Perdagangan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
	3		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	74	10	13,51		SR	Dinas Perdagangan
	4		Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	90	100,00		ST	Dinas Perdagangan
3.31			Perindustrian							
	1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,5	0	0,00		SR	Dinas Perindustrian
	2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	50	50,00		SR	Dinas Perindustrian
	3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10	0	0,00		SR	Dinas Perindustrian
	4		Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	1	1	100,00		ST	Dinas Perindustrian
	5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,5	0	0,00		SR	Dinas Perindustrian
4			UNSUR PENDUKUNG							
4.01			SEKRETARIAT DAERAH							
	1		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	78	89,21	100,00		ST	Bagian Organisasi (Capaian 2024)
	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	89	90,59	100,00		ST	Bagian Organisasi (Capaian 2024)
	3		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>78BB	73,12	96,21		ST	Bagian Kerjasama dan Otda (Capaian 2024)
	4		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,48/ST	3,3	94,83		ST	Bagian Kerjasama dan Otda (Capaian 2024)
4.02			SEKRETARIAT DPRD							
	1		Tersusun dan terintegrasinya	%	100	25	25,00		SR	Sekretariat DPRD

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
5			program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
5.01			Perencanaan							
	1		Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu,	Dokumen	2	2	100,00		ST	Bappeda
	2		Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu,	Dokumen	2	0	0,00		SR	Bappeda
	3		Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	99,38	99,38		ST	Bappeda
	4		Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100	100,00		ST	Bappeda
5.02			Keuangan							
	1		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	55,24	100,00		ST	Bapenda
	2		Persentase Silpa terhadap APBD	%	0,82	5,01	0,00		SR	BPKAD (Capaian 2024)
5.03			Kepegawaian							
	1		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	84	85,99	100,00		ST	BKPP (Capaian 2024)
	2		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	275,54	949	100,00		ST	BKPP
	3		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,88	20,98	91,70		T	BKPP
	4		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100,00		ST	BKPP
5.04			Pendidikan dan Pelatihan							
	1		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	0	0,00		SR	BKPP

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
	2		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	5	5,88		SR	BKPP
5.05			Penelitian dan Pengembangan							
	1		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	0	0,00		SR	Bappeda
	2		Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	47,06	73,00	100,00		ST	Bappeda
	3		Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	68	67,92	99,88		ST	Bappeda
6			UNSUR PENGAWAS							
6.01			INSPEKTORAT DAERAH							
	1		Indeks Penerapan Managemen Resiko	Indeks	3	2,99	99,67		ST	Inspektorat (Capaian 2024)
	2		Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,08	3,15	100,00		ST	Inspektorat (Capaian 2024)
	3		Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP Opini	WTP	100,00		ST	Inspektorat (Capaian 2024)
	4		Kapabilitas APIP	Leveling	3	3	100,00		ST	Inspektorat (Capaian 2024)
7			UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01			Kecamatan							
	1		Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	95,73	67,5	70,51		S	16 Kecamatan
	2		Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	93,20	36,63	39,30		SR	16 Kecamatan
	3		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	94,00	87,90	93,51		ST	16 Kecamatan
	4		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	37,08	37,08		SR	16 Kecamatan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01			Kesatuan Bangsa dan Politik							
	1		Indeks Demokrasi	Indeks	73,2	89,72	100,00		ST	Badan Kesbangpol (Capaian 2024)
	2		Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,5	84,34	100,00		ST	Badan Kesbangpol (Capaian 2024)

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW I						
C			ASPEK DAYA SAING							
	1		Kemampuan Ekonomi Daerah							
	1		PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	104,8	156,57	100,00		ST	Bappeda (Capaian 2024)
	2		Nilai Ekspor	US\$	3.680.871.861,74	211.079.706,8	5,73		SR	Dinas Perdagangan
	2		Fasilitas Wilayah / Infrastruktur							
	2.1		Aksesibilitas Daerah							
	1		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,5935	0,88	100,00		ST	Dinas Perhubungan (Capaian 2024)
	2.2		Penataan Wilayah							
	1		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,64	44,82	98,20		ST	Dinas Penataan Ruang
	2		Kesesuaian tata ruang	%	100	100	100,00		ST	Dinas Penataan Ruang
	3		Fasilitasi Iklim Berinvestasi							
	3.1		Ketentraman dan Ketertiban							
	1		Angka Kriminalitas	kejadian	1213	322	100,00		ST	Satpol PP
	2		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,28	2,59	100,00		ST	Satpol PP dan Kecamatan
	3.2		Kemudahan Perijinan							
	1		Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	98,5	95	96,45		ST	DPM PTSP
	4		Sumber Daya Manusia							
	4.1		Kualitas Tenaga Kerja							
	1		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,2	69,88	99,54		ST	Dinas Tenaga Kerja (Capaian 2024)
	2		Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	79	79,33	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja
	4.2		Rasio Ketergantungan Penduduk	%	41,03	40,3	98,22		ST	Dispendukcapil

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

*) : Indikator pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dari 217 Indikator Kinerja Daerah yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang, sampai dengan kondisi triwulan I tahun 2025, terdapat 105 indikator (sebesar 48,39%)

telah mencapai predikat kinerja Tercapai ($X \geq 100\%$ dari target RKPD Tahun 2025), sebanyak 65 indikator (sebesar 29,95%) mempunyai predikat Akan Tercapai ($100\% > X > 50\%$ dari target tahun 2025), dan sebanyak 47 Indikator (sebesar 21,66%) dalam kategori Perlu Upaya Keras ($X \leq 50\%$ dari target 2025). Sedangkan, berdasarkan predikat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 150 (69,12%) indikator mendapat kriteria Sangat Tinggi (ST), 10 (4,62%) indikator berkriteria Tinggi (T), 5 (2,30%) indikator berkriteria Sedang (S), 5 (2,30%) indikator berkriteria Rendah (R), dan 47 (21,66%) indikator berkriteria Sangat Rendah (SR).

Adapun evaluasi dari indikator dengan predikat kinerja dengan status perlu upaya keras atau berkriteria Sangat Rendah dan hal lainnya yang memerlukan perhatian, sehingga pemenuhan target tahun 2025 bisa tercapai, diantaranya sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM); Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM); dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM).

Hal ini disebabkan kurang optimalnya masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan, kurang optimalnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan, dan kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan status kesehatan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang masih menerapkan gaya hidup serba instan seperti dalam pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok dan minum alkohol.

Berdasarkan hal tersebut, perlu Memprioritaskan aspek promotif dan preventif kesehatan menjadi kebijakan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan sikap untuk mendukung dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk pencegahan dan pengendalian vektor penyakit.

- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM); Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM); Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni); Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU; dan Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk.

Hal ini disebabkan masih rendahnya pengelolaan personil lapangan dan manajemen ketersediaan peralatan dan bahan konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya meningkatkan kesiapan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan manajemen ketersediaan material.

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada indikator Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM); Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM); Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

(SPM); dan Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM).

Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemantauan situasi dan kondisi di tingkat kelurahan. Masih banyaknya gangguan trantibum yang ada di Semarang, dengan kesimpulan belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Selain itu, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan layanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi kebencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya memaksimalkan kerjasama antar instansi terkait sampai ke tingkat wilayah melalui kegiatan formal dan nonformal untuk mencari memetakan dan mencari solusi permasalahan ketertiban yang merupakan hal klasik di perkotaan besar. Selain itu, perlunya percepatan dan optimalisasi kegiatan layanan kebencanaan pada triwulan II, III, dan IV sehingga meminimalisir terjadinya bencana dan meminimalisir meningkatnya jumlah korban bencana baik korban jiwa maupun harta benda.

- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada indikator Arus penumpang angkutan umum dan Kepemilikan KIR angkutan umum.

Hal ini disebabkan oleh dampak banjir di sebagian wilayah sehingga menyebabkan gangguan pada layanan transportasi. Selain itu, kualitas layanan dan rute transportasi umum yang kurang efisien sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Kurang optimalnya kepemilikan KIR angkutan umum disebabkan oleh banyak pemilik angkutan umum yang kurang menyadari pentingnya uji KIR untuk keselamatan dan kelayakan kendaraan.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya meningkatkan layanan transportasi umum dan mengkaji rute sehingga lebih efisien. Selain itu, perlunya meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan tentang pentingnya uji KIR dan didukung oleh perbaikan kualitas layanan uji KIR dengan menyediakan fasilitas yang memadai.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada indikator Meningkatnya koperasi yang berkualitas.

Hal ini disebabkan masih sedikit koperasi yang melaksanakan RAT atau Rapat Anggota Tahunan sampai triwulan I tahun 2025. Jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT sejumlah 109 dari 578 koperasi. Koperasi yang meningkat kualitasnya dapat dinilai berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya percepatan pelaksanaan RAT di triwulan II, III, dan IV. Selain itu, perlu juga meningkatkan kualitas koperasi dari segi kelembagaan, keuangan maupun usahanya melalui Inkubasi Koperasi, memberikan fasilitasi uji kompetensi bagi pengurus/pengelola koperasi serta fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi koperasi sehingga terwujud koperasi yang mandiri, meningkat aset dan omsetnya.

- f. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada indikator Nilai investasi.

Hal ini disebabkan oleh layanan proses perizinan yang kurang efisien serta persaingan dengan daerah lain yang menawarkan iklim investasi yang lebih kondusif dan infrastruktur yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menawarkan iklim investasi yang lebih kondusif.

- g. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada indikator Peningkatan prestasi olahraga.

Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang belum maksimal sehingga masih ada beberapa Cabang Olahraga yang harus mencari tempat Latihan guna Peningkatan SDM Atlet.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga secara berkala dan meningkatkan kesejahteraan atlet Kota Semarang.

- h. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada indikator Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi.

Hal ini disebabkan belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya ke Portal SDI Tingkat Kota Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya melakukan percepatan integrasi data melalui aplikasi/web yang tersedia atau yang dimiliki oleh OPD dengan Portal SDI Tingkat Kota Semarang.

- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada indikator Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal.

Hal ini disebabkan event Pemkot Semarang belum diselenggarakan seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya percepatan penyelenggaraan event Pemkot Semarang pada triwulan II, III, dan IV sehingga sanggar/pelaku seni/komunitas dapat tampil di event Pemkot Semarang.

- j. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada indikator Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota; Produksi Ikan Olahan; Produksi perikanan tangkap (ton); dan Produksi perikanan budidaya (ton).

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, keterikatan nelayan dengan pemberi modal, dan mahalnnya operasional pembudidaya ikan. Selain itu, faktor perubahan iklim dan dampaknya terhadap perikanan budidaya serta ketergantungan nelayan terhadap musim dan cuaca.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya memberikan pelatihan kepada nelayan dan istri nelayan untuk menambah ketrampilan untuk berdagang di saat musim hujan; memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan; membantu pengembangan koperasi nelayan serta membantu akses permodalan; memberikan pelatihan pembuatan pakan mandiri; serta perlunya diversifikasi jenis ikan yang di budidayakan.

- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan); Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku; dan Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini disebabkan perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggusur penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik) serta berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (online). Selain itu belum ada dasar hukum untuk melakukan penjualan langsung barang kebutuhan pokok bersubsidi.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya mendorong produsen alat ukur untuk dapat mengikuti perkembangan pasar serta berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi terkait dengan penggunaan meter taksi online sebagai dasar pengenaan tarif. Selain itu dalam rangka pengendalian harga telah disusun aplikasi untuk melakukan pemantauan harga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah sehingga informasi tentang harga kebutuhan pokok dapat di informasikan secara real time, serta bekerja

sama dengan OPD terkait dalam melakukan stabilisasi harga dan penetrasi pasar jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran.

- l. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada indikator Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota; Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan; dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Hal ini disebabkan, persentase pertambahan IKM masih sebesar 0% karena kegiatan yang dilaksanakan pada periode tersebut difokuskan pada pelatihan. IKM baru ditargetkan akan muncul setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai dilaksanakan

Berdasarkan hal tersebut, perlunya percepatan dalam proses pertambahan IKM di triwulan selanjutnya.

- m. Unsur Penunjang Perencanaan pada indikator Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.

Hal ini disebabkan proses penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 masih dalam tahap Rancangan Akhir.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan percepatan dalam penyusunan Perkada RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang akan ditetapkan pada triwulan III.

- n. Unsur Penunjang Keuangan pada indikator Persentase Silpa terhadap APBD.

Hal ini disebabkan mendapat sumbangan terbesar untuk SILPA berasal dari DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU, DIF, dan Bantuan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya percepatan penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah pada Triwulan II, III, dan IV

- o. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

Hal ini disebabkan, masih sedikitnya jumlah peserta yang mengikuti diklat CPNS dan struktural.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya percepatan penyelenggaraan diklat CPNS dan struktural pada triwulan II, III, dan IV.

- p. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Hal ini disebabkan penyusunan kajian masih dalam tahap awal serta belum optimalnya penyampaian informasi terkait hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi yang dihasilkan dapat terinformasikan dan diimplementasikan melalui percepatan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pada Triwulan II, III, dan IV sehingga bermanfaat dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang.

- q. Unsur Kewilayahan Kecamatan pada indikator Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif.

Hal ini disebabkan oleh maraknya fenomena destruktif yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang menyasar masyarakat umum secara acak.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bekerja sama dengan kepolisian/pihak yang berwajib untuk ikut aktif menghentikan segala bentuk aktivitas gangster yang mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu perlu didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah kecamatan di Kota Semarang.

- r. Aspek Daya Saing Kemampuan Ekonomi Daerah pada indikator Nilai Ekspor

Hal ini disebabkan belum optimalnya kegiatan promosi dan pameran dagang serta kurangnya kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya optimalisasi kegiatan promosi dan pameran dagang baik taraf nasional maupun internasional serta kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang yang produknya masuk dalam produk unggulan dengan metode *cost sharing* kerjasama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI).

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan tidak terlepas dari pencapaian kinerja pada tingkat program dan pengaruh dari eksternal, baik akibat kebijakan pemerintah ditingkat atasnya, peran pembangunan yang berasal dari non pemerintah dan stakeholder pembangunan lainnya. Dan pada evaluasi on going terhadap 190 indikator program diluar program penunjang, sampai dengan triwulan I ini akan dibandingkan terhadap target tahun 2025, dan kemudian untuk memudahkan evaluasinya dilakukan pengelompokan pencapaian kinerjanya dalam tiga kategori, yaitu: "Tercapai" ($X \geq 100\%$) dimaknai bahwa indikator tersebut telah mencapai target kinerja tahun 2024 meski baru pada triwulan I, "Akan Tercapai" ($100 > X > 50\%$) dimaknai bahwa indikator kinerja tersebut diprediksi akan dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun, dan "Perlu Upaya Keras" ($X \leq 50\%$) dimaknai indikator tersebut perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pelaksanaannya, kemudian dilakukan percepatan pencapaian kinerja mendasarkan pada rencana tindak lanjut yang disusun. Selain itu berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 pencapaian kinerja dikelompokkan menjadi lima kriteria, yaitu: "Sangat Tinggi" dengan capaian $100\% \geq X \geq 91\%$; "Tinggi" dengan capaian $90\% \geq X \geq 76\%$; "Sedang" dengan capaian $75\% \geq X \geq 66\%$; "Rendah" dengan capaian $65\% \geq X \geq 51\%$; serta "Sangat Rendah" dengan capaian $50\% \geq X$.

Berikut evaluasi atas pencapaian indikator program berdasarkan pada bidang urusan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam tengah tahun kedua pada periode pembangunan tahun 2025.

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.01. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang Pendidikan, diantaranya pendampingan BOP/BOS sekolah swasta, beasiswa miskin, serta beasiswa miskin berprestasi mulai jenjang pendidikan SD/MI hingga jenjang perguruan tinggi. Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Pendidikan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	113,73	103,10	92,28		ST	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	%	115,65	105,50	91,22		ST	
		APK PAUD 5-6 tahun	%	86,21	97,00	112,52		ST	
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	Lembaga	12,00	10,00	83,33		T	
2	Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pendidikan
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00	100,00		ST	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualitas S1/D-IV	%	90,29	85,02	94,16		ST	Dinas Pendidikan
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pendidikan
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	100,00	100,00		ST	

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan I tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 5 diantaranya telah tercapai dan 4 akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan I tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 8 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 memiliki kriteria tinggi. Namun demikian agar pencapaian SPM bidang pendidikan tetap menjadi prioritas sebagai wujud komitmen Kepala Daerah, baik dari aspek pemenuhan penerima layanan maupun kualitas layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.1.02. Urusan Kesehatan

Percepatan penanggulangan stunting yang terintegrasi di Kota Semarang dilakukan diantaranya melalui: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan

Pembuatan Menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu untuk pelayanan kesehatan sesuai SPM, sampai dengan triwulan II terdapat layanan kesehatan TB dan HIV yang masih memerlukan perhatian, mengingat mobilitas pasien terduga, kesadaran memeriksakan diri dan penyimpangan seks yang makin menggejala. Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN KESEHATAN								
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	%	100,00	40,11	40,11	▼	SR	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100,00	0,00	0,00	▼	SR	RSUD KRMT WONGSO NEGORO
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100,00	0,00	0,00	▼	SR	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	●	ST	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	97,00	20,00	20,62	▼	SR	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	25,00	25,00	▼	SR	Dinas Kesehatan

Keterangan:

● : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 ▲ : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

▼ : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik, hal ini ditunjukkan dari 6 indikator keberhasilan, keseluruhan indikator dengan predikat kinerja perlu upaya keras. Hal ini disebabkan belum ada pengadaan peralatan kesehatan pada triwulan I. Selain itu, pada pembangunan gedung 12 lantai tahap III tahap review dokumen perencanaan dan pada gedung unit layanan kanker terpadu tahap II proses lelang, maka pada Triwulan I belum ada pengembangan sarana prasarana.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.1.03. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sesuai Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang tahun 2024 didominasi oleh perkerasan aspal hot mix dengan proporsi mencapai 61,11% (513.239 km); disusul dengan perkerasan jenis beton blok/rigid sebesar 36,33% (305.106 km); telford/kerikil sebesar 0,29% (2.449 km) dan tanah/belum tembus sebesar 2,27% (19.107 km). Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 10 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk sepanjang 9.587 km, Kecamatan Semarang Barat sepanjang 3.659 km, Kecamatan Mijen 1.999 km.

Disisi lain penanganan rob dan banjir menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Pada tahun 2024 persentase wilayah yang mengalami banjir dan rob terhadap keseluruhan wilayah Kota Semarang sebesar 3,29%, yang meliputi jalan, permukiman, tambak, dan sawah.

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	%	98,44	97,78	99,33		ST	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	57,86	99,80	100,00		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	92,72	99,10	100,00		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	67,00	65,20	97,31		ST	Dinas Pekerjaan Umum
5	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	84,00	67,82	80,74		T	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	75,30	74,50	98,94		ST	Dinas Pekerjaan Umum
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan I tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 12 indikator keberhasilan yang ada, 2 indikator dengan predikat telah tercapai, 4 indikator dengan predikat akan tercapai, dan 6 lainnya perlu upaya keras, yaitu rumah tangga yang terlayani SPAM, tertatanya bangunan gedung, reklame berizin, pemanfaatan hunian tertata, izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan, dan dokumen perencanaan tata ruang yang disusun.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 12 indikator yang

dijadikan ukuran keberhasilan, 5 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 memiliki kriteria tinggi, dan 6 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.1.04. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2024 sebesar 44,60%, kondisi ini meningkat di triwulan I tahun 2025 dan telah melampaui target tahun 2025 sebesar 44,73%. Selain itu kinerja pelayanan dasar di Bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, sampai dengan triwulan I tahun 2025 diukur dari persentase rumah layak huni mencapai 99,31% dari total jumlah rumah keseluruhan. Dengan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum, diharapkan kondisi perumahan di Kota Semarang akan semakin layak dan sehat sebagai hunian.

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	99,70	99,31	99,61		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,41	44,73	100,72		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan I tergolong cukup baik, hal ini ditunjukkan dari 4 indikator keberhasilan yang ada, 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 2 lainnya perlu upaya keras yaitu pada fasilitasi kebutuhan perumahan dan perumahan yang terfasilitasi PSU.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4

indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.1.05. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dari data tingkat waktu tanggap (response time rate/15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada triwulan I tahun 2025 sebesar 98,04%, sehingga masih terdapat gap sebesar 1,96% dari pelayanan yang diberikan yang belum memenuhi SOP. Perlu mempertahankan kinerja dalam melibatkan stakeholder dan masyarakat dalam hal Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran untuk bersinergi mencapai pelayanan sesuai response time 15 menit.

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pemberdayaan linmas	%	16,00	13,00	81,25		T	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	10,00	10,00	100,00		ST	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	%	20,00	0,00	0,00		SR	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	25,00	25,00		SR	BPBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang	%	100,00	19,61	19,61		SR	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
		dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran							
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100,00	21,74	21,74	▼	SR	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	0,00	0,00	▼	SR	
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100,00	98,04	98,04	▶	ST	

Keterangan:

● : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 ▶ : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

▼ : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan I tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari 9 indikator keberhasilan yang ada, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dengan status tercapai, 2 indikator yang berstatus akan tercapai dan 5 indikator yang berstatus perlu upaya keras, yaitu indikator peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran, bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran, terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3

diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi, dan 5 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.1.06. Urusan Sosial

Pembangunan pada urusan sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2024 angka kemiskinan Kota Semarang menurut data BPS sebesar 4,03%. Disisi lain berdasarkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data awal terdapat sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar pada 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Muktiharjo, Tandang, Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, dan Muktiharjo Kidul. Setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi pada kantong kemiskinan tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori ini meningkat menjadi sebanyak 1.024 KK (5.519 Individu).

Dengan terbitnya UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Karena isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, menyebabkan beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level, dan di Kota Semarang telah terlaksana program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya.

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Sosial

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	URUSAN SOSIAL								
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0,00		SR	Dinas Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	100,00	0,00	0,00		SR	Dinas Sosial
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	99,93	100,00	100,00		ST	Dinas Sosial

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(PPKS) yang ditangani							
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	71,25	100,00	100,00		ST	Dinas Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Sosial

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S: $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan sosial sampai dengan triwulan I tergolong cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dari 5 indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan, sampai dengan triwulan I terdapat 3 indikator yang telah tercapai, dan 2 indikator yang berstatus perlu upaya keras, yaitu cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi dan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan sosial sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

Permasalahan yang berpotensi mengganggu pencapaian kinerja pada urusan sosial diantaranya: belum adanya aplikasi pengolah data pada pelayanan data dan pengaduan sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data guna pembuatan pelaporan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

2.3.2. Urusan Dasar Non Pelayanan Dasar

2.3.2.07. Urusan Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan urusan tenaga kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 (rilis terakhir oleh BPS) sebesar 5,82% atau sebesar 55.121 penganggur dari Angkatan kerja sebanyak 946.618 orang. Diduga kebutuhan tenaga kerja di Kota Semarang, kurang diminati oleh pencaker Kota Semarang sehingga justru diisi oleh tenaga kerja dari luar wilayah.

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Tenaga Kerja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	URUSAN DASAR BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR								
7	URUSAN TENAGA KERJA								
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	80,95	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	79,00	79,33	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	70,00	122,40	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,60	19,60	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan I tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari 4 indikator keberhasilan yang dijadikan ukuran, keseluruhan indikator telah tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 4 indikator tersebut memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.2.08. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen sekaligus kinerja ini terlihat dengan diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor dan predikat Kota Layak Anak kategori Utama dari Kementerian PPPA. Penyelenggaraan upaya terkait juga diperkuat dengan ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental RDRM yang menyediakan layanan konsultasi masalah anak, remaja dan keluarga, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	10,91	10,91		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	11,44	7,68	67,13		S	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,01	0,01	100,00		ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100,00	20,00	20,00		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100,00	15,79	15,79		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik, ditunjukkan dari 6 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, 1 indikator telah tercapai, 1 indikator mempunyai predikat akan tercapai pada akhir periode, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki

kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria sedang, dan 4 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.09. Urusan Pangan

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangkaantisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman sebanyak 197 kali yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, Fresh Mart, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Distribusi Pangan didukung oleh Mekanisme dan alur distribusi pangan (terutama berupa beras) kepada warga miskin yang sesuai aturan juga telah tercapai 100%. Demikian pula terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang. Selain itu juga berhasil menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan mencapai 0%, melalui Intervensi daerah rentan rawan pangan prioritas 1,2,3 dengan berbagai kegiatan antara lain: memberi bantuan beras melalui Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM-Beras), penyelenggaraan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), peningkatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Pelatihan pengembangan ketersediaan pangan dan Rakor dengan multistekholder lintas sektoral. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menginisiasi Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (Garang Asem) dan Penggunaan Pangan Lokal melalui kegiatan Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Pisang Legi) yang telah dilegalisasi melalui Surat Edaran Wali Kota.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Pangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
9	URUSAN PANGAN								
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal/Kapita	3.059,00	3.058,00	99,97		ST	Dinas Ketahanan Pangan
		Presentase Cakupan Distribusi	%	100,00	25,00	25,00		SR	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Pangan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	%	100,00	25,00	25,00		SR	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0,00	0,00	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	82,50	82,50	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pangan sampai dengan triwulan I tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 6 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 2 indikator kinerja telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 3 lainnya dalam predikat perlu upaya keras, yaitu cakupan wilayah layanan kemandirian pangan, cakupan distribusi, dan terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pangan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 3 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.10. Urusan Pertanahan

Salah satu wujud penyelenggaraan Urusan Pertanahan, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program prioritas nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan, dimana target nasional pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan diharapkan sampai pada penerbitan sertifikat elektronik untuk menghindari pemalsuan dari oknum mafia tanah yang meresahkan. PTSL merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk

basis data pertanahan yang valid dan terbaru dalam optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan.

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Pertanahan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	URUSAN PERTANAHAN								
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	%	100.00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100.00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
3	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100.00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	100.00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang
5	Program Pernetagunaan Tanah	Terselesaikannya penatagunaan tanah	%	100.00	25,00	25,00		SR	Dinas Penataan Ruang

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik, ditunjukkan dari 5 indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, belum terdapat indikator yang telah mencapai target, terdapat sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.11. Urusan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah indeks kualitas lingkungan hidup, yang menjadi salah satu indikator tujuan pembangunan strategis Pemerintah Kota Semarang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 yang menggunakan definisi operasional baru terlihat bahwa IKLH mengalami

penurunan kinerjanya, pada tahun 2024 sebesar 59,41 sedangkan IKLH pada tahun 2023 sebesar 64,55. Capaian ini disumbangkan oleh peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA mengalami penurunan menjadi 45,56 di tahun 2024 dari tahun 2023 yang sebesar 57,31. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 sebesar 86,90 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,23. Sedangkan dengan Indeks Kualitas Lahan yang mengalami penurunan menjadi 32,35 di tahun 2024 dari angka 44,29 di tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder peduli lingkungan.

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Lingkungan Hidup

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	64,00	68,57	100,00		ST	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	91,00	60,00	65,93		R	
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Hektar	40,00	50,05	100,00		ST	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	2,00	5,98	100,00		ST	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	60,00	100,00	100,00		ST	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,80	80,95	94,35		ST	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	25,00	25,00		SR	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	56,00	53,00	94,64		ST	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	12,50	19,51	100,00		ST	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau	%	100,00	25,00	25,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti							
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,70	91,55	99,84		ST	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	30,00	28,01	93,37		ST	
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	70,00	71,34	100,00		ST	

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan I tergolong baik, ditunjukkan dari 16 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, terdapat sebanyak 6 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 5 indikator akan tercapai, serta 5 indikator lainnya perlu upaya keras, yaitu terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang, persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan, serta jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 16 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 10 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria rendah, dan 5 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2024 adalah 99,35% atau 1.280.090 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.288.430 orang. Sedangkan 0,65% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan

perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Capaian kinerja tersebut, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat penurunan sejumlah 0,22%. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja di tahun 2024 adalah adanya lonjakan penambahan Wajib KTP-el dikarenakan peristiwa kependudukan seperti pindah datang atau mutasi penduduk dan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian Wajib KTP-el. Keberhasilan kinerja kependudukan dan catatan sipil hingga triwulan I tahun 2025 yaitu pada indikator persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 98,40% yang telah melampaui target tahun 2025 sebesar 97,80%.

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,60	98,49	98,89		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	77,00	71,53	92,90		ST	
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	97,80	98,40	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00		ST	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan I tergolong baik, ditunjukkan

dari 6 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan 4 indikator kinerjanya mempunyai predikat tercapai, 2 indikator akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak termasuk di dalamnya swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Program Administrasi Pemerintahan dan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00		ST	DP3A
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	20,51	20,51		SR	DP3A

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sampai dengan triwulan I tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan predikat kinerja tercapai dan 1 indikator mempunyai predikata perlu upaya keras, yaitu pada indikator pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 2 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 serta Surat Mendagri Nomor 470133761SJ dan 470133751SJ tanggal 5 Juni 2020, Kota Semarang telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 pilar, yang terdiri dari: Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dan semuanya telah diinternalisasikan dalam program dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu juga telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045.

Keberhasilan kinerja pembangunan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dari 4 indikator yang telah melampaui target tahun 2025 yaitu cakupan PUS umur istri <20 tahun, cakupan peserta KB aktif, cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO), dan cakupan anggota bina keluarga aktif.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,33	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,00	1,72	86,00		T	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	60,32	72,10	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan I tergolong baik, ditunjukkan dari 3 indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, 2 diantaranya mempunyai predikat tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan I ditunjukkan

dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 indikator memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memiliki kriteria sedang.

2.3.2.15. Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi yang berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan.

Kinerja lain yang berhasil direalisasikan yaitu dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir *on street* yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor perparkiran yang belum tertangani. Indikator Parkir *On the Street* sebesar 90,04% yang artinya sudah hampir mencapai target tahun 2025. Disisi lain peningkatan ruas jalan yang digunakan untuk parkir *on the street* berdampak pada kemacetan arus lalu lintas dilokasi sekitar.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Perhubungan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
15	URUSAN PERHUBUNGAN								
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	66,82	20,23	30,28		SR	Dinas Perhubungan
		Persentase pengelolaan Parkir <i>On the Street</i>	%	92,00	90,04	97,87		ST	Dinas Perhubungan
		Jumlah trayek BRT	trayek	15,00	13,00	86,67		T	Dinas Perhubungan
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	33,00	22,54	68,30		S	Dinas Perhubungan
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	rasio	6,94	5,53	79,68		T	Dinas Perhubungan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, terdapat 4 indikator dengan predikat akan tercapai dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 2 indikator memiliki kriteria tinggi, 1 indikator kriteria sedang, dan 1 indikator memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Terbangunnya fasilitas publik baru *Co-Working Space* di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; *Free Wifi* pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan telah berfungsinya Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik; Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi *Smart City* Kota Semarang.

Keunggulan penerapan SPBE di Kota Semarang terlihat dari adanya kebijakan tata kelola melalui perwalo yang mengatur seluruh kebijakan SPBE dan telah mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan K/L/Pemda lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unturnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data dengan adanya SOP Layanan Hosting dan Penempatan Data, Jaringan Intra yang dapat diakses oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang memberikan layanan pemerintahan sesuai topologi yang disampaikan, dan Sistem Penghubung Layanan yang mengatur interoperabilitas berbagai layanan perizinan. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, dan pengadaan melalui aplikasi LPSE/SPSE sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kota Semarang menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja.

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya pengelolaan <i>E-Government</i>	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan I tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan status telah tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 2 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.2.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada triwulan I tahun 2025, kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah berhasil mencapai persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi pelatihan. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Kinerja indikator lain yang masih rendah disebabkan pelaksanaan kegiatan di triwulan II, III, dan IV sehingga perlunya melakukan percepatan dalam mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kondisi ini kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	3,00	0,00	0,00		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	50,00	19,90	39,80		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	33,00	12,40	37,58		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10,00	0,00	0,00		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	1,00	1,00	100,00		ST	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	28,00	10,90	38,93		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	3,00	1,17	39,00		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20,00	2,08	10,40		SR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik, ditunjukkan dari 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 1 indikator kinerja

dengan predikat tercapai dan 7 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam, Presentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi, Prosentase koperasi sehat, Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase koperasi yang meningkat omsetnya, Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan, Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 8 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 7 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.18. Urusan Penanaman Modal

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Di mana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Pada tahun 2024 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Nilai investasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 7.223.003 juta atau sebesar 24,67% dari target sebesar Rp 29.277.435 juta dengan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 315 investor atau 52,94% dari target 595 investor.

Untuk menunjang pelayanan publik terkait perijinan, pada tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang sebagaimana Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Implementasi Program Gerakan Indonesia Melayani. Selain itu juga telah terbit Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan berusaha dan non berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai upaya penambahan wewenang penerbitan perijinzn di DPMPPTSP Kota Semarang untuk menyesuaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kinerja penyelenggaraan pada urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Urusan Penanaman Modal

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	URUSAN PENANAMAN MODAL								
1	Program Pengembangan Iklim	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat	Penanam Modal	3.713	5.061	100,00		ST	Penanaman Modal dan PTSP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanaman Modal	Fasilitasi Investasi							
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	595	315	52,94		R	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP	%	95,50	95,50	100,00		ST	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	2,00	2,00	100,00		ST	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	99,00	100,00	100,00		ST	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan penanaman modal sampai dengan triwulan I tergolong baik, ditunjukkan dari 5 indikator sebagai ukuran keberhasilan, 4 indikator kinerja dengan predikat tercapai dan 1 indikator dengan predikat akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan penanaman modal sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 4 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 memiliki kriteria rendah.

2.3.2.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk meningkatkan kinerja dibidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan beberapa upaya, diantaranya kemitraan dunia usaha, Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*), Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	45	45	100,00		ST	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet prestasi	Jumlah	1.273	723	56,79		R	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	5	5	100,00		ST	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	Kegiatan	53	5	9,43		SR	Dinas Pemuda dan Olahraga

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan I tergolong baik, ditunjukkan dari 4 indikator sebagai ukuran keberhasilan, 3 diantaranya telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Semarang secara berkala, pembentukan kelompok wirausaha muda di masing-masing kecamatan, peningkatan kesejahteraan atlet, dan mengaktifkan kembali ruang-ruang di Manunggal Jati guna kegiatan organisasi kepemudaan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.20. Urusan Statistika

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada Urusan Statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan tersebut menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, penyelenggaraan urusan Statistik dapat mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral sebesar 100%.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Statistik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	URUSAN STATISTIK								
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100,00	0,00	0,00		SR	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2024  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2024

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Statistik sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja masih perlu upaya keras dalam pencapaian targetnya.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan statistik sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan dan memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.21. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi, serta *software* yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan eksternal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Persandian, khususnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan: Kegiatan Launching Semarangkota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang, Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Persandian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	URUSAN PERSANDIAN								
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan persandian sampai dengan triwulan I tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status tercapai yaitu indikator terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota Semarang berbasis elektronik dan non elektronik dengan kegiatan *penetration testing* aplikasi-aplikasi pada perangkat daerah serta melakukan kegiatan sosialisasi keamanan informasi.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan persandian sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan dan memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.2.22. Urusan Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang menampilkan. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kearifan budaya melalui pelestarian warisan budaya dan kesenian lokal dengan sasaran meningkatkan pelestarian warisan budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2024 pada Urusan Kebudayaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap	%	30,00	6,10	20,33		SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kegiatan Seni Budaya							
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	30,00	5,64	18,80		SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Warisan Budaya	%	91,57	129,22	100,00		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan I tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator, 1 indikator dengan status tercapai dan 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu apresiasi kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya terhadap kegiatan seni budaya dan indikator apresiasi kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya terhadap pengembangan seni budaya tradisional.

Apresiasi kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya terhadap pengembangan seni budaya tradisional merupakan kegiatan untuk meningkatkan hasil karya dari pelaku seni budaya yang bergabung dalam kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya dengan menampilkan seni budaya tradisi dan ekonomi kreatif. Kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya ini mengapresiasi kesenian lokal hasil karyanya dengan dilakukan pendampingan pembinaan, workshop, pelatihan, perlombaan dan tampil di event pertunjukkan untuk meningkatkan semangat berkeaktifitas dari kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya. Selain itu, pelaku seni budaya yang bergabung pada kelompok/sanggar seni budaya dan komunitas seni budaya berkolaborasi mengapresiasi karya seni budaya untuk meningkatkan kearifan seni budaya lokal. Selain itu juga terdapat Pelestarian Warisan Budaya.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kebudayaan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 2 indikator lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.2.23. Urusan Perpustakaan

Kinerja pada urusan perpustakaan dapat ditunjukkan oleh Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang yakni di angka 69,59% sehingga pengunjung perpustakaan per tahun hingga triwulan I tahun 2025 sebesar 83,17% sudah melampaui target tahun 2025 sebesar 32%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi dengan interval sebagai berikut: 0-20 (Sangat rendah); 20,01-40 (Rendah); 40,01-60 (Sedang); 60,01-80 (Tinggi); 80,01-100 (Sangat Tinggi). Indikator selanjutnya adalah Indeks

Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2023 sebesar 71,58. Terdapat tujuh unsur pembangunan Literasi Masyarakat yakni Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat, Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar, Keterlibatan Masyarakat, dan Anggota Perpustakaan. Dan indikator lainnya rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota di mana jumlah minimal Pustakawan adalah 1 dibanding 75.000 penduduk. Hal ini bertujuan untuk mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Untuk mendukung Indikator tersebut didukung oleh program strategis.

Adapun kinerja indikator program dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Perpustakaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	URUSAN PERPUSTAKAAN								
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,00	0,92	92,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan perpustakaan sampai dengan triwulan I tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja, 1 indikator telah tercapai dan 1 lainnya akan tercapai yaitu indikator Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perpustakaan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 2 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 2 nya memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.2.24. Urusan Kearsipan

Untuk menunjang *e-government* di bidang pengelolaan arsip daerah, indikator keberhasilan yang ingin diwujudkan adalah Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban daerah; Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat; dan Arsip yang terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi. Tentunya pelibatan teknologi informasi atau

digitalisasi arsip mutlak diperlukan dalam pembangunan di bidang kearsipan.

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Kearsipan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	URUSAN KEARSIPAN								
1	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip musnah	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	80,00	81,08	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan I tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukuran keberhasilan, semuanya mempunyai predikat tercapai. Kota Semarang terus berupaya untuk menjaga sejarah yang ada di sekitar Pemerintah Kota Semarang untuk dipelajari dan diajarkan kepada orang-orang di dalam dan di luar Pemerintah Kota Semarang serta menjaga dan menyelamatkan dokumen penting.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 3 nya memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.3. Urusan Pilihan

2.3.3.25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pada urusan kelautan

dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja peningkatan konsumsi ikan per kapita dimana realisasinya di tahun 2023 yang mencapai 43,75 kg/kapita/tahun dari target sebesar 40,18 kg/kapita/tahun meningkat di tahun 2024 yang mencapai 44,18 kg/kapita/tahun dari target sebesar 40,20 kg/kapita/tahun sedangkan data sampai dengan kondisi triwulan I tahun 2025 belum dapat dilakukan karena penghitungannya dilakukan setiap akhir periode.

Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal serta belum memiliki TPI yang representatif, sehingga nelayan hanya sedikit yang melelangkan ikan di TPI.

Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II	URUSAN PILIHAN								
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	3.169,37	793,55	25,04		SR	Dinas Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	4.080,17	1.001,30	24,54		SR	Dinas Perikanan
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	2,00	0,00	100,00		ST	Dinas Perikanan
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan olahan	ton	17.808,18	4.470,61	25,10		SR	Dinas Perikanan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator, 1 diantaranya dalam kategori tercapai, dan masih terdapat 3 indikator lainnya perlu upaya keras yaitu pada indikator produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, dan produksi ikan olahan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, dan 3 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

Produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya perlu ditingkatkan di triwulan II, III, dan IV dengan optimalisasi penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

2.3.3.26. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata dilakukan untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata sebagai produk unggulan daerah melalui gerakan atau berkampanye “Ayo Wisata ke Semarang” dengan mengajak masyarakat untuk datang ke Kota Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata mancanegara dan kunjungan wisata nusantara Kota Semarang melalui penguatan promosi pariwisata, peningkatan pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan industri pariwisata serta pemberdayaan masyarakat kepariwisataan.

Kinerja pelayanan Urusan Kepariwisataan pada tahun 2024 secara umum terus meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kenaikan Kunjungan wisata di tahun 2024 sebesar 5,94% meningkat dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di tahun 2024 masing-masing 7.321.077 orang dan 24.296 orang, meningkat dari tahun 2023 dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara 6.478.883 orang dan mancanegara 13.992 orang. Sumbangan paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan domestik, meskipun wisatawan mancanegarapun juga mengalami kenaikan. Hingga triwulan I tahun 2025 jumlah kunjungan wisata nusantara sebesar 1.329.711 dari target sebesar 4.363.020 orang. Sedangkan, jumlah kunjungan wisata mancanegara sebesar 6.146 dari target sebesar 8.869 orang.

Untuk meningkatkan sektor pariwisata diperlukan upaya pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instagram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri; perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata; pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata; peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan; serta peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Pariwisata

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PARIWISATA								
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100,00	25,00	25,00	▼	SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100,00	25,00	25,00	▼	SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	%	90,00	25,45	28,28	▼	SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong kurang baik. Dari sebanyak 3 indikator, terdapat 3 yang mempunyai predikat perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 3 nya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.3.27. Urusan Pertanian

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) mencapai 6,71 ton/ha/tahun pada triwulan I tahun 2025 yang telah melampaui target tahun 2025 sebesar 6,38 ton/ha/tahun. Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama telah mencapai 32 kelompok hampir mencapai target tahun 2025 sebesar 33 kelompok.

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Pertanian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PERTANIAN								
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi hasil peternakan	Ton	36.519,00	10.163,40	27,83		SR	Dinas Pertanian
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	51.069,22	14.826,00	29,03		SR	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton	6,38	6,71	100,00		ST	Dinas Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5,00	-25,33	100,00		ST	Dinas Pertanian
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	80,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	Kelompok	33,00	32,00	96,97		ST	Dinas Pertanian

Keterangan:



Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pertanian sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong baik. Dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, sebanyak 3 indikator mempunyai predikat tercapai, 1 indikator lainnya akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, yaitu produksi hasil peternakan dan jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Hal ini disebabkan adanya serangan hama karena pergantian musim. Selain itu, permasalahan secara umum yang dihadapi diantaranya terkait ketersediaan prasarana pertanian yang masih kurang, serta banyak prasarana yang ada kondisinya memerlukan perbaikan/rehabilitasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan

non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun. Rantai pemasaran produk pertanian perkotaan belum terbentuk sehingga produksi dari kelompok-kelompok tani perkotaan juga belum dapat dipasarkan dengan optimal.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pertanian sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 4 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.3.28. Urusan Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada Sektor Perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Pada tahun 2025 triwulan I Nilai Ekspor Kota Semarang mengalami mencapai US\$ 312.912.949,96 dari target tahun 2025 yang sebesar US\$ 1.713.153.249. Perlunya dilakukan percepatan dalam mencapai target Nilai Ekspor dengan semakin sering dilakukannya kegiatan promosi dan pameran dagang baik taraf nasional maupun internasional serta dilaksanakannya kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang yang produknya masuk dalam produk unggulan dengan metode cost sharing kerjasama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI).

Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I kinerja yang dicapai adalah berhasil memenuhi target persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu, dari yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100%, atau tingkat capaian terhadap target sebesar 100% mengingat baru terlaksana pada separuh periode. Selain itu, indikator persentase koefisien variasi harga antar waktu telah melebihi target tahun 2025.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Urusan Perdagangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	URUSAN PERDAGANGAN								
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	26,00	18,00	69,23		S	Dinas Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3,93	5,77	100,00		ST	Dinas Perdagangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pokok Dan Barang Penting								
4	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	U\$	1.713.153.249,00	312.912.949,96	18,27	▼	SR	Dinas Perdagangan
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku	%	86,00	19,61	22,80	▼	SR	Dinas Perdagangan
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	40,00	5,00	12,50	▼	SR	Dinas Perdagangan

Keterangan:

● : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 ▲ : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

▼ : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Perdagangan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong cukup baik. Dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, 2 indikator mempunyai predikat tercapai, 1 indikator lainnya akan tercapai, dan 3 indikator berstatus perlu upaya keras, yaitu Nilai ekspor non migas; Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) bertandatera sah yang berlaku; dan Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 memiliki kriteria sedang, dan 3 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.3.29. Urusan Perindustrian

Pembangunan Urusan Industri diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 96% terealisasi 96% di triwulan I tahun 2025.

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Perindustrian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	URUSAN PERINDUSTRIAN								
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	96,00	96,00	100,00		ST	Dinas Perindustrian
		Persentase Pertambahan IKM	%	0,50	0,00	0,00		SR	Dinas Perindustrian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4,00	1,34	33,50		SR	Dinas Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	0,39	78,00		T	Dinas Perindustrian

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong cukup baik. Dari 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator dengan predikat telah tercapai, 1 indikator dengan predikat akan tercapai, dan 2 indikator yang perlu upaya keras, yaitu persentase pertambahan jumlah sentra IKM dan persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, diantaranya 1 indikator memiliki kriteria sangat tinggi, 1 indikator memiliki kriteria tinggi, 1 memiliki kriteria rendah, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

Pada triwulan I tahun 2025, persentase pertambahan IKM masih sebesar 0% karena kegiatan yang dilaksanakan pada periode tersebut difokuskan pada pelatihan. IKM baru ditargetkan akan muncul setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai dilaksanakan.

2.3.4 Unsur Pendukung

2.3.4.01. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2024, diantaranya, Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dengan nilai 73,12. Hal ini menunjukkan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat menjadi 89,21 dengan predikat A- di tahun 2024. Secara rinci, nilai RB General sebesar 77 dan nilai RB Tematik sebesar 12,21.

Pada tahun 2024 terdapat kinerja yang pencapaiannya melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,59 dari target yang ditetapkan sebesar 88,35 namun lebih rendah dari realisasi IKM tahun 2023 yang sebesar 90,72. Pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan untuk selalu menjaga dan senantiasa meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 pada Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III	UNSUR PENDUKUNG								
1	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	OPD	45,00	22,00	48,89		SR	Bagian Organisasi
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	100,00	25,00	25,00		SR	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Pelayanan Publik	%	128,00	4,43	3,46		SR	Bagian Organisasi
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Kegiatan	9,00	1,00	11,11		SR	Bagian Kesra

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	%	70,00	20,00	28,57	▼	SR	Bagian Otda dan Kerjasama
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100,00	25,00	25,00	▼	SR	Bagian Tapem
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	0,00	0,00	▼	SR	Bagian Administrasi Pemb
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100,00	25,00	25,00	▼	SR	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	25,00	25,00	▼	SR	Bagian Perekonomian dan SDA

Keterangan:

● : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025 ▲ : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

▼ : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong kurang baik, hal ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, keseluruhan indikator mempunyai predikat perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.4.02. Sekretariat DPRD

Fungsi pembentukan Sekretariat DPRD diantaranya untuk memfasilitasi kebutuhan para Anggota DPRD baik secara administrasi maupun keuangan, fasilitas kesehatan dan kebutuhan persidangan untuk meningkatkan produktivitas kinerja Anggota DPRD dalam menciptakan produk-produk hukum bagi Kota Semarang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anggota DPRD Kota Semarang menjalankan 3 (tiga) fungsi yang harus dilaksanakan dalam menunjang program Pemerintah Daerah. Tiga fungsi yang diemban oleh Anggota DPRD adalah:

- I. Fungsi Pembentukan Perda
Menjalankan fungsi pembentukan Perda, bertugas menciptakan produk-produk hukum yang akan dijadikan pedoman semua peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Produk hukum yang dihasilkan berasal dari usulan Pemerintah Kota Semarang atau berasal dari inisiatif para Anggota DPRD sendiri. Produk hukum akan sangat berarti bila menyentuh kalangan masyarakat luas karena kepentingan masyarakat akan terpenuhi dan terlindungi hak-haknya.
- II. Fungsi Anggaran
Para Anggota DPRD mempunyai hak juga untuk mengajukan anggaran, biaya yang akan digunakan sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan tugasnya. Dalam membuat produk hukum diperlukan rapat-rapat, kajian luar daerah, konsultasi dengan Pemerintah Pusat, dan lain-lain. Anggaran biaya untuk para Anggota Dewan diusulkan oleh Sekretariat DPRD dan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- III. Fungsi Pengawasan
Merupakan salah satu fungsi dalam mengawasi pelaksanaan jalannya roda pemerintahan. Pengawasan akan membuat jalannya roda pemerintahan berada pada jalur yang benar dan aman dari permasalahan hukum, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan sehat. Pengawasan yang dilakukan oleh para Anggota DPRD berfungsi memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan menentukan arah dan kebijakan.

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	SEKRETARIAT DPRD								
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	Raperda	18,00	0,00	0,00		SR	Sekretariat DPRD

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Sampai dengan triwulan I belum ada raperda yang disetujui DPRD. Pencapaian kinerja program pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong sangat rendah dikarenakan 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan mempunyai predikat kinerja perlu upaya keras, yaitu indikator Jumlah Raperda yang disetujui DPRD yang belum ada raperda yang disetujui DPRD. Jadwal pembahasan, kelengkapan berkas dan kesiapan OPD pengusul raperda

sangat menentukan kelancaran dalam pembahasan raperda. Selanjutnya, kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang masih memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.5. Unsur Penunjang

2.3.5.01. Perencanaan

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja utama yang harus dipenuhi.

Kinerja pada unsur penunjang Perencanaan dapat ditunjukkan diantaranya dengan diraihnya penghargaan, diantaranya: Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024 dari BKKBN Republik Indonesia diserahkan 26 Juni 2024 di Kota Semarang; 5 Besar Kota pada I-SIM For Cities 2024 dari APEKSI dan PT. Surveyor Indonesia diserahkan 19 September 2024 di DKI Jakarta; Terbaik I Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah diserahkan 13 November 2024 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah; Peringkat 2 Kategori Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng dalam rangka Gerakan Hemat Energi dan Air Tingkat Jawa Tengah pada Earth Day 2024 Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah diserahkan 22 April 2024 di Taman Syailendra Dieng Kabupaten Wonosobo; dan Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur pada UI Green Metric Ranking Tahun 2024 dari Universitas Indonesia diserahkan 8 Agustus 2024 di Universitas Indonesia.

Kinerja lain yang merupakan lintas sektor koordinasi ditandai dengan terbitnya regulasi terkait Dokumen Perencanaan Tahunan (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Kinerja penyelenggaraan dalam unsur penunjang perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Unsur Penunjang Perencanaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PERENCANAAN								
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	100,00	99,66	99,66		ST	Bappeda
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	%	100,00	99,67	99,67		ST	Bappeda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan Manusia							
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	101,60	100,00		ST	Bappeda
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	99,98	99,98		ST	Bappeda

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S: $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja RKPD pada Unsur Perencanaan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 1 indikator dengan predikat tercapai dan 3 indikator dengan predikat akan tercapai. Selanjutnya, kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Perencanaan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.5.02. Keuangan

Ketepatan waktu penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Telah dilakukan pembahasan bersama dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Semarang sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 tanggal 20 Desember 2024.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per 7 Februari 2025, Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2024 tercatat mencapai 92,37% mengalami penurunan dari 2023 sebesar 93,05%. Hal tersebut dapat dicapai atas kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang, DPRD Kota Semarang dan Masyarakat yang terus memberikan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024 Aset Kota Semarang yang telah dikelola sebesar Rp 21.315.424.332.709. Nilai aset yang belum dikelola sebesar Rp 241.388.475.079 antara lain tuntutan ganti kerugian, aset lain-lain, dan aset yang dikuasai namun belum ditentukan penggunaannya. Sehingga diperoleh nilai aset yang dikelola mencapai 98,88%. Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Semarang yang

optimal dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga program prioritas di Kota Semarang dapat terlaksana.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2024 adalah dinamika regulasi yang cepat dan kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu juga terkait optimalisasi pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan karena belum terdapat petunjuk teknis yang memadai tentang pelaksanaan sensus barang. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Reklame disebabkan adanya pembatasan pemasangan reklame di tengah kota dan semakin banyak reklame yang dipasang di daerah pinggiran kota yang nilainya lebih kecil.

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Unsur Penunjang Keuangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	KEUANGAN								
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	0,82	5,01	0,00		SR	BPKAD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	100,00	23,24	23,24		SR	BPKAD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	24,05	100,00		ST	BAPENDA

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong cukup baik, terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan terdapat 1 indikator dengan predikat tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras yaitu persentase SILPA terhadap APBD dan persentase legalitas aset.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 indikator memiliki kriteria sangat tinggi, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.5.03. Kepegawaian

Kinerja Pada tahun 2022 telah disusun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengembangan karier yang dilaksanakan sesuai prinsip profesionalisme yaitu dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang Pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya.

Dan untuk menyederhanakan pelayanan, sampai dengan saat ini telah tersusun pengembangan aplikasi: e-disiplin, e-cuti, e-kenaikan pangkat, e-fungsional, e-kinerja dan e-TPP.

Kinerja penyelenggaraan pada unsur penunjang kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Unsur Penunjang Kepegawaian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	KEPEGAWAIAN								
1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	275,50	949,00	100,00		ST	BKPP
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100,00	73,00	73,00		S	BKPP
		Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	100,00	100,00		ST	BKPP
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99,00	99,00	100,00		ST	BKPP
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	81,50	0,00	0,00		SR	BKPP
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,88	21,00	91,78		ST	BKPP
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00	100,00		ST	BKPP

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong baik. Dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, terdapat 4 indikator memiliki predikat kinerja telah tercapai, 2 indikator mempunyai kategori akan tercapai, dan 1 indikator mempunyai kategori perlu upaya keras yakni Persentase ASN yang bekerja baik sampai dengan sangat baik.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 7 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 5 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 memiliki kriteria sedang, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.5.04. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat ditunjukkan dengan diraihnya pencapaian, yaitu Sertifikasi ISO 9001: 2015 sistem manajemen mutu pada penyelenggaraan Diklat serta Sarana dan Prasarana Pengelola Diklat (berlaku selama 3 tahun).

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
pada Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	50,00	5,00	10,00		SR	BKPP

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong tidak baik dikarenakan 1 indikator yang menjadi ukuran memiliki status perlu upaya keras yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya. Selanjutnya, Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.5.05. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan diantaranya ditunjukkan Kota Semarang meraih penilaian dan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan cara-cara inovatif.

Indeks Inovasi Daerah menunjukkan capaian penyelenggaraan inovasi di daerah. Pada tahun 2024 indeks inovasi daerah Kota Semarang mencapai 67,92 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 65,80 dan secara predikat Kota Semarang termasuk dalam kategori Inovatif. Secara struktur, Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel, dan 36 indikator. Jika dilihat dari cakupan perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi melaksanakan inovasi daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif, dan pada tahun 2024 mencapai 100% atau sebanyak 52 OPD secara keseluruhan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan yaitu belum disusunnya payung hukum inovasi daerah yang terintegrasi serta belum lengkapnya dokumen pedoman teknis dan SOP inovasi OPD.

Adapun kajian yang telah selesai hingga triwulan I tahun 2025 sejumlah tiga judul yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Kelayakan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera sebagai BUMD Pangan.
2. Kajian Rancangan Peraturan Daerah Kedaulatan Pangan Kota Semarang.
3. Kajian Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Semarang.

Kajian dengan judul Penyusunan Sistem Pengelolaan Sampah Mandiri Kawasan Kota Lama Semarang masih pada tahap laporan pendahuluan. Keenam kajian lainnya seperti kajian pengelolaan pasar, kajian potensi investasi, dan lain-lain masih dalam tahap pendalaman substansi.

Kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100,00	25,00	25,00		SR	Bappeda

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025

 : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 tergolong kurang baik karena dari 1

indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai predikat kinerja perlu upaya keras, yaitu persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perlu adanya optimalisasi dalam publikasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan pada triwulan berikutnya. Selanjutnya, Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian pada triwulan I ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.6. Unsur Pengawas

2.3.6.01. Inspektorat Daerah

Kinerja Inspektorat Daerah dapat terlihat dari diperolehnya Peringkat pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2024 dari KPK RI dengan nilai 91,62 Kategori Pemerintah Kota.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang sebesar 3,158 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Semarang telah memperoleh WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Selanjutnya sebagai upaya mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 melakukan pengawasan internal secara optimal.

Kinerja penyelenggaraan inspektorat daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Unsur Pengawas

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00		ST	Inspektorat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,09	3,15	100,00		ST	Inspektorat

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025  : Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025

 : Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pengawas sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong sangat baik, ditandai dengan 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan telah mencapai target. Selanjutnya, untuk kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 2 indikator yang memiliki kriteria sangat tinggi.

2.3.7. Unsur Kewilayahan

2.3.7.01. Kecamatan

Unsur Penunjang Kewilayahan diselenggarakan oleh 16 Kecamatan se-Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Unsur Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilannya diantaranya: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi; Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Persentase Jumlah Ormas, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Kinerja penyelenggaraan 16 kecamatan dihitung sebagai agregat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Unsur Kewilayahan Kecamatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	16 KECAMATAN								
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis	%	94,00	89,95	95,69		ST	16 Kecamatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian s.d TW I (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW I				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		teknologi informasi (SPBE)							
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100,00	29,19	29,19	▼	SR	16 Kecamatan
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25,00	11,83	47,33	▼	SR	16 Kecamatan
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	98,00	41,00	41,84	▼	SR	16 Kecamatan

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Kewilayahan Kecamatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tergolong kurang baik, hal ini dapat dilihat dari 4 Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 1 indikator memiliki kategori akan tercapai dan 3 lainnya perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kewilayahan Kecamatan sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 3 diantaranya memiliki kriteria sangat rendah.

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diantaranya: Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan; Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 ditunjukkan melalui Indeks Demokrasi sebesar 89,72, Indeks Pembumian

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) sebesar 84,34, Indeks Pengamalan Pancasila sebesar 3,78, Indeks Ormas sebesar 60,05, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 83,86. Kondisi ini masih sama dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena pengukurannya dilakukan sekali dalam satu tahun pada akhir periode.

Kinerja penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	2,30	3,78	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	%	68,00	90,23	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	59,00	60,05	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71,50	83,86	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam	%	84,00	95,45	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2025



: Akan Tercapai, $100\% > X > 50\%$ Target Th. 2025



: Perlu Upaya Keras $50\% \geq X$ Target Th. 2025

ST : $100\% \geq X \geq 91\%$; T : $90\% \geq X \geq 76\%$; S : $75\% \geq X \geq 66\%$; R : $65\% \geq X \geq 51\%$; SR : $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan I tergolong sangat baik, hal ini ditunjukkan dari 5 Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator dengan predikat tercapai. Selanjutnya, untuk kriteria pencapaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan I ditunjukkan dari 5 indikator yang seluruhnya memiliki kriteria sangat tinggi.

Secara keseluruhan, indikator kinerja program non penunjang dalam mendukung pencapaian Kinerja Utama dan Kinerja Daerah tahun 2025 sebanyak 189 indikator. Sampai dengan triwulan I, pencapaian terhadap target tahun 2025 adalah sebagai berikut, sebanyak 71 indikator atau sebesar 37,57% telah dapat mencapai target atau terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 35 indikator atau sebesar 18,52% diantaranya sedang berproses dan akan mencapai target pada akhir periode 2025. Hal ini dimungkinkan karena ini merupakan evaluasi *on going* dengan rentang capaian diantara 50% sampai dengan 100% dari target tahun 2025. Adapun sebanyak 83 indikator (sebesar 43,91%) masih dalam predikat Perlu Upaya Keras, diantaranya disebabkan menyesuaikan jadwal kegiatan, menyesuaikan pentahapan kegiatan utamanya jika dibiayai oleh dana transfer, terkendala dengan proses pengadaan dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Berat lainnya, Pengajuan raperda yang belum didukung kesiapan materi dari OPD pengusul Raperda dan adanya perubahan perundang-undangan dari tingkat pusat. Terdapat program yang setelah dilakukan kajian dan dilakukan pembahasan dengan instansi vertikal direkomendasikan bahwa program penetapan tanah ulayat tidak relevan jika dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kota Semarang, sehingga tidak akan dilanjutkan penyelenggaraan program/kegiatan dan subkegiatan terkait.

Selain itu, berdasarkan predikat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dari 189 indikator terdapat 93 (49,21%) indikator berkriteria Sangat Tinggi (ST), 6 (3,17%) indikator berkriteria Tinggi (T), 4 (2,12%) indikator berkriteria Sedang (S), 3 (1,59%) indikator berkriteria Rendah (R), dan 83 (43,91%) indikator lainnya berkriteria Sangat Rendah (SR).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan triwulan I-2024 (YoY). Pada triwulan I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% (yoy) yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, momentum Hari Raya Idul Fitri dan dukungan optimal APBN. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% tersebut tidak lepas dari momentum Hari Raya Idul Fitri pada awal bulan April yang secara signifikan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tidak terjadi secara merata di setiap sektor usaha. Sektor yang menguat paling signifikan pada kuartal I 2025 adalah pertanian, dengan pertumbuhan sebesar 10,52% (yoy). Sektor lain yang pertumbuhannya tergolong tinggi adalah perdagangan dan reparasi, dengan pertumbuhan sebesar 5,03 (yoy). Sementara itu, dari 17 lapangan usaha utama di Indonesia, hanya ada satu sektor yang melemah yaitu pertambangan dan penggalan. Faktor kenaikan biaya operasional, penurunan harga komoditas global, dan faktor eksternal serta ketidakpastian global menjadi penyebab utama pelemahan sektor pertambangan dan penggalan sehingga menurunkan permintaan komoditas global dan mengurangi daya tarik investasi pada sektor ini. Pelemahan sektor pertambangan dan penggalan ini juga mengubah struktur perekonomian di tingkat nasional yang sebelumnya mendominasi perekonomian sebesar 9,31% pada triwulan I-2024. Kondisi tersebut selaras dengan struktur perekonomian di tingkat daerah yang didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 16,50% pada triwulan I-2024 dan pada triwulan I-2025 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,24%.

Secara keseluruhan, tren peningkatan kinerja ekonomi di tingkat nasional maupun daerah diperkirakan kembali berlanjut pada tahun 2025 ditengah tren Ketidakpastian Ekonomi Global dan Gejolak Geopolitik. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT, seiring dengan kondisi pasca Pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR dengan Tukin 100%. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Namun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberikan implikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang. Seperti program stimulus percepatan pencairan belanja bantuan sosial dan relaksasi pajak penghasilan dapat mendorong konsumsi masyarakat, sementara konsumsi pemerintah dapat meningkat sejalan dengan percepatan transfer dana ke daerah. Selain itu, Laju inflasi masih diperkirakan relatif terkendali di tengah tekanan inflasi global yang tinggi.

Selain difokuskan pada Upaya pengendalian inflasi dan pemenuhan Cadangan pangan Masyarakat, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2025 harus tetap berpedoman pada Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di perubahan tahun 2025 mencapai 5,90 – 6,30 persen. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Semarang yang fokus pada Perwujudan Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!.

Secara ringkas beberapa capaian dan target indikator ekonomi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi				Rerata	Target Kota Semarang	
		2021	2022	2023	2024		RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	LPE (%)	5,16	5,73	5,79	5,62	4.17	5,80 – 6,30	5,80 – 6,50
2	Inflasi (%)	1,49	4,99	2,84	1,69	2.33	2,3 ±1	2,3 ±1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	22.538.063	24.662.877	27.205.700	28.261.147	25.666.947	29.277.435	29.277.435
4	Kemiskinan (%)	4,56	4,25	4,23	4,03	3.26	3,98 – 3,74	3,98 – 3,74
5	TPT (%)	9,54	7,60	5,99	5,82	5,78	5,61 – 5,31	5,61 – 5,31

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Perlambatan ekonomi dunia dan berbagai risiko serta ketidakpastian global yang berpotensi akan meningkatkan risiko bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung juga berdampak pada pendapatan daerah. Namun demikian, secara umum Pemerintah Kota Semarang tetap optimis dan realistis terhadap target pendapatan daerah pada perubahan RKPD 2025 ini. Hal ini terlihat dari perkembangan perekonomian di masyarakat yang meningkat, sehingga secara langsung juga berdampak pada pendapatan daerah.

Dibandingkan dengan APBD TA 2025, pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 diperkirakan meningkat dari Rp5.520.663.472.694 menjadi Rp6.300.248.533.990 atau naik sebesar Rp779.585.061.296 (14,12%). Penyumbang terbesar kenaikan tersebut adalah pada pendapatan transfer sebesar Rp678.994.374.621.

Meskipun secara keseluruhan terjadi kenaikan pada Pendapatan Daerah, namun jika dibandingkan dengan RKPD 2025, pada pos Pendapatan Transfer perubahan RKPD tahun 2025 ada yang mengalami penurunan pada rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp162.938.883.826 dikarenakan adanya silpa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik memotong salur DAU sebesar Rp44.113.340. Disamping itu, Pemerintah kota Semarang akan terus melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi dan meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang. Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)			SELISIH	
	RKPD	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN APBD MURNI
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.826.262.515.007	3.826.262.515.007	3.904.690.263.565	78.427.748.558	78.427.748.558
Pajak Daerah	3.040.722.250.000	3.040.722.250.000	3.090.722.250.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Retribusi Daerah	688.841.797.729	688.841.797.729	695.371.570.256	6.529.772.527	6.529.772.527
HPKD yang Dipisahkan	84.386.062.278	84.386.062.278	80.494.038.309	(3.892.023.969)	(3.892.023.969)
Lain-lain PAD yang Sah	12.312.405.000	12.312.405.000	38.102.405.000	25.790.000.000	25.790.000.000
Pendapatan Transfer	1.694.400.957.687	1.780.983.757.201	2.373.395.332.308	678.994.374.621	592.411.575.107
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.694.400.957.687	1.780.983.757.201	2.373.395.332.308	678.994.374.621	592.411.575.107
Insentif Fiskal	-	-	29.284.482.000	29.284.482.000	29.284.482.000
Dana Bagi Hasil	185.764.960.486	240.412.749.000	240.412.749.000	54.647.788.514	-
Dana Alokasi Umum	1.277.400.412.000	1.309.335.423.000	1.300.226.488.660	22.826.076.660	(9.108.934.340)
Dana Alokasi Khusus	-	-	508.146.704.648	508.146.704.648	508.146.704.648
a) DAK Fisik	-	-	15.211.370.204	15.211.370.204	15.211.370.204
b) DAK Non Fisik	-	-	492.935.334.444	492.935.334.444	492.935.334.444
Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.235.585.201	231.235.585.201	295.324.908.000	64.089.322.799	64.089.322.799
Pendapatan Bagi Hasil	231.235.585.201	231.235.585.201	274.695.908.000	43.460.322.799	43.460.322.799
Bantuan Keuangan	-	-	20.629.000.000	20.629.000.000	20.629.000.000
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	22.162.938.117	22.162.938.117	22.162.938.117
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	22.162.938.117	22.162.938.117	22.162.938.117
Jumlah Pendapatan Daerah	5.520.663.472.694	5.607.246.272.208	6.300.248.533.990	779.585.061.296	693.002.261.782

Sumber : Bapenda; BPKAD Kota Semarang; 2025

3.2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Komposisi Belanja Daerah tidak lepas dari penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan pasca pemilu. risiko ketidakpastian global akibat geopolitik dagang China-Amerika Serikat dan konflik Palestina-Israel. serta ancaman El Nino dan perubahan iklim. Penyesuaian Belanja Daerah secara simultan diakomodir APBD TA 2025 melalui pergeseran anggaran ke-2. kemudian hasil akhir pergeseran tersebut menjadi dasar Perubahan RKPD Tahun 2025.

Penyesuaian Belanja Daerah ini diupayakan masih berpedoman pada arahan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan prioritas dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 adalah:

1. Proyeksi Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren APBD Murni 3 tahun terakhir. namun tetap memerhatikan besaran *earmarking* dan kebutuhan yang didasarkan di tahun 2025.
2. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya.
3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut.

4. Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2025 dilakukan terhadap belanja operasional seperti efisiensi terhadap belanja alat tulis kantor (ATK), belanja Narasumber, belanja *Operational Maintenance* (OM), belanja konsumsi rapat, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan.
5. Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial yang Merata dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Secara umum jika dibandingkan dengan RKPD TA 2025, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 komposisi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp886.850.005.462 atau naik 15,90%. Dengan uraian belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp5.240.386.471.717 atau naik sebesar Rp815.840.280.830 (18,44%). Jika dibandingkan dengan RKPD TA 2025, penyesuaian Belanja Operasi terdapat pada:

1. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari Rp2.081.367.933.246 pada RKPD 2025 menjadi sebesar Rp2.124.755.330.167 atau mengalami peningkatan sebesar Rp43.387.396.921, Peningkatan tersebut berasal dari tambahan beban anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pemerintah daerah dan Dana Transfer yang masuk di Pergeseran-2 terkait Tunjangan Guru ASN Daerah (Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru).
2. Belanja Barang dan Jasa yang pada RKPD 2025 dialokasikan Rp2.252.933.415.912, pada perubahan RKPD 2025 naik menjadi Rp2.927.214.938.594.
3. Belanja Subsidi pada RKPD 2025 dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000 untuk subsidi pasar namun tidak dianggarkan dalam Perubahan RKPD 2025, dilakukan Efisiensi pada Pergeseran-2 sebagai Efisiensi Belanja Lainnya sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025.
4. Belanja Hibah naik dari Rp78.607.041.729 menjadi sebesar Rp185.177.102.956. Peningkatan tersebut terutama berasal dari Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dan BOS SD dan SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian Hibah kepada Yayasan, serta pemberian bantuan keuangan partai politik.
5. Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan dari Rp8.137.800.000 menjadi sebesar Rp3.239.100.000. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya terkait Beasiswa karena adanya penyesuaian siswa penerima hasil pemadanan dengan Data Terpadu Kerawanan Sosial (DTKS).

Untuk Belanja Modal, jika dibandingkan dengan RKPD TA 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp75.734.941.775 pada perubahan RKPD 2025. Selanjutnya, untuk Belanja Tidak Terduga, pada perubahan RKPD tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp4.725.217.142 (-6,17%) dari semula dianggarkan sebesar Rp76.553.242.183 pada RKPD Murni, pada APBD Murni 2025 menjadi sebesar Rp99.607.975.983. Belanja Tidak Terduga pada perubahan RKPD tahun 2025 dianggarkan untuk Antisipasi kejadian bencana/darurat atau perkiraan santunan kematian. Secara lengkap, rincian perbandingan belanja pada RKPD 2025, APBD TA 2025 dan Perubahan RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)			SELISIH	
	RKPD	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN APBD MURNI
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	4.424.546.190.887	4.452.195.277.608	5.240.386.471.717,10	815.840.280.830	788.191.194.109
Belanja Pegawai	2.081.367.933.246	2.019.380.050.124	2.124.755.330.166,87	43.387.396.921	105.375.280.043
Belanja Barang dan Jasa	2.252.933.415.912	2.342.570.385.755	2.927.214.938.594,23	674.281.522.682	584.644.552.839
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	3.500.000.000	3.500.000.000	-	(3.500.000.000)	(3.500.000.000)
Belanja Hibah	78.607.041.729	78.607.041.729	185.177.102.956,00	106.570.061.227	106.570.061.227
Belanja Bantuan Sosial	8.137.800.000	8.137.800.000	3.239.100.000,00	(4.898.700.000)	(4.898.700.000)
Belanja Modal	1.076.811.955.604	1.147.623.934.597	1.152.546.897.377,69	75.734.941.774	4.922.962.781
Belanja Modal Tanah	1.214.101.000	1.214.101.000	4.821.294.000,00	3.607.193.000	3.607.193.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.393.333.829	185.372.494.583	228.844.228.938,96	73.450.895.110	43.471.734.356
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.263.738.325	355.339.172.941	342.327.372.083,64	(16.936.366.241)	(13.011.800.857)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.612.089.042	603.423.026.145	555.567.949.124,59	(3.044.139.917)	(47.855.077.020)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.248.612	436.695.132	13.775.590.154,90	13.285.341.543	13.338.895.023
Belanja Modal Aset Lainnya	1.838.444.796	1.838.444.796	7.210.463.075,60	5.372.018.280	5.372.018.280
Belanja Tidak Terduga	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041,21	(4.725.217.142)	(27.779.950.942)
Belanja Tidak Terduga	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041,21	(4.725.217.142)	(27.779.950.942)
Jumlah Belanja Daerah	5.577.911.388.674	5.699.427.188.188	6.464.761.394.136,00	886.850.005.462	765.334.205.948

Sumber : Bappeda Kota Semarang; 2025

Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja tersebut, maka ringkasan alokasi rencana pendapatan dan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)			SELISIH	
	RKPD	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN APBD MURNI
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.826.262.515.007	3.826.262.515.007	3.904.690.263.565	78.427.748.558	78.427.748.558
Pendapatan Transfer	1.694.400.957.687	1.780.983.757.201	2.373.395.332.308	678.994.374.621	592.411.575.107
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	22.162.938.117	22.162.938.117	22.162.938.117
Jumlah Pendapatan Daerah	5.520.663.472.694	5.607.246.272.208	6.300.248.533.990	779.585.061.296	693.002.261.782
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	4.424.546.190.887	4.452.195.277.608	5.240.386.471.717,10	815.840.280.830	788.191.194.109
Belanja Modal	1.076.811.955.604	1.147.623.934.597	1.152.546.897.377,69	75.734.941.774	4.922.962.781
Belanja Tidak Terduga	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041,21	(4.725.217.142)	(27.779.950.942)
Jumlah Belanja Daerah	5.577.911.388.674	5.699.427.188.188	6.464.761.394.136,00	886.850.005.462	765.334.205.948
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	(57.247.915.980)	(92.180.915.980)	(164.512.860.146,00)	(107.264.944.166)	(72.331.944.166)

Sumber : Bappeda Kota Semarang; 2025

Dari penjelasan Tabel 3.4, dapat dilihat bahwa pada Perubahan RKPD 2025 diperkirakan akan terdapat defisit sebesar Rp164.512.860.146 karena rencana belanja daerah lebih besar dari rencana pendapatan daerah. Pemerintah Kota Semarang akan menggunakan anggaran tersebut secara produktif dan efisien, agar struktur pendapatan dan belanja daerah menjadi ideal dan seimbang.

3.2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kota Semarang pada perubahan RKPD Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tersebut tercatat sebesar Rp194.512.860.146. Jika dibandingkan dengan RKPD induk, angka tersebut berselisih sebesar Rp75.764.944.166 karena pada RKPD induk terpasang Rp. 118.747.915.980. Sedangkan jika dibandingkan dengan APBD TA 2025. SiLPA pada perubahan RKPD 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.084.547.166.

Berbeda dengan sisi Penerimaan, Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD 2025 jika dibandingkan dengan RKPD Induk 2025 tidak mengalami perubahan. Secara lengkap, rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)			SELISIH	
	RKPD	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN RKPD	PERUBAHAN RKPD DENGAN APBD MURNI
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	118.747.915.980	153.680.915.980	194.512.860.146	75.764.944.166	40.831.944.166
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	118.747.915.980	153.680.915.980	194.512.860.146	75.764.944.166	40.831.944.166
				-	-
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan				-	-
Penyertaan Modal Daerah	57.500.000.000	57.500.000.000	30.000.000.000	(27.500.000.000)	(27.500.000.000)
Penyertaan Modal PDAM	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal Perusda BPR / BKK	500.000.000	500.000.000	-	(500.000.000)	(500.000.000)
Penyertaan Modal Bank Jateng	23.000.000.000	23.000.000.000	-	(23.000.000.000)	(23.000.000.000)
Penyertaan Modal PT. BPS (<i>holding company</i>)	4.000.000.000	4.000.000.000	-	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Penyertaan Modal PT. Taman Satwa	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	61.500.000.000	61.500.000.000	30.000.000.000	(31.500.000.000)	(31.500.000.000)
PEMBIAYAAN NETTO	57.247.915.980	92.180.915.980	164.512.860.146	107.264.944.166	72.331.944.166

Sumber : BPKAD; Bagian Perekonomian dan SDA Kota Semarang; 2025

Berdasarkan uraian Pembiayaan Daerah tabel 3.5, maka Pemerintah Kota Semarang mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp194.512.860.146 pada perubahan RKPD Tahun 2025. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk penyertaan modal daerah, sehingga kondisi pada perubahan RKPD 2025 adalah anggaran berimbang.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Semarang, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 merupakan masa transisi dari RPJMD tahun 2021-2026 ke RPJMD tahun 2025-2029. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Semarang, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 beserta perubahannya secara normatif tetap mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026, namun secara substansi juga harus selaras dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, terutama pada arah kebijakan pembangunan daerah, visi, misi dan program prioritas. RKPD Kota Semarang tahun 2025 beserta perubahannya juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 beserta program strategis nasional yang ditetapkan, serta program kebijakan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Selain memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, isu strategis, dan prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional, penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kesesuaian dengan dokumen perencanaan, urgensi penanganan isu, dan kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” dan visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari Dan Inklusif”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan rasio gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.
- Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

- Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.
- Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.
- Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.
- Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.
- Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Untuk memberikan arah kebijakan tematik untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka perwujudan visi Kota Semarang, maka ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Tahun 2025 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata
- Tahun 2026 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Pangan Kota Yang Berkelanjutan
- Tahun 2027 : Pengembangan Pariwisata dan ekonomi Kerakyatan Berbasis Produk Unggulan Daerah
- Tahun 2028 : Peningkatan Infrastruktur Strategis Kota
- Tahun 2029 : Penguatan Daya Saing Yang Mendoron Perekonomian Kota
- Tahun 2030 : Perwujudan Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.

Dari tahapan tersebut, maka untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 ini difokuskan pada meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merata.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025 beserta indikator dan targetnya. Perlu diketahui bahwa meskipun terdapat penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, namun tidak dilakukan penyesuaian terhadap target indikator tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini karena penyesuaian belanja dilakukan terhadap belanja operasional yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target pembangunan. Efisiensi dilakukan pada belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, belanja perjalanan dinas, serta belanja-belanja yang tidak terlalu mendesak

yang diubah untuk memenuhi prioritas lain sesuai dengan tema prioritas di tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merata, yang dilakukan antara lain melalui pemberian beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, penyelesaian ijasah yang tertahan, pembangunan Rumah Inspirasi, Kartu BRT Gratis untuk pelajar dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang, penambahan kuota *Universal Health Coverage* (UHC), pemilahan dan pengolahan sampah, sampai dengan penyelesaian permasalahan infrastruktur yang mendesak, terutama di wilayah-wilayah pengembangan. Tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan targetnya di tahun 2025 baik pada RKPD 2025 dan penyesuaiannya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2025	
MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KeadILAN SOSIAL				
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,80 – 85,80 poin	84,80 – 85,80 poin	
	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	66,20 %	66,20 %	
	Sasaran: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,62 Tahun	15,62 Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,63 Tahun	10,63 Tahun
		Angka Harapan Hidup	77,59 Tahun	77,59 Tahun
	2. Meningkatkan kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	66,20 %	66,20 %
	2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61 – 5,31 %	5,61 – 5,31 %
Angka Kemiskinan		3,98 – 3,74 %	3,98 – 3,74 %	
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	95,73 %	95,73 %
4. Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,20 %	70,20 %
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	79,00 %	79,00 %
5. Menurunnya angka kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	14,90 – 15,20 %	14,90 – 15,20 %
6. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial		Persentase Penanganan PPKS	99,93 %	99,93 %
MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA				

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2025
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,80 – 6,50 %	5,80 – 6,50 %
	Sasaran: 7. Meningkatkan produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	3.680.871.861,74 US\$	3.680.871.861,74 US\$
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00 %	6,00 %
	8. Meningkatkan nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7 % (Rp 29.277.435 Juta)	7 % (Rp 29.277.435 Juta)
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	158,79 – 159,80 juta rupiah	158,79 – 159,80 juta rupiah
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,91 %	28,91 %
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,74 %	28,74 %
MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN				
4.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi	73,20	73,20
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,90	95,90
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	9,28	9,28
	Sasaran: 9. Meningkatkan internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	74,50	74,50
	10. Meningkatkan akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,30	75,30
	11. Meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.213 kejadian	1.213 kejadian
MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA				
5.	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,35	67,35
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	82,75	82,75

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2025	
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,63	52,63	
	Indeks Kualitas Udara	96,00	96,00	
	Penurunan Emisi CO2	183.278,54 Ton CO2e	183.278,54 Ton CO2e	
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	70 %	70 %	
	Persentase ruang terbuka hijau	45,64 %	45,64 %	
13. Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	79 %	79 %	
	Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	84 %	84 %	
	Persentase kawasan banjir dan rob	3,04 %	3,04 %	
14. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	99,00 %	99,00 %	
	Persentase rumah layak huni	99,70 %	99,70 %	
15. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	89 %	89 %	
16. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	107,00	107,00	
17. Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5935	0,5935	
	Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	1	1	
MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA				
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi	78,00	78,00
	Sasaran: 18. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>78/BB	>78/BB
		Opini BPK	WTP	WTP
	19. Meningkatnya efisiensi	Indeks Profesionalitas ASN	84,00	84,00
Indeks SPBE		4,4	4,4	

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2025
kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,48/ST	>3,48/ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	89,00

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Sementara itu, ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	84,80 – 85,80	84,80 – 85,80
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	66,20	61,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61-5,31	5,61-5,31
4	Angka Kemiskinan	%	3,98 – 3,74	3,98 – 3,74
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 – 6,50	5,80 – 6,50
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	158,79 – 159,80	158,79 – 159,80
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7,00 (29.277.435)	7,00 (29.277.435)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,00	6,00
9	Indeks Demokrasi	indeks	73,20	73,20
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,90	95,90
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,28	9,28
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,35	64,89
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	85,50	85,50
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,04	3,04
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	78,00	78,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	89,00	89,00
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Tabel 4. 3

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	%	0,35	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 - 6,50	5,80 - 6,50
3	Laju inflasi	%	2,3 ±1	2,3 ±1
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,91	28,91
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,74	28,74
	Fokus Kesejahteraan Sosial			
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	84,80 – 85,80	84,80 – 85,80
a.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /tahun	16.300	16.300
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,59	77,59
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,63	10,63
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,62	15,62
7	Angka Kemiskinan	%	3,98 – 3,74	3,98 – 3,74
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61 – 5,31	5,61 – 5,31
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	99,97
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga			
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	66,20	66,20
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)			
a.	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
b.	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,60	70,60
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,50	70,50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
6	Angka Partisipasi Kasar			
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	81,85	81,85
	b. SD/MI	%	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100
7	Angka Partisipasi Murni:			
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90,00	90,00
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,00	80,00
8	Angka Putus Sekolah:			
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,02	0,02
9	Angka Kelulusan:			
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00
10	Angka Melanjutkan (AM):			
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00
11	Fasilitas Pendidikan:			
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97,00	97,00
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,40	99,40
12	Rasio Guru/Murid per kelas Rata-rata			
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
	a. Jenjang PAUD	%	99,00	99,00
	b. Jenjang SD/MI	%	100,00	100,00
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100,00	100,00
I.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,39	0,39
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	96,80	96,80

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100,00	100,00
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,31	71,31
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,05	6,05
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	6,86	6,86
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	79,00	79,00
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+	A+
I.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	97,42	97,42
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,59	99,59
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	85,50	85,50
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100,00	100,00
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	92,72	92,72
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,50	94,50
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	66,90	66,90
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43,00	43,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,54	36,54
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	16,00	16,00
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30,00	30,00
I.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100,00 (30 Unit)	100,00 (30 Unit)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100,00 (84 Unit)	100,00 (84 Unit)
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	84 (84% x 431,54 Ha = 362.502 Ha)	84 (84% x 431,54 Ha = 362.502 Ha)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000	1.000
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100,00 (10 perumahan)	100,00 (10 perumahan)
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	20,07	20,07
I.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70,00	70,00
3	Indeks Resiko Bencana	%	107,00	107,00
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100,00	100,00
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100,00	100,00
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100,00	100,00
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100,00	100,00
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,80	88,80
I.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100,00	100,00
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	%	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
	luar panti			
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00	100,00
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	%	100,00	100,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	75,00
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	60,00 (140 kasus)	60,00 (140 kasus)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,95	7,95
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,011	0,011
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	11,44	11,44
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,71	74,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	68,10	68,10
7	Rasio KDRT	Rasio	0,021	0,021
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	255,074	255,074
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,00	3,00
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,10	89,10
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	82,00	82,00
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58,00	58,00
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60,00	60,00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,35	67,35
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,63	52,63

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	96,00	96,00
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,90	56,90
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Persentase pengurangan timbulan sampah b. Persentase penanganan timbulan sampah	% %	30,00 70,00	30,00 70,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	86,00	86,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	77,00	77,00
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,80	97,80
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100,00	100,00
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100,00	100,00
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,60	99,60
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase LPM aktif	%	100,00	100,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,52	7,52
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,34	77,34
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	17.611.420	17.611.420
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	1	1
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	2010	2010
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,34	75,34
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100,00	100,00
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14	%	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Persentase koperasi aktif	%	77,50	77,50
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	15,00	15,00
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	56,00	56,00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	595	595
2	Persentase peningkatan investasi	%	7,00	7,00
3	Nilai investasi	Rp (dlm juta)	29.277.435	29.277.435
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	51	51
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,96	0,96
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043	0,043
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100,00	100,00
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100,00	100,00
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	85,00	85,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Terlestariannya Cagar Budaya	%	91,57	91,57
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	465	465
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	14	14
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	40,83	40,83
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	49,00	49,00
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	32,00	32,00
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	61,00	61,00
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	81,00	81,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	60,00	60,00
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	152.000	152.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.249,54	7.249,54
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita /thn	40,20	40,20
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	17.808	17.808
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ tahun	3.169,37	3.169,37
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ tahun	4.080,17	4.080,17
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6,00 (4.363.020)	6,00 (4.363.020)
2	Tingkat hunian akomodasi	%	48,52	48,52
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19,00	19,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/ta hun	6,38	6,38
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,00	5,00
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	162	162
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	7	7
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	74,00	74,00
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	91,00	91,00
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	74,00	74,00
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90,00	90,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50	0,50
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100,00	100,00
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	%	10,00	10,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
	Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan			
4	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	1	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,50	12,50
4	UNSUR PENDUKUNG			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	78,00	78,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	89,00	89,00
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>78/BB	>78/BB
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,48/ST	>3,48/ST
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00	100,00
5	UNSUR PENUNJANG			
5.01.	PERENCANAAN			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100,00	100,00
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100,00	100,00
5.02	KEUANGAN			
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	54,57
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	0,82	0,82
5.03	KEPEGAWAIAN			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	84,00	84,00
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	275,54	275,54
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,88	22,88
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	4,18
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85,00	85,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	47,06	47,06

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	68	68
6	UNSUR PENGAWAS			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3,00	3,00
2	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,08	3,08
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	95,73	95,73
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	93,20	93,20
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	94,00	94,00
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Indeks Demokrasi	Indeks	73,20	73,20
2	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,50	74,50
C.	ASPEK DAYA SAING			
1.	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	PDRB per kapita berlaku	juta Rp	158,79 – 159,80	158,79 – 159,80
2	Nilai Ekspor	US\$	3.680.871.861,74	3.680.871.861,74
2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur			
2.1	Aksesibilitas Daerah			
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5935	0,5935
2.2	Penataan Wilayah			
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,64	45,64
2.	Kesesuaian tata ruang	%	100,00	100,00
3.	Fasilitasi Iklim Berinvestasi			
3.1	Ketentraman dan Ketertiban			
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1213	1213
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,28	9,28
3.2	Kemudahan Perizinan			
1	Prosedur izin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perizinan dari semula 52 jenis)	%	98,50	98,50
4.	Sumber Daya Manusia			
4.1	Kualitas Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,20	70,20
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	79,00	79,00
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,20	41,20

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan tujuan menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan

pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjadi konsivitas daerah;
 - b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI, pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatkan kualitas pembelajaran berbasis *soft skill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana, pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
 - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi

- sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan, pemerataan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta, revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga, serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugur, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet;
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jenjang penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber

- pencemai air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan epatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk di dalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen

- organisasi berbasis risiko dan riset yang didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

4.2.3. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2025. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
 - a) Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
 - b) Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
 - c) Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
 - d) Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
 - e) Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
 - f) Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
 - g) Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;
 - h) Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
 - a) Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
 - b) Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
 - c) Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
 - d) Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan *homecare* bagi warga lanjut usia yang

- mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian;
- e) Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan *Universal Health Coverage (UHC)*;
 - f) Meningkatkan kualitas layanan dan tenaga medis serta fasilitas rawat inap di Puskesmas;
 - g) Fokus pada kelurahan yang kasus stuntingnya mengalami peningkatan;
 - h) Penambahan armada *Ambulance Hebat*;
 - i) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama terkait fasilitas tenaga medis;
 - j) Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
 - k) Menyediakan berbagai program pembukaan lapangan kerja dan bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat;
 - l) Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
 - m) Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;
 - n) Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif
 - a) Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
 - b) Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;
 - c) Memperbanyak beasiswa untuk masuk perguruan tinggi;
 - d) Penambahan program pelatihan operator EMIS (*Education Management Information System*) bagi para guru Madrasah Diniyah;
 - e) Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, dan juga transformasi tata kelola guru.
 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota
 - a) Perbaikan jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
 - b) Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
 - c) Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;
 - d) Perlu pemeriksaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
 - e) Peningkatan infrastruktur dalam pengendalian banjir, melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS);

- f) Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
 - g) Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
 - h) Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
 - i) Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran;
 - j) Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
 - k) Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
 - l) Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balau RT yang telah rusak dan belum ada;
 - m) Memperhatikan ruang publik terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
 - n) Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
 - o) Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
 - p) Perlu rekonstruksi ulang bagi halte BRT yang keberadaannya kurang representatif juga menonjol dibahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan;
 - q) Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
 - r) Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota
- a) Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
 - b) Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
 - c) Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
 - d) Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;
 - e) Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini bisa positif;
 - f) Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;

- g) Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;
- h) Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
- i) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
- j) Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;
- k) Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
- l) Pemerintah Kota Semarang diminta untuk mengencangkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang;
- m) Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
- n) Agar Pemkot Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini telah mengakomodir kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2025-2030 yang tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 Triwulan I serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
- Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

- Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
- Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
- Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
- Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
- Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaraan event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilain, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

Jika dibandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

WILAYAH	LPE	IPM	KEMISKINAN	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Nasional	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00%	4,50 – 5,00%

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Selanjutnya disajikan sandingan antara sasaran prioritas pembangunan dan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025, serta sandingan prioritas daerah dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota di tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan, visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2030.

Tabel 4. 5
Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,62 Tahun	P1	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.	Prioritas Nasional 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,63 Tahun			
		Angka Harapan Hidup	77,59 Tahun			
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	66,20%			
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	95,73%			
4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,20%			
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	79,00%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025			
5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	14,90 – 15,20%	P5	<p>Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin</p> <p>Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> <p>Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p>
6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,93%		
7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$ 3.680.871.861,74	P4	<p>Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaraan event-event seni dan budaya penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.</p> <p>Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p>Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>Prioritas Provinsi 1.</p>
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00%		
8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7% (29.277.435 juta rupiah)		
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	158-79-159,80 juta rupiah		
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan	28,91%		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
		perdagangan dan jasa terhadap PDRB			<p>Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p> <p>Prioritas Provinsi 3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.</p>	
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,74%			
9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	74,50	P1	<p>Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.</p>	<p>Prioritas Nasional 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).</p>
10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,30		<p>Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p>	
11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.213 kejadian	P2	<p>Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja</p>	<p>Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis</p>

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
				P7	<p>rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.</p> <p>Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).</p>	<p>dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> <p>Prioritas Provinsi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.</p>
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	<p>Indeks Kualitas Air</p> <p>Indeks Kualitas Udara</p> <p>Penurunan Emisi CO2</p> <p>Persentase sampah perkotaan yang tertangani</p> <p>Persentase ruang terbuka hijau</p>	<p>52,63</p> <p>96,00</p> <p>183.278,54 Ton CO2e</p> <p>70%</p> <p>45,64%</p>	P3	<p>Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis</p>	<p>Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> <p>Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,</p>
13	Meningkatnya pemerataan pelayanan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	79%	P6	<p>Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan</p>	

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT		
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2025				
	sarana dan prasarana perkotaan	Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	84%	fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Prioritas Provinsi 3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.		
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,04%				
14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	99,00%				
		Persentase rumah layak huni	99,70%				
15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	89%				
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	107				
17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5935				
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	1 titik/ruas				
18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>78/BB			P7	Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		Opini BPK	WTP				
19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan	Indeks Profesionalitas ASN	84,00				

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025			PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		
sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks SPBE	4,4	P8 dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT). Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.	Prioritas Provinsi 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,48/ST		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00		

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Tabel 4. 6

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Daerah Kota Semarang	
Kualitas sumber daya manusia	PN.4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.1	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan
Konektivitas dan aksesibilitas wilayah	PN.3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD.1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	PD.2	Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas
Daya saing ekonomi, peningkatan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan	PN.3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD.1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	PD.7	Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang
	PN.5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			PD.3	Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia
	PN.6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			PD.4	Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan
					PD.5	Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan
					PD.7	Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Daerah Kota Semarang	
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya;	PN.2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD.3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PD.6	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
	PN.8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			PD.7	Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang
Tata kelola pemerintahan	PN.1	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PD.4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PD.8	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif
	PN.7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan				

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Tabel 4. 7
 Persandingan Prioritas Daerah Dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil
 Wali Kota Tahun 2025-2029

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
Prioritas Daerah 1.	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;	Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan, dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.
		Sekolah gratis di sekolah negeri dan swasta bagi yang kurang mampu.
		Bus gratis bagi siswa Kota Semarang.
		Bus gratis bagi mahasiswa Kota Semarang.
		Beasiswa D3/D4/S1 bagi masyarakat miskin, siswa berprestasi, dan atlet
		Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
		Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.
		Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter.
		Pengembangan program pelatihan kerja yang dapat menjangkau masyarakat luas.
		Prioritas Daerah 2.
Perluasan program kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan, baik untuk tenaga kerja formal, maupun informal.		
Pemerataan layanan kesehatan di seluruh kelurahan.		
Peningkatan pelayanan kesehatan.		
Upaya penurunan stunting.		
Pemberian makanan tambahan bagi keluarga miskin rawan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan Baduta guna menciptakan generasi SDM mendatang yang berdaya guna.		
Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas dan membantu tenaga medis untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.		
Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.		
Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah.		
Mendorong implementasi tanaman obat dan produksi tanaman obat yang		

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
		bekerjasama dengan perusahaan farmasi nasional.
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;	Pembangunan IPAL/SPALDT.
		Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat.
		Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan).
		Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik.
		Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
		Bimbingan belajar dan lembaga pembelajaran Al-Quran gratis yang tersedia di setiap kelurahan.
		Penyediaan Rumah Bersubsidi.
Prioritas Daerah 4.	Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;	Pembangunan jalan dan jembatan.
		Pembangunan Semarang Middle Ring Road.
		Rintisan Pembangunan Jalan Spondol - Sekaran.
		Pengembangan Semarang Outer Ring Road.
		Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota.
		Pengembangan pasar tradisional modern dengan mengintegrasikan fungsi lainnya (sport center, area kuliner, dan UMKM, serta industri kreatif dan lain-lain).
		Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah.
		Penguatan petani milenial.
		Penguatan lumbung pangan dan urban farming.
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
		Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa, dan logistik.
		Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.
		Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan dan peternak.
		Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
		Optimalisasi anggaran pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya		

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
	<p>dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman.</p> <p>Penyiapan support system untuk kompetisi olahraga dan seni, serta inovator muda.</p> <p>Peningkatan pembangunan budidaya perikanan.</p> <p>Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.</p> <p>Peningkatan angka investasi di Kota Semarang.</p> <p>Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya.</p> <p>Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match).</p> <p>Penguatan dan pengembangan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif.</p> <p>Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas.</p> <p>Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.</p> <p>Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa.</p> <p>Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur).</p>
<p>Prioritas Daerah 5.</p>	<p>Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;</p> <p>Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktik budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila.</p> <p>Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan, dan akuisisi dari pihak lain.</p> <p>Mengintegrasikan literasi kesehatan mental.</p> <p>Dukungan terhadap pendirian rumah inspirasi bagi kelompok disabilitas di tingkat kecamatan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi.</p> <p>Umrah dan perjalanan religi gratis bagi masyarakat.</p>

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
Prioritas Daerah 6.	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
		Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan.
		Peningkatan upaya penghijauan wilayah.
		Pembangunan kebun/taman hutan raya.
		Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon.
		Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
		Peningkatan gerakan pilah sampah dari rumah.
		Peningkatan gerakan Semarang Wegah Nyampah.
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF).
		Pembangunan 1000 Biopori
		Penegakan aturan Zero Delta Q pada kawasan
		Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah daerah aliran sungai
		Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin.
		Normalisasi Sungai Plumbon.
		Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang, dan Sungai Asin.
		Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo.
		Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor.
		Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu.
		Normalisasi Sungai Babon.
		Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen.
Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.		
Pengembangan sistem peringatan dini bencana Kota Semarang.		
Prioritas Daerah 7.	Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;	Kolaborasi antar warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan).
		Pemberdayaan masyarakat (bank sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST).
		Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi.
		Tambahan operasional RT.
		Tambahan operasional RW.

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM PRIORITAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
		Tambahan bantuan LPMK.
		Penambahan penerima dana operasional marbot.
		Penambahan penerima dana operasional penjaga rumah ibadah lainnya.
		Penambahan penerima dana operasional TPA.
		Penambahan penerima dana operasional guru keagamaan lainnya.
Prioritas Daerah 8.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang.
		Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya.
		Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
		Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.
		Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
		Pengambilan keputusan berdasarkan big data.
		Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.
		Penguatan riset dan inovasi daerah.
		Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang.

Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

Tabel 4. 8
Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan				
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.21 %	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	111.73 %	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.65 %	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12 lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29 %	DINAS PENDIDIKAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	DINAS PENDIDIKAN
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas				
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	RSUD KRMT WONGSONEGORO
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	RSUD KRMT WONGSONEGORO
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	RSUD KRMT WONGSONEGORO
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	RSUD KRMT WONGSONEGORO

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	DINAS KESEHATAN
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia				
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86 Persen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92.72 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99.7 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.41 Persen	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	DINAS PENATAAN RUANG
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS PERHUBUNGAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	15.00 trayek	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66.82 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.94 Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan				
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75.00 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79.00 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70.00 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.60 Persen	DINAS TENAGA KERJA
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059 Kkal	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Cakupan Distribusi	100.00 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	0 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82.50 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop)	100.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkop)	100.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (dinkop)	100.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3713.00 Penanam	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595.00 Investor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99.00 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	91.57 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	DINAS PERIKANAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	DINAS PERIKANAN
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	DINAS PERIKANAN
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	DINAS PERIKANAN
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	DINAS PERIKANAN
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17808.18 ton	DINAS PERIKANAN
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	SDM Pariwisata	90.00 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	DINAS PERTANIAN
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	DINAS PERTANIAN
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00 Persen	DINAS PERTANIAN
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069.22 ton	DINAS PERTANIAN
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi hasil peternakan	36519.00 ton	DINAS PERTANIAN
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	DINAS PERTANIAN
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 Persen	DINAS PERTANIAN
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80.00 Persen	DINAS PERTANIAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33.00 kelompok	DINAS PERTANIAN
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 Persen	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1713153249 US\$	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	86 Persen	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 Persen	DINAS PERDAGANGAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Peindustrian	100.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	DINAS PERINDUSTRIAN
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan				
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	SATPOL PP

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP	100%	SATPOL PP
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	SATPOL PP
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP	100%	SATPOL PP
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan linmas	0	SATPOL PP
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	SATPOL PP
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	DINAS SOSIAL
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS SOSIAL

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS SOSIAL
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100.00 Persen	DINAS SOSIAL
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	DINAS SOSIAL
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	DINAS SOSIAL
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71.25 Persen	DINAS SOSIAL
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	DINAS SOSIAL
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11.44 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
				PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2 persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100 persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1273.00 jumlah	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	53.00 Kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 Indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	68.00 angka	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	59.00 indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84.00 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40.00 Ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.80 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.50 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30.00 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.70 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang				
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	KECAMATAN TEMBALANG
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	100 Persen	KECAMATAN TUGU
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	0	KECAMATAN CANDISARI

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN GENUK
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN MIJEN
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN NGALIYAN
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif				
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.60 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.80 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80 Persen	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	128.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daera	100.00 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	SEKRETARIAT DPRD

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	0.82 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	100.00 Persen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN,

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.88 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	275.50 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	50 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	INSPEKTORAT
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 persen	INSPEKTORAT
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	INSPEKTORAT
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	INSPEKTORAT
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	INSPEKTORAT
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.09 Nilai	INSPEKTORAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0	KECAMATAN MIJEN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	0	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	0	KECAMATAN MIJEN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	0	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	KECAMATAN TUGU
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100.00 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	KECAMATAN TEMBALANG
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN GENUK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN MIJEN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN NGALIYAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SngTgh	100.00 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	0	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	0	KECAMATAN MIJEN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	0	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	KECAMATAN TUGU

Prioritas Perubahan RKPDP 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	KECAMATAN TEMBALANG
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN GENUK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN MIJEN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN NGALIYAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	KECAMATAN TUGU
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	KECAMATAN TEMBALANG
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN GENUK
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN MIJEN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN NGALIYAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2 angka	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	94 Persen	KECAMATAN TUGU
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	KECAMATAN TEMBALANG

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN GENUK
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN MIJEN
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN NGALIYAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Prioritas Perubahan RKPDP 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	25 Persen	KECAMATAN TUGU
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	KECAMATAN TEMBALANG
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN GENUK

Prioritas Perubahan RKPDP 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN MIJEN
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN NGALIYAN
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum- Pedurungan	25 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	98 Persen	KECAMATAN TUGU

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Persen	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80%	KECAMATAN TEMBALANG
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN BANYUMANIK

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN GAYAMSARI
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN GENUK
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN GUNUNG PATI
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN MIJEN
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN NGALIYAN

Prioritas Perubahan RKPD 2025	Program	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98.00 Persen	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	50 Persen	KECAMATAN PEDURUNGAN

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2025 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan bidang urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

5.1.1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
Program diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan.
- b. Program Pengembangan Kurikulum
Program diarahkan pada penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non-Formal.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

5.1.1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diarahkan pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program iini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

- f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

5.1.1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

- b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

5.1.1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

5.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

5.1.2.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Tanah Ulayat
Program ini diarahkan pada Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
- f. Program Penatagunaan Tanah
Program ini diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sampah.

5.1.2.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan.

5.1.2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

5.1.2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.1.2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Aplikasi Informatika
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

5.1.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota.
- b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

5.1.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini diarahkan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

5.1.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini diarahkan pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, dan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

5.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

5.1.3.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini diarahkan pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

5.1.3.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

5.1.3.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Penjaminan Kesehatan

Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

- e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

5.1.3.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

- d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5.1.3.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

5.1.4. UNSUR PENDUKUNG

5.1.4.01. SEKRETARIAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

5.1.4.02. SEKRETARIAT DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

5.1.5. UNSUR PENUNJANG

5.1.5.01. PERENCANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

5.1.5.02. KEUANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.1.5.03. KEPEGAWAIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5.1.5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5.1.5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan,

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

5.1.6. UNSUR PENGAWAS

5.1.6.01. INSPEKTORAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi.

5.1.7. UNSUR KEWILAYAHAN

5.1.7.01. KECAMATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

5.1.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

5.1.8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator:

- 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan;
- 2) Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN;
- 3) Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD; dan
- 4) Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD.

5.2 RENCANA PENDANAAN DAERAH

5.2.1 DUKUNGAN PROGRAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pemerintah Pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah di tahun 2025 ini ditempuh dengan ditetapkannya 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya mendukung 8 (delapan) Prioritas Pemerintah Pusat atau Prioritas Nasional, dukungan ini ditujukan agar Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang selaras dengan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dirangkum sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Semarang terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Daerah	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan		5	1.317.440.364.832
	DINAS PENDIDIKAN	5	1.317.440.364.832
2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas		7	1.155.925.807.418
	DINAS KESEHATAN	5	632.276.617.440
	RSUD KRMT WONGSONEGORO	2	523.649.189.978
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia		31	1.393.140.359.324
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	13.866.482.694
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	67.494.609.231
	DINAS PEKERJAAN UMUM	4	384.078.990.970
	DINAS PENATAAN RUANG	10	124.773.028.469
	DINAS PERHUBUNGAN	2	362.565.602.971
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	440.361.644.988
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan		53	255.650.226.415
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7	48.907.560.401
	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	14.773.771.838
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8	23.937.632.864
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	16.046.286.104
	DINAS PERDAGANGAN	7	62.579.149.349
	DINAS PERIKANAN	5	11.559.229.459
	DINAS PERINDUSTRIAN	4	21.955.365.511
	DINAS PERTANIAN	6	34.723.648.618
	DINAS TENAGA KERJA	5	21.167.582.271
	5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan		31
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		6	27.521.387.863
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		4	62.133.370.649
DINAS PEMADAM KEBAKARAN		2	34.028.331.907
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		7	18.774.880.469

Prioritas Daerah	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	30.770.763.294
	DINAS SOSIAL	6	34.906.154.797
	SATPOL PP	2	38.779.797.893
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		10	165.649.504.001
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	165.649.504.001
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang		18	769.333.531.180
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	4.033.694.754
	KECAMATAN BANYUMANIK	1	56.301.938.619
	KECAMATAN CANDISARI	1	31.932.952.066
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	1	27.041.667.037
	KECAMATAN GAYAMSARI	1	31.973.958.306
	KECAMATAN GENUK	1	55.722.879.062
	KECAMATAN GUNUNG PATI	1	46.219.710.476
	KECAMATAN MIJEN	1	46.502.934.911
	KECAMATAN NGALIYAN	1	61.029.037.416
	KECAMATAN PEDURUNGAN	1	74.661.178.744
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	1	65.399.297.091
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	1	36.279.394.743
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1	41.467.495.214
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	1	41.228.964.411
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	1	50.109.539.060
	KECAMATAN TEMBALANG	1	75.970.430.878
	KECAMATAN TUGU	1	23.458.458.392
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif		96	1.160.706.914.096
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	33.784.868.700
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	77.060.316.966
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	188.224.776.255
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	22.417.736.613
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2	11.080.132.578
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6	28.231.973.051
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	20.927.924.103
	INSPEKTORAT	3	22.996.381.928
	KECAMATAN BANYUMANIK	4	23.949.924.907
	KECAMATAN CANDISARI	4	16.038.139.112
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	4	18.839.219.703
	KECAMATAN GAYAMSARI	4	16.342.584.990
	KECAMATAN GENUK	4	26.609.552.187
	KECAMATAN GUNUNG PATI	4	30.872.938.107
	KECAMATAN MIJEN	4	28.992.156.042
	KECAMATAN NGALIYAN	4	24.773.135.361
	KECAMATAN PEDURUNGAN	4	26.377.901.631
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	4	28.740.061.546
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	4	20.018.915.164
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	4	27.272.760.099
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	4	20.229.285.586
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	4	20.461.028.137
	KECAMATAN TEMBALANG	4	26.174.787.331

Prioritas Daerah	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
	KECAMATAN TUGU	4	16.413.772.031
	SEKRETARIAT DAERAH	3	265.130.574.991
	SEKRETARIAT DPRD	2	118.746.066.977
Jumlah		251	6.464.761.394.136

5.2.2 DUKUNGAN PROGRAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 TERHADAP PRIORITAS PROVINSI

Pemerintah Provinsi menyatakan bahwa upaya pemerataan Pembangunan yang dilakukan Provinsi di tahun 2025 ini ditempuh dengan ditetapkannya 4 (empat) Prioritas Daerah. Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya mendukung 4 (empat) Prioritas Pemerintah Provinsi, dukungan ini ditujukan agar Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang selaras dengan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi juga berkesinambungan dengan Prioritas Nasional. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 terhadap Prioritas Provinsi tahun 2025 dirangkum sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Semarang terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2025

Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas		77	1.613.756.520.773
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7	48.907.560.401
	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	14.773.771.838
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	67.494.609.231
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	8	23.937.632.864
	DINAS PEKERJAAN UMUM	4	384.078.990.970
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	16.046.286.104
	DINAS PENATAAN RUANG	10	124.773.028.469
	DINAS PERDAGANGAN	7	62.579.149.349
	DINAS PERHUBUNGAN	2	362.565.602.971
	DINAS PERIKANAN	5	11.559.229.459
	DINAS PERINDUSTRIAN	4	21.955.365.511
	DINAS PERTANIAN	6	34.723.648.618
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	440.361.644.988
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata		48	2.741.448.441.392
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	27.521.387.863
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	62.133.370.649
	DINAS KESEHATAN	5	632.276.617.440
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	34.028.331.907
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18.774.880.469
	DINAS PENDIDIKAN	5	1.317.440.364.832

Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	30.770.763.294
	DINAS SOSIAL	6	34.906.154.797
	DINAS TENAGA KERJA	5	21.167.582.271
	RSUD KRMT WONGSONEGORO	2	523.649.189.978
	SATPOL PP	2	38.779.797.893
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan		12	179.515.986.695
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	13.866.482.694
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	165.649.504.001
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif		114	1.930.040.445.276
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	33.784.868.700
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	77.060.316.966
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	188.224.776.255
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	22.417.736.613
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2	11.080.132.578
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6	28.231.973.051
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	20.927.924.103
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	4.033.694.754
	INSPEKTORAT	3	22.996.381.928
	KECAMATAN BANYUMANIK	5	80.251.863.526
	KECAMATAN CANDISARI	5	47.971.091.178
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	5	45.880.886.740
	KECAMATAN GAYAMSARI	5	48.316.543.296
	KECAMATAN GENUK	5	82.332.431.249
	KECAMATAN GUNUNG PATI	5	77.092.648.583
	KECAMATAN MIJEN	5	75.495.090.953
	KECAMATAN NGALIYAN	5	85.802.172.777
	KECAMATAN PEDURUNGAN	5	101.039.080.375
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	5	94.139.358.637
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	5	56.298.309.907
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	5	68.740.255.313
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	5	61.458.249.997
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	5	70.570.567.197
	KECAMATAN TEMBALANG	5	102.145.218.209
	KECAMATAN TUGU	5	39.872.230.423
	SEKRETARIAT DAERAH	3	265.130.574.991
	SEKRETARIAT DPRD	2	118.746.066.977
Jumlah		251	6.464.761.394.136

5.2.3 DUKUNGAN PROGRAM PERUBAHAN RKPd KOTA SEMARANG TAHUN 2025 TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan daerah, berkesinambungan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi sebagai bentuk keselarasan terhadap permasalahan/isu strategis yang ada di Kota Semarang. Pembangunan yang dilakukan,

juga dikontribusikan utuh secara kolaboratif oleh semua perangkat daerah. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang tersebut, terangkum di dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Semarang
Pada Perubahan Tahun 2025

Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		5	24.594.325.063
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	24.594.325.063
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		6	86.674.612.494
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	13.866.482.694
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	34.028.331.907
	SATPOL PP	2	38.779.797.893
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		39	1.544.923.380.630
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	67.494.609.231
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	165.649.504.001
	DINAS PEKERJAAN UMUM	4	384.078.990.970
	DINAS PENATAAN RUANG	10	124.773.028.469
	DINAS PERHUBUNGAN	2	362.565.602.971
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	440.361.644.988
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		38	2.641.118.923.729
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	62.133.370.649
	DINAS KESEHATAN	5	632.276.617.440
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18.774.880.469
	DINAS PENDIDIKAN	5	1.317.440.364.832
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	30.770.763.294
	DINAS SOSIAL	6	34.906.154.797
	DINAS TENAGA KERJA	5	21.167.582.271
	RSUD KRMT WONGSONEGORO	2	523.649.189.978
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		32	155.422.455.570
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3	18.640.626.777
	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	14.773.771.838
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2	9.868.026.533
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	16.046.286.104
	DINAS PERDAGANGAN	7	62.579.149.349
	DINAS PERIKANAN	5	11.559.229.459
	DINAS PERINDUSTRIAN	4	21.955.365.511
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		12	48.793.254.949
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6	14.069.606.331
	DINAS PERTANIAN	6	34.723.648.618

Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	Jml. Program	Pagu Indikatif
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		114	1.930.040.445.276
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	33.784.868.700
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	77.060.316.966
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	188.224.776.255
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	22.417.736.613
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2	11.080.132.578
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6	28.231.973.051
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	20.927.924.103
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	4.033.694.754
	INSPEKTORAT	3	22.996.381.928
	KECAMATAN BANYUMANIK	5	80.251.863.526
	KECAMATAN CANDISARI	5	47.971.091.178
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	5	45.880.886.740
	KECAMATAN GAYAMSARI	5	48.316.543.296
	KECAMATAN GENUK	5	82.332.431.249
	KECAMATAN GUNUNG PATI	5	77.092.648.583
	KECAMATAN MIJEN	5	75.495.090.953
	KECAMATAN NGALIYAN	5	85.802.172.777
	KECAMATAN PEDURUNGAN	5	101.039.080.375
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	5	94.139.358.637
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	5	56.298.309.907
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	5	68.740.255.313
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	5	61.458.249.997
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	5	70.570.567.197
	KECAMATAN TEMBALANG	5	102.145.218.209
	KECAMATAN TUGU	5	39.872.230.423
	SEKRETARIAT DAERAH	3	265.130.574.991
	SEKRETARIAT DPRD	2	118.746.066.977
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		5	33.193.996.424
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	2.927.062.800
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4	30.266.933.624
Jumlah		251	6.464.761.394.136

5.2.4 REKAPITULASI PERUBAHAN PER BIDANG URUSAN

Rekapitulasi perubahan Jumlah Progran, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif per Bidang Urusan, termuat di dalam tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4

Rekapitulasi Pagu Per Bidang Urusan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Semarang Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru / Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru / Berkurang	Jumlah Sub Kegiatan Baru / Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	5	5	16	16	16	88	88	92	913.670.396.824	916.296.330.510	1.317.440.364.832	-	-	4
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	18	18	18	77	77	82	996.840.483.294	1.017.171.719.088	1.155.925.807.418	-	-	5
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	10	21	21	21	99	99	99	550.069.140.281	578.146.673.281	513.296.915.787	-	-	-
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	4	11	11	12	44	44	45	353.984.872.160	363.984.872.160	434.362.201.940	-	1	1
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4	21	21	21	86	86	86	99.011.170.080	99.266.397.830	86.674.612.494	-	-	-
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	6	16	16	16	80	80	80	35.528.133.116	37.028.133.116	34.906.154.797	-	-	-
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	5	17	17	17	48	48	48	22.504.715.366	22.958.096.766	21.167.582.271	-	-	-
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	19	19	21	57	57	62	21.485.310.586	21.524.556.136	18.774.880.469	-	2	5
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	5	12	12	12	51	51	51	19.514.641.628	19.007.078.346	14.773.771.838	-	-	-
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5	5	5	6	6	6	8	8	8	1.083.046.994	1.183.046.994	1.554.546.700	-	-	-

Kode	Bidang Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru / Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru / Berkurang	Jumlah Sub Kegiatan Baru / Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	10	18	18	18	56	56	56	126.962.143.126	144.471.756.546	165.649.504.001	-	-	-
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	19	19	19	58	58	58	21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.103	-	-	-
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	2	2	2	2	2	11	11	11	3.671.745.940	3.671.745.940	4.033.694.754	-	-	-
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	14	14	14	50	50	60	17.578.586.672	18.078.586.672	30.770.763.294	-	-	10
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2	21	21	21	65	65	65	328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971	-	-	-
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	9	9	9	40	40	40	72.418.935.597	72.444.218.937	64.845.763.998	-	-	-
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	8	14	14	14	40	40	40	25.488.592.490	27.588.592.490	23.937.632.864	-	-	-
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	12	12	12	41	41	41	20.451.360.181	20.551.360.181	16.046.286.104	-	-	-
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	15	15	15	50	50	50	59.261.755.080	59.661.755.080	62.133.370.649	-	-	-
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	805.000.000	836.207.760	494.431.378	-	-	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855	-	-	-
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	12	12	12	33	33	33	26.773.970.587	26.673.970.587	30.266.933.624	-	-	-
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	10	10	10	42	42	42	16.562.110.347	16.562.110.347	26.867.570.683	-	-	-
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	3	9	9	9	22	22	22	1.434.339.953	1.434.339.953	1.364.402.368	-	-	-

Kode	Bidang Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru / Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru / Berkurang	Jumlah Sub Kegiatan Baru / Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	16	16	16	39	39	39	14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459	-	-	-
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3	5	5	5	9	9	9	16.293.736.353	16.293.736.353	18.640.626.777	-	-	-
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	16	16	16	42	42	44	37.808.615.375	40.792.115.375	34.723.648.618	-	-	2
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	7	7	12	12	12	38	38	38	75.468.162.652	75.768.162.652	62.579.149.349	-	-	-
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	10	10	10	43	43	43	18.406.507.350	18.571.626.200	21.955.365.511	-	-	-
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	20	20	20	68	68	68	248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991	-	-	-
4.02	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	14	14	14	41	41	41	138.860.115.826	140.938.973.172	118.746.066.977	-	-	-
5.01	PERENCANAAN	3	3	3	12	12	12	46	46	46	30.442.087.872	32.725.575.936	22.417.736.613	-	-	-
5.02	KEUANGAN	4	4	4	14	14	14	96	96	96	310.040.062.659	333.394.796.459	265.285.093.221	-	-	-
5.03	KEPEGAWAIAN	2	2	2	11	11	11	46	46	46	25.742.303.118	25.742.303.118	25.205.686.818	-	-	-
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	7.392.150.738	7.392.150.738	8.579.181.882	-	-	-
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	10	10	10	32	32	32	10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578	-	-	-
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	11	11	11	44	44	44	31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.928	-	-	-
7.01	KECAMATAN	5	5	5	13	13	13	42	42	42	845.913.339.086	844.913.339.086	1.137.405.998.361	-	-	-
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	12	12	12	57	57	57	30.612.948.231	30.612.948.231	27.521.387.863	-	-	-
	Jumlah	168	168	168	492	492	495	1799	1799	1826	5.577.911.388.674	5.699.427.188.188	6.464.761.394.136	-	3	27

5.2.5 MATRIKS PERUBAHAN PAGU INDIKATIF PER PROGRAM PER BIDANG URUSAN

Matriks perubahan target atau indikator program terhadap kesesuaian RPJMD 2021-2026 dijabarkan di dalam tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5.

Pagu Indikatif Program Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Semarang Tahun 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				913.670.396.824	916.296.330.510	1.317.440.364.832		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				913.670.396.824	916.296.330.510	1.317.440.364.832		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %	722.458.568.800	718.917.968.760	892.866.392.730	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %					
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.21 %	86.21 %	122.739.321.424	125.365.255.110	354.125.064.875	DINAS PENDIDIKAN	
		APK SD/MI	111.73 %	111.73 %					
		APK SMP/MTs	115.65 %	115.65 %					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12 lembaga	12 lembaga					
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100 %	100 %	685.000.000	685.000.000	122.098.620	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %	100 %					
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualitas S1/D-IV	90.29 %	90.29 %	67.387.506.600	70.928.106.640	70.193.815.687	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	100 %	400.000.000	400.000.000	132.992.920	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100 %	100 %					
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				511.271.026.895	532.810.552.739	632.276.617.440		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				511.271.026.895	532.810.552.739	632.276.617.440		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	100.00 Persen	364.482.429.756	363.989.911.876	380.524.164.121	DINAS KESEHATAN	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	145.634.672.619	167.623.716.343	248.447.225.200	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	581.924.520	581.924.520	1.977.490.893	DINAS KESEHATAN	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	97.00 Persen	260.000.000	287.000.000	620.980.734	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	100.00 Persen	312.000.000	328.000.000	706.756.492	DINAS KESEHATAN	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO				485.569.456.399	484.361.166.349	523.649.189.978		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				485.569.456.399	484.361.166.349	523.649.189.978		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	100 persen	432.897.114.749	432.896.864.749	470.724.273.378	RSUD KRMT WONGSONEGORO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	100 persen					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	100 persen	52.672.341.650	51.464.301.600	52.924.916.600	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	100 persen					
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM				383.704.701.641	420.682.234.641	384.078.990.970		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				383.704.701.641	420.682.234.641	384.078.990.970		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	75.950.969.338	75.950.969.338	75.140.389.102	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	98.44 Persen	51.772.839.454	51.772.839.454	57.920.001.459	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00 Persen	67.00 Persen	143.550.329.938	147.460.329.938	98.527.829.620	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30 Persen	75.30 Persen	112.430.562.911	145.498.095.911	152.490.770.789	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				163.063.575.574	154.263.575.574	124.773.028.469		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				161.980.528.580	153.080.528.580	123.218.481.769		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	27.463.538.375	28.063.538.375	29.006.747.491	DINAS PENATAAN RUANG	
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	100.00 Persen	130.952.208.013	121.452.208.013	91.179.549.977	DINAS PENATAAN RUANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	100.00 Persen	616.483.389	616.483.389	467.990.352	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	537.183.946	537.183.946	329.340.262	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	100.00 Persen	2.411.114.857	2.411.114.857	2.234.853.688	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.083.046.994	1.183.046.994	1.554.546.700		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	327.300.000	327.300.000	309.338.096	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	100.00 Persen	448.553.274	448.553.274	405.543.898	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	100.00 Persen	240.130.720	240.130.720	278.336.485	DINAS PENATAAN RUANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	100.00 Persen	50.094.000	150.094.000	122.355.006	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	16.969.000	16.969.000	438.973.215	DINAS PENATAAN RUANG	
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				358.368.782.220	368.368.782.220	440.361.644.988		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.383.910.060	4.383.910.060	5.999.443.048		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86 Persen	57.86 Persen	1.257.150.000	607.900.000	452.080.788	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100 %	100 %	292.850.000	942.100.000	634.811.650	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92.72 %	92.72 %	1.641.710.060	1.641.710.060	4.057.942.173	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	100 %	1.192.200.000	1.192.200.000	854.608.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				353.984.872.160	363.984.872.160	434.362.201.940		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100 %	100 %	50.960.922.329	50.960.922.329	51.354.206.402	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100 %	100 %					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100 %	100 %					
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100 %	100 %	6.571.686.600	6.571.686.600	6.595.848.092	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99.7 %	99.7 %	17.346.090.000	17.346.090.000	23.323.664.220	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	100.00 Persen	279.106.173.231	289.106.173.231	353.088.483.227	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.41 Persen	44.41 Persen					
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATPOL PP				43.702.807.430	43.858.035.180	38.779.797.893		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				43.702.807.430	43.858.035.180	38.779.797.893		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	32.794.101.015	29.972.446.157	26.295.380.370	SATPOL PP	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP	100 %	100 %					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP	100 %	100 %					
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan linmas	16 %	0	10.908.706.415	13.885.589.023	12.484.417.523	SATPOL PP	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	10.00 Persen					
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				41.228.057.090	41.328.057.090	34.028.331.907		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				41.228.057.090	41.328.057.090	34.028.331.907		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	35.022.043.741	32.259.987.341	26.981.270.757	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen	6.206.013.349	9.068.069.749	7.047.061.150	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				14.080.305.560	14.080.305.560	13.866.482.694		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.080.305.560	14.080.305.560	13.866.482.694		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	11.838.913.390	11.361.903.990	10.322.794.271	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	20.00 persen	2.241.392.170	2.718.401.570	3.543.688.424	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL				35.528.133.116	37.028.133.116	34.906.154.797		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				35.528.133.116	37.028.133.116	34.906.154.797		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.656.598.330	15.202.276.761	13.398.273.194	DINAS SOSIAL	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100.00 Persen	100.00 Persen	6.472.822.021	6.665.795.861	6.823.219.531	DINAS SOSIAL	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	30.320.774	30.320.774	16.790.559	DINAS SOSIAL	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	99.93 Persen	8.301.760.849	8.635.386.089	9.062.392.417	DINAS SOSIAL	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	71.25 Persen	71.25 Persen	4.266.929.375	5.521.245.064	4.862.312.094	DINAS SOSIAL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		memperoleh bantuan Sosial							
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	799.701.767	973.108.567	743.167.002	DINAS SOSIAL	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA				22.504.715.366	22.958.096.766	21.167.582.271		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				22.504.715.366	22.958.096.766	21.167.582.271		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	17.215.301.220	17.215.301.220	15.599.369.890	DINAS TENAGA KERJA	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75.00 Persen	75.00 Persen	64.382.763	46.762.654	18.139.647	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79.00 Persen	79.00 Persen	3.001.491.850	3.454.873.250	3.180.379.075	DINAS TENAGA KERJA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70.00 Persen	70.00 Persen	1.290.811.533	1.308.431.642	916.772.010	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.60 Persen	5.60 Persen	932.728.000	932.728.000	1.452.921.649	DINAS TENAGA KERJA	
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				25.157.056.526	25.196.302.076	22.808.575.223		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21.485.310.586	21.524.556.136	18.774.880.469		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	16.579.576.516	16.618.822.066	14.084.990.743	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100 %	100 %					
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100 %	100 %					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100 %	100 %	1.375.000.000	1.375.000.000	764.036.727	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11.44 %	11.44 %	1.345.111.720	1.345.111.720	874.861.477	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100 %	100 %	554.828.200	554.828.200	1.314.719.130	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100 %	100 %	282.396.670	282.396.670	209.769.098	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	1.008.397.480	1.008.397.480	1.264.596.873	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	0.011 %	340.000.000	340.000.000	261.906.421	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN				3.671.745.940	3.671.745.940	4.033.694.754		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100 %	100 %	741.430.730	741.547.730	685.006.791	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	2.930.315.210	2.930.198.210	3.348.687.963	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN				19.514.641.628	19.007.078.346	14.773.771.838		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				19.514.641.628	19.007.078.346	14.773.771.838		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen	14.355.453.433	14.355.453.433	9.507.518.501	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Porsen	100 Porsen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059 Kkal	3059 Kkal	4.137.360.370	3.407.598.148	3.856.023.310	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Presentase Cakupan Distribusi	100.00 Porsen	100.00 Porsen					
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 Porsen	100.00 Porsen					
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	0 Porsen	0 Porsen	272.282.200	198.932.200	357.480.140	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82.50 Porsen	82.50 Porsen	724.545.625	1.020.094.565	1.027.749.887	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				126.962.143.126	144.471.756.546	165.649.504.001		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				126.962.143.126	144.471.756.546	165.649.504.001		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	49.603.158.547	49.603.158.547	55.757.350.570	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	446.546.333	1.446.546.333	1.186.138.275	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40.00 Ha	40.00 Ha	4.491.304.490	4.591.304.490	10.053.971.813	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		kerusakan lingkungan hidup							
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	2.00 Persen					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91.00 Persen	91.00 Persen					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64.00 Persen	64.00 Persen					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	2.272.702.525	2.272.702.525	1.390.850.196	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60.00 Persen	60.00 Persen	255.911.774	255.911.774	423.099.962	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	100.00 Persen	494.046.742	494.046.742	268.384.809	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.80 Persen	85.80 Persen					
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56.00 Persen	56.00 Persen	2.361.345.650	2.617.367.150	2.591.430.942	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.50 Persen	12.50 Persen	248.195.280	248.195.280	204.654.412	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan	100.00 Persen	100.00 Persen	95.866.136	95.866.136	58.807.574	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		hidup yang ditindaklanjuti							
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70.00 Persen	70.00 Persen	66.693.065.649	82.846.657.569	93.714.815.448	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30.00 Persen	30.00 Persen					
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.70 Persen	91.70 Persen					
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.103		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.103		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	20.055.894.122	20.055.894.122	20.412.735.672	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.60 Persen	99.60 Persen	340.613.230	340.613.230	209.638.230	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00 Persen	77.00 Persen					
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.80 Persen	97.80 Persen	127.109.720	127.109.720	26.603.760	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	100.00 Persen	505.265.597	505.265.597	202.522.905	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	134.616.095	134.616.095	76.423.536	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.578.586.672	18.078.586.672	30.770.763.294		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.578.586.672	18.078.586.672	30.770.763.294		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen	10.809.346.697	10.784.346.697	9.659.816.627	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	0.50 Persen	1.123.000.000	1.725.300.000	2.041.930.900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2 persen	2 persen	4.530.502.175	4.453.202.175	11.133.669.222	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32 Persen	60.32 Persen	1.115.737.800	1.115.737.800	7.935.346.545	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	80.213.655.576	80.213.655.576	78.350.599.765	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	15.00 trayek	15.00 trayek	248.760.466.561	248.760.466.561	284.215.003.207	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66.82 Persen	66.82 Persen					
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33 Persen	33 Persen					
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92 Persen	92 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.94 Rasio	6.94 Rasio					
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				74.167.345.617	74.328.836.717	67.494.609.231		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				72.418.935.597	72.444.218.937	64.845.763.998		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	100.00 Persen	22.597.116.450	21.936.478.510	20.965.585.677	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 persen	100 persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen					
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00 Persen	100.00 Persen	4.945.556.000	5.476.304.400	6.671.442.211	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	100.00 Persen	44.876.263.147	45.031.436.027	37.208.736.110	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				805.000.000	836.207.760	494.431.378		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	100.00 Persen	805.000.000	836.207.760	494.431.378	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				25.488.592.490	27.588.592.490	23.937.632.864		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.488.592.490	27.588.592.490	23.937.632.864		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop)	100.00 Persen	100.00 Persen	13.901.894.152	13.583.322.152	11.847.006.290	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkop)	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (dinkop)	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	3.00 Persen	150.000.000	150.000.000	39.065.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	50.00 Persen	504.320.000	504.320.000	158.160.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33.00 Persen	33.00 Persen	394.320.000	394.320.000	263.710.510	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	10.00 Persen	601.700.000	601.700.000	549.819.918	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	1.00 Persen					
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28 Persen	28 Persen	2.060.280.000	2.092.353.680	1.211.844.613	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 Persen	3.00 Persen	4.360.294.000	6.456.538.390	6.510.208.993	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	20.00 Persen	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20.451.360.181	20.551.360.181	16.046.286.104		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				20.451.360.181	20.551.360.181	16.046.286.104		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.254.270.246	14.887.010.462	12.705.049.610	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3713.00 Penanam	3713.00 Penanam	841.000.000	941.000.000	565.698.803	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595.00 Investor	595.00 Investor	1.201.874.293	1.400.741.377	1.098.625.634	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	95.50 Persen	2.900.000.000	3.050.392.700	1.402.853.069	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	2 Nilai	120.000.000	138.000.000	77.432.616	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99.00 Persen	99.00 Persen	134.215.642	134.215.642	196.626.372	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				59.261.755.080	59.661.755.080	62.133.370.649		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				59.261.755.080	59.661.755.080	62.133.370.649		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 Persen	100 Persen	15.033.082.919	15.486.946.436	18.843.689.932	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 Persen	100.00 Persen					
		presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100 persen	100 persen					
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	45.00 Persen	2.950.487.224	2.950.487.224	2.626.464.214	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1273.00 jumlah	1273.00 jumlah	38.778.184.937	38.724.321.420	38.163.216.503	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	5 Lapangan					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	53.00 Kegiatan	53.00 Kegiatan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				43.067.706.940	42.967.706.940	48.907.560.401		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				26.773.970.587	26.673.970.587	30.266.933.624		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	17.998.272.835	17.898.272.835	15.990.505.815	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30.00 Persen	30.00 Persen	3.310.037.038	3.310.037.038	6.142.330.244	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30.00 Persen	30.00 Persen	4.725.620.714	4.725.620.714	7.485.079.355	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	91.57 Persen	91.57 Persen	740.040.000	740.040.000	649.018.210	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.293.736.353	16.293.736.353	18.640.626.777		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	100.00 Persen	11.880.684.360	11.880.684.360	14.621.806.012	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	3.513.051.993	3.513.051.993	2.810.057.025	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	90.00 Persen	90.00 Persen	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				17.996.450.300	17.996.450.300	28.231.973.051		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.562.110.347	16.562.110.347	26.867.570.683		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.129.191.990	15.129.191.990	13.596.741.055	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1 Rasio	1.233.190.357	1.233.190.357	12.886.539.508	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	100.00 Persen	199.728.000	199.728.000	384.290.120	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.434.339.953	1.434.339.953	1.364.402.368		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100 Persen	100 Persen	640.981.920	640.981.920	867.374.885	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	100.00 Persen	698.113.023	698.113.023	433.865.143	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80 Persen	80 Persen	95.245.010	95.245.010	63.162.340	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN				14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	30.00 Orang	8.109.963.900	8.109.963.900	6.668.139.385	DINAS PERIKANAN	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen					
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	3169.37 ton	1.643.198.000	1.643.198.000	1.372.790.504	DINAS PERIKANAN	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	4080.17 ton	2.694.439.000	3.299.439.000	2.446.198.674	DINAS PERIKANAN	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	2 Kasus	200.000.000	169.950.351	90.468.216	DINAS PERIKANAN	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Produksi ikan olahan	17808.18 ton	17808.18 ton	1.648.518.037	1.678.567.686	981.632.679	DINAS PERIKANAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN				37.808.615.375	40.792.115.375	34.723.648.618		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.808.615.375	40.792.115.375	34.723.648.618		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	24.095.995.030	24.095.995.030	21.800.604.795	DINAS PERTANIAN	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen					
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069.22 ton	51069.22 ton	8.950.320.221	10.489.670.002	7.840.027.406	DINAS PERTANIAN	
		Produksi hasil peternakan	36519.00 ton	36519.00 ton					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	2.834.200.000	3.893.646.182	3.098.800.142	DINAS PERTANIAN	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah	-5.00 Persen	-5.00 Persen	900.044.839	1.084.748.876	743.911.450	DINAS PERTANIAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	kasus penyakit hewan menular							
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80.00 Persen	80.00 Persen	203.650.000	203.650.000	191.883.983	DINAS PERTANIAN	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33.00 kelompok	33.00 kelompok	824.405.285	1.024.405.285	1.048.420.842	DINAS PERTANIAN	
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN				75.468.162.652	75.768.162.652	62.579.149.349		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				75.468.162.652	75.768.162.652	62.579.149.349		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	42.123.125.918	41.122.944.918	37.946.600.942	DINAS PERDAGANGAN	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	DINAS PERDAGANGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	26 pasar	27.163.272.070	28.267.029.470	22.184.353.868	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 Persen	3.93 Persen	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1713153249 US\$	1713153249 US\$	497.776.580	497.776.580	551.350.848	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	86 Persen	86 Persen	1.000.000.000	1.138.486.600	859.842.856	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 Persen	40 Persen	860.230.000	872.004.800	700.280.410	DINAS PERDAGANGAN	
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN				18.406.507.350	18.571.626.200	21.955.365.511		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				18.406.507.350	18.571.626.200	21.955.365.511		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen	10.845.266.200	10.845.266.200	9.975.526.429	DINAS PERINDUSTRIAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Peindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen					
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	0.50 Persen	5.400.000.000	5.410.000.000	9.263.184.735	DINAS PERINDUSTRIAN	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96.00 Persen	96.00 Persen					
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	4.00 Persen	1.604.881.150	1.760.000.000	2.051.228.167	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	0.50 Persen	556.360.000	556.360.000	665.426.180	DINAS PERINDUSTRIAN	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH				248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	45.00 OPD	167.574.016.650	173.042.789.090	180.160.073.730	SEKRETARIAT DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Bagian Tata Usaha		100.00 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Tata Usaha
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian TU		100.00 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Tata Usaha
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Keuangan
		Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Tata Usaha
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Presentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Tata Usaha

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir bagian Rumah Tangga
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	70.972.759.273	72.677.226.049	77.004.824.747	SEKRETARIAT DAERAH	
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70.00 Persen	70.00 Persen					
		Indek Pelayanan Publik	128.00 Persen	128.00 Persen					
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	100.00 Persen					
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 Persen	100.00 Persen	10.230.272.374	10.256.036.194	7.965.676.514	SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan		100.00 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengakomodir

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa							bagian Administrasi Pembangunan
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daera	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen					
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD				138.860.115.826	140.938.973.172	118.746.066.977		
4.02	SEKRETARIAT DPRD				138.860.115.826	140.938.973.172	118.746.066.977		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	78.742.074.241	79.681.037.967	70.680.649.531	SEKRETARIAT DPRD	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	18.00 dokumen	60.118.041.585	61.257.935.205	48.065.417.446	SEKRETARIAT DPRD	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				30.442.087.872	32.725.575.936	22.417.736.613		
5.01	PERENCANAAN				30.442.087.872	32.725.575.936	22.417.736.613		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	13.954.087.872	13.861.087.872	12.054.478.729	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	100.00 Persen	4.510.000.000	4.525.500.000	2.653.255.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 Persen	100.00 Persen	11.978.000.000	14.338.988.064	7.710.002.884	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	PEMBANGUNAN DAERAH								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	100.00 Persen					
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				203.521.163.979	226.875.897.779	188.224.776.255		
5.02	KEUANGAN				203.521.163.979	226.875.897.779	188.224.776.255		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	116.866.216.032	116.866.216.032	108.464.274.105	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	0.82 Persen	0.82 Persen	83.388.887.046	106.443.620.846	76.506.724.061	BADAN PENGELOLAAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
								KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer		100.00 %				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penambahan Indikator (Pelimpahan dari BAPENDA sesuai dengan RPJMD)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	100.00 Persen	100.00 Persen	3.266.060.901	3.566.060.901	3.253.778.088	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966		
5.02	KEUANGAN				106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen	76.774.448.308	76.774.448.308	51.828.360.507	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	10 Persen	29.744.450.372	29.744.450.372	25.231.956.459	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				33.134.453.856	33.134.453.856	33.784.868.700		
5.03	KEPEGAWAIAN				25.742.303.118	25.742.303.118	25.205.686.818		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	100.00 Persen	18.125.034.988	18.125.034.988	17.112.141.016	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen					
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen					
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50 Persen	81.50 Persen	7.617.268.130	7.617.268.130	8.093.545.802	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99 Persen	99 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	99.00 Persen					
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	275.50 Persen	275.50 Persen					
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.88 Persen	22.88 Persen					
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7.392.150.738	7.392.150.738	8.579.181.882		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	50 Persen	50 Persen	7.392.150.738	7.392.150.738	8.579.181.882	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578		
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	100 %	5.864.888.312	5.864.888.312	5.081.743.383	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah							
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %					
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	4.339.817.565	4.339.817.565	5.998.389.195	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT				31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.928		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.928		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	22.415.818.750	22.415.818.750	19.075.410.254	INSPEKTORAT	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 persen	100 persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	4.129.485.320	4.129.485.320	1.691.438.343	INSPEKTORAT	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.09 Nilai	3.09 Nilai	4.926.701.010	4.926.701.010	2.229.533.331	INSPEKTORAT	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				42.725.973.630	42.725.973.630	56.298.309.907		
7.01	KECAMATAN				42.725.973.630	42.725.973.630	56.298.309.907		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	16.978.444.900	16.791.198.340	16.965.452.136	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000	3.589.846.560	2.842.954.598	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830	22.206.760.830	36.279.394.743	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	107.467.900	107.467.900	106.058.430	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	30.700.000	30.700.000	104.450.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA				51.313.567.689	51.313.567.689	70.570.567.197		
7.01	KECAMATAN				51.313.567.689	51.313.567.689	70.570.567.197		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	17.890.133.979	17.532.543.619	17.473.739.041	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.244.970.760	3.602.561.120	2.764.917.050	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	29.896.719.350	29.896.719.350	50.109.539.060	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	125.243.600	125.243.600	122.168.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	156.500.000	156.500.000	100.203.446	KECAMATAN SEMARANG UTARA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT				68.036.139.800	68.036.139.800	94.139.358.637		
7.01	KECAMATAN				68.036.139.800	68.036.139.800	94.139.358.637		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	25.667.935.950	25.202.417.310	24.812.683.637	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.264.604.800	4.730.123.440	3.828.454.309	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	37.984.964.650	37.984.964.650	65.399.297.091	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	38.637.200	38.637.200	20.949.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	79.997.200	79.997.200	77.974.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR				45.901.066.036	45.901.066.036	61.458.249.997		
7.01	KECAMATAN				45.901.066.036	45.901.066.036	61.458.249.997		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	100.00 Persen	17.557.162.933	17.324.403.613	17.327.017.127	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		SKPD(Kec.Semarang Timur)							
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.497.272.463	3.730.031.783	2.620.946.099	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00 Persen	100.00 Persen	24.564.805.090	24.564.805.090	41.228.964.411	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	182.330.000	182.330.000	184.222.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.00 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98.00 Persen	98.00 Persen	99.495.550	99.495.550	97.100.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				55.520.892.772	55.520.892.772	68.740.255.313		
7.01	KECAMATAN				55.520.892.772	55.520.892.772	68.740.255.313		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00 Persen	100.00 Persen	24.192.189.478	23.886.915.758	24.401.657.810	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.476.335.436	3.774.084.156	2.756.602.289	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	94 Persen	27.736.367.858	27.743.892.858	41.467.495.214	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Persen	16 Persen	33.600.000	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Persen	50 Persen	82.400.000	82.400.000	80.900.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNG PATI				64.176.920.572	64.176.920.572	77.092.648.583		
7.01	KECAMATAN				64.176.920.572	64.176.920.572	77.092.648.583		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	28.839.718.740	28.343.410.865	27.059.617.780	KECAMATAN GUNUNG PATI	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.059.518.452	4.555.826.327	3.537.164.009	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	31.052.354.023	31.052.354.023	46.219.710.476	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	111.129.357	111.129.357	135.306.318	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	114.200.000	114.200.000	140.850.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU				35.107.563.241	35.107.563.241	39.872.230.423		
7.01	KECAMATAN				35.107.563.241	35.107.563.241	39.872.230.423		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	100.00 Persen	14.972.935.350	14.755.346.950	14.184.988.477	KECAMATAN TUGU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	94 Persen	94 Persen	1.994.373.088	2.211.961.488	2.073.193.554	KECAMATAN TUGU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	17.977.014.803	17.977.014.803	23.458.458.392	KECAMATAN TUGU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	25 Persen	25 Persen	75.540.000	75.540.000	69.690.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	98 Persen	98 Persen	87.700.000	87.700.000	85.900.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN				62.087.257.480	62.087.257.480	75.495.090.953		
7.01	KECAMATAN				62.087.257.480	62.087.257.480	75.495.090.953		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	26.525.188.990	26.275.526.910	25.903.352.272	KECAMATAN MIJEN	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.660.619.290	3.910.281.370	2.896.938.180	KECAMATAN MIJEN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	31.722.449.200	31.722.449.200	46.502.934.911	KECAMATAN MIJEN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	87.000.000	87.000.000	106.375.830	KECAMATAN MIJEN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	92.000.000	92.000.000	85.489.760	KECAMATAN MIJEN	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK				62.468.337.286	61.968.337.286	82.332.431.249		
7.01	KECAMATAN				62.468.337.286	61.968.337.286	82.332.431.249		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	23.174.756.885	22.971.906.445	23.004.375.791	KECAMATAN GENUK	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.808.978.936	4.511.829.376	3.438.424.537	KECAMATAN GENUK	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	34.271.974.595	34.271.974.595	55.722.879.062	KECAMATAN GENUK	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	109.462.510	109.462.510	80.087.499	KECAMATAN GENUK	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	103.164.360	103.164.360	86.664.360	KECAMATAN GENUK	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				36.804.736.840	36.804.736.840	45.880.886.740		
7.01	KECAMATAN				36.804.736.840	36.804.736.840	45.880.886.740		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.831.003.090	15.674.964.290	16.039.852.665	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	96 Persen	3.524.842.750	3.680.881.550	2.524.839.698	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	17.172.400.000	17.172.400.000	27.041.667.037	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	194.516.000	194.516.000	193.652.340	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	81.975.000	81.975.000	80.875.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG				68.622.926.866	68.622.926.866	102.145.218.209		
7.01	KECAMATAN				68.622.926.866	68.622.926.866	102.145.218.209		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	22.332.817.726	22.068.201.206	22.340.532.504	KECAMATAN TEMBALANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100 %					Penambahan indikator sesuai dengan RPJMD, sehingga harus ada dalam target Perubahan
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100 %					Penambahan indikator sesuai dengan RPJMD, sehingga harus ada dalam target Perubahan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	4.768.688.740	5.033.305.260	3.683.254.827	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	41.365.120.400	41.365.120.400	75.970.430.878	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 %	25 %	60.000.000	60.000.000	54.700.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	80 %	80 %	96.300.000	96.300.000	96.300.000	KECAMATAN TEMBALANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI				34.836.828.344	34.836.828.344	47.971.091.178		
7.01	KECAMATAN				34.836.828.344	34.836.828.344	47.971.091.178		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	13.741.675.498	13.493.961.738	14.136.074.852	KECAMATAN CANDISARI	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	2.479.220.086	2.726.933.846	1.784.164.260	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan		2 angka					Penambahan indikator sesuai dengan RPJMD, sehingga

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
									harus ada dalam target Perubahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18.488.482.760	18.488.482.760	31.932.952.066	KECAMATAN CANDISARI	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	53.300.000	53.300.000	44.750.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	74.150.000	74.150.000	73.150.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				56.087.752.962	56.087.752.962	80.251.863.526		
7.01	KECAMATAN				56.087.752.962	56.087.752.962	80.251.863.526		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	21.186.671.844	20.999.425.284	21.189.714.369	KECAMATAN BANYUMANIK	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.484.355.230	3.671.601.790	2.525.710.538	KECAMATAN BANYUMANIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	31.147.675.888	31.147.675.888	56.301.938.619	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	45.450.000	45.450.000	32.400.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	223.600.000	223.600.000	202.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				59.337.863.016	59.337.863.016	85.802.172.777		
7.01	KECAMATAN				59.337.863.016	59.337.863.016	85.802.172.777		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	21.545.743.316	21.297.163.634	21.691.003.724	KECAMATAN NGALIYAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.716.382.820	3.964.962.502	2.768.376.546	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	33.818.554.050	33.818.554.050	61.029.037.416	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	176.082.830	176.082.830	219.105.090	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	81.100.000	81.100.000	94.650.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI				35.796.514.330	35.796.514.330	48.316.543.296		
7.01	KECAMATAN				35.796.514.330	35.796.514.330	48.316.543.296		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100.00 Persen	100.00 Persen	14.355.832.121	14.153.631.121	14.333.367.519	KECAMATAN GAYAMSARI	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	2.366.177.740	2.568.378.740	1.807.467.621	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18.847.102.469	18.847.102.469	31.973.958.306	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	153.602.000	153.602.000	129.749.850	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	73.800.000	73.800.000	72.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN				67.088.998.222	66.588.998.222	101.039.080.375		
7.01	KECAMATAN				67.088.998.222	66.588.998.222	101.039.080.375		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	100.00 Persen	22.884.304.442	22.697.274.362	22.695.247.777	KECAMATAN PEDURUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.269.079.180	3.956.109.260	3.359.873.934	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	94 Persen	39.435.010.000	39.435.010.000	74.661.178.744	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum- Pedurungan	25 Persen	25 Persen	479.604.600	479.604.600	312.873.600	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional- Pedurungan	50 Persen	50 Persen	21.000.000	21.000.000	9.906.320	KECAMATAN PEDURUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.612.948.231	30.612.948.231	27.521.387.863		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.612.948.231	30.612.948.231	27.521.387.863		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	9.246.686.000	9.072.012.600	7.550.572.223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 Indeks	2.30 Indeks	5.239.712.760	5.239.712.760	4.121.600.840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Indeks Kebebasan Sipil	68.00 angka	68.00 angka	6.668.605.000	6.684.208.880	7.348.550.177	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	59.00 indeks	59.00 indeks	2.695.909.260	2.727.982.940	2.602.112.010	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	71.50 indeks	2.936.000.000	2.967.424.240	2.927.062.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84.00 Persen	84.00 Persen	3.826.035.211	3.921.606.811	2.971.489.813	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
JUMLAH					5.577.911.388.674	5.699.427.188.188	6.464.761.394.136		

5.2.6 MATRIKS PERUBAHAN PAGU INDIKATIF PER BIDANG URUSAN PER PROGRAM PER KEGIATAN PER SUB KEGIATAN

Matriks perubahan target atau indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap kesesuaian RPJMD 2021-2026 dijabarkan di dalam tabel 5.6 berikut

TABEL 5.6
MATRIK PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PER PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				913.670.396.824	916.296.330.510	1.317.440.364.832		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				913.670.396.824	916.296.330.510	1.317.440.364.832		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %	722.458.568.800	718.917.968.760	892.866.392.730	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %					
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100 %	100 %	162.302.400	162.302.400	299.663.400	DINAS PENDIDIKAN	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %					
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	57.525.400	57.525.400	205.039.000	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan anggaran kegiatan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Swasta Gratis dan Kajian Bantuan Pendidikan
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.745.900	9.745.900	9.336.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.418.200	9.418.200	8.908.800	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.745.900	9.745.900	1.244.800	DINAS PENDIDIKAN	Pengurangan anggaran
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.418.200	9.418.200	8.908.800	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.855.400	6.855.400	6.744.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	9.593.400	9.593.400	9.482.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	693.086.756.560	689.546.156.520	865.388.787.093	DINAS PENDIDIKAN	
		Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %					
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	5667 Orang/bulan	687.197.217.000	683.001.470.480	858.864.262.053	DINAS PENDIDIKAN	Pengurangan Anggaran
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	5.859.632.160	6.514.778.640	6.516.878.640	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja 2. Penambahan PJPL
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.932.800	9.932.800	7.546.400	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19.974.600	19.974.600	100.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	250.023.400	250.023.400	274.158.915	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250.023.400	250.023.400	274.158.915	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan belanja aplikasi Sumringah 2. Pengurangan dari Sewa Lahan KAI 3. Penambahan untuk Kajian Retribusi
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	100 %	2.554.556.400	2.554.556.400	1.358.332.672	DINAS PENDIDIKAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.000.000	135.000.000	85.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	225.000.000	225.000.000	195.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	225.000.000	225.000.000	196.618.000	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan Belanja ATK di ULD, RDRM dan Koorsatpen
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	225.000.000	225.000.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	125.000.000	52.576.241	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.023.636.400	1.023.636.400	704.038.431	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja Mamin 2. Penambahan Belanja SPPD Dinas
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	595.920.000	595.920.000	100.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	382.366.240	382.366.240	188.564.977	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	382.366.240	382.366.240	188.564.977	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja untuk ULD 2. Pengurangan Efisiensi Belanja Modal
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	22.762.463.800	22.762.463.800	23.310.256.790	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	21.255.600.000	21.255.600.000	21.255.600.000	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	1.506.863.800	1.506.863.800	2.054.656.790	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	3.260.100.000	3.260.100.000	2.046.628.883	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	214.000.000	214.000.000	202.036.296	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	127 Unit	950.000.000	950.000.000	825.092.871	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.516.100.000	1.516.100.000	485.460.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	500.000.000	500.000.000	454.039.716	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan belanja
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	80.000.000	80.000.000	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.21 %	86.21 %	122.739.321.424	125.365.255.110	354.125.064.875	DINAS PENDIDIKAN	
		APK SD/MI	111.73 %	111.73 %					
		APK SMP/MTs	115.65 %	115.65 %					
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12 lembaga	12 lembaga					
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	63.150.348.424	63.576.782.110	195.636.170.764	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	5.997.960.000	5.997.960.000	100.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	1.943.880.000	1.943.880.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	493.880.000	493.880.000	100.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	695.250.000	695.250.000	853.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, Pengawasan, Pengelolaan 2. Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	1.259.987.000	572.487.068	6.359.684.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	1.050.000.000	1.050.000.000	1.010.479.120	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	1600 Orang	740.000.000	775.000.000	995.208.087	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan untuk Peningkatan Kompetensi Guru Negeri dan Swasta SD 2. Penambahan untuk lomba pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 3. Pergeseran internal untuk PPG Daljab bagi guru agama yang ada di bawah kewenangan Pemkot Semarang 4. Penambahan untuk Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris SD
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	900.000.000	900.000.000	805.796.300	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		508 Satuan Pendidikan			116.441.190.918	DINAS PENDIDIKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 1. Pergeseran Internal untuk BOSP Reguler dan BOSP Kinerja 2. Penambahan Belanja untuk Silpa BOSP Kinerja 3. Penambahan Anggaran untuk Pengembalian atas Pemeriksaan
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	508 Orang	508 Orang	290.000.000	290.000.000	251.826.240	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	4500 Paket	565.000.000	1.252.499.932	1.252.499.932	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	15.093.283.984	15.093.283.984	15.089.283.984	DINAS PENDIDIKAN	Pengurangan anggaran DIF, Efisiensi belanja modal
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	15 Unit	3.043.880.000	3.043.880.000	4.352.999.997	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan OM, Penanganan Banjir, Pengawasan, Pengelolaan 2. Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	1.238.056.000	1.238.056.000	1.206.336.815	DINAS PENDIDIKAN	Kajian Pelaksanaan 6 hari Sekolah
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85 Ruang	12.581.671.440	12.581.671.440	32.907.880.400	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja Rehabilitasi Ruang Kelas, Pengawasan, DED Ruang Kelas untuk Tahun 2026, Pengelolaan, Pengalihan untuk Rehab Ruang Kelas (DIF) 2. Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134000 Peserta Didik	134000 Peserta Didik	17.257.500.000	17.648.933.686	13.709.784.971	DINAS PENDIDIKAN	Pengurangan P BOSP SD Swasta dan Beasiswa Miskin SD/MI
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	50.225.565.000	52.409.065.000	113.806.512.432	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	7.099.320.000	8.099.320.000	106.938.920	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	999.320.000	999.320.000	1.099.320.000	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan untuk DED Pembangunan Lab SMPN 48
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	50 Ruang	4.569.320.000	4.569.320.000	5.546.570.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan DED Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 11, SMPN 15, SMPN 18, SMPN 19, SMPN 22, SMPN 31, SMPN 32, SMPN 39, SMPN 41, dan SMPN 44 2. Efisiensi Belanja Modal 3. Pengurangan DIF
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	2.499.320.000	2.499.320.000	2.502.156.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan OM SMP, DED Rehab Perpus SMPN 4, SMPN 13, SMPN 24, SMPN 28, dan SMPN 33 2. Efisiensi belanja modal
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	199.320.000	45.929.500	100.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4568 Peserta Didik	4568 Peserta Didik	15.844.200.000	17.027.700.000	14.509.463.640	DINAS PENDIDIKAN	Pengurangan P BOSP SMP Swasta dan Beasiswa Siswa Miskin SMP/MTs/SMA/SMK, Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	1.110.000.000	1.110.000.000	1.102.289.875	DINAS PENDIDIKAN	1. Pergeseran internal 2. Penambahan untuk GSI
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	900 Orang	300.000.000	300.000.000	382.002.970	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan Belanja
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	230 Satuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	39.500.000	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		230 Satuan Pendidikan		-	72.591.502.446	DINAS PENDIDIKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 1. Pergeseran internal 2. Penambahan Belanja 3. Pemeriksaan Inpektorat
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	190 Orang	315.000.000	315.000.000	221.419.610	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	1.710.000.000	1.710.000.000	1.319.356.540	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	30 Ruang	14.965.445.000	14.965.445.000	13.606.820.000	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	46 Paket	265.000.000	418.390.500	263.172.431	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	299.320.000	299.320.000	515.900.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	8.635.768.000	8.651.768.000	36.789.132.349	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2.197.280.000	2.197.280.000	2.828.280.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja 2. Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	215.000.000	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan Belanja
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	482.280.000	482.280.000	656.280.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja 2. Pergeseran dari SUB keG lain
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2458 Peserta Didik	2458 Peserta Didik	3.228.600.000	3.279.600.000	3.115.847.540	DINAS PENDIDIKAN	1. Pengurangan P BOSP TK Swasta 2. Penambahan untuk kegiatan Pendidikan Karakter PAUD
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang	200.000.000	200.000.000	246.312.640	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan Belanja
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	260 Satuan Pendidikan	300.000.000	370.000.000	262.702.360	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		689 Satuan Pendidikan		-	27.012.920.000	DINAS PENDIDIKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pergeseran Internal
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	247.280.000	247.280.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan DED TKN Sumurrejo 2. Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	69.368.000	268.008.000	71.139.299	DINAS PENDIDIKAN	Efisiensi Belanja
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	624.320.000	624.320.000	830.320.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja TKN Kintelan 2. Efisiensi Belanja Modal
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	208.640.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	42563 Satuan Pendidikan	42563 Satuan Pendidikan	1.035.000.000	930.000.000	1.204.330.510	DINAS PENDIDIKAN	1. Penambahan Belanja Bunda PAUD 2. Penambahan Belanja kegiatan Pendidikan Karakter Usia Dini
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang	38.000.000	38.000.000	261.000.000	DINAS PENDIDIKAN	Rehab ruang kelas TKN Banyumanik
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100 %	100 %	727.640.000	727.640.000	7.893.249.330	DINAS PENDIDIKAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000	40.000.000	30.550.000	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	100.000.000	100.000.000	82.455.040	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	150.000.000	150.000.000	32.159.600	DINAS PENDIDIKAN	Pergeseran internal
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		40 Satuan Pendidikan		-	7.412.170.000	DINAS PENDIDIKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pergeseran Internal
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	39.000.000	39.000.000	39.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	175.000.000	175.000.000	73.274.690	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	223.640.000	223.640.000	223.640.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100 %	100 %	685.000.000	685.000.000	122.098.620	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %	100 %					
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	300.000.000	300.000.000	58.700.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	100.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6585 Buku	6585 Buku	150.000.000	150.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50.000.000	50.000.000	48.500.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	100.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	385.000.000	385.000.000	63.398.620	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	60.000.000	14.574.310	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4500 Buku	4500 Buku	150.000.000	150.000.000	100.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000	175.000.000	48.724.310	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90,29 %	90,29 %	67.387.506.600	70.928.106.640	70.193.815.687	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	67.387.506.600	70.928.106.640	70.193.815.687	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	18 Dokumen	62.303.506.600	65.844.106.640	65.529.015.687	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	5.084.000.000	5.084.000.000	4.664.800.000	DINAS PENDIDIKAN	1. Pengurangan belanja transport PAUD 2. Penambahan belanja untuk Pengiriman Diklat Calon Kepala Sekolah
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	100 %	400.000.000	400.000.000	132.992.920	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100 %	100 %					
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	18.175.000	DINAS PENDIDIKAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	13.175.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100 %	250.000.000	250.000.000	114.817.920	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	150.000.000	150.000.000	21.817.920	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000	100.000.000	93.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				511.271.026.895	532.810.552.739	632.276.617.440		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				511.271.026.895	532.810.552.739	632.276.617.440		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	100.00 Persen	364.482.429.756	363.989.911.876	380.524.164.121	DINAS KESEHATAN	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	131.685.200	131.685.200	107.259.950	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	51.078.400	51.078.400	48.703.400	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	7.468.800	7.468.800	7.468.800	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	8.908.800	8.908.800	8.908.800	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3.501.600	3.501.600	3.501.600	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.969.600	2.969.600	2.969.600	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	7.758.000	7.758.000	7.758.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	50.000.000	27.949.750	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	270.841.159.400	269.673.483.480	263.038.891.093	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000 Orang/bulan	2000 Orang/bulan	270.094.013.000	268.926.337.080	262.418.762.693	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	12 Dokumen	731.688.000	731.688.000	604.670.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	5.040.400	5.040.400	5.040.400	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	5.152.800	5.152.800	5.152.800	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	5.265.200	5.265.200	5.265.200	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 persentase	100 persentase	2.123.875.975	2.308.875.975	2.621.638.473	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	81.803.000	81.803.000	50.012.600	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	22.031.340	22.031.340	42.573.660	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	96.781.579	96.781.579	53.961.560	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	3.840.000	3.840.000	3.840.000	DINAS KESEHATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	115 Laporan	1.023.792.740	1.208.792.740	855.638.212	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	5 Dokumen	895.627.316	895.627.316	1.615.612.441	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persentase	100 persentase	984.660.947	984.660.947	6.472.924.718	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	984.660.947	984.660.947	6.472.924.718	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persentase	100 persentase	2.898.571.501	3.071.729.541	2.772.843.873	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	1.000.000	1.000.000	200.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	1.149.294.501	1.149.294.501	955.139.501	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	1.748.277.000	1.921.435.040	1.817.504.372	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 persentase	100 persentase	4.622.254.921	4.939.254.921	4.846.044.928	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	211.765.763	211.765.763	192.915.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	2.392.552.008	2.392.552.008	2.238.102.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	788 Unit	464.359.350	464.359.350	695.630.134	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1.500.000.000	1.817.000.000	1.665.819.994	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	53.577.800	53.577.800	53.577.800	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	89 persentase	89 persentase	82.880.221.812	82.880.221.812	100.664.561.086	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.832.150.000	1.832.150.000	2.080.392.157	PUSKESMAS PONCOL	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.393.479.000	1.393.479.000	1.821.339.250	PUSKESMAS MIROTO	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.681.957.000	2.681.957.000	3.241.377.229	PUSKESMAS BANDARHARJO	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.020.418.000	2.020.418.000	2.178.428.046	PUSKESMAS BULULOR	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.274.924.000	2.274.924.000	3.191.810.316	PUSKESMAS HALMAHERA	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.524.477.000	1.524.477.000	1.726.402.500	PUSKESMAS BUGANGAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.752.646.000	2.752.646.000	3.113.719.611	PUSKESMAS KARANGDORO	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.437.368.000	2.437.368.000	2.746.643.413	PUSKESMAS PANDANARAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.582.775.000	1.582.775.000	1.747.762.657	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.351.352.000	1.351.352.000	1.473.469.482	PUSKESMAS KARANG AYU	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.761.530.000	1.761.530.000	1.926.638.608	PUSKESMAS LEBDOSARI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.766.310.000	1.766.310.000	2.104.965.445	PUSKESMAS MANYARAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.521.400.000	1.521.400.000	1.618.969.972	PUSKESMAS KROBOKAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.269.502.000	1.269.502.000	1.619.757.913	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	3.229.765.812	3.229.765.812	3.280.264.497	PUSKESMAS GAYAMSARI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.910.967.000	1.910.967.000	1.869.583.064	PUSKESMAS CANDILAMA	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.492.750.000	1.492.750.000	1.826.950.800	PUSKESMAS KAGOK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.024.457.000	2.024.457.000	2.264.700.473	PUSKESMAS PENGANDAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	1.947.065.000	1.947.065.000	2.330.249.450	PUSKESMAS GENUK	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	4.011.754.000	4.011.754.000	4.790.054.320	PUSKESMAS BANGETAYU	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	2.682.767.000	2.682.767.000	3.968.781.892	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.403.256.000	3.403.256.000	3.912.995.122	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.060.674.000	4.060.674.000	5.061.247.676	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.195.088.000	2.195.088.000	3.114.061.134	PUSKESMAS ROWOSARI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.932.999.000	1.932.999.000	2.413.615.017	PUSKESMAS NGESREP	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.989.844.000	1.989.844.000	2.408.817.347	PUSKESMAS SRONDOL	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.970.333.000	1.970.333.000	2.406.196.148	PUSKESMAS PADANGSARI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.556.062.000	1.556.062.000	1.961.617.924	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.170.097.000	3.170.097.000	4.353.333.179	PUSKESMAS GUNUNGPATI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.642.164.000	2.642.164.000	3.361.503.021	PUSKESMAS MIJEN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	1.540.073.000	1.540.073.000	1.619.764.139	PUSKESMAS TAMBAKAJI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.736.677.000	1.736.677.000	2.146.485.117	PUSKESMAS KARANGMALANG	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.234.088.000	3.234.088.000	4.719.065.878	PUSKESMAS NGALIYAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.417.028.000	1.417.028.000	1.858.743.309	PUSKESMAS PURWOYOSO	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.456.833.000	1.456.833.000	2.019.373.162	PUSKESMAS MANGKANG	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.366.666.000	1.366.666.000	1.520.499.554	PUSKESMAS KARANG ANYAR	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.990.208.000	1.990.208.000	2.140.737.872	PUSKESMAS SEKARAN	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.748.318.000	1.748.318.000	3.174.244.392	UPTD Laboratorium Kesehatan	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000	1.000.000.000	850.000.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000	1.000.000.000	700.000.000	PUSKESMAS BULUSAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	145.634.672.619	167.623.716.343	248.447.225.200	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persentase	100 persentase	40.830.054.599	58.863.117.149	100.548.411.738	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	20.916.000.000	20.916.000.000	21.577.853.245	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0 Unit	1.325.000.000	1.325.000.000	2.075.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	15.126.548.774	30.659.611.324	48.556.146.399	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0 Paket	3.462.505.825	5.962.505.825	28.339.412.094	DINAS KESEHATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 persentase	100 persentase	101.088.199.816	105.026.180.990	144.812.831.408	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	65.700.000	76.700.000	34.400.000	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		756 Orang		-	48.600.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		750 Orang		-	43.800.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1260 Orang		-	74.400.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		747 Orang		-	63.850.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		536 Orang		-	28.200.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		450 Orang		-	48.150.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		450 Orang		-	27.000.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		690 Orang		-	49.500.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		528 Orang		-	33.000.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		720 Orang		-	43.200.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		640 Orang		-	32.000.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		624 Orang		-	46.800.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		336 Orang		-	20.400.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		480 Orang		-	28.800.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		980 Orang		-	63.700.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		540 Orang		-	32.400.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		480 Orang		-	24.600.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		462 Orang		-	41.600.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1146 Orang		-	66.750.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1315 Orang			-	72.000.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		950 Orang			-	50.000.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		912 Orang			-	40.200.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1440 Orang			-	72.000.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		612 Orang			-	36.000.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		540 Orang			-	30.600.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		432 Orang			-	29.100.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300 Orang			-	23.400.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		400 Orang			-	30.000.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1848 Orang			-	99.000.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1200 Orang			-	72.000.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		183 Orang			-	41.600.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		570 Orang			-	96.000.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		368 Orang			-	27.600.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		735 Orang			-	87.300.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		204 Orang			-	29.700.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		208 Orang			-	39.200.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1350 Orang			-	81.000.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		66 Orang			-	29.700.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	31.300.000	40.300.000	11.500.000	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	23.600.000	23.600.000	10.900.000	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	10.750.000	10.750.000	3.900.000	DINAS KESEHATAN		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	66.576.950	72.576.950	48.800.000	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		524 Orang		-	106.050.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		510 Orang		-	91.350.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		278 Orang		-	63.750.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		516 Orang		-	96.000.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8718 Orang		-	79.950.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3368 Orang		-	27.450.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2411 Orang		-	28.200.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		276 Orang		-	65.700.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		222 Orang		-	41.850.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		436 Orang		-	32.700.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		292 Orang		-	69.000.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		217 Orang		-	49.650.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4476 Orang		-	42.600.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		114 Orang		-	17.700.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1066 Orang		-	79.950.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		482 Orang		-	85.950.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		207 Orang		-	46.350.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		567 Orang		-	42.525.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		262 Orang		-	69.450.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8257 Orang		-	45.750.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		240 Orang			-	74.250.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10644 Orang			-	42.600.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15500 Orang			-	141.900.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1092 Orang			-	81.900.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2795 Orang			-	33.150.000	PUSKESMAS NGRESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8 Orang			-	40.350.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8 Orang			-	68.700.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3893 Orang			-	40.800.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		327 Orang			-	69.300.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1540 Orang			-	115.500.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3175 Orang			-	22.350.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		139 Orang			-	20.850.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		666 Orang			-	33.300.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		6184 Orang			-	55.950.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		700 Orang			-	31.950.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		110 Orang			-	25.950.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		324 Orang			-	62.400.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3640 Orang			-	43.350.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1726 Orang	1726 Orang	200.658.560	207.658.560		64.777.115	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	175.550.928	31.000.000		19.900.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	160 Orang	17.134.157	17.134.157		7.966.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	160 Orang	17.134.157	17.134.157		7.966.000	DINAS KESEHATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	11.145.701	11.145.701	4.373.000	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		38 Orang		-	2.850.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		30 Orang		-	2.250.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		12 Orang		-	10.800.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		27 Orang		-	2.025.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		48 Orang		-	3.600.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		11 Orang		-	9.750.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		18 Orang		-	2.700.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		30 Orang		-	4.500.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		24 Orang		-	3.600.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		36 Orang		-	2.700.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		96 Orang		-	7.200.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		240 Orang		-	18.000.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		12 Orang		-	1.800.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		60 Orang		-	9.000.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		6 Orang		-	5.400.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		7 Orang		-	2.100.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		30 Orang		-	4.500.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		24 Orang		-	1.800.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		24 Orang		-	3.600.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		205 Orang		-	2.700.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		120 Orang			-	9.000.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		288 Orang			-	4.500.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		9 Orang			-	8.100.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		120 Orang			-	9.000.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		7 Orang			-	1.050.000	PUSKESMAS NGSREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		12 Orang			-	5.400.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		6 Orang			-	900.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		6 Orang			-	2.700.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		348 Orang			-	26.100.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		24 Orang			-	1.800.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		33 Orang			-	3.600.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		25 Orang			-	3.750.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		26 Orang			-	1.950.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		43 Orang			-	1.800.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		43 Orang			-	1.500.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		43 Orang			-	1.800.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		10 Orang			-	9.000.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		94 Orang			-	1.800.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38490 Orang	38490 Orang	208.401.279	208.401.279		87.243.419	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		144 Orang			-	10.800.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		128 Orang			-	9.600.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		143 Orang			-	14.850.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		422 Orang			-	31.650.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		56 Orang			-	8.400.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		59 Orang			-	14.850.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		12 Orang			-	8.775.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		80 Orang			-	15.000.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		80 Orang			-	6.000.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		346 Orang			-	25.950.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		150 Orang			-	11.250.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		128 Orang			-	9.600.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		114 Orang			-	8.550.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		85 Orang			-	17.250.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		45 Orang			-	6.750.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		54 Orang			-	8.100.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		132 Orang			-	9.900.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		88 Orang			-	9.900.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		96 Orang			-	7.200.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1588 Orang			-	5.625.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		130 Orang			-	9.750.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		2496 Orang			-	29.250.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		180 Orang			-	18.900.000	PUSKESMAS KEDUNGMONDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		216 Orang			-	16.200.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		25 Orang			-	3.750.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		179 Orang			-	6.000.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		35 Orang			-	13.425.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		337 Orang			-	6.450.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		140 Orang			-	10.500.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		360 Orang			-	27.000.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		252 Orang			-	2.550.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		64 Orang			-	7.500.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		44 Orang			-	3.300.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1558 Orang			-	15.150.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		319 Orang			-	11.700.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		325 Orang			-	4.500.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		40 Orang			-	7.500.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		132 Orang			-	2.100.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54000 Orang	54000 Orang	105.412.300	105.412.300		74.581.519	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	2.670.000.000	2.828.550.928		3.964.860.109	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		849 Dokumen			-	157.203.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		618 Dokumen			-	118.964.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1030 Dokumen			-	530.464.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		11515 Dokumen			-	217.045.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		59 Dokumen			-	152.958.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		22 Dokumen			-	121.527.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	312.384.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		446 Dokumen			-	108.297.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		658 Dokumen			-	141.929.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		43 Dokumen			-	99.740.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		769 Dokumen			-	121.221.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		629 Dokumen			-	101.094.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		424 Dokumen			-	116.545.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		21 Dokumen			-	100.241.000	PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		918 Dokumen			-	308.005.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		762 Dokumen			-	214.612.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		849 Dokumen			-	146.823.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		195 Dokumen			-	279.290.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		534 Dokumen			-	169.436.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	321.867.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		695 Dokumen			-	228.382.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	238.559.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		48 Dokumen			-	210.462.000	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		7532 Dokumen			-	367.980.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		604 Dokumen			-	121.968.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		41 Dokumen			-	192.873.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	193.590.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100 Dokumen			-	186.842.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		951 Dokumen			-	199.110.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		8828 Dokumen			-	250.239.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	95.861.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		994 Dokumen			-	186.128.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		3315 Dokumen			-	165.780.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	279.965.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	135.324.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen			-	123.818.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		68 Dokumen			-	244.955.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		3088 Dokumen			-	114.440.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000	19.200.000		79.205.270	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		14 Dokumen			-	2.100.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		25 Dokumen			-	1.875.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen			-	3.750.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	7.425.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		8 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		47 Dokumen			-	4.650.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	750.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen			-	1.500.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen			-	450.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen			-	2.250.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10 Dokumen			-	2.250.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			-	5.625.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		6 Dokumen			-	4.200.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		15 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.275.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			-	900.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4 Dokumen			-	600.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		82 Dokumen			-	12.450.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		60 Dokumen			-	4.500.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		30 Dokumen			-	1.500.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS NGALYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		9 Dokumen			-	1.875.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		15 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	214.078.770	214.078.770		178.176.957	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		63 Dokumen			-	5.850.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		60 Dokumen			-	9.000.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		55 Dokumen			-	8.250.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		136 Dokumen			-	12.450.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		33 Dokumen			-	11.250.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		77 Dokumen			-	13.500.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		62 Dokumen			-	4.650.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		79 Dokumen			-	5.925.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		95 Dokumen			-	14.250.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		4 Dokumen			-	1.650.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		78 Dokumen			-	9.450.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		49 Dokumen			-	5.625.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		44 Dokumen			-	8.700.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		16 Dokumen			-	10.275.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		61 Dokumen			-	8.925.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		112 Dokumen			-	14.625.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		81 Dokumen			-	12.150.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		118 Dokumen			-	8.025.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		77 Dokumen			-	10.275.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	13.200.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		80 Dokumen			-	12.000.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	9.150.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		48 Dokumen			-	7.650.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100 Dokumen			-	15.000.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		105 Dokumen			-	18.750.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		84 Dokumen			-	9.750.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	11.250.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		155 Dokumen			-	15.375.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		126 Dokumen			-	18.900.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		360 Dokumen			-	27.000.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	12.225.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		60 Dokumen			-	6.900.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		140 Dokumen			-	6.975.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	10.950.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	5.850.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen			-	6.750.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		15 Dokumen			-	10.800.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		35 Dokumen			-	2.625.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	155.503.410	182.503.410		502.489.625	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	89.850.000	89.850.000		31.334.925	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	188.697.674	188.697.674		222.088.000	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		726 Dokumen			-	78.075.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		418 Dokumen			-	62.700.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		872 Dokumen			-	66.000.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		413 Dokumen			-	49.950.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		46 Dokumen			-	33.600.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		40 Dokumen			-	31.200.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	21.750.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		246 Dokumen			-	33.300.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		119 Dokumen			-	29.100.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		26 Dokumen			-	41.550.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		324 Dokumen			-	36.717.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		164 Dokumen			-	26.625.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		170 Dokumen			-	33.075.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		14 Dokumen			-	13.200.000	PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		660 Dokumen			-	63.000.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		122 Dokumen			-	29.550.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		241 Dokumen			-	31.125.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		8 Dokumen			-	72.225.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		88 Dokumen			-	45.750.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	38.700.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		197 Dokumen			-	64.800.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	134.775.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		10 Dokumen			-	23.160.000	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		122 Dokumen			-	25.200.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		152 Dokumen			-	15.300.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		69 Dokumen			-	13.200.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	32.232.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		312 Dokumen			-	46.800.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		159 Dokumen			-	24.675.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		128 Dokumen			-	9.600.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	16.125.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		60 Dokumen			-	73.800.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		957 Dokumen			-	47.850.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	79.350.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	43.050.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen			-	25.050.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		22 Dokumen			-	11.250.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1280 Dokumen			-	96.000.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Orang			-	900.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Orang			-	900.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		64 Orang			-	9.600.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		4 Orang			-	300.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		48 Orang			-	3.900.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		76 Orang			-	5.700.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		18 Orang			-	9.000.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		128 Orang			-	19.200.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		152 Orang			-	11.400.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		32 Orang			-	2.400.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		60 Orang			-	4.500.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		156 Orang			-	11.700.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		132 Orang			-	9.900.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		20 Orang			-	1.500.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		114 Orang			-	8.550.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		360 Orang		-	1.800.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		92 Orang		-	13.800.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Orang		-	1.500.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		60 Orang		-	4.500.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		205 Orang		-	3.000.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		52 Orang		-	3.900.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		24 Orang		-	750.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10 Orang		-	3.000.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		92 Orang		-	6.900.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		108 Orang		-	8.100.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		8 Orang		-	11.400.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		200 Orang		-	600.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Orang		-	3.600.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		84 Orang		-	6.300.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		48 Orang		-	3.600.000	PUSKESMAS MLJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		15 Orang		-	3.300.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Orang		-	900.000	PUSKESMAS TAMBKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		6 Orang		-	450.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		4 Orang		-	1.800.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		20 Orang		-	3.000.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		20 Orang		-	1.500.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		80 Orang			-	6.000.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		94 Orang			-	900.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 Orang	120 Orang	17.053.431	17.053.431		6.653.969	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	100 Dokumen	845.510.875	1.047.119.315		667.918.440	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		190 Dokumen			-	59.135.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		118 Dokumen			-	52.600.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		509 Dokumen			-	94.750.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		93 Dokumen			-	72.672.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		51 Dokumen			-	78.150.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		42 Dokumen			-	68.750.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	94.025.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		291 Dokumen			-	104.175.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		200 Dokumen			-	84.575.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		62 Dokumen			-	58.725.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		313 Dokumen			-	99.700.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		456 Dokumen			-	114.468.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		244 Dokumen			-	98.750.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		69 Dokumen			-	77.325.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		100 Dokumen			-	82.900.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		226 Dokumen			-	86.625.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		335 Dokumen			-	111.375.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	90.900.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		326 Dokumen			-	83.675.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	176.525.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		361 Dokumen			-	91.950.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	84.624.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	232.375.000	PUSKESMAS KEDUNGMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1120 Dokumen			-	195.000.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		244 Dokumen			-	76.675.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		77 Dokumen			-	83.230.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	98.573.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		227 Dokumen			-	65.703.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		550 Dokumen			-	112.075.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1977 Dokumen			-	129.683.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	128.591.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		575 Dokumen			-	87.105.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1161 Dokumen			-	87.075.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	81.725.000	PUSKESMAS NGALYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	73.900.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen			-	94.382.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		133 Dokumen			-	113.425.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		516 Dokumen			-	44.950.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	78.885.955.300	46.301.295.300	60.081.141.485	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 Paket		-	572.454.000	DINAS KESEHATAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	310.164.340	31.084.824.340	30.911.892.518	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		231 Dokumen		-	140.591.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		50 Dokumen		-	130.384.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		46 Dokumen		-	219.468.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		34 Dokumen		-	163.153.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		33 Dokumen		-	128.050.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		36 Dokumen		-	120.613.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		40 Dokumen		-	138.922.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		46 Dokumen		-	135.585.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		70 Dokumen		-	122.593.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		35 Dokumen		-	110.071.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		54 Dokumen		-	128.219.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		222 Dokumen		-	122.944.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		35 Dokumen		-	118.105.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		41 Dokumen		-	110.525.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		250 Dokumen		-	183.420.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		40 Dokumen		-	143.693.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		264 Dokumen		-	137.534.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		14 Dokumen		-	164.924.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		298 Dokumen			-	147.753.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	194.894.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		50 Dokumen			-	159.043.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	171.823.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		30 Dokumen			-	214.220.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		70 Dokumen			-	206.277.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		58 Dokumen			-	109.663.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		36 Dokumen			-	128.793.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	141.181.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		189 Dokumen			-	127.682.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		470 Dokumen			-	181.347.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1407 Dokumen			-	201.085.000	PUSKESMAS MJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	111.717.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		40 Dokumen			-	137.788.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		2366 Dokumen			-	118.310.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	181.755.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	113.282.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen			-	119.180.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		31 Dokumen			-	157.193.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		424 Dokumen			-	119.142.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen	7.224.164.507	12.696.537.241		13.941.412.578	DINAS KESEHATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.525.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		6 Dokumen			-	10.800.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	6.150.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.150.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	5.700.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	6.075.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	5.700.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	10.650.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.225.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	7.625.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	8.250.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.000.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	7.200.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	8.025.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.375.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		8 Dokumen			-	6.825.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	6.600.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	8.325.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	8.625.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12 Dokumen			-	10.575.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.900.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	14.700.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	13.935.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		4 Dokumen			-	14.771.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		6 Dokumen			-	7.050.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	5.250.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	7.950.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	7.200.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	11.175.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		90 Dokumen			-	9.900.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		54 Dokumen			-	7.500.000	PUSKESMAS TAMBKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		146 Dokumen			-	7.275.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12 Dokumen			-	8.850.000	PUSKESMAS NGALYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	10.275.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Dokumen			-	9.300.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000		1.463.951.586	UPTD Instalasi Farmasi	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000	500.000.000		381.137.960	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	500.000.000	500.000.000		426.776.610	PUSKESMAS BULUSAN	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 Unit	39 Unit	32.000.000	32.000.000		63.959.100	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	18.650.000	18.650.000		7.600.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen	42.275.000	42.275.000		24.910.141	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	6.685.160.648	6.685.160.648		5.955.461.845	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6527 Orang	6527 Orang	46.429.000	46.429.000		18.093.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1307 Orang	1307 Orang	78.291.321	78.291.321		31.307.542	DINAS KESEHATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45 Orang	45 Orang	31.843.000	31.843.000	20.632.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		4 Dokumen			5.270.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		33 Dokumen			8.250.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		24 Dokumen			10.400.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		10 Dokumen			14.596.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		10 Dokumen			8.050.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		20 Dokumen			50.500.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		3 Dokumen			4.450.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		4 Dokumen			3.850.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		4 Dokumen			3.850.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		10 Dokumen			13.600.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		5 Dokumen			6.250.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		38 Dokumen			15.050.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		2 Dokumen			16.700.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		20 Dokumen			49.600.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		5 Dokumen			10.250.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		22 Dokumen			8.225.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		30 Dokumen			8.050.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		8 Dokumen			15.600.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		8 Dokumen			10.400.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			18.700.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		4 Dokumen			-	4.600.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	9.950.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		5 Dokumen			-	6.150.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		8 Dokumen			-	5.600.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		290 Dokumen			-	35.550.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	28.540.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	25.400.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		128 Dokumen			-	11.625.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		45 Dokumen			-	6.775.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		119 Dokumen			-	7.050.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	29.150.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		7 Dokumen			-	6.295.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		471 Dokumen			-	23.568.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	24.300.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	23.125.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen			-	33.750.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		32 Dokumen			-	25.850.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		69 Dokumen			-	35.675.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	100.008.508	100.008.508		282.361.694	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		3 Dokumen			-	225.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		4 Dokumen			-	300.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		6 Dokumen			-	900.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		6 Dokumen			-	450.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		3 Dokumen			-	225.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	222.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	300.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		8 Dokumen			-	1.200.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		4 Dokumen			-	300.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		512 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		8 Dokumen			-	1.200.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen			-	1.500.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		7 Dokumen			-	525.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		3 Dokumen			-	225.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		10 Dokumen			-	1.563.000	PUSKESMAS KEDUNGMONDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		4 Dokumen			-	1.125.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		3 Dokumen			-	225.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		4 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	300.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		4 Dokumen			-	372.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		3 Dokumen			-	225.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		5 Dokumen			-	375.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen			-	300.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen			-	930.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen			-	150.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		3 Dokumen			-	225.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen			-	75.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		36 Dokumen			-	2.700.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		40 Dokumen			-	3.000.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		24 Dokumen			-	3.600.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		11 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		120 Dokumen			-	9.000.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	3.600.000	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		22 Dokumen			-	1.650.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		432 Dokumen			-	32.400.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		132 Dokumen			-	9.900.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		20 Dokumen			-	16.500.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		22 Dokumen			-	1.650.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		24 Dokumen			-	2.700.000	PUSKESMAS NGESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		48 Dokumen			-	1.500.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		4250 Dokumen			-	3.600.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN	
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		36 Dokumen			-	2.700.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		48 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1859 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		24 Dokumen			-	1.800.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		36 Dokumen			-	2.700.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase faskes (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang telah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan sesuai standar	100 persentase	100 persentase	2.121.599.420	2.139.599.420	1.876.467.038	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	2.121.599.420	2.139.599.420	1.876.467.038	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 persentase	100 persentase	1.594.818.784	1.594.818.784	1.209.515.016	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit	0 Unit	20.000.000	20.000.000	18.500.000	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	39 Unit	1.119.818.784	1.119.818.784	959.017.831	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	455.000.000	455.000.000	231.997.185	DINAS KESEHATAN		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	581.924.520	581.924.520	1.977.490.893	DINAS KESEHATAN		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	100 persentase	100 persentase	265.306.748	265.306.748	249.290.620	DINAS KESEHATAN		
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	22.381.000	22.381.000	13.300.000	DINAS KESEHATAN		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0 Orang	80.657.748	80.657.748	67.912.520	DINAS KESEHATAN		
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	162.268.000	162.268.000	168.078.100	DINAS KESEHATAN		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 persentase	100 persentase	316.617.772	316.617.772	1.728.200.273	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang	316.617.772	316.617.772	1.720.636.273	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		174 Orang		-	7.564.000	PUSKESMAS KARANGMALANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	97.00 Persen	260.000.000	287.000.000	620.980.734	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100 persentase	100 persentase	97.476.370	97.476.370	31.088.564	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen	0 Dokumen	97.476.370	97.476.370	31.088.564	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 persentase	100 persentase	69.338.290	125.134.880	418.023.200	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	0 Dokumen	69.338.290	125.134.880	418.023.200	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 persentase	100 persentase	93.185.340	64.388.750	171.868.970	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit	0 Unit	93.185.340	64.388.750	171.868.970	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	100.00 Persen	312.000.000	328.000.000	706.756.492	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 persentase	100 persentase	162.000.000	162.000.000	84.751.592	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	162.000.000	162.000.000	84.751.592	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 persentase	100 persentase	150.000.000	166.000.000	622.004.900	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000	166.000.000	392.076.900	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen		-	5.400.000	PUSKESMAS PONCOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen		-	2.650.000	PUSKESMAS MIROTO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		8 Dokumen		-	6.300.000	PUSKESMAS BANDARHARJO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		5 Dokumen		-	6.050.000	PUSKESMAS BULULOR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen		-	6.852.000	PUSKESMAS HALMAHERA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		15 Dokumen		-	7.024.000	PUSKESMAS BUGANGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen		-	6.125.000	PUSKESMAS KARANGDORO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen		-	5.850.000	PUSKESMAS PANDANARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		14 Dokumen		-	6.424.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen		-	6.700.000	PUSKESMAS KARANG AYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		5 Dokumen		-	2.888.000	PUSKESMAS LEBDOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		15 Dokumen		-	12.129.000	PUSKESMAS MANYARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen		-	13.969.000	PUSKESMAS KROBOKAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen		-	6.306.000	PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen		-	3.246.000	PUSKESMAS GAYAMSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen		-	6.690.000	PUSKESMAS CANDILAMA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 Dokumen		-	6.386.000	PUSKESMAS KAGOK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		8 Dokumen		-	5.350.000	PUSKESMAS PENGANDAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen		-	6.746.000	PUSKESMAS GENUK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen		-	6.450.000	PUSKESMAS BANGETAYU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen		-	6.343.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen		-	6.790.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen		-	7.925.000	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		9 Dokumen		-	5.927.000	PUSKESMAS ROWOSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		5 Dokumen		-	5.705.000	PUSKESMAS NGRESREP	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		5 Dokumen		-	5.862.000	PUSKESMAS SRONDOL	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen		-	8.309.000	PUSKESMAS PADANGSARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen		-	5.874.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen		-	5.902.000	PUSKESMAS GUNUNGPATI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		240 Dokumen		-	4.995.000	PUSKESMAS MIJEN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		21 Dokumen		-	5.600.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		101 Dokumen		-	5.056.000	PUSKESMAS PURWOYOSO	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen		-	6.075.000	PUSKESMAS NGALIYAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen		-	6.700.000	PUSKESMAS MANGKANG	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 Dokumen		-	2.480.000	PUSKESMAS KARANG ANYAR	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen		-	6.302.000	PUSKESMAS SEKARAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		40 Dokumen		-	4.548.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO				485.569.456.399	484.361.166.349	523.649.189.978		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				485.569.456.399	484.361.166.349	523.649.189.978		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	100 persen	432.897.114.749	432.896.864.749	470.724.273.378	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	100 persen					
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	131.390.720	126.120.441	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	41.063.200	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	81.390.720	85.057.241	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	77.626.657.000	77.595.016.280	76.633.815.911	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	632 Orang/bulan	595 Orang/bulan	77.626.657.000	77.595.016.280	76.633.815.911	RSUD KRMT WONGSONEGORO	Pengembalian anggaran gaji CPNS dan PPPK bulan Januari-Mei
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100 Persen	100 Persen	355.170.457.749	355.170.457.749	393.964.337.026	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	355.170.457.749	355.170.457.749	393.964.337.026	RSUD KRMT WONGSONEGORO	Penambahan Pembiayaan (SiLPA)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	100 persen	52.672.341.650	51.464.301.600	52.924.916.600	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	100 persen					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	52.672.341.650	51.464.301.600	52.924.916.600	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	2 Unit	51.464.051.600	51.464.051.600	51.464.051.600	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	25 Unit	1.208.290.050	250.000	1.460.865.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO	Penambahan anggaran DBHCHT
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM				383.704.701.641	420.682.234.641	384.078.990.970		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				383.704.701.641	420.682.234.641	384.078.990.970		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	75.950.969.338	75.950.969.338	75.140.389.102	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	137.589.200	137.589.200	106.921.600	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	54.712.400	54.712.400	30.171.600	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.764.900	4.764.900	4.764.900	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.964.100	4.964.100	4.964.100	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	3.698.200	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	9.406.000	9.406.000	4.581.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	49.172.282.100	43.555.231.660	35.811.635.537	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	450 Orang/bulan	48.188.684.000	42.571.633.560	34.829.333.837	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	973.375.700	973.375.700	973.315.700	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.359.400	2.359.400	2.359.400	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.942.600	4.942.600	3.706.200	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.920.400	2.920.400	2.920.400	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	6.037.000	6.037.000	4.554.200	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.942.200	2.942.200	1.459.400	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	3.094.800	3.094.800	3.094.800	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	7.434.200	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.954.200	DINAS PEKERJAAN UMUM	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	4.480.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	3.278.137.445	3.278.137.445	1.872.401.106	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	200.000.000	200.000.000	277.061.224	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1.255.478.043	1.255.478.043	408.581.700	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	277.133.551	277.133.551	277.133.551	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	5.000.000	29.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	203.625.851	203.625.851	187.814.351	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	716.900.000	716.900.000	407.379.872	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	545.000.000	545.000.000	239.401.408	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	221.571.203	221.571.203	29.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Unit	0 Unit	221.571.203	221.571.203	29.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	18.352.507.442	23.969.557.882	28.025.074.048	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	19.283.000	19.283.000	19.283.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.058.247.394	7.058.247.394	9.767.099.241	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.274.977.048	16.892.027.488	18.238.691.807	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	4.762.844.948	4.762.844.948	9.312.339.411	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	121 Unit	2.549.231.478	2.549.231.478	2.876.642.019	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031 Unit	1031 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422 Unit	422 Unit	239.548.470	239.548.470	331.417.392	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	899.065.000	899.065.000	1.498.057.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	5 Ha	1.000.000.000	1.000.000.000	4.531.223.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	98.44 Persen	51.772.839.454	51.772.839.454	57.920.001.459	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97.42 Persen	97.42 Persen	49.072.839.454	49.072.839.454	48.576.230.845	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	28.100.675.000	28.100.675.000	23.300.675.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	989.236.374	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	85 Unit	15.310.681.739	15.310.681.739	20.198.383.285	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Unit	100 Unit	720.225.715	720.225.715	720.225.715	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	0,5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	857.106.800	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	441.257.000	441.257.000	510.603.670	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85.50 Persen	85.50 Persen	2.700.000.000	2.700.000.000	9.343.770.614	DINAS PEKERJAAN UMUM	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.3 KM	2,3 KM	2.600.000.000	2.600.000.000	9.043.770.614	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00 Persen	67.00 Persen	143.550.329.938	147.460.329.938	98.527.829.620	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.59 Persen	99.59 Persen	143.550.329.938	147.460.329.938	98.527.829.620	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	96.900.000.000	100.300.000.000	30.662.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208 Unit	208 Unit	9.000.000.000	9.410.000.000	9.170.825.140	UPTD Peralatan dan Pergbngkelan	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1.617.500.000	1.717.500.000	2.959.875.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	15.638.000.000	15.638.000.000	24.198.435.920	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	20.394.829.938	20.394.829.938	31.536.493.560	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30 Persen	75.30 Persen	112.430.562.911	145.498.095.911	152.490.770.789	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88.48 Persen	88.48 Persen	112.430.562.911	145.498.095.911	152.490.770.789	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	2 Dokumen	455.000.000	455.000.000	325.055.316	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	1.476.426.000	1.576.426.000	2.482.380.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	2 KM	12.500.000.000	12.500.000.000	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	2 KM	9.159.577.500	9.159.577.500	9.341.534.924	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	18.064.450.009	35.064.450.009	71.891.672.313	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		5 KM		-	2.996.045.402	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	Penambahan Sub Kegiatan baru untuk UPTD
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM	2 KM	1.360.871.738	1.360.871.738	999.259.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	500.000.000	500.000.000	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	2 Jembatan	6.700.000.000	17.200.000.000	11.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	2 Jembatan	7.692.000.000	7.692.000.000	5.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM	6 KM	575.317.000	575.317.000	572.211.664	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	36.400.000.000	41.867.533.000	13.751.083.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	4 KM	10.340.000.000	10.340.000.000	16.572.965.000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	2.241.196.255	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	2.289.038.319	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	2.000.000.000	2.000.000.000	4.414.472.583	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	2.206.920.664	2.206.920.664	3.113.857.013	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				163.063.575.574	154.263.575.574	124.773.028.469		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				161.980.528.580	153.080.528.580	123.218.481.769		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	27.463.538.375	28.063.538.375	29.006.747.491	DINAS PENATAAN RUANG	
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	189.146.400	189.146.400	227.167.101	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	88.859.600	88.859.600	50.418.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.900	7.800.900	1.518.000	DINAS PENATAAN RUANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.490.900	7.490.900	1.456.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.900	7.800.900	7.590.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.490.900	7.490.900	1.569.301	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	7.078.200	7.078.200	3.372.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	12.625.000	12.625.000	12.068.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	149.175.800	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang disetujui
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	24.672.543.386	24.672.543.386	21.588.430.161	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	158 Orang/bulan	24.001.875.000	22.678.149.160	19.420.376.843	DINAS PENATAAN RUANG	Mandatori
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	655.824.800	1.979.550.640	2.164.933.550	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.114.214	5.114.214	1.075.782	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.114.214	5.114.214	1.075.782	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	4.615.158	4.615.158	968.204	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	100 %	109.420.000	191.829.100	101.938.969	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	3.599.269	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	240 Orang	99.420.000	181.829.100	98.339.700	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	1.332.382.253	1.849.973.153	6.026.460.525	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.996.476	49.996.476	49.996.476	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 Paket	19.999.314	19.999.314	874.845.269	DINAS PENATAAN RUANG	Hold belanja modal dianggarkan kembali serta penambahan usulan yang disetujui
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	140.000.000	140.000.000	138.261.425	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	83.893.357	83.893.357	56.125.539	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	75.000.000	75.000.000	16.167.253	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.359.404	3.359.404	5.554.884	DINAS PENATAAN RUANG	Hold belanja modal
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	50 Laporan	519.533.208	519.533.208	306.644.697	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15 Dokumen	440.600.494	958.191.394	4.578.864.982	DINAS PENATAAN RUANG	Hold belanja modal dianggarkan kembali, penambahan usulan yang disetujui serta tambahan dari anggaran sub kegiatan lain
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	429.737.237	429.737.237	401.608.551	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.498.000	6.498.000	6.498.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.494.552	61.494.552	61.494.552	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	361.744.685	361.744.685	333.615.999	DINAS PENATAAN RUANG	Dialihkan untuk belanja modal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	730.309.099	730.309.099	661.142.184	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	56 Unit	640.705.496	640.705.496	553.470.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	71.717.184	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	100.00 Persen	130.952.208.013	121.452.208.013	91.179.549.977	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	100 %	130.952.208.013	121.452.208.013	91.179.549.977	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	451.955.000	451.955.000	125.746.275	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	150 Orang	150 Orang	112.000.000	112.000.000	13.524.296	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	27 Bangunan Gedung	84.381.436.295	74.481.436.295	54.960.460.318	DINAS PENATAAN RUANG	Hold belanja modal, tidak lolos verifikasi status aset, perubahan pagu sesuai dengan kebutuhan
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	20 Bangunan Gedung	17.812.651.982	17.812.651.982	16.469.271.821	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang disetujui
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	9 Dokumen	434.027.504	434.027.504	1.070.656.493	DINAS PENATAAN RUANG	Pengalihan sub kegiatan, penambahan usulan yang disetujui serta hold belanja modal
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	25.000.000	25.000.000	13.508.738	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	21 Dokumen	25.857.626.870	26.257.626.870	17.112.923.610	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600 Orang	600 Orang	100.000.000	100.000.000	47.732.457	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400 Dokumen	2400 Dokumen	1.777.510.362	1.777.510.362	1.365.725.967	DINAS PENATAAN RUANG	Dialihkan ke penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	100.00 Persen	616.483.389	616.483.389	467.990.352	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	616.483.389	616.483.389	467.990.352	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	616.483.389	616.483.389	467.990.352	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	537.183.946	537.183.946	329.340.262	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	100 %	537.183.946	537.183.946	329.340.262	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang	56.846.725	56.846.725	25.168.359	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	60 Lembaga	54.980.719	54.980.719	27.290.950	DINAS PENATAAN RUANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	1 Dokumen	118.934.781	118.934.781	97.409.748	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	50 Orang	306.421.721	306.421.721	179.471.205	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	100.00 Persen	2.411.114.857	2.411.114.857	2.234.853.688	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000	930.701.774	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000	900.000.000	925.254.816	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang disetujui dan perubahan rincian anggaran
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	1 Publikasi	100.000.000	100.000.000	5.446.958	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	700.000.000	700.000.000	456.558.699	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	2 Peta	200.000.000	200.000.000	191.602.989	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 Orang	40 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000	300.000.000	64.955.710	DINAS PENATAAN RUANG	Dialihkan ke penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	409.597.652	409.597.652	435.844.689	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	240.398.304	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang di setujui
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	209.597.652	209.597.652	195.446.384	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	301.517.205	301.517.205	411.748.526	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	341.588.970	DINAS PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	101.517.205	101.517.205	70.159.556	DINAS PENATAAN RUANG	dialihkan ke penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.083.046.994	1.183.046.994	1.554.546.700		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	327.300.000	327.300.000	309.338.096	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	100 %	327.300.000	327.300.000	309.338.096	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24 Berita Acara	24 Berita Acara	211.950.000	211.950.000	105.673.500	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30 Dokumen	35 Dokumen	115.350.000	115.350.000	203.664.596	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang di setujui
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	100.00 Persen	448.553.274	448.553.274	405.543.898	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	448.553.274	448.553.274	405.543.898	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	448.553.274	448.553.274	405.543.898	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	100.00 Persen	240.130.720	240.130.720	278.336.485	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100 %	240.130.720	240.130.720	278.336.485	DINAS PENATAAN RUANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	223.630.720	223.630.720	169.826.861	DINAS PENATAAN RUANG	dialihkan ke penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan penambahan usulan yang disetujui
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000	16.500.000	108.509.624	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang disetujui
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	100.00 Persen	50.094.000	150.094.000	122.355.006	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100 %	100 %	16.500.000	16.500.000	8.439.457	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000	16.500.000	8.439.457	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 persen	100 persen	33.594.000	133.594.000	113.915.549	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	33.594.000	133.594.000	113.915.549	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	16.969.000	16.969.000	438.973.215	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	100 %	16.969.000	16.969.000	438.973.215	DINAS PENATAAN RUANG	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	3 Laporan	16.969.000	16.969.000	438.973.215	DINAS PENATAAN RUANG	Penambahan usulan yang disetujui
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				358.368.782.220	368.368.782.220	440.361.644.988		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.383.910.060	4.383.910.060	5.999.443.048		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86 Persen	57.86 Persen	1.257.150.000	607.900.000	452.080.788	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100 Persen	100 Persen	1.257.150.000	607.900.000	452.080.788	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	5 Titik	1.257.150.000	607.900.000	452.080.788	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100 %	100 %	292.850.000	942.100.000	634.811.650	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	50 SR	292.850.000	942.100.000	634.811.650	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9 Unit	9 Unit	200.000.000	849.250.000	602.721.750	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	49.175.000	49.175.000	18.244.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	100 Orang	43.675.000	43.675.000	13.844.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92.72 %	92.72 %	1.641.710.060	1.641.710.060	4.057.942.173	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	1.641.710.060	1.641.710.060	4.057.942.173	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11 M ³ /Hari	11 M ³ /Hari	646.600.000	646.600.000	364.525.113	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8 Unit	8 Unit	150.000.000	150.000.000	2.639.440.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50 Penyelenggara	50 Penyelenggara	41.100.000	41.100.000	13.273.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M ³ /Hari	1 M ³ /Hari	641.710.060	641.710.060	905.729.660	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	125.000.000	125.000.000	125.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	100 Orang	37.300.000	37.300.000	9.973.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	100 %	1.192.200.000	1.192.200.000	854.608.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100 %	100 %	1.192.200.000	1.192.200.000	854.608.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	1.192.200.000	1.192.200.000	854.608.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				353.984.872.160	363.984.872.160	434.362.201.940		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100 %	100 %	50.960.922.329	50.960.922.329	51.354.206.402	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100 %	100 %					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100 %	100 %					
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	208.821.026	208.821.026	114.584.798	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	78.301.315	78.301.315	43.276.704	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.254.849	7.254.849	1.684.980	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.503.599	8.503.599	3.992.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.296.349	21.296.349	3.076.002	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.503.599	8.503.599	2.977.020	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.237.868	5.237.868	3.569.600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	29.723.447	29.723.447	6.007.542	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	100 %	32.329.289.782	30.298.152.982	26.303.854.271	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/bulan	269 Orang/bulan	31.527.649.000	29.496.512.200	25.710.889.954	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	783.648.000	783.648.000	588.330.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	1200 Dokumen	3.900.000	3.900.000	1.016.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.615.158	4.615.158	1.082.452	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4.862.466	4.862.466	1.453.413	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	4.615.158	4.615.158	1.082.452	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100 %	100 %	518.382.400	518.382.400	284.038.820	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	400 Paket	130.536.000	130.536.000	83.318.820	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000	8.100.000	600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	346.621.400	346.621.400	176.650.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	33.125.000	33.125.000	23.470.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.108.685.988	1.108.685.988	503.871.054	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	42.928.000	42.928.000	62.928.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	549.313.281	549.313.281	84.528.964	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	213.250.780	213.250.780	233.250.780	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	81.058.664	81.058.664	45.334.932	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	83.792.309	83.792.309	10.193.946	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	27.750.000	27.750.000	8.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	95.151.000	95.151.000	51.913.455	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.441.954	15.441.954	7.720.977	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		-	6.950.930.040	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		4 unit Unit		-	6.950.930.040	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penambahan Sub Kegiatan baru atas pengadaan Alat Besar
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.042.624.200	4.073.761.000	4.613.554.240	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000	16.500.000	20.020.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	872.398.800	872.398.800	852.614.040	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.153.725.400	3.184.862.200	3.740.920.200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	14.753.118.933	14.753.118.933	12.583.373.179	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	2.113.674.392	2.113.674.392	1.835.468.724	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	8.260.752.725	8.260.752.725	8.468.478.625	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.853.096	50.853.096	4.035.960	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.748.435.814	3.748.435.814	1.759.968.785	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	579.402.906	579.402.906	515.421.085	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100 %	100 %	6.571.686.600	6.571.686.600	6.595.848.092	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	100 %	400.000.000	400.000.000	697.570.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 Unit Rumah	16 Unit Rumah	400.000.000	400.000.000	697.570.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100 %	100 %	4.616.636.600	4.616.636.600	5.334.628.229	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100 Laporan	100 Laporan	4.616.636.600	4.616.636.600	5.334.628.229	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	1.555.050.000	1.555.050.000	563.649.863	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	1 Laporan	1.555.050.000	1.555.050.000	563.649.863	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99.7 %	99.7 %	17.346.090.000	17.346.090.000	23.323.664.220	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100 %	100 %	17.346.090.000	17.346.090.000	23.323.664.220	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 Unit Rumah	16 Unit Rumah	17.346.090.000	17.346.090.000	23.323.664.220	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	100.00 Persen	279.106.173.231	289.106.173.231	353.088.483.227	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Ruang Terbuka Hijau Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100 %	100 %	279.106.173.231	289.106.173.231	353.088.483.227	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.319.200.000	5.319.200.000	6.326.400.853	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Lokasi	100 Lokasi	53.397.577.599	57.397.577.599	83.856.398.768	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	31.117.344.200	31.117.344.200	31.231.413.285	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	1 Lokasi	133.428.195.164	133.428.195.164	134.884.360.285	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	1 Lokasi	54.661.855.252	60.661.855.252	95.290.214.148	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	1.182.001.016	1.182.001.016	1.499.695.888	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATPOL PP				43.702.807.430	43.858.035.180	38.779.797.893		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				43.702.807.430	43.858.035.180	38.779.797.893		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	32.794.101.015	29.972.446.157	26.295.380.370	SATPOL PP	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP	100 %	100 %					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP	100 %	100 %					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	178.668.700	178.668.700	139.119.710	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53.328.800	53.328.800	32.844.900	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.849.020	4.849.020	1.588.120	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.240.840	5.240.840	2.229.940	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.849.020	4.849.020	1.926.220	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.240.840	5.240.840	2.740.840	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	48.039.760	48.039.760	29.041.960	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	7.120.420	7.120.420	34.420.420	SATPOL PP	
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	34.327.310	SATPOL PP	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	28.483.474.975	25.867.616.975	22.442.143.001	SATPOL PP	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	265 Orang/bulan	28.229.502.000	25.613.644.000	22.208.493.001	SATPOL PP	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	241.076.815	241.076.815	228.350.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.512.400	2.512.400	1.100.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.071.360	9.071.360	3.400.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.312.400	1.312.400	800.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	100 %	951.702.270	745.905.412	890.436.093	SATPOL PP	
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	12.000.000	12.000.000	10.000.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	285 Paket	285 Paket	442.304.420	442.304.420	551.768.901	SATPOL PP	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	960 Orang	50 Orang	490.864.050	285.067.192	325.067.192	SATPOL PP	
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	6.533.800	6.533.800	3.600.000	SATPOL PP	Pengurangan anggaran untuk akomodir sub kegiatan lain
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100 %	100 %	602.230.595	602.230.595	492.202.484	SATPOL PP	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	10.819.572	10.819.572	10.819.572	SATPOL PP	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	34.557.540	34.557.540	34.557.540	SATPOL PP	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	21.898.550	21.898.550	31.467.290	SATPOL PP	Penambahan anggaran untuk barang dan jasa
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	31.682.820	31.682.820	23.140.820	SATPOL PP	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	71.072.000	71.072.000	59.200.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	244.819.445	244.819.445	131.938.828	SATPOL PP	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	187.380.668	187.380.668	201.078.434	SATPOL PP	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	524.532.078	524.532.078	305.401.529	SATPOL PP	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	414.826.004	414.826.004	127.130.000	SATPOL PP	Pengurangan anggaran belanja modal
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	109.706.074	109.706.074	178.271.529	SATPOL PP	Penambahan anggaran belanja modal
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	595.141.080	595.141.080	672.078.080	SATPOL PP	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.141.080	235.141.080	235.141.080	SATPOL PP	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	360.000.000	360.000.000	436.937.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	1.458.351.317	1.458.351.317	1.353.999.473	SATPOL PP	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	1.061.558.530	1.061.558.530	855.729.000	SATPOL PP	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	95.201.049	95.201.049	95.201.049	SATPOL PP	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	201.139.350	201.139.350	350.477.830	SATPOL PP	Penambahan anggaran belanja modal
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	60.848.785	60.848.785	16.636.594	SATPOL PP	Penambahan anggaran belanja modal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan linmas	16 %	0	10.908.706.415	13.885.589.023	12.484.417.523	SATPOL PP	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	10.00 Persen					
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	20 %	20 %	10.085.708.453	12.901.566.453	11.755.356.532	SATPOL PP	
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %					
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	831.000.000	1.031.000.000	1.179.337.517	SATPOL PP	Penambahan anggaran belanja barang jasa
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	8.257.712.800	10.873.570.800	10.118.379.876	SATPOL PP	Pengurangan anggaran
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Orang	252 Orang	189.790.000	189.790.000	77.231.540	SATPOL PP	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan#dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	210.756.870	210.756.870	74.503.392	SATPOL PP	
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	46.755.690	46.755.690	29.820.401	SATPOL PP	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	80 laporan	80 laporan	204.034.100	204.034.100	121.602.480	SATPOL PP	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	76 Laporan	337.525.166	337.525.166	153.009.499	SATPOL PP	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	8.133.827	8.133.827	1.471.827	SATPOL PP	Pengurangan anggaran barang dan jasa
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ersentase perda dan perkada yang ditegakkan	70 %	70 %	701.598.544	862.623.152	656.345.107	SATPOL PP	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	101.514.755	101.514.755	11.091.350	SATPOL PP	Pengurangan anggaran barang dan jasa
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	20 Laporan	320.088.656	481.113.264	509.151.658	SATPOL PP	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	80 Laporan	279.995.133	279.995.133	136.102.099	SATPOL PP	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	14 KASUS	14 KASUS	121.399.418	121.399.418	72.715.884	SATPOL PP	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	121.399.418	121.399.418	72.715.884	SATPOL PP	
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				41.228.057.090	41.328.057.090	34.028.331.907		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				41.228.057.090	41.328.057.090	34.028.331.907		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	35.022.043.741	32.259.987.341	26.981.270.757	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	125.064.700	125.064.700	105.034.700	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	51.768.000	51.768.000	32.538.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.001.900	6.001.900	5.926.900	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.936.900	4.936.900	4.886.900	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.155.900	4.155.900	4.105.900	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.900	3.480.900	3.430.900	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.835.700	1.835.700	1.485.700	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	2.885.400	2.885.400	2.660.400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	28.328.968.610	25.466.912.210	22.274.406.716	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	288 Orang/bulan	28.032.640.000	25.170.583.600	21.992.668.106	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	286.168.000	286.168.000	274.528.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	949.680	949.680	949.680	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.967.690	2.967.690	1.492.690	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.236.400	1.236.400	511.400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.459.840	1.459.840	1.259.840	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	2.685.600	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	861.400	861.400	311.400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	3.886.540	3.886.540	2.336.540	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	761.720	761.720	611.720	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.044.320	1.044.320	844.320	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.080.500	2.080.500	880.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	2.345.790	2.345.790	1.700.790	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	441.720	441.720	416.720	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	563.440	563.440	563.440	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1.340.630	1.340.630	720.630	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	331.614.652	331.614.652	322.313.642	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	322.167.632	322.167.632	322.167.632	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	9.447.020	9.447.020	146.010	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	1.191.959.412	1.191.959.412	289.919.954	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.533.771	17.533.771	17.533.771	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	746.166.689	746.166.689	21.591.732	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	71.218.364	71.218.364	54.611.420	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal dan Penambahan Belanja
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.082.548	19.082.548	9.512.405	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75 Laporan	32 Laporan	44.955.000	44.955.000	15.385.586	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	293.003.040	293.003.040	171.285.040	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Penambahan Belanja SPPD
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	1.438.164.276	1.538.164.276	1.143.779.865	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen					
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	529.869.600	529.869.600	529.869.600	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	0 Unit	182.856.128	182.856.128	9.630.360	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	195 Unit	24.674.535	24.674.535	24.674.535	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.826.800	139.826.800	105.646.470	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	2 Unit	660.937.213	660.937.213	473.958.900	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	607.642.200	607.642.200	633.270.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	416.202.000	416.202.000	441.942.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Penambahan Anggaran
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	191.440.200	191.440.200	191.328.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	2.992.397.561	2.992.397.561	2.208.508.550	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen					
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	45 Unit	2.469.787.943	2.469.787.943	1.680.191.860	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	0 Unit	1.818.000	1.818.000	218.160	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	34.775.223	34.775.223	34.775.223	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	358.757.550	358.757.550	383.757.550	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Penambahan Anggaran
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 Unit	83 Unit	83.298.846	83.298.846	69.655.707	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen	6.206.013.349	9.068.069.749	7.047.061.150	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 Porsen	100.00 Porsen					
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100 persen	100 persen	4.122.962.942	6.985.019.342	5.919.491.991	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen					
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen					
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000	400.000.000	276.103.450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	300 Laporan	1.729.802.998	4.591.859.398	4.934.776.950	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Penambahan Anggaran PJLP
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	390 Dokumen	390 Dokumen	83.489.940	83.489.940	80.354.440	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	1 Dokumen	5.122.765	5.122.765	1.645.470	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	73.957.320	73.957.320	73.957.320	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	13.661.410	13.661.410	12.606.929	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	173 Unit	21 Unit	1.791.411.882	1.791.411.882	526.185.305	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	25.516.627	25.516.627	13.862.127	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100 persen	100 persen	461.200.000	461.200.000	206.579.332	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	13.305.268	13.305.268	3.029.641	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	447.894.732	447.894.732	203.549.691	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100 persen	100 persen	7.650.960	7.650.960	3.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	50 Dokumen	50 Dokumen	7.650.960	7.650.960	3.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 persen	100 persen	1.335.166.642	1.335.166.642	777.957.022	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 Orang	1920 Orang	348.400.697	348.400.697	286.480.297	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	36 Desa/Kelurahan	305.460.625	305.460.625	225.397.325	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	681.305.320	681.305.320	266.079.400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Efisiensi Belanja Modal
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100 persen	100 persen	279.032.805	279.032.805	139.932.805	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
		Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen	100 persen					
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	832.805	832.805	832.805	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	1 Laporan	278.200.000	278.200.000	139.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pergeseran Internal
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				14.080.305.560	14.080.305.560	13.866.482.694		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.080.305.560	14.080.305.560	13.866.482.694		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	11.838.913.390	11.361.903.990	10.322.794.271	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	103.408.000	103.408.000	32.257.771	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	50.404.400	50.404.400	15.593.281	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	890.000	890.000	214.490	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	712.000	712.000	440.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	832.000	832.000	200.512	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	569.600	569.600	137.274	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	15.672.215	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	9.529.312.400	9.052.303.000	7.878.429.600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.318.270.000	8.841.260.600	7.691.187.070	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyesuaian Belanja Pegawai
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	210.368.000	210.368.000	187.080.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyesuaian Belanja
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	81.265	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	81.265	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	326.668.875	326.668.875	160.761.052	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.927.150	19.927.150	19.922.816	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.693.246	25.693.246	5.000.151	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	43.713.531	43.713.531	43.713.238	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.000.000	29.000.000	18.723.597	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.562.760	24.562.760	8.735.684	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	13.200.000	13.200.000	6.665.885	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	149.509.720	149.509.720	51.137.441	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penambahan Anggaran
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.062.468	21.062.468	6.862.240	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	100 %	100 %	42.135.600	42.135.600	100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	42.135.600	42.135.600	100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Efisiensi Belanja Modal
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	861.818.400	861.818.400	974.064.309	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.927.000	3.927.000	3.927.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237.575.000	237.575.000	270.913.659	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penambahan Anggaran
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	620.316.400	620.316.400	699.223.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengurangan Anggaran dan Penganggaran RJP
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	975.570.115	975.570.115	1.277.181.538	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	352.799.985	352.799.985	310.032.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	467.747.466	467.747.466	615.101.617	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Mutasi Kendaraan Dinas Operasional dan BNPB, Pemeliharaan Kendaraan
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	55.022.664	55.022.664	55.022.664	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	297.025.257	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perawatan Gedung Kantor
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	20.00 persen	2.241.392.170	2.718.401.570	3.543.688.424	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	70.000.000	70.000.000	155.590.236	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	155.590.236	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pembuatan Peta Rawan Bencana Kota
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	947.982.220	1.040.306.620	979.006.313	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	5 Unit	150.000.000	150.000.000	81.027.586	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	643.940.410	643.940.410	580.397.684	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyesuaian Belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	2 laporan	52.000.000	52.000.000	23.503.672	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pergeseran Upah PJLP
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	2 Kawasan	102.041.810	194.366.210	294.077.371	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penambahan Anggaran dan Pergeseran Upah PJLP
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	12 dokumen	661.409.950	1.046.094.950	1.003.556.035	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	1000 Orang	397.545.130	782.230.130	737.679.021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penambahan Anggaran
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1000 Orang	263.864.820	263.864.820	265.877.014	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penambahan Anggaran dan Pergeseran Upah PJLP
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	100 orang	562.000.000	562.000.000	1.405.535.840	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	410.000.000	410.000.000	1.334.910.789	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penambahan Anggaran
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	152.000.000	152.000.000	70.625.051	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pergeseran Upah PJLP
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL				35.528.133.116	37.028.133.116	34.906.154.797		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				35.528.133.116	37.028.133.116	34.906.154.797		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.656.598.330	15.202.276.761	13.398.273.194	DINAS SOSIAL	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen					
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial	100 %	100 %	157.331.469	157.331.469	63.740.774	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	78.473.679	78.473.679	32.220.100	DINAS SOSIAL	Pergeseran Rekening Belanja
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.225.400	1.225.400	612.700	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.883.600	1.883.600	672.440	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.491.800	1.491.800	561.492	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.883.600	1.883.600	672.440	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.567.600	1.567.600	550.907	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	20.805.790	20.805.790	1.375.945	DINAS SOSIAL	Pergeseran Rekening Belanja
1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	27.074.750	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100 %	100 %	12.273.063.400	11.681.414.840	10.519.241.576	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	11.928.466.000	11.336.817.440	10.176.976.824	DINAS SOSIAL	Pengurangan Belanja
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	338.779.600	338.779.600	340.083.642	DINAS SOSIAL	Penyesuaian Belanja
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	779.800	779.800	389.900	DINAS SOSIAL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1.230.400	1.230.400	469.642	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.576.200	2.576.200	880.538	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.231.400	1.231.400	441.030	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100 %	100 %	607.595.202	644.922.193	299.570.902	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	57.539.854	57.539.854	7.688.100	DINAS SOSIAL	Efisiensi Belanja
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	33.656.500	33.656.500	13.462.501	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	32.400.000	32.400.000	7.037.702	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.760.000	5.760.000	8.000.000	DINAS SOSIAL	Penambahan Belanja
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	74 Laporan	80.000.000	80.000.000	39.500.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	250.000.000	250.000.000	210.757.000	DINAS SOSIAL	Penambahan Belanja
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	135.238.848	172.565.839	125.600	DINAS SOSIAL	Efisiensi Belanja
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100 %	100 %	593.558.570	593.558.570	224.400	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	63.688.970	63.688.970	112.200	DINAS SOSIAL	Efisiensi Belanja
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	529.869.600	529.869.600	112.200	DINAS SOSIAL	Efisiensi Belanja
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100 %	100 %	141.860.980	141.860.980	126.296.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	141.860.980	141.860.980	126.296.000	DINAS SOSIAL	Pengurangan belanja
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100 %	100 %	1.566.934.432	1.566.934.432	1.653.110.589	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	635.180.155	635.180.155	559.755.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	32.292.250	32.292.250	32.292.250	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	740.000.000	740.000.000	840.000.000	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136 Unit	136 Unit	69.858.424	69.858.424	135.108.339	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100 %	100 %	316.254.277	416.254.277	736.088.953	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	316.254.277	416.254.277	736.088.953	DINAS SOSIAL	Penambahan Belanja
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100.00 Persen	100.00 Persen	6.472.822.021	6.665.795.861	6.823.219.531	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	100 %	60.000.000	110.991.280	76.040.450	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	110.991.280	76.040.450	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100 %	100 %	6.412.822.021	6.554.804.581	6.747.179.081	DINAS SOSIAL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	5.077.500.000	5.128.491.280	4.940.523.780	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	350.000.000	370.000.000	351.272.400	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	4 Keluarga	45.746.381	65.746.381	41.715.000	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga	50 Lembaga	293.565.640	344.556.920	279.638.270	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	12 Sertifikat	646.010.000	646.010.000	1.134.029.631	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	30.320.774	30.320.774	16.790.559	DINAS SOSIAL	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100 %	100 %	30.320.774	30.320.774	16.790.559	DINAS SOSIAL	
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	13 Orang	30.320.774	30.320.774	16.790.559	DINAS SOSIAL	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	99.93 Persen	8.301.760.849	8.635.386.089	9.062.392.417	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	2.192.079.680	2.465.486.480	2.263.719.874	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	1.200.000.000	1.380.000.000	1.352.470.000	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	58.569.800	58.569.800	58.569.800	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	418.130	418.130	418.130	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	33.950.000	33.950.000	16.537.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	534.385.420	627.792.220	572.182.087	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	90 Orang	28.773.000	28.773.000	21.202.643	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	6.686.000	6.686.000	4.968.844	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	6.222.330	6.222.330	6.222.330	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	68.167.540	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	163.225.000	163.225.000	118.232.500	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	29.925.000	29.925.000	21.294.000	DINAS SOSIAL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	29.925.000	29.925.000	23.455.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	100 %	6.109.681.169	6.169.899.609	6.798.672.543	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	416.926.240	557.144.680	377.130.340	DINAS SOSIAL	Pengurangan belanja
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	36.840.905	36.840.905	17.215.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265 Orang	5265 Orang	4.800.000.000	4.620.000.000	4.819.470.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	48 Orang	19.008.000	19.008.000	19.008.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	130.000.000	130.000.000	113.235.400	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	390.928.000	390.928.000	386.816.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	32.931.424	32.931.424	19.414.475	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	49.855.000	49.855.000	144.760.905	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	45.000.000	45.000.000	37.950.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	33.491.600	33.491.600	693.734.523	DINAS SOSIAL	Penambahan belanja
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	14.900.000	14.900.000	6.590.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	14.900.000	14.900.000	7.860.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	14.900.000	14.900.000	7.440.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	210.000.000	148.047.900	DINAS SOSIAL	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71.25 Persen	71.25 Persen	4.266.929.375	5.521.245.064	4.862.312.094	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	100 %	131.332.845	182.324.125	118.888.572	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	67.956.655	118.947.935	80.812.150	DINAS SOSIAL	Pengurangan belanja
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	33.334.960	33.334.960	18.553.110	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	30.041.230	30.041.230	19.523.312	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.15 %	14.15 %	4.135.596.530	5.338.920.939	4.743.423.522	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	150000 Orang	234.335.280	412.787.640	271.462.657	DINAS SOSIAL	Pengurangan belanja
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	1500 Keluarga	300.000.000	1.324.872.049	1.249.897.889	DINAS SOSIAL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	50000 Keluarga	3.176.261.250	3.176.261.250	2.964.367.797	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	425.000.000	425.000.000	257.695.179	DINAS SOSIAL	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	799.701.767	973.108.567	743.167.002	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 %	100 %	517.499.687	604.311.327	494.224.872	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	373 Orang	179.498.067	179.498.067	162.214.307	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	373 Orang	80.008.000	80.008.000	79.712.237	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	30.250.000	30.250.000	28.766.825	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	54.052.000	74.052.000	52.878.534	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	280 Orang	173.691.620	240.503.260	170.652.969	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	100 %	282.202.080	368.797.240	248.942.130	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung	145.077.859	231.673.019	178.566.223	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	137.124.221	137.124.221	70.375.907	DINAS SOSIAL	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA				22.504.715.366	22.958.096.766	21.167.582.271		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				22.504.715.366	22.958.096.766	21.167.582.271		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	17.215.301.220	17.215.301.220	15.599.369.890	DINAS TENAGA KERJA	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	111.243.634	111.243.634	34.885.212	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	51.245.864	51.245.864	4.384.008	DINAS TENAGA KERJA	Pengurangan belanja
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.494.614	2.494.614	834.997	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.081.139	2.081.139	719.370	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.704.294	1.704.294	577.274	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.081.139	2.081.139	719.370	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	747.474	747.474	265.255	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	889.110	889.110	311.439	DINAS TENAGA KERJA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	27.073.499	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen	13.394.308.000	13.178.234.960	12.390.031.118	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	13.181.264.000	12.965.190.960	12.176.987.118	DINAS TENAGA KERJA	Pengurangan belanja
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	213.044.000	213.044.000	213.044.000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	1.667.226.562	1.667.226.562	1.315.903.266	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.820.488	24.820.488	24.820.488	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	150.821.328	150.821.328	2.392.050	DINAS TENAGA KERJA	Efisiensi belanja
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24.998.199	24.998.199	24.998.199	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	24.995.647	24.995.647	14.687.632	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	21.362.553	21.362.553	9.015.180	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	24 Dokumen	5.924.736	5.924.736	4.262.400	DINAS TENAGA KERJA	Efisiensi belanja
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	19.980.000	19.980.000	9.975.714	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390 Laporan	90 Laporan	209.556.020	209.556.020	45.979.456	DINAS TENAGA KERJA	Penambahan belanja
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	9.990.888	9.990.888	4.995.444	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19 Dokumen	19 Dokumen	1.174.776.703	1.174.776.703	1.174.776.703	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	216.961.943	216.961.943	100.000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit	57 Unit	216.961.943	216.961.943	100.000	DINAS TENAGA KERJA	Efisiensi belanja
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	1.280.420.530	1.496.493.570	1.508.313.570	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	469.606.590	469.606.590	469.406.590	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	810.813.940	1.026.886.980	1.038.906.980	DINAS TENAGA KERJA	Penambahan belanja
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	545.140.551	545.140.551	350.136.724	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	292.054.038	292.054.038	252.342.000	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	57.784.674	57.784.674	57.784.674	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	151.341.840	151.341.840	100.000	DINAS TENAGA KERJA	Efisiensi belanja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75.00 Persen	75.00 Persen	64.382.763	46.762.654	18.139.647	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	64.382.763	46.762.654	18.139.647	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	30 Orang	64.382.763	46.762.654	18.139.647	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79.00 Persen	79.00 Persen	3.001.491.850	3.454.873.250	3.180.379.075	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	55 persen	55 persen	2.513.763.850	2.967.145.250	2.841.367.850	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	776 Orang	918 Orang	2.494.763.850	2.948.145.250	2.822.697.796	DINAS TENAGA KERJA	Penambahan belanja
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	6 Unit	19.000.000	19.000.000	18.670.054	DINAS TENAGA KERJA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24 persen	24 persen	317.728.000	317.728.000	266.374.191	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	20 Lembaga	317.728.000	317.728.000	266.374.191	DINAS TENAGA KERJA	Penambahan belanja
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100 persen	100 persen	60.000.000	60.000.000	20.838.706	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25 Perizinan	20 Perizinan	60.000.000	60.000.000	20.838.706	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas	10 perusahaan	10 perusahaan	30.000.000	30.000.000	13.297.113	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	60 Perusahaan	60 Perusahaan	30.000.000	30.000.000	13.297.113	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154267000 Rupiah	154267000 Rupiah	80.000.000	80.000.000	38.501.216	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	80.000.000	80.000.000	38.501.216	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70.00 Persen	70.00 Persen	1.290.811.533	1.308.431.642	916.772.010	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	2000 orang	612.811.533	651.656.642	456.141.427	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	2000 Orang	225.000.000	225.000.000	92.686.435	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	110 Orang	30.000.000	30.000.000	114.117.843	DINAS TENAGA KERJA	Penambahan belanja
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	10 Orang	23.824.990	62.670.099	26.550.466	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	75 Orang	40 Orang	333.986.543	333.986.543	222.786.683	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	1000 orang	533.000.000	533.000.000	383.281.643	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	2500 Orang	233.000.000	233.000.000	146.438.356	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1000 Orang	300.000.000	300.000.000	236.843.287	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	50 orang	50 orang	145.000.000	123.775.000	77.348.940	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	10 Orang	100.000.000	78.775.000	50.324.865	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	10 Orang	45.000.000	45.000.000	27.024.075	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.60 Persen	5.60 Persen	932.728.000	932.728.000	1.452.921.649	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818 perusahaan	818 perusahaan	327.105.756	327.105.756	1.157.865.844	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	50 Perusahaan	43.995.252	43.995.252	20.040.032	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	283.110.504	283.110.504	1.137.825.812	DINAS TENAGA KERJA	Penambahan belanja
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	60 persen	60 persen	605.622.244	605.622.244	295.055.805	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	100 Perkara	74.650.504	74.650.504	32.775.529	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	50 Perkara	27.002.114	27.002.114	13.724.014	DINAS TENAGA KERJA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	43.845.254	43.845.254	19.950.775	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	460.124.372	460.124.372	228.605.487	DINAS TENAGA KERJA	
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				25.157.056.526	25.196.302.076	22.808.575.223		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21.485.310.586	21.524.556.136	18.774.880.469		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	16.579.576.516	16.618.822.066	14.084.990.743	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100 %	100 %					
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100 %	100 %					
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	121.735.400	121.735.400	74.744.020	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	53.235.200	53.235.200	23.474.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan kegiatan Dedicated Bappeda untuk Forum Renstra OPD dan RSO yang sempat dihapus saat efisiensi
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.289.000	3.289.000	1.012.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.744.000	3.744.000	1.040.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.530.000	2.530.000	1.012.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000	2.080.000	1.040.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	4.271.200	4.271.200	2.652.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2.586.000	2.586.000	405.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.108.620	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengurangan ATK
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	13.007.994.200	12.683.559.920	10.824.625.748	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	12.711.239.000	12.386.804.720	10.548.895.748	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi Belanja Pegawai sesuai Pagu yang ditetapkan
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	290.984.000	290.984.000	272.620.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi Honor Penatausahaan
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.348.800	1.348.800	1.124.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	12 Laporan	2.023.200	2.023.200	1.124.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	899.200	899.200	562.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak yang sempat dihapus saat efisiensi agar target output dapat terpenuhi
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100 %	100 %	313.007.210	352.252.760	353.705.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	178.752.760	178.752.760	150.380.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan kegiatan untuk monitoring kegiatan Dinas dan Penyusunan Kajian SOTK
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	300 Orang	134.254.450	173.500.000	203.325.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan anggaran untuk DBHCHT (silpa tahun lalu)
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	1.289.801.460	1.289.801.460	707.924.303	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.999.950	6.999.950	6.999.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	212.673.880	212.673.880	167.499.356	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi kebutuhan kantor
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37.621.250	37.621.250	37.621.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.789.880	64.789.880	50.783.360	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi kebutuhan kantor
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	26.729.926	26.729.926	15.270.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan belanja cetak untuk Stopmap Dinas dikarenakan ganti alamat
2.08.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	71.380.500	71.380.500	24.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	10 Laporan	530.882.704	530.882.704	173.214.227	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan untuk makan minum rapat dan narsum
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	338.723.370	338.723.370	232.536.160	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Pengurangan belanja modal yang disepakati untuk hold 2. Penambahan belanja modal baru di anggaran perubahan sesuai RKBM
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	192.075.024	192.075.024	133.872.090	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	79.775.940	79.775.940	39.104.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Pengurangan belanja modal yang disepakati untuk hold 2. Penambahan belanja modal baru di anggaran perubahan sesuai RKBM
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	97.663.384	97.663.384	72.659.770	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Pengurangan belanja modal yang disepakati untuk hold 2. Penambahan belanja modal baru di anggaran perubahan sesuai RKBM
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	14.635.700	14.635.700	22.108.320	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Pengurangan belanja modal yang disepakati untuk hold 2. Penambahan belanja modal baru di anggaran perubahan sesuai RKBM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	788.523.600	1.112.957.880	1.172.571.070	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	321.915.600	321.915.600	207.732.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi listrik dan telepon
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	466.608.000	791.042.280	964.839.070	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan PJLP dari bidang total berjumlah 11 orang x 5 bulan
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100 %	100 %	866.439.622	866.439.622	817.548.512	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	474.399.969	474.399.969	377.412.210	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi jumlah kendaraan yang dipelihara
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	59.243.241	59.243.241	46.810.821	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi pemeliharaan printer
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	241.831.000	241.831.000	288.392.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan anggaran untuk renovasi kantor baru
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	47.005.413	47.005.413	65.023.431	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan anggaran untuk renovasi kantor baru
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100 %	100 %	1.375.000.000	1.375.000.000	764.036.727	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	98 Program	170.590.400	170.590.400	113.755.271	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	70.590.400	70.590.400	58.390.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	55.364.871	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	3 Organisasi	100.000.000	100.000.000	102.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	100.000.000	102.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyesuaian anggaran untuk FGD DPRD
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	31 Lembaga	1.104.409.600	1.104.409.600	547.781.456	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	979.409.600	979.409.600	301.390.486	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pergeseran anggaran lintas sub untuk dialihkan ke Desk PPE
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	125.000.000	125.000.000	246.390.970	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11.44 %	11.44 %	1.345.111.720	1.345.111.720	874.861.477	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	220.000.000	220.000.000	224.214.117	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	7 Dokumen	220.000.000	220.000.000	224.214.117	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan anggaran untuk digunakan kegiatan Penguatan Kader JPPA Kecamatan khususnya di kecamatan yang JPPA nya kurang aktif
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga	633.611.720	633.611.720	426.791.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	100 Orang	633.611.720	633.611.720	283.371.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemindahan anggaran PJLP ke Sekretariat
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		75 Layanan			143.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pergeseran Internal
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	26 Lembaga	491.500.000	491.500.000	223.855.610	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	226.500.000	202.186.050	53.200.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan kegiatan untuk penanganan korban
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		50 Orang			44.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	5 Orang	125.000.000	149.313.950	125.365.260	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan untuk kebutuhan korban seperti obat, popok, pembalut dll
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000	140.000.000	1.289.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100 %	100 %	554.828.200	554.828.200	1.314.719.130	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	400.000.000	400.000.000	1.193.100.880	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Perangkat Daerah	70 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000	1.132.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	33.605.870	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	26.895.010	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	154.828.200	154.828.200	121.618.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	154.828.200	154.828.200	121.618.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100 %	100 %	282.396.670	282.396.670	209.769.098	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	282.396.670	282.396.670	209.769.098	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	85.777.990	86.277.990	75.671.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	196.618.680	196.118.680	134.097.598	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan untuk makan minum rapat dan narsum
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	1.008.397.480	1.008.397.480	1.264.596.873	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	9 Jejaring	370.000.000	370.000.000	817.729.643	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	2 Organisasi	20.000.000	20.000.000	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000	350.000.000	811.729.643	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tambahan anggaran dari Nota Dinas untuk Peringatan HAN Kota Semarang
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	9 Lembaga	638.397.480	638.397.480	446.867.230	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	258.397.480	258.397.480	220.584.040	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan gaji pengasuh daycare
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	139.919.780	139.919.780	60.247.790	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengalihan anggaran PJLP ke Sekretariat
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	110.080.220	110.080.220	117.847.460	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan anggaran untuk fasilitasi Forum Anak Kota
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000	130.000.000	48.187.940	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tambahan untuk kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	0.011 %	340.000.000	340.000.000	261.906.421	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	340.000.000	340.000.000	150.166.421	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		120 Orang			45.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	5 Dokumen	340.000.000	340.000.000	104.466.421	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengurangan anggaran lintas sub kegiatan untuk digunakan kegiatan Penguatan Kader JPPA Kecamatan khususnya di kecamatan yang JPPA nya kurang aktif
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya anak korban kekerasan		100 %			86.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		60 Layanan			86.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya cakupan lembaga penyediaan layanan AMPK		100 %			25.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		80 Orang			25.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.671.745.940	3.671.745.940	4.033.694.754		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100 %	100 %	741.430.730	741.547.730	685.006.791	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	741.430.730	741.547.730	685.006.791	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	46.307.550	47.007.550	37.650.050	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	17.987.300	23.987.300	10.669.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177 Orang	177 Orang	80.497.000	81.197.000	32.996.191	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi kegiatan
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	55.494.730	42.886.730	20.117.430	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan kegiatan untuk makan minum prodeske
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	541.144.150	546.469.150	583.573.520	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tambahan anggaran dari Nota Dinas untuk fasilitasi lomba kelurahan Tk Nasional
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	2.930.315.210	2.930.198.210	3.348.687.963	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	2.930.315.210	2.930.198.210	3.348.687.963	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	147.601.360	151.026.360	410.890.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penambahan kegiatan untuk Sosialisasi Perwal Operasional RT dan RW
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	144.706.650	144.926.650	161.745.173	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	1.076.275.230	1.081.275.230	1.414.193.222	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Efisiensi untuk kegiatan sewa pada TMMD
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	105.988.610	100.988.610	21.722.179	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	106.027.160	100.027.160	73.295.970	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tambahan anggaran untuk makan minum BBGRM
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	40 Dokumen	20 Dokumen	1.349.716.200	1.351.954.200	1.266.840.919	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tambahan anggaran dari Nota Dinas untuk fasilitasi TP PKK
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN				19.514.641.628	19.007.078.346	14.773.771.838		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				19.514.641.628	19.007.078.346	14.773.771.838		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen	14.355.453.433	14.355.453.433	9.507.518.501	DINAS KETAHANAN PANGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	100 Persen					
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang	9 Dokumen	9 Dokumen	111.009.200	111.009.200	111.009.200	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50.762.000	50.762.000	50.762.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.475.900	1.475.900	1.475.900	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.900	1.700.900	1.700.900	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.475.900	1.475.900	1.475.900	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.900	1.700.900	1.700.900	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.893.600	3.893.600	3.893.600	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	4 Dokumen	4 Dokumen	8.775.851.200	8.634.983.320	7.422.564.045	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	8.544.875.000	8.404.007.120	7.191.587.845	DINAS KETAHANAN PANGAN	Efisiensi Belanja Pegawai
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	228.956.000	228.956.000	228.956.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pegeseran Anggaran dalam Sub Kegiatan, Penyesuaian Honor KPA, BP, BPP, PPTK
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.347.800	1.347.800	1.347.800	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	448.600	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-Ketapang	100 %	100 %	704.603.991	704.603.991	238.256.122	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.999.574	4.999.574	4.999.574	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.108.343	28.108.343	1.308.981	DINAS KETAHANAN PANGAN	Efisiensi belanja modal
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.047.474	43.047.474	36.525.225	DINAS KETAHANAN PANGAN	Efisiensi belanja modal
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.997.208	49.997.208	29.108.399	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.007.174	31.007.174	11.276.213	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000	5.700.000	5.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	75.161.360	75.161.360	75.161.360	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	365.675.998	365.675.998	57.029.500	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk perjalanan dinas ke DKI Jakarta
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.906.860	100.906.860	17.146.870	DINAS KETAHANAN PANGAN	Efisiensi belanja modal
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang	100 %	100 %	803.045.480	943.913.360	970.313.360	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	187.290.000	187.290.000	206.490.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk tagihan listrik dan air gedung UMKM Srandol

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	615.755.480	756.623.360	763.823.360	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk tenaga kebersihan gedung UMKM Srandol
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang	100 %	100 %	3.960.943.562	3.960.943.562	765.375.774	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	445.225.210	445.225.210	395.082.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	48.864.749	48.864.749	48.864.749	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.427.250.000	3.427.250.000	285.474.025	DINAS KETAHANAN PANGAN	Efisiensi Belanja Modal dan penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059 Kkal	3059 Kkal	4.137.360.370	3.407.598.148	3.856.023.310	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Presentase Cakupan Distribusi	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 %	100 %	1.399.365.350	1.318.495.378	1.200.422.770	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	106.409.600	88.259.600	73.619.410	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	12.300.000	12.300.000	8.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	14.911.120	14.911.120	5.995.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	120.800.000	120.800.000	213.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk lomba olahan pangan icon Kota Semarang
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	124.017.760	58.917.760	47.460.290	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177 Unit	177 Unit	785.279.500	750.479.500	646.102.540	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pergeseran anggaran antar sub kegiatan untuk penambahan bantuan kepada keluarga rawan stunting dan keluarga stunting
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	2.248.120	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	5.376.400	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 Laporan	4 Laporan	16.500.000	16.500.000	13.275.156	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	174.147.370	174.147.370	143.500.970	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	57.180.028	40.844.884	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100 %	100 %	1.441.500.000	1.441.500.000	1.434.416.700	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.5 Ton	100,5 Ton	1.306.500.000	1.306.500.000	1.306.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	10 Ton	135.000.000	135.000.000	127.916.700	DINAS KETAHANAN PANGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88 %	88 %	1.296.495.020	647.602.770	1.221.183.840	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	874.249.850	202.977.600	478.507.950	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penambahan Anggaran DBHCHT
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	2 Laporan	91.645.170	91.645.170	87.270.170	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pergeseran Anggaran dalam Sub Kegiatan untuk Hari Pangan Sedunia
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan	2 Laporan	330.600.000	352.980.000	655.405.720	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	0 Persen	0 Persen	272.282.200	198.932.200	357.480.140	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	1 Buku	1 Buku	50.000.000	50.000.000	44.259.960	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.259.960	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	222.282.200	148.932.200	313.220.180	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000	75.000.000	62.375.790	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	147.282.200	73.932.200	250.844.390	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pergeseran antar sub kegiatan untuk bantuan pangan fortifikasi keluarga rawasan stunting / keluarga dengan balita stunting
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82.50 Persen	82.50 Persen	724.545.625	1.020.094.565	1.027.749.887	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %	100 %	724.545.625	1.020.094.565	1.027.749.887	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	314.365.311	165.965.311	206.271.413	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk Internal Control System (ICS) pasar rakyat / tradisional
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	75.913.640	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pergeseran Anggaran dalam Sub Kegiatan, untuk kegiatan pelayanan perijinan PSAT PDUK jemput bola pasar rakyat / tradisional
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	156.680.314	600.629.254	571.359.254	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Dokumen	12 Dokumen	153.500.000	153.500.000	174.205.580	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pergeseran Anggaran dalam Sub Kegiatan, untuk bimbingan teknis dan mitoring evaluasi kinerja kader keamanan pangan
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				126.962.143.126	144.471.756.546	165.649.504.001		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				126.962.143.126	144.471.756.546	165.649.504.001		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	49.603.158.547	49.603.158.547	55.757.350.570	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	105.881.320	105.881.320	70.411.116	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50.696.192	50.696.192	17.440.536	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pergeseran anggaran
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	744.900	744.900	744.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	834.900	834.900	834.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	744.900	744.900	744.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	834.900	834.900	834.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	2.025.528	2.025.528	685.980	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	49.125.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	24.420.573.910	24.420.573.910	21.551.640.375	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100,00 Persen	100,00 Persen					
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	23.457.825.000	22.163.802.680	19.514.672.245	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir anggaran perubahan
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	440.258.970	440.258.970	437.633.970	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	521.031.740	1.815.054.060	1.597.875.960	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyesuaian belanja pelayanan umum PJLP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	561.000	561.000	561.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	448.600	448.600	448.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	448.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 Persen	100,00 Persen	1.967.927.492	1.967.927.492	687.936.792	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.650.000	45.650.000	65.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	444.123.147	444.123.147	124.229.163	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Efisiensi belanja modal
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	111.330.919	111.330.919	99.727.619	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	59.254.700	59.254.700	12.026.304	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0 Dokumen	2.055.800	2.055.800	300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Efisiensi belanja modal
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000	135.000.000	67.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	448.962.990	448.962.990	138.250.589	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penambahan anggaran
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	721.549.936	721.549.936	180.253.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Efisiensi belanja modal
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 Persen	100,00 Persen	1.456.976.108	1.456.976.108	6.954.120.308	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	820.177.308	820.177.308	758.346.508	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyesuaian belanja mamin
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	636.798.800	636.798.800	6.195.773.800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penambahan anggaran PJLP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 Persen	100,00 Persen	21.651.799.717	21.651.799.717	26.493.241.979	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	152.903.870	152.903.870	133.615.215	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	310 Unit	310 Unit	20.209.584.460	20.209.584.460	25.177.047.972	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	5.246.748	5.246.748	5.246.748	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	252.150.499	252.150.499	272.648.879	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tambahan dari sub kegiatan lain
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1.031.914.140	1.031.914.140	904.683.165	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan dan efisiensi belanja modal
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00 Persen	100,00 Persen	446.546.333	1.446.546.333	1.186.138.275	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	292.628.105	292.628.105	173.971.259	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	192.105.000	192.105.000	150.955.564	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pergeseran anggaran untuk perubahan narasumber
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.523.105	100.523.105	23.015.695	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	153.918.228	1.153.918.228	1.012.167.016	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	153.918.228	1.153.918.228	1.012.167.016	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan dan pergeseran belanja mamin
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40.00 Ha	40.00 Ha	4.491.304.490	4.591.304.490	10.053.971.813	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	2.00 Persen					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91.00 Persen	91.00 Persen					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64.00 Persen	64.00 Persen					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2	8980648.51 Kt	8980648.51 Kt	3.500.956.367	3.600.956.367	9.211.760.969	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan					
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85 persen	85 persen					
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	4 Dokumen	892.918.573	992.918.573	1.821.007.114	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan dan pergeseran belanja bibit tanaman
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.719.152.247	1.719.152.247	1.533.685.032	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan, anggaran belanja dihold dan pergeseran mamin
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	888.885.547	888.885.547	5.857.068.823	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan dan penyesuaian untuk belanja PJLP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	522.128.272	522.128.272	291.883.466	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	8 Laporan	8 Laporan	522.128.272	522.128.272	291.883.466	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pergeseran belanja teknologi informasi ke jasa konsultasi
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	80 Ha	80 Ha	468.219.851	468.219.851	550.327.378	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	80 Ha	468.219.851	468.219.851	550.327.378	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir belanja barjas, efisiensi belanja modal, dan pergeseran belanja mamin
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamahayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	2.272.702.525	2.272.702.525	1.390.850.196	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3.00 Jenis	3.00 Jenis	2.272.702.525	2.272.702.525	1.390.850.196	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.797.771.026	1.797.771.026	930.086.822	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perubahan belanja kegiatan DED Kebun Raya Tinjomoyo
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	187.454.656	187.454.656	187.454.656	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pergeseran item barang di rekening belanja bahan bangunan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	287.476.843	287.476.843	273.308.718	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pergeseran anggaran untuk kegiatan Taman Kehati
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60.00 Persen	60.00 Persen	255.911.774	255.911.774	423.099.962	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50.00 Perusahaan	50.00 Perusahaan	167.370.758	167.370.758	47.849.454	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	94.646.358	94.646.358	13.672.157	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyesuaian anggaran perubahan SSH Perjadiin, Pengalihan sisa anggaran narasumber ke kegiatan ATK dan cetak
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	45 Laporan	45 Laporan	72.724.400	72.724.400	34.177.297	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyesuaian anggaran perubahan SSH Perjadiin, Pengalihan anggaran rompu lapangan ke cetak, pengalihan bahan komputer ke ATK dan cetak dan materai
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3	1 Unit	1 Unit	88.541.016	88.541.016	375.250.508	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	88.541.016	88.541.016	375.250.508	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan dan pengalihan belanja modal ke belanja barjas
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	100.00 Persen	494.046.742	494.046.742	268.384.809	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.80 Persen	85.80 Persen					
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	494.046.742	494.046.742	268.384.809	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 Dokumen	45 Dokumen	245.814.957	245.814.957	112.389.274	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengubah rincian belanja narasumber
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 Laporan Badan Usaha	105 Laporan Badan Usaha	248.231.785	248.231.785	155.995.535	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Efisiensi belanja modal
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56.00 Persen	56.00 Persen	2.361.345.650	2.617.367.150	2.591.430.942	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	2.361.345.650	2.617.367.150	2.591.430.942	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	433.487.300	433.487.300	407.244.748	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penambahan anggaran untuk kegiatan hari-hari lingkungan hidup
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 Lembaga	250 Lembaga	1.927.858.350	2.183.879.850	2.184.186.195	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan dan belanja barjas yang diserahkan ke masyarakat.

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.50 Persen	12.50 Persen	248.195.280	248.195.280	204.654.412	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2.00 Jenis	2.00 Jenis	248.195.280	248.195.280	204.654.412	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70 Entitas	70 Entitas	248.195.280	248.195.280	204.654.412	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penambahan anggaran untuk kegiatan adiwiyata
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	100.00 Persen	95.866.136	95.866.136	58.807.574	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60.00 Kasus	60.00 Kasus	95.866.136	95.866.136	58.807.574	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 Pengaduan	55 Pengaduan	69.466.306	69.466.306	39.683.928	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Efisiensi belanja modal
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen Perkara	1 Dokumen Perkara	26.399.830	26.399.830	19.123.647	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tambahan dari sub kegiatan lain
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70.00 Persen	70.00 Persen	66.693.065.649	82.846.657.569	93.714.815.448	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30.00 Persen	30.00 Persen					
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.70 Persen	91.70 Persen					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00 Persen	100.00 Persen	66.693.065.649	82.846.657.569	93.714.815.448	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	32 Kelompok	32 Kelompok	1.953.608.400	1.953.608.400	2.777.564.035	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Menggeser honor narsum ke konsumsi dan transport
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	3 Dokumen	4.371.723.417	14.840.315.337	32.096.985.765	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20 Unit	20 Unit	5.270.569.979	10.955.569.979	8.353.659.349	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mengakomodir tambahan anggaran perubahan
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	98.800.000	98.800.000	73.144.060	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 Ton	365 Ton	50.415.044.045	50.415.044.045	45.219.149.541	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Menggeser perlatan kerja penyapu
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 Laporan Ton	6 Laporan Ton	3.065.833.622	3.065.833.622	3.688.712.282	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Menyesuaikan rincian obyek belanja
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53 Dokumen	53 Dokumen	1.517.486.186	1.517.486.186	1.505.600.416	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.103		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.163.498.764	21.163.498.764	20.927.924.103		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan laporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	20.055.894.122	20.055.894.122	20.412.735.672	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	105.131.636	105.131.636	8.072.582	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000	1.530.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.032.300	1.032.300	1.032.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.251.800	1.251.800	1.251.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.032.300	1.032.300	1.032.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.251.800	1.251.800	2.096.909	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penambahan anggaran untuk belanja barang dan jasa
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	248.418	248.418	248.418	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	315.018	315.018	315.018	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	565.837	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	13.688.950.654	13.304.265.654	12.603.753.481	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	13.451.458.000	13.066.773.000	12.387.644.827	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan belanja pegawai
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	236.747.400	236.747.400	215.363.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan belanja pegawai
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	248.418	248.418	248.418	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	248.418	248.418	248.418	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	248.418	248.418	248.418	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	156.365.720	156.365.720	30.668.730	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	20 Orang	156.365.720	156.365.720	30.668.730	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	1.351.527.217	1.351.527.217	2.666.267.804	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.774.800	27.774.800	21.934.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	100.706.220	100.706.220	26.069.560	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	126.466.680	126.466.680	98.805.980	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	328.996.800	328.996.800	2.123.571.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penambahan anggaran
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	90.159.009	90.159.009	25.949.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	24.900.000	24.900.000	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	360.656.760	360.656.760	276.750.880	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penambahan anggaran perjalanan dinas
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	61.560.000	61.560.000	61.560.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	230.306.948	230.306.948	24.125.684	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	223.961.480	223.961.480	7.122.340	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	5 Unit	101.730.350	101.730.350	3.281.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	122.231.130	122.231.130	3.841.140	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	3.368.124.616	3.752.809.616	4.002.804.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	814.100.000	814.100.000	957.195.980	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.554.024.616	2.938.709.616	3.045.608.120	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	1.161.832.799	1.161.832.799	1.094.046.635	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	291.477.462	291.477.462	255.390.432	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	100 Unit	14.544.000	14.544.000	7.272.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395 Unit	379 Unit	410.763.497	410.763.497	386.336.363	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	410.650.000	410.650.000	410.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	34.397.840	34.397.840	34.397.840	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.60 Persen	99.60 Persen	340.613.230	340.613.230	209.638.230	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00 Persen	77.00 Persen					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432000 Dokumen	432000 Dokumen	235.197.430	235.197.430	185.247.430	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 Dokumen	100 Dokumen	8.659.960	8.659.960	4.534.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	38.659.960	38.659.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323500 Dokumen	323500 Dokumen	187.877.510	187.877.510	179.852.510	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100.00 Persen	100.00 Persen	41.119.920	41.119.920	1.419.920	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.159.960	16.159.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	24.959.960	24.959.960	559.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	100 Persen	55.635.920	55.635.920	22.110.920	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	28.225.960	28.225.960	8.425.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	12 Laporan	27.409.960	27.409.960	13.684.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.00 Persen	100.00 Persen	8.659.960	8.659.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	8.659.960	8.659.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.80 Persen	97.80 Persen	127.109.720	127.109.720	26.603.760	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45475 Dokumen	45475 Dokumen	68.629.840	68.629.840	20.219.840	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45450 Dokumen	45450 Dokumen	32.239.960	32.239.960	17.939.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	13.659.960	13.659.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.909.960	4.909.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	17.819.960	17.819.960	559.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00 Persen	100.00 Persen	42.319.920	42.319.920	5.523.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	21.159.960	21.159.960	4.664.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	21.159.960	21.159.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00 Persen	100.00 Persen	16.159.960	16.159.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	16.159.960	16.159.960	859.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	100.00 Persen	505.265.597	505.265.597	202.522.905	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	140.542.421	140.542.421	119.767.420	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.159.960	21.159.960	8.484.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	119.382.461	119.382.461	111.282.460	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	23.659.960	23.659.960	559.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	23.659.960	23.659.960	559.960	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	271.348.441	271.348.441	80.980.750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	8.899.940	8.899.940	1.699.940	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12.293.220	12.293.220	5.918.220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	65.972.120	65.972.120	13.582.120	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	5 Laporan	128.169.541	128.169.541	52.366.850	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 Dokumen	10 Dokumen	56.013.620	56.013.620	7.413.620	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	69.714.775	69.714.775	1.214.775	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	16.221.555	16.221.555	621.555	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	1 Laporan	53.493.220	53.493.220	593.220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengurangan anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	134.616.095	134.616.095	76.423.536	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	134.616.095	134.616.095	76.423.536	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	134.616.095	134.616.095	76.423.536	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.578.586.672	18.078.586.672	30.770.763.294		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.578.586.672	18.078.586.672	30.770.763.294		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen	10.809.346.697	10.784.346.697	9.659.816.627	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	112.677.400	112.677.400	50.498.584	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	51.962.000	51.962.000	20.134.784	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan anggaran dari sub kegiatan lain
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	253.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.874.900	1.874.900	208.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	253.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.874.900	1.874.900	832.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.495.800	2.495.800	344.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	28.473.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan dari sub kegiatan lain
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100 %	100 %	7.831.732.600	7.800.524.840	7.151.459.705	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	7.565.433.000	7.534.225.240	6.889.957.705	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Efisiensi
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	862.000	862.000	562.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	265.437.600	265.437.600	260.940.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pergeseran internal
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 %	100 %	689.370.771	664.370.771	369.132.702	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.666.546	21.666.546	19.055.826	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat pengurangan item

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.044.255	17.044.255	18.309.351	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat pengurangan item
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.351.337	49.351.337	29.733.792	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat pengurangan item
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	146.078.778	146.078.778	126.281.103	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat pengurangan item
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.198.975	35.198.975	10.800.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat tambahan anggaran
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	44.815.000	44.815.000	40.013.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat tambahan item dan ada pengalihan anggaran
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	375.215.880	350.215.880	124.938.880	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat tambahan anggaran
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	2.680.000	2.680.000	25.809.003	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit	2.680.000	2.680.000	25.809.003	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan dari sub kegiatan lain
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	902.547.382	933.755.142	960.054.248	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	250.465.742	250.465.742	278.863.168	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat tambahan anggaran
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	652.081.640	683.289.400	681.191.080	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pergeseran ke sub kegiatan lain
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100 %	100 %	1.270.338.544	1.270.338.544	1.102.862.385	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	81 Unit	776.198.142	776.198.142	655.542.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	129 Unit	107.156.857	107.156.857	125.174.875	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan anggaran untuk pemeliharaan jaringan internet
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5 Unit	347.379.942	347.379.942	286.190.510	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Efisiensi belanja modal
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	0.50 Persen	1.123.000.000	1.725.300.000	2.041.930.900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	454.101.400	436.918.067	434.134.846	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	130.750.000	130.750.000	120.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5 Kegiatan	5 Kegiatan	211.601.400	211.601.400	64.484.846	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mendapat tambahan anggaran dan sebagian sisa hold dialihkan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	69.750.000	52.566.667	249.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mendapat tambahan anggaran dan sebagian sisa hold dialihkan
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	42.000.000	42.000.000	150.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	668.898.600	1.288.381.933	1.607.796.054	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		4 Laporan		-	59.999.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	12 Dokumen	301.569.850	848.406.450	1.129.395.280	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sudah realisasi dan menambah 3 kegiatan serta tambahan honor, ada yang dialihkan
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	189.328.750	266.628.750	196.537.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	178.000.000	173.346.733	221.864.174	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2 persen	2 persen	4.530.502.175	4.453.202.175	11.133.669.222	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.34 %	77.34 %	494.326.000	417.026.000	1.393.090.480	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		160 Laporan		-	364.832.080	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		10 Laporan		-	320.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		12 Dokumen		-	100.552.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokumen	16 Dokumen	494.326.000	417.026.000	358.370.400	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mendapat tambahan dari sub kegiatan lain
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		6 Organisasi		-	249.336.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.34 %	77.34 %	878.811.160	878.811.160	1.324.219.278	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		17700 Orang		-	926.438.720	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	177 Organisasi	177 Organisasi	308.811.160	308.811.160	154.022.320	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan	570.000.000	570.000.000	243.758.238	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7.52 %	7.52 %	1.836.539.371	1.836.539.371	5.869.057.124	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4773 Orang	4607 Orang	175.000.000	175.000.000	4.833.725.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan anggaran untuk pelayanan KB MKJP
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	19.150.000	19.150.000	34.100.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Unit	12 Unit	644.549.331	644.549.331	485.450.109	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	220.600.000	529.075.000	257.462.015	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mengakomodir dukungan operasional petugas pelayanan KB berbegark (muwan)
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	12 Laporan	444.790.040	136.315.040	18.850.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	30 Orang	62.600.000	62.600.000	69.725.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dilakukan monitoring dan evaluasi kelompok KB pria
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	269.850.000	269.850.000	169.745.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.34 %	77.34 %	1.320.825.644	1.320.825.644	2.547.302.340	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	177 Laporan	177 Laporan	182.424.630	182.424.630	43.180.740	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke sub kegiatan lain
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16 Unit	16 Unit	1.138.401.014	1.138.401.014	1.841.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mendapat pagu tambahan untuk DASHAT
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		177 Kampung			662.921.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32 Persen	60.32 Persen	1.115.737.800	1.115.737.800	7.935.346.545	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32 %	60.32 %	945.687.800	945.687.800	854.051.545	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	120.000.000	207.094.530	94.575.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dialihkan ke kegiatan lain
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		8 Laporan / Dokumen			122.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan	477.000.000	389.905.470	255.834.065	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perubahan tempat kegiatan dan dialihkan ke kegiatan lain

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	15 Unit	20.000.000	20.000.000	220.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan dari sub kegiatan lain
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	2 Laporan	217.687.800	217.687.800	110.629.980	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tambahan dari sub kegiatan lain
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90 Orang	90 Orang	66.000.000	66.000.000	31.462.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	16 Kelompok	16 Kelompok	45.000.000	45.000.000	19.150.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32 %	60.32 %	170.050.000	170.050.000	7.081.295.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan	170.050.000	170.050.000	362.795.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		10 laporan			2.866.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		10 laporan			3.852.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				328.974.122.137	328.974.122.137	362.565.602.971		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	80.213.655.576	80.213.655.576	78.350.599.765	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	100 persen	120.847.200	120.847.200	116.847.200	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	55.036.400	55.036.400	53.536.400	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.300	2.532.300	2.032.300	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.631.800	2.631.800	2.131.800	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.300	2.532.300	2.032.300	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.751.800	2.751.800	2.251.800	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.578.800	3.578.800	3.578.800	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.783.800	1.783.800	1.283.800	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	100 persen	25.092.993.400	23.092.631.400	20.356.248.889	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/bulan	212 Orang/bulan	24.559.627.000	22.559.265.000	19.825.418.489	DINAS PERHUBUNGAN	Penyesuaian Belanja Pegawai/Gaji
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	515.295.000	515.295.000	518.559.000	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.623.800	8.623.800	5.823.800	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.423.800	7.423.800	5.023.800	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.023.800	2.023.800	1.423.800	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	100 persen	380.343.787	380.343.787	446.095.177	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	1 Unit	75.802.500	75.802.500	91.605.000	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	350 Paket	304.541.287	304.541.287	354.490.177	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	100 persen	1.676.289.036	1.676.289.036	1.005.754.423	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	88.770.077	88.770.077	88.770.077	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	184.611.315	184.611.315	138.406.788	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal Peralatan Kantor
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	77.109.915	77.109.915	77.109.915	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	117.270.940	117.270.940	106.404.195	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	194.977.738	194.977.738	138.349.723	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	97.500.000	97.500.000	55.294.000	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	476.341.720	476.341.720	273.950.000	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	439.707.331	439.707.331	127.469.725	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal, dan Penambahan Anggaran
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	100 persen	1.394.889.758	1.394.889.758	1.319.197.970	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.077.421.500	1.077.421.500	1.077.421.500	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	1 Unit	41.558.400	41.558.400	6.926.400	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal Kendaraan Listrik
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	45.258.962	45.258.962	45.258.962	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	185.858.400	185.858.400	185.858.400	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1 Unit	44.792.496	44.792.496	3.732.708	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	100 persen	5.315.690.800	7.316.052.800	7.654.541.942	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	37.340.892	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.321.690.800	1.321.690.800	1.497.730.800	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.946.000.000	5.946.362.000	6.119.470.250	DINAS PERHUBUNGAN	Penganggaran Upah PjLP
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	100 persen	5.732.601.595	5.732.601.595	5.682.379.726	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	116 Unit	3.851.496.702	3.851.496.702	3.729.709.836	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	157.420.853	157.420.853	157.420.853	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1.117.481.000	1.117.481.000	1.117.481.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	48.619.821	48.619.821	48.619.821	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	517.979.616	517.979.616	593.193.216	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	100 persen	40.500.000.000	40.500.000.000	41.769.534.438	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.500.000.000	40.500.000.000	41.769.534.438	DINAS PERHUBUNGAN	Penggunaan SILPA 2024
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	15.00 trayek	15.00 trayek	248.760.466.561	248.760.466.561	284.215.003.207	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66.82 Persen	66.82 Persen					
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33 Persen	33 Persen					
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92 Persen	92 Persen					
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,94 Rasio	6,94 Rasio					
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRL	100 persen	100 persen	496.363.600	496.363.600	1.142.368.075	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	13 Dokumen	496.363.600	496.363.600	1.142.368.075	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	100 persen	12.858.769.240	12.858.769.240	17.485.308.520	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	17 Unit	56 Unit	7.380.467.158	7.380.467.158	8.376.700.194	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal, Penambahan Anggaran
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	385 Unit	3198 Unit	2.963.761.805	2.963.761.805	6.737.964.952	DINAS PERHUBUNGAN	Pergeseran Anggaran
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	103 Unit	1.887.367.049	1.887.367.049	1.744.567.049	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	82 Unit	627.173.228	627.173.228	626.076.326	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3 unit	3 unit	1.512.268.523	1.512.268.523	1.372.624.973	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	20 Orang	20 Orang	277.616.468	277.616.468	204.350.918	DINAS PERHUBUNGAN	Pergeseran Upah PJLP
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	3 Unit	1.234.652.055	1.234.652.055	1.168.274.055	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal Bangunan
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	12 bulan	2.057.313.110	2.057.313.110	2.023.764.710	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Dokumen	800 Dokumen	503.056.750	503.056.750	387.152.270	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal dan Pergeseran Upah PJLP
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.554.256.360	1.554.256.360	1.636.612.440	DINAS PERHUBUNGAN	Pergeseran Rincian Obyek Belanja, Penambahan Anggaran
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	12 bulan	2.658.202.834	2.658.202.834	1.684.372.129	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	29 Unit	1.444.042.252	1.444.042.252	496.645.797	DINAS PERHUBUNGAN	Efisiensi Belanja Modal
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5300 Dokumen	5300 Dokumen	246.507.519	246.507.519	246.507.519	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	35 Unit	967.653.063	967.653.063	941.218.813	DINAS PERHUBUNGAN	Pergeseran Upah PJLP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	12 bulan	12 bulan	3.375.368.254	3.375.368.254	2.581.350.250	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.889.074.610	1.889.074.610	1.657.569.790	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Belanja, Pergeseran Upah PJLP
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1.277.094.460	1.277.094.460	879.394.460	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	209.199.184	209.199.184	44.386.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1 tahun	1 tahun	58.040.000	58.040.000	25.350.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	13.790.000	13.790.000	6.750.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	12 Laporan	44.250.000	44.250.000	18.600.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12 bulan	12 bulan	4.917.359.890	4.917.359.890	5.588.937.240	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	4.917.359.890	4.917.359.890	5.588.937.240	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan angkutan	100 persen	100 persen	220.155.313.820	220.155.313.820	251.805.244.260	DINAS PERHUBUNGAN	
		pendukung pelayanan BRT	100 persen	100 persen					
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	263.463.820	263.463.820	255.955.420	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	287 Unit	287 Unit	219.891.850.000	219.891.850.000	251.549.288.840	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	202.949.520	202.949.520	202.949.520	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	202.949.520	202.949.520	202.949.520	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	55.249.740	55.249.740	15.340.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	49.674.740	49.674.740	110.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.575.000	5.575.000	15.230.000	DINAS PERHUBUNGAN	Penambahan Anggaran
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	314.502.030	314.502.030	249.265.530	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	43.246.500	43.246.500	110.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	271.255.530	271.255.530	249.155.530	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	98.766.000	98.766.000	38.128.000	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	30 Unit	30 Unit	14.796.000	14.796.000	6.603.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	83.970.000	83.970.000	31.525.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				74.167.345.617	74.328.836.717	67.494.609.231		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				72.418.935.597	72.444.218.937	64.845.763.998		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	100.00 Persen	22.597.116.450	21.936.478.510	20.965.585.677	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 persen	100 persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	150.919.869	150.919.869	125.437.439	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	75.935.101	75.935.101	51.539.139	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.063.154	5.063.154	4.939.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.699	4.851.699	4.617.600	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.063.154	5.063.154	4.939.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.699	4.851.699	4.617.600	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.155.062	5.155.062	4.784.100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	19.061.145.420	18.297.854.180	17.370.444.237	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	139 Orang/bulan	18.639.007.000	17.875.715.760	16.950.338.353	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	408.704.000	408.704.000	407.393.320	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	34 Laporan	4.602.904	4.602.904	4.103.848	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diberikan ke sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	35 Laporan	4.478.140	4.478.140	4.366.740	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34 Dokumen	34 Dokumen	4.353.376	4.353.376	4.241.976	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 persen	100 persen	337.229.760	258.720.860	160.282.985	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	337.229.760	258.720.860	160.282.985	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Pengadaan Mebel dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	1.371.407.947	1.386.795.347	1.423.270.747	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	81.818.160	81.818.160	177.272.680	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Pengadaan Mebel, pemeliharaan listrik kantor
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	459.120.827	459.120.827	166.930.924	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diberikan ke sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Hibah Drone Lanumad, AC standing 53 Juta tambahan dr infrastruktur
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.600.000	35.600.000	35.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	45.387.400	35.387.400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.442.076	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan	30.525.000	30.525.000	33.855.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	301.638.574	301.638.574	153.642.038	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diberikan ke sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan SPPD
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	417.705.386	417.705.386	805.140.630	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Pengadaan Mebel
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100 persen	100 persen	109.355.779	109.355.779	78.267.210	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	109.355.779	109.355.779	78.267.210	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diberikan ke sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	507.700.000	658.087.400	660.805.285	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.700.000	7.700.000	8.712.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Pengadaan Mebel
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	500.000.000	650.387.400	652.093.285	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	1.059.357.675	1.074.745.075	1.147.077.774	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tidak ada pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	577.705.228	593.092.628	598.678.760	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diambilkan dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, , Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, pemeliharaan mobil OB Van
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	63.550.698	63.550.698	49.263.566	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diberikan ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	174.821.750	174.821.750	192.894.998	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	199.320.000	199.320.000	266.330.400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	pemeliharaan gedung kominfo, sewa pickup
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00 Persen	100.00 Persen	4.945.556.000	5.476.304.400	6.671.442.211	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	4.945.556.000	5.476.304.400	6.671.442.211	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	5000 Permohonan	900.000.000	947.869.960	632.275.470	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan, pergeseran PJLP ke Sekretariat, lomba keterbukaan informasi publik, Sosialisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Narasumber Dewan
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	100 Persentase	199.728.000	199.728.000	76.653.690	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan, Workshop Pertelekomunikasian (1 Kegiatan)
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2000 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	1.010.000.000	1.167.192.680	992.868.451	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan diberikan ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Talkshow Lapor Semar Solusi AWP, Sosialisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Narasumber Dewan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	100 Persentase	260.000.000	336.937.000	1.135.993.340	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	5 Media	2.226.100.000	2.474.848.760	3.533.781.490	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Cetak baliho, lomba short film, lomba fotografi, video Indonesia raya, pertempuran lima hari, Sosialisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Narasumber Dewan, Video Konten tentang Optimalisasi Kebijakan Kepala Daerah, Festival Film
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	90 Orang	349.728.000	349.728.000	299.869.770	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan, Workshop Pengembangan TIK (2 Kegiatan)
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terseleenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	100.00 Persen	44.876.263.147	45.031.436.027	37.208.736.110	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 persen	100 persen	44.876.263.147	45.031.436.027	37.208.736.110	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	3.532.259.897	3.578.855.057	3.209.000.549	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan yang diambilkan dari sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, san switch, FS Data Center, DED Data Center, diambil 11.170.000 ke jaringan intra
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	517 Aplikasi	2.569.340.000	2.600.331.280	2.456.869.580	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	pembuatan game legenda kota semarang berbasis AI dan metaverse
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	517 Aplikasi	13.950.203.250	13.965.590.650	2.528.757.900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	23.924.460.000	23.971.055.160	23.743.636.055	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan yang diberikan ke sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah, pemeliharaan listrik data center, access point, jalur lokal ring balaikota, perapihan kabel FO, Smart tv dihold sebagian dari bappeda, 11.170.000 dr pusat kendali
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	6 Program	900.000.000	915.603.880	5.270.472.027	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan, penyusunan masterplan smart city, pelatihan TIK dan keamanan informasi, SPPD smart city, makan minum sosialisasi smart city, sosialisasi ruang warga, Pengembangan Virtual Tour Kota Semarang
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				805.000.000	836.207.760	494.431.378		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	100.00 Persen	805.000.000	836.207.760	494.431.378	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 persen	100 persen	805.000.000	836.207.760	494.431.378	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	34 Orang	270.000.000	285.603.880	174.706.160	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Sosialisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Narasumber Dewan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi <u>Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</u>	100 Persentase	100 Persentase	235.000.000	250.603.880	145.763.864	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Sosialisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Narasumber Dewan
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	147 Dokumen	170.000.000	170.000.000	80.686.354	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	15 Dokumen	130.000.000	130.000.000	93.275.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	terdapat pergeseran nilai obyek kegiatan dalam satu sub kegiatan
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terseleenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 persen	100 persen	943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	943.410.020	1.048.410.020	2.154.413.855	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Lisensi Software Keamanan Informasi, 170 juta dr pusat kendali, 100 juta dr APT
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				25.488.592.490	27.588.592.490	23.937.632.864		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.488.592.490	27.588.592.490	23.937.632.864		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop)	100.00 Persen	100.00 Persen	13.901.894.152	13.583.322.152	11.847.006.290	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkop)	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (dinkop)	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	109.849.400	109.849.400	53.012.783	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	51.143.000	51.143.000	3.499.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.891.400	1.891.400	1.001.400	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.290.900	2.290.900	1.250.900	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.179.400	1.179.400	645.400	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.458.900	1.458.900	834.900	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.885.800	1.885.800	1.368.600	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.412.583	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	12.075.891.600	11.757.319.600	10.795.554.330	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen					
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	11.805.218.000	11.486.646.000	10.525.097.130	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pengurangan pagu anggaran Perubahan Belanja Pegawai
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	269.664.000	269.664.000	269.560.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Digeser ke Rek 2.17.01.2.06.0009 sebesar Rp 104.000,-
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	448.600	448.600	336.200	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	561.000	561.000	561.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	861.267.355	861.267.355	461.464.228	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	171.784.366	171.784.366	153.985.050	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Digesor ke Rek 2.17.01.2.06.0008 untuk penambahan anggaran Jamuan rapat
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	22.114.840	22.114.840	22.114.840	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	40.000.300	40.000.300	24.482.740	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	26.020.437	26.020.437	25.254.117	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000	1.920.000	1.920.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	55.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Penambahan dari Rek 2.17.01.2.06.0002 sebesar 17.799.316 dan dari 2.17.01.2.08.0002 sebesar Rp. 7.200.684,-
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	409.751.860	409.751.860	178.647.482	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	149.675.552	149.675.552	60.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Terkena Efisiensi belanja Modal
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	53.101.912	53.101.912	90.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	7.284.264	7.284.264	45.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Terkena Efisiensi belanja Modal
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	45.817.648	45.817.648	45.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Terkena Efisiensi belanja Modal
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	313.530.000	313.530.000	107.614.545	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	313.530.000	313.530.000	107.614.545	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Digesor ke Rek 2.17.06.2.01.0003 untuk Pengadaan Buku Wajib Koperasi bagi 177 KKMP sebesar Rp. 198.705.150 Digesor ke Rek 2.17.01.2.06.0008 untuk penambahan anggaran Jamuan rapat sebesar Rp. 7.200.684 dan ke Rek 2.17.01.2.06.0009 sebesar Rp. 9.621
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	488.253.885	488.253.885	429.270.404	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	401.550.296	401.550.296	346.215.418	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	47.099.986	47.099.986	47.099.986	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	3.00 Persen	150.000.000	150.000.000	39.065.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 koperasi	15 koperasi	75.000.000	75.000.000	20.900.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	75.000.000	75.000.000	20.900.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pergeseran Internal dalam 1 sub kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 koperasi	2 koperasi	75.000.000	75.000.000	18.165.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	75.000.000	75.000.000	18.165.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pergeseran Internal dalam 1 sub kegiatan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	50.00 Persen	504.320.000	504.320.000	158.160.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 koperasi	100 koperasi	504.320.000	504.320.000	158.160.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	200 Unit Usaha	504.320.000	504.320.000	158.160.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	- Pergeseran internal pada sub kegiatan untuk Jamuan kegiatan Bintek Akuntabilitas Koperasi Melalui Audit Forensik - Pergeseran Ke program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi - Pergeseran perjalanan dinas biasa dialihkan untuk perjalanan dinas dalam kota
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33.00 Persen	33.00 Persen	394.320.000	394.320.000	263.710.510	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69 persen	69 persen	394.320.000	394.320.000	263.710.510	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	200 Unit Usaha	394.320.000	394.320.000	263.710.510	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	- Pergeseran internal pada sub kegiatan untuk menunjang kegiatan Bintek Penerapan KKKPK Online bagi Pengelola Koperasi dan kegiatan Evaluasi Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi - Pergeseran dari program pengawasan dan pemeriksaan koperasi untuk menunjang program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	10.00 Persen	601.700.000	601.700.000	549.819.918	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitas Pelatihan	1.00 Persen	1.00 Persen					
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77 persen	77 persen	601.700.000	601.700.000	549.819.918	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 Orang	640 Orang	601.700.000	601.700.000	549.819.918	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	tambahan dari rek 2.17.06.2.01.0005 untuk penambahan kegiatan manajemen pengelolaan koperasi sebesar Rp 112.655.678 serta penambahan pagu untuk dukungan fasilitas pendidikan pengurus dan pengawas KKMP sebesar Rp. 211.700.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28 Persen	28 Persen	2.060.280.000	2.092.353.680	1.211.844.613	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 persen	50 persen	2.060.280.000	2.092.353.680	1.211.844.613	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	26 Kelompok Masyarakat	405.000.000	405.000.000	411.755.150	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Penambahan dari Rek 2.17.01.2.08.0002 untuk Pengadaan buku wajib koperasi bagi 177 KKMP
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	1.687.353.680	800.089.463	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pergeseran internal dan pergeseran antar sub dialihkan ke Rek 2.17.05.2.01.0001 sebesar Rp. 112.655.678, ke rek 2.17.08.2.01.0006 sebesar Rp. 115.200.000 serta penambahan pagu untuk dukungan pembentukan KKMP sebesar Rp. 257.000.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 Persen	3.00 Persen	4.360.294.000	6.456.538.390	6.510.208.993	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 orang	600 orang	4.360.294.000	6.456.538.390	6.510.208.993	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	410 Unit Usaha	228.700.000	138.996.000	1.592.942.320	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000	50.000.000	21.764.102	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	150 Unit Usaha	210.270.000	726.306.840	606.778.860	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pergeseran antar Sub Kegiatan ke Rek 2.17.07.2.01.00011 Sub. Keg. fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro untuk Jamuan Fasilitas Sertifikasi Halal
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490 Orang	100 Orang	1.201.410.000	1.201.410.000	1.114.145.116	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit Usaha	150 Unit Usaha	203.830.000	267.544.400	180.845.150	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pergeseran aantar sub dialihkan ke Rek .17.07.2.01.0008 Sub. Keg. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro untuk Jamuan Kemitraan Usaha
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 Unit Usaha	250 Unit Usaha	1.149.184.000	1.149.184.000	582.987.650	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Tambahan dari Rek S2.17.07.2.01.00011 ub.Keg. Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro untuk Jamuan Fasilitas Sertifikasi Halal
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 Orang	1060 Orang	1.316.900.000	2.923.097.150	2.410.745.795	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	20.00 Persen	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 orang	100 orang	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1200 Unit Usaha	700 Unit Usaha	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Pergeseran internal untuk menunjang kegiatan Pameran Tingkat Nasional dan Dekranasda, Penambahan dari Rek 2.17.06.2.01.0005 sebesar Rp. 115.200.000 serta penambahan anggaran untu support system kegiatan Asian Championship (U20 Asia Women) Rp. 301.500.000.
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20.451.360.181	20.551.360.181	16.046.286.104		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				20.451.360.181	20.551.360.181	16.046.286.104		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.254.270.246	14.887.010.462	12.705.049.610	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihilangkan	11 dokumen	11 dokumen	123.626.100	123.626.100	6.048.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	51.345.200	51.345.200	313.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.487.900	2.487.900	463.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.150.100	6.150.100	953.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.993.900	2.993.900	463.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.448.600	6.448.600	1.251.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.797.400	1.797.400	223.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.403.000	2.403.000	628.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	1.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	10.096.668.600	9.722.391.960	8.627.570.839	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9.812.725.000	9.438.448.360	8.350.493.639	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	279.000.000	279.000.000	276.180.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penambahan Anggaran
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.798.400	1.798.400	112.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.347.800	1.347.800	561.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.797.400	1.797.400	223.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100 persen	100 persen	255.981.640	237.028.840	97.150.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 Unit	100 Unit	65.520.000	32.760.000	32.760.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	190.461.640	204.268.840	64.390.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	1.669.343.051	1.241.391.798	667.029.635	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	639.405.451	440.245.780	417.690.726	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Efisiensi Belanja Modal
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	91.000.000	60.490.630	38.372.890	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	83.000.000	55.024.030	17.783.648	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	27 Dokumen	27 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	48.700.000	32.000.000	22.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	713.167.600	523.975.600	155.949.581	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	84.070.000	119.655.758	4.982.790	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Efisiensi Belanja Modal
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 persen	100 persen	2.162.280.880	2.536.557.520	2.468.011.476	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	801.000.000	801.000.000	708.605.576	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Efisiensi Belanja
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.361.280.880	1.735.557.520	1.759.405.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyesuaian Belanja
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	946.369.975	1.026.014.244	839.238.760	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	503.409.976	503.409.976	439.210.350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	394.000.000	473.644.269	355.118.360	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Efisiensi Belanja
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3713.00 Penanam	3713.00 Penanam	841.000.000	941.000.000	565.698.803	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 Buah	5 Buah	450.000.000	550.000.000	294.887.020	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	417.000.000	213.455.240	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	133.000.000	81.431.780	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 Dokumen	2 Dokumen	391.000.000	391.000.000	270.811.783	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	141.000.000	141.000.000	108.290.338	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	162.521.445	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595.00 Investor	595.00 Investor	1.201.874.293	1.400.741.377	1.098.625.634	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.201.874.293	1.400.741.377	1.098.625.634	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1.101.874.293	1.300.741.377	1.098.515.634	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	110.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	95.50 Persen	2.900.000.000	3.050.392.700	1.402.853.069	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100 %	100 %	2.900.000.000	3.050.392.700	1.402.853.069	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	13 Dokumen	950.000.000	1.065.392.800	489.330.327	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	900.000.000	934.999.900	502.046.040	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	900.000.000	900.000.000	345.524.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	150.000.000	150.000.000	65.952.102	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	2 Nilai	120.000.000	138.000.000	77.432.616	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	9 %	9 %	120.000.000	138.000.000	77.432.616	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	20.000.000	38.000.000	18.785.590	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	100.000.000	58.647.026	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99.00 Persen	99.00 Persen	134.215.642	134.215.642	196.626.372	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	100 %	134.215.642	134.215.642	196.626.372	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	134.215.642	134.215.642	196.626.372	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pergeseran Internal
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				59.261.755.080	59.661.755.080	62.133.370.649		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				59.261.755.080	59.661.755.080	62.133.370.649		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 Persen	100 Persen	15.033.082.919	15.486.946.436	18.843.689.932	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 Persen	100.00 Persen					
		presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100 persen	100 persen					
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	181.635.180	181.635.180	173.396.354	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	63.061.400	63.061.400	103.153.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.566.800	6.566.800	923.126	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	769.500	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	762.428	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	1.168.935	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	575.653	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	42.006.980	42.006.980	18.672.780	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	47.370.932	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen	100 Persen	10.976.874.000	10.807.612.600	10.123.643.710	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	10.564.510.000	10.395.248.600	9.752.935.632	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyesuaian gaji sesuai desk BPKAD
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	387.264.000	387.264.000	363.684.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	2.200.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	1.080.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.400.000	3.400.000	56.100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	1.159.950	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	1.954.400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000	3.700.000	573.628	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	100 persen	90.000.000	90.000.000	36.671.904	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	90.000.000	90.000.000	36.671.904	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	100 Persen	1.097.005.694	1.150.869.211	2.305.410.623	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.000.000	20.000.000	25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	200.117.246	253.980.763	1.349.518.442	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana prasarana UPTD
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	46.000.000	46.000.000	71.549.290	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana prasarana UPTD
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	50.000.000	50.000.000	48.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana prasarana UPTD
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	45.000.000	45.000.000	32.628.100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana prasarana UPTD
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.940.000	8.940.000	8.940.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	45.000.000	80.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	480.762.105	480.762.105	255.629.224	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penambahan anggaran
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	201.186.343	201.186.343	434.145.567	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis	9.00 Jenis	152.016.295	152.016.295	518.065.011	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	134.727.560	134.727.560	280.164.044	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	17.288.735	17.288.735	237.900.967	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penambahan anggaran
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	891.922.786	1.061.184.186	2.822.848.072	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	318.000.000	318.000.000	877.281.773	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penambahan anggaran
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	55.000.000	98.550.343	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana dan prasarana UPTD
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	518.922.786	688.184.186	1.847.015.956	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana dan prasarana UPTD
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	1.643.628.964	2.043.628.964	2.863.654.258	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana dan prasarana UPTD
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	456.765.042	456.765.042	403.160.720	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peremajaan sarana dan prasarana UPTD
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	7.272.000	7.272.000	7.272.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1.139.988.319	1.539.988.319	2.417.266.538	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rehab gedung UPTD
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	45.00 Persen	2.950.487.224	2.950.487.224	2.626.464.214	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	10 kegiatan	1.470.487.224	1.470.487.224	1.122.325.554	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1000 Orang	1000 Orang	746.962.000	746.962.000	616.491.400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	5 Kegiatan	185.694.224	185.694.224	117.796.384	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300 Orang	300 Orang	537.831.000	537.831.000	388.037.770	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan SDM Kepemudaan
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1600.00 Orang	1600.00 Orang	1.480.000.000	1.480.000.000	1.504.138.660	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Organisasi	40 Organisasi	759.855.620	759.855.620	919.635.190	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan SDM Kepemudaan
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	1000 Orang	720.144.380	720.144.380	584.503.470	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan SDM Kepemudaan
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1273.00 jumlah	1273.00 jumlah	38.778.184.937	38.724.321.420	38.163.216.503	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	5 Lapangan					
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah	6.00 jumlah	5.322.184.937	5.268.321.420	3.715.173.519	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pegeseran anggaran ke dalam sub kegiatan lain (penyediaan jasa umum)
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	6 Unit	5.322.184.937	5.268.321.420	3.715.173.519	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	5.091.000.000	5.091.000.000	6.506.169.141	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.101.000.000	1.101.000.000	1.646.738.079	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	1000 Orang	2.490.000.000	2.490.000.000	3.359.431.062	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1373.00 Orang	1373.00 Orang	2.865.000.000	2.865.000.000	2.767.465.310	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7 Pelatda	7 Pelatda	2.240.000.000	2.240.000.000	2.134.311.180	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penambahan anggaran pengganti anggaran KKO yang di efisiensi
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	50 Orang	625.000.000	625.000.000	633.154.130	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.174.408.533	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penambahan anggaran modifikasi RAGA
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	10 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	474.408.533	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	53.00 Kegiatan	53.00 Kegiatan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	53 Kegiatan	53 Kegiatan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				43.067.706.940	42.967.706.940	48.907.560.401		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				26.773.970.587	26.673.970.587	30.266.933.624		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	17.998.272.835	17.898.272.835	15.990.505.815	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen					
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar	9 dokumen	9 dokumen	102.869.600	102.869.600	78.421.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	50.536.400	50.536.400	27.043.600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran dan pergeseran internal
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	463.900	463.900	253.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	418.900	418.900	208.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	463.900	463.900	253.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	418.900	418.900	208.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	567.600	567.600	456.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100 persen	100 persen	13.480.698.380	13.342.211.780	12.006.066.029	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	13.153.399.000	13.014.912.400	11.732.566.649	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pengurangan belanja pegawai
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	326.627.980	326.627.980	272.827.980	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	223.800	223.800	223.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	223.800	223.800	223.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	223.800	223.800	223.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	149.977.400	49.977.400	49.977.400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	74 Orang	104.972.400	4.972.400	4.972.400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Edit indikator kinerja
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	74 Orang	45.005.000	45.005.000	45.005.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar	100 persen	100 persen	1.079.087.773	1.079.087.773	747.038.867	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	168.879.500	168.879.500	168.879.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Edit indikator kinerja
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	6 Paket	93.118.450	93.118.450	62.888.580	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Efisiensi belanja modal
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	6 Paket	69.543.720	69.543.720	47.512.780	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Edit indikator kinerja
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	43.313.163	43.313.163	47.636.117	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran dan pergeseran internal
2.22.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	115 Laporan	239.850.000	239.850.000	181.297.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	60 Laporan	275.000.000	275.000.000	138.631.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	189.382.940	189.382.940	100.193.390	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Efisiensi belanja modal
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	100 persen	100 persen	161.913.580	161.913.580	14.728.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 Unit	7 Unit	161.913.580	161.913.580	14.728.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Efisiensi belanja modal
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	100 persen	100 persen	2.126.697.700	2.265.184.300	2.259.500.330	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.050.090.000	1.050.090.000	1.050.090.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.076.607.700	1.215.094.300	1.209.410.330	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Menggeser honor PJLP dan anggaran laundry UPTD
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100 persen	100 persen	897.028.402	897.028.402	834.772.489	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	459.924.522	459.924.522	407.679.179	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	183.908.343	183.908.343	164.483.343	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pengurangan anggaran dan pergeseran internal
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127 Unit	200 Unit	253.195.537	253.195.537	262.609.967	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran dan pergeseran internal
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30.00 Persen	30.00 Persen	3.310.037.038	3.310.037.038	6.142.330.244	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30 persen	30 persen	1.067.911.194	1.067.911.194	3.472.148.410	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	1.067.911.194	1.067.911.194	3.472.148.410	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk berbagai kegiatan
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30 persen	30 persen	222.488.750	222.488.750	222.488.750	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.02.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 Objek	10 Objek	222.488.750	222.488.750	222.488.750	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30 persen	30 persen	2.019.637.094	2.019.637.094	2.447.693.084	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 Orang	2600 Orang	2.019.637.094	2.019.637.094	2.447.693.084	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk 3 kegiatan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30.00 Persen	30.00 Persen	4.725.620.714	4.725.620.714	7.485.079.355	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	30 persen	30 persen	4.725.620.714	4.725.620.714	7.485.079.355	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	650 Sertifikat	846 Sertifikat	1.425.370.564	1.434.370.564	3.782.549.355	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 Lembaga	191 Lembaga	3.300.250.150	3.291.250.150	3.702.530.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	91.57 Persen	91.57 Persen	740.040.000	740.040.000	649.018.210	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91.57	91.57	740.040.000	740.040.000	649.018.210	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.05.2.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 Objek	465 Objek	740.040.000	740.040.000	649.018.210	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.293.736.353	16.293.736.353	18.640.626.777		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	100.00 Persen	11.880.684.360	11.880.684.360	14.621.806.012	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1453030 orang	1453030 orang	6.598.086.280	6.598.086.280	7.050.026.319	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	6.598.086.280	6.598.086.280	7.050.026.319	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan kajian
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100 persen	100 persen	5.137.397.400	5.137.397.400	7.443.545.956	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5 Lokasi	117.552.640	117.552.640	205.912.936	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk 3 kajian
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	6 Unit	4.919.844.760	4.919.844.760	7.137.633.020	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan keg fisik pembangunan dan pemeliharaan sarpras di 4 UPTD
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Perubahan honor narsum
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95 persen	95 persen	145.200.680	145.200.680	128.233.737	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 Laporan	14 Laporan	145.200.680	145.200.680	128.233.737	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	3.513.051.993	3.513.051.993	2.810.057.025	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100 persen	100 persen	3.513.051.993	3.513.051.993	2.810.057.025	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	842.556.000	842.556.000	267.311.680	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pergeseran internal
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	14 Kegiatan	1.044.997.713	1.044.997.713	1.252.572.760	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 Promosi	28 Promosi	1.625.498.280	1.625.498.280	1.290.172.585	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	90.00 Persen	90.00 Persen	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90 persen	90 persen	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1000 Orang	3267 Orang	900.000.000	900.000.000	1.208.763.740	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				17.996.450.300	17.996.450.300	28.231.973.051		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.562.110.347	16.562.110.347	26.867.570.683		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.129.191.990	15.129.191.990	13.596.741.055	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dok	8 Dok	121.842.600	121.842.600	88.122.600	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	58.064.000	58.064.000	25.744.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Dialihkan untuk dukungan kegiatan kearsipan
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.808.600	4.808.600	4.033.600	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.713.000	4.713.000	4.088.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.257.000	4.257.000	4.257.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100 Persen	100 Persen	12.381.250.000	12.301.715.240	11.930.011.753	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	12.168.320.000	12.088.785.240	11.717.306.753	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian gaji
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	210.018.000	210.018.000	210.018.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.454.200	1.454.200	1.454.200	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.457.800	1.457.800	1.232.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	453.079.980	453.079.980	115.697.710	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.784.298	16.784.298	8.392.149	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9.380.980	9.380.980	9.380.980	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.193.490	29.193.490	25.299.590	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pindah ke SPBE dan Sarpras
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.305.540	10.305.540	10.305.540	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.320.000	10.320.000	10.320.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	24.325.000	24.325.000	10.503.850	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	149.767.500	149.767.500	41.174.201	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Tambahan SPPD pasca penambahan anggaran 20/06/2025
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	203.003.172	203.003.172	321.400	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Komitmen efisiensi
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	463.807.407	463.807.407	5.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	463.807.407	463.807.407	5.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Komitmen efisiensi
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	745.900.483	825.435.243	825.435.243	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	265.741.200	265.741.200	265.741.200	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	480.159.283	559.694.043	559.694.043	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	963.311.520	963.311.520	632.473.749	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	543.774.759	543.774.759	373.857.249	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	101.203.870	101.203.870	31.140.012	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	278.729.288	278.729.288	191.521.488	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Komitmen efisiensi
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1 Rasio	1.233.190.357	1.233.190.357	12.886.539.508	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100 Persen	100 Persen	791.609.727	650.310.347	1.578.168.874	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	41.580.590	41.580.590	7.143.960	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Tambahan SPPD

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	60.056.900	24.477.400	4.444.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5 Layanan	5 Layanan	56.418.540	25.000.000	25.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	34.566.420	25.000.000	25.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	41.834.920	5.000.000	1.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	12 Dokumen	12 Dokumen	52.332.000	24.432.000	9.744.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	129.911.920	129.911.920	882.159.914	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Komitmen efisiensi
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	125.457.640	125.457.640	564.972.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Tambahan perubahan
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	249.450.797	249.450.797	58.705.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Perubahan rincian belanja
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100 Persen	100 Persen	441.580.630	582.880.010	11.308.370.634	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	2 Orang	49.755.820	49.755.820	976.511.280	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	43.762.200	24.097.200	24.097.200	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	191.315.160	420.292.554	10.303.438.954	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Honor tim teknis pembangunan gedung perpustakaan dan FGD DAK
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	2 Orang	56.162.250	11.567.736	450.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2 Lokus	2 Lokus	100.585.200	77.166.700	3.873.200	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	100.00 Persen	199.728.000	199.728.000	384.290.120	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	47.722.800	47.722.800	1.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2 Orang	2 Orang	22.125.680	22.125.680	750.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara, digunakan untuk kegiatan rapat pengidentifikasi naskah kuno yang dimiliki masyarakat
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	25.597.120	25.597.120	750.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara, digunakan untuk kegiatan rapat pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki masyarakat
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100 Persen	100 Persen	152.005.200	152.005.200	382.790.120	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2 Eksemplar	2 Eksemplar	145.647.270	145.647.270	380.194.910	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyusunan antologi cerita tentang kampungku dan dukungan sub kegiatan
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5 Eksemplar	5 Eksemplar	6.357.930	6.357.930	2.595.210	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara, digunakan untuk perawatan koleksi etnis nusantara
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.434.339.953	1.434.339.953	1.364.402.368		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100 Persen	100 Persen	640.981.920	640.981.920	867.374.885	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100 Persen	100 Persen	250.844.110	250.844.110	149.941.520	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1500 Berkas	1500 Berkas	81.218.900	81.218.900	84.044.450	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	750 Berkas	750 Berkas	46.567.040	46.567.040	7.318.810	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Laporan	47 Laporan	123.058.170	123.058.170	58.578.260	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari Sub Kegiatan penilaian dan penetapan autentisitas Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai standart yang ditetapkan	100 Persen	100 Persen	143.459.830	143.459.830	632.654.435	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	50 Arsip	50 Arsip	26.352.790	26.352.790	511.185.660	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari Sub Kegiatan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	150 Arsip	117.107.040	117.107.040	121.468.775	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100 Persen	100 Persen	246.677.980	246.677.980	84.778.930	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	82.456.260	82.456.260	9.532.230	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	47 Laporan	47 Laporan	164.221.720	164.221.720	75.246.700	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	100.00 Persen	698.113.023	698.113.023	433.865.143	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100 Persen	100 Persen	84.247.523	84.247.523	54.124.043	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Berkas	1000 Berkas	35.636.663	35.636.663	24.168.613	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Tambahan untuk perjalanan dinas pelaksanaan pemusnahan di Kab. Magelang
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	100 Arsip	48.610.860	48.610.860	29.955.430	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100 Persen	100 Persen	56.042.640	56.042.640	29.575.475	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	33.035.800	33.035.800	23.390.735	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Perubahan rincian belanja
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	23.006.840	23.006.840	6.184.740	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Komitmen efisiensi

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	90 Persen	90 Persen	217.100.720	217.100.720	80.478.210	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Daftar	5 Daftar	75.000.000	75.000.000	60.250.210	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	7 Arsip	100.000.720	100.000.720	728.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	20 Arsip	20 Arsip	8.700.000	8.700.000	8.700.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Perubahan hastag kegiatan
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	20 Arsip	20 Arsip	33.400.000	33.400.000	10.800.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	90 Persen	90 Persen	142.053.540	142.053.540	201.940.890	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	100 Arsip	100.000.720	100.000.720	46.431.100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari beberapa sub kegiatan
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	100 Arsip	42.052.820	42.052.820	155.509.790	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	90 Persen	90 Persen	198.668.600	198.668.600	67.746.525	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	100 Arsip	41.344.400	41.344.400	22.180.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	20 Arsip	20 Arsip	57.188.200	57.188.200	42.435.700	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Perubahan rincian belanja
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	20 Arsip	20 Arsip	100.136.000	100.136.000	3.130.025	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80 Persen	80 Persen	95.245.010	95.245.010	63.162.340	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80 Persen	80 Persen	95.245.010	95.245.010	63.162.340	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	53.295.010	53.295.010	32.462.340	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penyesuaian alokasi anggaran dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	250 Arsip	41.950.000	41.950.000	30.700.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Perubahan rincian belanja
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN				14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.296.118.937	14.901.118.937	11.559.229.459		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	30.00 Orang	8.109.963.900	8.109.963.900	6.668.139.385	DINAS PERIKANAN	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen					
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	103.344.400	103.344.400	103.344.400	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.539.200	50.539.200	50.539.200	DINAS PERIKANAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	534.000	534.000	534.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	624.000	624.000	624.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	506.000	506.000	506.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	624.000	624.000	624.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	517.200	517.200	517.200	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	6.399.387.400	6.305.764.120	5.120.835.744	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	25 Orang/bulan	6.172.501.000	6.078.877.720	4.893.949.344	DINAS PERIKANAN	Penyesuaian gaji dan tpp
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	225.650.000	225.650.000	225.650.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	562.000	562.000	562.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	337.200	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	337.200	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	60.600.000	60.600.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	30.300.000	30.300.000	500.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	30.300.000	30.300.000	500.000	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	433.379.913	433.379.913	278.134.887	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.153.412	34.153.412	34.153.412	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.361.467	39.361.467	39.361.467	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.059.037	50.059.037	5.296.356	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	35.000.000	35.000.000	16.397.045	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	86.677.681	86.677.681	86.304.681	DINAS PERIKANAN	SPPD
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	188.128.316	188.128.316	96.621.926	DINAS PERIKANAN	Efisiensi belanja modal
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.00 Jenis	3.00 Jenis	139.808.796	139.808.796	42.086.716	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	5 Unit	139.808.796	139.808.796	42.086.716	DINAS PERIKANAN	Efisiensi belanja modal
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	100.00 %	524.854.404	618.477.684	740.560.146	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	199.999.168	199.999.168	203.000.000	DINAS PERIKANAN	Penyesuaian anggaran listrik karena ada kenaikan
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	151.227.236	151.227.236	126.367.616	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	173.628.000	267.251.280	411.192.530	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	448.588.987	448.588.987	382.177.493	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkannya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS PERIKANAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	345.259.979	345.259.979	295.883.820	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	27.606.359	27.606.359	27.606.359	DINAS PERIKANAN	Pemeliharaan servis perlengkapan kantor
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	31.762.650	31.762.650	18.777.264	DINAS PERIKANAN	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	3169.37 ton	1.643.198.000	1.643.198.000	1.372.790.504	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	250000.00 ekor	250000.00 ekor	477.000.000	477.000.000	508.615.464	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	30 Unit	477.000.000	477.000.000	508.615.464	DINAS PERIKANAN	Alat tangkap untuk nelayan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240.00 Orang	240.00 Orang	505.000.000	505.000.000	362.617.100	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	505.000.000	505.000.000	362.617.100	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60.00 Orang	60.00 Orang	661.198.000	661.198.000	501.557.940	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	661.198.000	661.198.000	501.557.940	DINAS PERIKANAN	Honor alih daya perorangan di alihkan ke sekretariat 2 orang 5 bulan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	4080.17 ton	2.694.439.000	3.299.439.000	2.446.198.674	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200.00 Orang	200.00 Orang	607.497.000	607.497.000	272.535.039	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	10 Kelompok	607.497.000	607.497.000	272.535.039	DINAS PERIKANAN	Pelatihan budidaya ikan di dalam kolam terpal
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi	60.00 Orang	60.00 Orang	2.086.942.000	2.691.942.000	2.173.663.635	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	1.479.378.000	1.819.378.000	1.763.438.553	DINAS PERIKANAN	Pemeliharaan BBI dan Belanja untuk di serahkan ke masyarakat serta honor alih daya perorangan di pindah ke sekretariat 2 orang 5 bulan
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	4 Unit	4 Unit	607.564.000	872.564.000	410.225.082	DINAS PERIKANAN	Efisiensi belanja modal
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	2 Kasus	200.000.000	169.950.351	90.468.216	DINAS PERIKANAN	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Pelatihan POKMASWAS	40.00 Orang	40.00 Orang	200.000.000	169.950.351	90.468.216	DINAS PERIKANAN	
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	200.000.000	169.950.351	90.468.216	DINAS PERIKANAN	Uji Laboratorium
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17808.18 ton	17808.18 ton	1.648.518.037	1.678.567.686	981.632.679	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	80.00 Orang	80.00 Orang	153.997.000	153.997.000	60.175.880	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	153.997.000	153.997.000	60.175.880	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100.00 Orang	100.00 Orang	500.000.000	500.000.000	125.530.165	DINAS PERIKANAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	500.000.000	500.000.000	125.530.165	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40.00 Orang	40.00 Orang	994.521.037	1.024.570.686	795.926.634	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	17800 Ton	17800 Ton	632.888.000	632.888.000	529.718.734	DINAS PERIKANAN	Di geser untuk pemeliharaan BBI & honor alih daya perorangan di geser ke sekretariat 1 orang 5 bulan
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	361.633.037	391.682.686	266.207.900	DINAS PERIKANAN	Belanja untuk di serahkan ke masyarakat
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN				37.808.615.375	40.792.115.375	34.723.648.618		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.808.615.375	40.792.115.375	34.723.648.618		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	24.095.995.030	24.095.995.030	21.800.604.795	DINAS PERTANIAN	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen					
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27 dokumen	27 dokumen	108.853.360	108.853.360	61.800.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	53.259.626	53.259.626	13.540.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	5.593.734	5.593.734	10.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	4 dokumen	4 dokumen	19.596.212.654	18.897.285.254	17.210.559.088	DINAS PERTANIAN	
		Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	100 %	100 %					
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/bulan	145 Orang/bulan	19.359.553.000	18.660.625.600	16.980.155.434	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	231.926.000	231.926.000	225.670.000	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.423.800	1.423.800	1.423.800	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.886.054	1.886.054	1.886.054	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.423.800	1.423.800	1.423.800	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	659.014.924	659.014.924	448.425.998	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	60.000.000	96.694.202	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	175.143.227	175.143.227	163.115.810	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000	30.000.000	10.780.000	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.660.000	9.660.000	9.660.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	15.750.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	125.838.000	125.838.000	52.290.400	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	218.373.697	218.373.697	100.135.586	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	142.423.912	142.423.912	33.026.939	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	0 Unit	104.981.692	104.981.692	10.000	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8 Unit	37.442.220	37.442.220	33.016.939	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	2.334.794.960	3.033.722.360	2.993.865.290	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.200	400.000.200	422.000.200	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.934.794.760	2.633.722.160	2.571.865.090	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset Dinas Pertanian	100 %	100 %	1.254.695.220	1.254.695.220	1.052.927.480	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	377.174.511	377.174.511	388.947.929	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	168.474.845	168.474.845	168.474.845	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8 Unit	665.085.865	665.085.865	455.594.656	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069.22 ton	51069.22 ton	8.950.320.221	10.489.670.002	7.840.027.406	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi hasil peternakan Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	36519.00 ton 28 kelompok	36519.00 ton 28 kelompok	6.878.315.367	8.239.236.128	5.501.406.538	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	29 Laporan	29 Laporan	518.903.452	1.879.824.213	1.853.093.462	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9 Laporan	9 Laporan	6.359.411.915	6.359.411.915	3.648.313.076	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	75 %	75 %	1.322.486.525	1.322.486.525	1.337.927.082	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	6 Dokumen	1.322.486.525	1.322.486.525	1.337.927.082	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60 %	60 %	174.000.000	437.133.057	514.259.494	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	9 Laporan	9 Laporan	174.000.000	437.133.057	514.259.494	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	100 ekor	100 ekor	575.518.329	490.814.292	486.434.292	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	380 Ekor	380 Ekor	575.518.329	490.814.292	486.434.292	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	2.834.200.000	3.893.646.182	3.098.800.142	DINAS PERTANIAN	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	3 unit	3 unit	2.834.200.000	3.893.646.182	3.098.800.142	DINAS PERTANIAN	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		16 Unit	-	-	859.018.943	DINAS PERTANIAN	Penambahan Sub Kegiatan baru berdasar Pemetaan Kemendagri untuk DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 Unit	9 Unit	2.614.400.000	3.254.400.000	343.501.618	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	26 Unit	219.800.000	639.246.182	1.896.279.581	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 Persen	-5.00 Persen	900.044.839	1.084.748.876	743.911.450	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	14 kelurahan	617.994.145	717.994.145	532.114.248	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	617.994.145	717.994.145	532.114.248	DINAS PERTANIAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	2 kegiatan	2 kegiatan	58.600.000	58.600.000	45.202.800	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3 laporan	3 laporan	36.800.000	36.800.000	28.652.800	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan	2 Laporan	21.800.000	21.800.000	16.550.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95 %	95 %	223.450.694	308.154.731	166.594.402	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	14 Laporan	14 Laporan	124.850.694	209.554.731	115.464.402	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	23.600.000	23.600.000	18.030.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	35 Produk	35 Produk	55.000.000	55.000.000	16.550.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	20.000.000	20.000.000	16.550.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80.00 Persen	80.00 Persen	203.650.000	203.650.000	191.883.983	DINAS PERTANIAN	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7 kelompok	7 kelompok	203.650.000	203.650.000	191.883.983	DINAS PERTANIAN	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	173.204.650	173.204.650	167.314.967	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	20 Ha	20 Ha	30.445.350	30.445.350	24.569.016	DINAS PERTANIAN	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33.00 kelompok	33.00 kelompok	824.405.285	1.024.405.285	1.048.420.842	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55 %	55 %	824.405.285	1.024.405.285	1.048.420.842	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	250.830.000	250.830.000	103.369.131	DINAS PERTANIAN	Efisiensi belanja
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Unit	50 Unit	537.055.285	737.055.285	815.011.697	DINAS PERTANIAN	Penambahan belanja
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit	36.520.000	36.520.000	16.040.014	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		25 Orang			114.000.000	DINAS PERTANIAN	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Ketahanan Pangan Pertanian
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN				75.468.162.652	75.768.162.652	62.579.149.349		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				75.468.162.652	75.768.162.652	62.579.149.349		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	42.123.125.918	41.122.944.918	37.946.600.942	DINAS PERDAGANGAN	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	109.845.228	109.845.228	19.511.900	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	52.173.016	52.173.016	19.200.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.471.099	1.471.099	150.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.428.099	1.428.099	3.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.471.099	1.471.099	150.000	DINAS PERDAGANGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.428.099	1.428.099	3.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.873.816	1.873.816	3.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	2.900	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen	100 persen	30.240.145.762	29.054.666.522	26.287.966.479	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	142 Orang/bulan	29.841.709.000	28.656.229.760	25.942.977.479	DINAS PERDAGANGAN	pengurangan belanja pegawai
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	395.592.000	395.592.000	344.980.000	DINAS PERDAGANGAN	siswa anggaran, digeser untuk pemeliharaan peralatan kantor
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	948.254	948.254	3.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	948.254	948.254	3.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	948.254	948.254	3.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	100 persen	1.197.039.507	1.197.039.507	1.449.688.760	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.926.150	9.926.150	9.926.150	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	104.548.347	104.548.347	483.080.440	DINAS PERDAGANGAN	hold belanja modal; pengadaan komputer dan printer untuk 6 Korwil Pasar
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	30.041.630	30.041.630	22.307.370	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	199.999.880	199.999.880	134.542.470	DINAS PERDAGANGAN	tambahan untuk belanja meterai
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	397.960.000	397.960.000	476.611.830	DINAS PERDAGANGAN	tambahan untuk cetak karcis
3.30.01.2.06.0008	Fasilitas Kuniungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	179.660.000	179.660.000	138.500.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	274.903.500	274.903.500	184.720.500	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	7.331.650.445	7.516.948.685	8.785.950.870	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.707.229.065	6.707.229.065	6.179.370.000	DINAS PERDAGANGAN	pergeseran internal antar sub kegiatan : sisa anggaran listrik untuk perbaikan kantor
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	624.421.380	809.719.620	2.606.580.870	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen	100 persen	3.244.444.976	3.244.444.976	1.403.482.933	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	607.999.976	607.999.976	253.596.150	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	20.000.000	20.000.000	19.998.000	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	330.000.000	330.000.000	419.643.783	DINAS PERDAGANGAN	tambahan anggaran pemeliharaan dari sisa sub kegiatan lain
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.286.445.000	2.286.445.000	710.245.000	DINAS PERDAGANGAN	hold belanja modal
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	100 persen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	85.847.190	116.621.990	109.432.990	DINAS PERDAGANGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	26 pasar	27.163.272.070	28.267.029.470	22.184.353.868	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	26 pasar	26 pasar	21.255.942.070	21.425.203.470	16.228.322.297	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	11.190.163.906	10.943.287.066	7.053.863.597	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	50 Unit	10.065.778.164	10.481.916.404	9.174.458.700	DINAS PERDAGANGAN	hold belanja modal
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	52 pasar	5.907.330.000	6.841.826.000	5.956.031.571	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.005.890.000	5.305.890.000	4.159.453.110	DINAS PERDAGANGAN	honor alihdaya disentralkan ke sekretariat
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	901.440.000	1.535.936.000	1.796.578.461	DINAS PERDAGANGAN	pendataan pasar dan PKL
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 Persen	3.93 Persen	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	100 persen	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	3.737.910.894	3.753.298.294	227.287.434	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1713153249 US\$	1713153249 US\$	497.776.580	497.776.580	551.350.848	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36 persen	36 persen	497.776.580	497.776.580	551.350.848	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	268.687.000	265.687.000	264.850.294	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	113.445.610	113.445.610	168.530.200	DINAS PERDAGANGAN	tambahan anggaran dari sub kegiatan lain untuk misi dagang dengan Kota lain
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	115.643.970	118.643.970	117.970.354	DINAS PERDAGANGAN	tambahan anggaran dari sub kegiatan lain untuk pelatihan pelaku ekspor
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86 Persen	86 Persen	1.000.000.000	1.138.486.600	859.842.856	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86 persen	86 persen	1.000.000.000	1.138.486.600	859.842.856	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	62780 Unit	62780 Unit	637.138.581	775.625.181	636.598.632	DINAS PERDAGANGAN	belanja pompa air untuk instalasi TUM
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	5 Orang	362.861.419	362.861.419	223.244.224	DINAS PERDAGANGAN	hold belanja modal
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 Persen	40 Persen	860.230.000	872.004.800	700.280.410	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	860.230.000	872.004.800	700.280.410	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	705.880.000	656.880.000	499.468.010	DINAS PERDAGANGAN	pergeseran internal antar sub kegiatan, anggaran FGD dialihkan ke belanja konsultan
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	10 UMKM	154.350.000	215.124.800	200.812.400	DINAS PERDAGANGAN	pergeseran internal antar sub kegiatan, anggaran FGD dialihkan ke belanja konsultan
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN				18.406.507.350	18.571.626.200	21.955.365.511		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				18.406.507.350	18.571.626.200	21.955.365.511		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen	10.845.266.200	10.845.266.200	9.975.526.429	DINAS PERINDUSTRIAN	
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Peindustrian	100.00 Porsen	100.00 Porsen					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Porsen	100.00 Porsen					
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan _ Dinas Perindustrian	11 Dokument	11 Dokument	116.651.370	116.651.370	66.431.370	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokument Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokument Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokument	4 Dokument	53.141.600	53.141.600	4.671.600	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokument RKA-SKPD	Jumlah Dokument RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokument RKA-SKPD	1 Dokument	1 Dokument	1.797.400	1.797.400	1.797.400	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokument Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokument Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokument Perubahan RKA-SKPD	1 Dokument	1 Dokument	2.796.900	2.796.900	2.796.900	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokument DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokument DPA-SKPD	1 Dokument	1 Dokument	2.363.680	2.363.680	2.363.680	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokument Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokument Perubahan DPA-SKPD	1 Dokument	1 Dokument	2.845.590	2.845.590	2.845.590	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3.706.200	3.706.200	3.706.200	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokument Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokument	1 Dokument	50.000.000	50.000.000	48.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100 Porsen	100 Porsen	7.176.009.488	7.065.699.928	6.662.920.529	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.915.728.000	6.805.418.440	6.539.895.169	DINAS PERINDUSTRIAN	Pengurangan Belanja Pegawai
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokument Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokument	12 Dokument	249.684.000	249.684.000	117.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Pergeseran Anggaran
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokument Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokument	1 Dokument	7.722.128	7.722.128	2.550.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokument Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokument	1 Dokument	695.200	695.200	695.200	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian	100.00 Porsen	100.00 Porsen	148.000.000	148.000.000	8.636.360	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	148.000.000	148.000.000	8.636.360	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100 Porsen	100 Porsen	676.821.190	676.821.190	486.560.810	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	31.681.697	31.681.697	41.641.697	DINAS PERINDUSTRIAN	Pergeseran Anggaran
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	64.996.173	64.996.173	74.956.173	DINAS PERINDUSTRIAN	Pergeseran Anggaran
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	80.000.000	80.000.000	74.534.990	DINAS PERINDUSTRIAN	Pergeseran Anggaran
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	47.268.982	47.268.982	22.404.450	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	73.085.150	73.085.150	82.325.150	DINAS PERINDUSTRIAN	Pergeseran Anggaran
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	206.040.000	206.040.000	190.648.350	DINAS PERINDUSTRIAN	Penyesuaian Belanja
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokument Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokument	0 Dokument	173.749.188	173.749.188	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Pengurangan Belanja Modal
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100 Porsen	100 Porsen	825.497.255	825.497.255	410.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	12.791.918	12.791.918	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Pengurangan Belanja Modal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	702.705.337	702.705.337	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Pengurangan Belanja Modal
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	110.000.000	110.000.000	410.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Penambahan Peralatan Produksi
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perindustrian	100 Persen	100 Persen	1.459.128.800	1.569.438.360	1.584.578.360	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	383.441.200	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000	50.000.000	65.140.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Pergeseran Anggaran
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.009.128.800	1.119.438.360	1.135.997.160	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100 Persen	100 Persen	443.158.097	443.158.097	756.299.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	288.504.494	288.504.494	255.294.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	110.000.000	110.000.000	460.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN	Pengurangan Belanja Modal, dan Penambahan Anggaran
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	50.000	50.000	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	0.50 Persen	5.400.000.000	5.410.000.000	9.263.184.735	DINAS PERINDUSTRIAN	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96.00 Persen	96.00 Persen					
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	20 IKM	5.400.000.000	5.410.000.000	9.263.184.735	DINAS PERINDUSTRIAN	
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra	1 Sentra					
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	51.681.200	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000	600.000.000	363.027.422	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000.000	854.049.500	590.503.540	DINAS PERINDUSTRIAN	Penambahan Anggaran
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	13 Dokumen	620.000.000	630.000.000	553.735.800	DINAS PERINDUSTRIAN	Tambahan DBHCHT dan Workshop HACCP
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	11 Dokumen	2.780.000.000	2.925.950.500	7.507.832.133	DINAS PERINDUSTRIAN	Penambahan Anggaran Event
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	196.404.640	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPU, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	4.00 Persen	1.604.881.150	1.760.000.000	2.051.228.167	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	15 IKM	1.604.881.150	1.760.000.000	2.051.228.167	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	undefined	2 Dokumen	3 Dokumen	1.074.881.150	630.000.000	686.592.320	DINAS PERINDUSTRIAN	Penambahan Anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	4 Dokumen	530.000.000	1.130.000.000	1.364.635.847	DINAS PERINDUSTRIAN	Penambahan DBHCHT
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	0.50 Persen	556.360.000	556.360.000	665.426.180	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	4 Persen	556.360.000	556.360.000	665.426.180	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000	200.000.000	373.063.580	DINAS PERINDUSTRIAN	Penambahan Pendataan Potensi CSR
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	3 Dokumen	306.360.000	306.360.000	277.371.120	DINAS PERINDUSTRIAN	
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	14.991.480	DINAS PERINDUSTRIAN	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH				248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				248.777.048.297	255.976.051.333	265.130.574.991		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	45.00 OPD	167.574.016.650	173.042.789.090	180.160.073.730	SEKRETARIAT DAERAH	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Bagian Tata Usaha		100.00 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Tata Usaha
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian TU		100.00 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Tata Usaha
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Keuangan
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Tata Usaha
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Tata Usaha
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Rumah Tangga

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	133.869.450	133.869.450	59.903.982	SEKRETARIAT DAERAH	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	66.429.850	66.429.850	31.237.475	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	716.900	BAGIAN KEUANGAN	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	626.900	BAGIAN KEUANGAN	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.900	4.258.900	3.499.900	BAGIAN KEUANGAN	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.538.900	3.538.900	834.900	BAGIAN KEUANGAN	
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	22.987.908	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Penambahan honor narsum dan belanja cetak penggandaan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100 %	100 %	45.851.442.400	44.851.495.200	42.258.922.968	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	276 Orang/bulan	44.788.323.000	43.788.375.800	41.200.180.168	BAGIAN KEUANGAN	Penyesuaian Belanja Pegawai
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.059.648.000	1.059.648.000	1.058.520.000	BAGIAN KEUANGAN	Penyesuaian Honorarium Pengelola Keuangan
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	111.400	BAGIAN KEUANGAN	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1 Laporan	2.685.600	2.685.600	111.400	BAGIAN KEUANGAN	Penyesuaian Target Indikator
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	5 dokumen	1.247.279.172	1.279.352.852	414.955.285	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	122.915.102	138.951.942	25.046.405	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1.124.364.070	1.140.400.910	389.908.880	BAGIAN KEUANGAN	Penyesuaian Target Indikator
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 Paket	4 Paket	414.659.773	414.659.773	206.384.773	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	183.259.773	183.259.773	183.259.773	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	50 Orang	231.400.000	231.400.000	23.125.000	BAGIAN KEUANGAN	Penyesuaian Target Indikator
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	33.009.416.937	33.147.217.016	23.852.417.869	SEKRETARIAT DAERAH	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.151.077.137	1.166.763.919	1.090.138.919	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	702.094.004	733.518.244	560.459.798	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	713.597.299	713.597.299	168.532.896	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.889.753.400	10.966.690.400	11.936.036.523	BAGIAN TATA USAHA	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	17.862.670.500	17.862.670.500	7.312.006.461	BAGIAN TATA USAHA	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.690.224.597	1.703.976.654	2.785.243.272	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	9.971.747.266	14.043.308.427	18.647.654.953	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	10 Unit	1.954.710.000	4.655.710.000	8.029.310.000	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	15 Unit	496.392.000	496.392.000	5.161.523.992	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	1482 Unit	1.430.518.037	2.486.040.032	2.815.814.240	BAGIAN RUMAH TANGGA	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	153 Unit	176 Unit	4.632.549.054	4.947.588.220	2.632.310.721	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1.457.578.175	1.457.578.175	8.696.000	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	15.858.590.038	15.950.914.438	16.330.307.096	SEKRETARIAT DAERAH	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	181.549.600	95.293.587	BAGIAN TATA USAHA	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	9.403.219.632	9.403.219.632	9.403.219.632	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.564.000.000	2.564.000.000	2.869.300.785	BAGIAN TATA USAHA	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	588.990.920	588.990.920	628.763.806	BAGIAN TATA USAHA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	3.182.379.486	3.213.154.286	3.333.729.286	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	24.431.520.236	26.300.781.636	38.109.231.043	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	182.679.999	182.679.999	167.432.400	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149 Unit	149 Unit	2.857.775.348	2.857.775.348	2.649.485.354	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 Unit	1500 Unit	121.078.800	121.078.800	121.078.800	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	17.770.145.883	19.639.407.283	31.750.294.283	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1140 Unit	1140 Unit	2.807.627.018	2.807.627.018	2.807.627.018	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	807 Unit	603 Unit	692.213.188	692.213.188	613.313.188	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	5.342.375.800	5.342.375.800	6.937.982.772	SEKRETARIAT DAERAH	
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	239.313.000	239.313.000	239.313.000	BAGIAN KEUANGAN	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	850.336.800	850.336.800	850.336.800	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.252.726.000	4.252.726.000	5.848.332.972	BAGIAN TATA USAHA	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	3.955.000.000	3.955.000.000	3.955.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	89 Indeks	4.110.970.938	4.142.611.658	2.446.846.655	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	552.074.925	697.602.226	530.361.182	BAGIAN ORGANISASI	Penambahan anggaran makan minum
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	2.233.691.216	2.024.777.722	1.098.690.368	BAGIAN ORGANISASI	Penambahan anggaran jasa konsultasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	569.058.000	648.481.033	303.096.332	BAGIAN ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	756.146.797	771.750.677	514.698.773	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100 Persen	100 Persen	23.247.144.640	23.481.202.840	26.940.466.334	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	2.041.242.491	2.056.846.371	1.869.945.362	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	14.098.183.150	14.160.382.190	18.011.476.515	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	7.107.718.999	7.263.974.279	7.059.044.457	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	70.972.759.273	72.677.226.049	77.004.824.747	SEKRETARIAT DAERAH	
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70.00 Persen	70.00 Persen					
		Indek Pelayanan Publik	128.00 Persen	128.00 Persen					
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	100.00 Persen					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 Kecamatan	16 Kecamatan	4.577.262.403	4.577.262.403	4.047.874.544	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	480.000.000	480.000.000	367.757.090	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Penambahan anggaran barang jasa
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	817.438.390	817.438.390	513.042.762	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Pergeseran internal sub kegiatan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3.164.162.810	3.164.162.810	3.120.541.843	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Penambahan anggaran barang jasa
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	115.661.203	115.661.203	46.532.849	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	53.377.518.689	53.957.053.449	63.848.471.183	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	7 Dokumen	43.074.379.400	43.281.840.480	50.594.767.869	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan operasional TPQ, semarang bersolawat
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	2 Dokumen	9.668.739.289	9.864.776.129	12.476.525.594	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	kegiatan visi misi
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	3 Dokumen	634.400.000	810.436.840	777.177.720	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan donor darah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Perduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 Persen	100 Persen	5.872.140.252	5.983.099.252	4.891.330.726	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 Dokumen	565 Dokumen	685.727.323	706.764.163	362.046.060	BAGIAN HUKUM	Kegiatan diadakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perwal Operasional RT/RW terkait kebutuhan Kec/Kel menerbitkan SK untuk RT/RW
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	55 Kasus	1.855.535.087	1.919.249.487	1.341.036.964	BAGIAN HUKUM	digunakan untuk penggandaan hasil kaajain
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	550 Dokumen	550 Dokumen	3.330.877.842	3.357.085.602	3.188.247.702	BAGIAN HUKUM	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80 Persen	80 Persen	7.145.837.929	8.159.810.945	4.217.148.294	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	1.566.072.736	1.582.109.576	933.366.142	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	5.579.765.193	6.577.701.369	3.283.782.152	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 Persen	100.00 Persen	10.230.272.374	10.256.036.194	7.965.676.514	SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa		100.00 Persen					Penambahan Indikator sesuai dengan RPJMD untuk mengkomodir bagian Administrasi Pembangunan
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daera	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 Persen	100 Persen	5.519.826.084	5.582.674.564	5.349.065.583	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	6 Dokumen	1.080.696.863	1.096.084.263	1.157.259.391	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Penambahan belanja
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	4 Laporan	931.100.838	947.137.678	1.062.472.133	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Penambahan belanja
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	8 Dokumen	3.508.028.383	3.539.452.623	3.129.334.059	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Penambahan belanja
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100 Persen	100 Persen	968.192.250	984.229.090	609.942.237	SEKRETARIAT DAERAH	
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen					
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	227.714.770	227.714.770	208.315.931	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Penambahan belanja cetak dan honor tim
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	624.236.320	624.236.320	291.353.674	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengalihan anggaran belanja sewa
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	116.241.160	132.278.000	110.272.632	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Penambahan honor tim
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100 Persen	100 Persen	3.473.745.140	3.489.132.540	1.756.667.894	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.704.934.320	1.720.321.720	888.701.617	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	Penambahan anggaran untuk bimtek dokumen
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	805.638.820	805.638.820	504.672.577	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	Penambahan anggaran untuk bimtek pengelolaan aplikasi
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	220 Orang	963.172.000	963.172.000	363.293.700	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100 persen	100 persen	268.508.900	200.000.000	250.000.800	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	6 Dokumen	268.508.900	200.000.000	250.000.800	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Penambahan belanja
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD				138.860.115.826	140.938.973.172	118.746.066.977		
4.02	SEKRETARIAT DPRD				138.860.115.826	140.938.973.172	118.746.066.977		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	78.742.074.241	79.681.037.967	70.680.649.531	SEKRETARIAT DPRD	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	200.685.318	200.685.318	117.091.700	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	92.462.418	92.462.418	31.018.800	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.561.400	4.561.400	4.561.400	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.306.900	8.306.900	8.306.900	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.900	4.370.900	4.370.900	SEKRETARIAT DPRD	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.731.400	5.731.400	5.731.400	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	30.881.400	30.881.400	8.731.400	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	8.799.554.031	8.674.939.471	8.712.705.649	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8.430.282.000	8.305.667.440	8.370.575.618	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Belanja
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	365.452.431	365.452.431	338.310.431	SEKRETARIAT DPRD	Efisiensi Belanja Modal
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.685.000	1.685.000	1.685.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	2.134.600	2.134.600	2.134.600	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	8 buah	70.000.000	70.000.000	2.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	2.000.000	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	50 orang	710.000.000	816.053.050	500.103.050	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	710.000.000	816.053.050	500.103.050	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Efisiensi Kegiatan
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	5.862.697.691	7.601.390.369	6.155.366.686	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	397.327.845	397.327.845	351.494.200	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	473.413.980	487.389.216	287.389.216	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	378.878.046	440.487.546	388.161.279	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	225.776.400	225.776.400	145.070.000	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.945.427.240	3.725.002.640	3.913.246.923	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Kegiatan
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.366.874.180	2.250.406.722	995.005.068	SEKRETARIAT DPRD	Perubahan dan Efisiensi Kegiatan
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	3.913.303.861	4.245.589.879	639.932.282	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	2.833.059.662	2.916.298.840	450.001	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	605.792.613	854.839.453	478.653.715	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	474.451.586	474.451.586	160.828.566	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Belanja
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	6.363.395.971	6.304.232.211	3.332.789.349	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	22.477.693	22.477.693	22.477.693	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	167.162.256	99.135.936	80.698.354	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.173.756.022	6.182.618.582	3.229.613.302	SEKRETARIAT DPRD	Rencana Penghapusan Tenaga Pendamping
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.211.983.307	2.054.843.307	1.557.862.785	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	1.080.776.904	1.080.776.904	883.095.115	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	248 Unit	328.313.203	328.313.203	153.176.403	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	561.044.000	403.904.000	403.904.000	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Kegiatan
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	241.849.200	241.849.200	117.687.267	SEKRETARIAT DPRD	Efisiensi Kegiatan
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100 %	100 %	48.721.954.062	49.711.504.362	49.660.998.030	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	47.879.959.000	48.719.959.000	48.719.959.000	SEKRETARIAT DPRD	Pergeseran Internal
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	841.995.062	991.545.362	941.039.030	SEKRETARIAT DPRD	Pengurangan Efisiensi Kegiatan
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100 %	100 %	1.888.500.000	1.800.000	1.800.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.888.500.000	1.800.000	1.800.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	18.00 dokumen	60.118.041.585	61.257.935.205	48.065.417.446	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	19 Perda	15.381.426.880	15.381.426.880	15.870.658.360	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	15.381.426.880	15.381.426.880	15.870.658.360	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Belanja
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100 %	100 %	7.037.972.958	7.329.762.924	7.011.319.824	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	20 Orang	3.487.512.440	3.487.512.440	3.103.577.440	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Belanja
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	2.675.575.300	2.675.575.300	2.675.575.300	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Belanja
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	874.885.218	1.166.675.184	1.232.167.084	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100 %	100 %	7.452.585.148	7.528.819.486	7.714.200.499	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	50 Dokumen	7.452.585.148	7.528.819.486	7.714.200.499	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Reses
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	100 %	30.246.056.599	31.017.925.915	17.469.238.764	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	27.391.770.000	27.391.770.000	14.475.047.557	SEKRETARIAT DPRD	Penambahan Anggaran
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.854.286.599	3.626.155.915	2.994.191.207	SEKRETARIAT DPRD	Efisiensi Belanja Modal
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				30.442.087.872	32.725.575.936	22.417.736.613		
5.01	PERENCANAAN				30.442.087.872	32.725.575.936	22.417.736.613		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	13.954.087.872	13.861.087.872	12.054.478.729	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	10 Dokumen	130.300.000	130.300.000	63.730.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	50.700.000	50.700.000	1.215.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	6.500.000	4.050.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	4.770.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	6.500.000	2.025.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	2.385.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.600.000	1.600.000	1.035.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	10.946.583.000	10.818.288.280	10.401.061.304	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 Persen	100 Persen					
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	62 Orang/bulan	10.631.433.000	10.503.138.280	10.010.956.304	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Mengikuti hasil perhitungan dari BPKAD
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	313.500.000	313.500.000	388.525.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan honor Non ASN
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	900.000	900.000	900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	250.000	230.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	317.600.000	317.600.000	163.515.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	60 Orang	317.600.000	317.600.000	163.515.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	1.722.104.872	1.712.099.592	632.422.649	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	206.237.360	181.237.360	3.465.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi belanja modal
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	50.400.000	44.394.720	43.885.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	64.000.000	72.500.000	60.276.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk operasional kantor
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	22.385.512	22.385.512	20.994.649	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk operasional kantor
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	68.000.000	68.000.000	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	770.000.000	770.000.000	329.812.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	541.082.000	553.582.000	153.990.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi belanja modal
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	153.200.000	183.700.000	182.994.857	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	6.200.000	8.200.000	7.825.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	147.000.000	175.500.000	175.169.857	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 Persen	100 Persen	684.300.000	699.100.000	610.754.919	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.000.000	44.000.000	35.960.001	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	26 Unit	400.700.000	415.500.000	337.029.918	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	239.600.000	239.600.000	237.765.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi belanja modal
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	100.00 Persen	4.510.000.000	4.525.500.000	2.653.255.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 Persen	100 Persen	3.190.000.000	3.190.000.000	1.889.570.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000	300.000.000	130.382.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000	200.000.000	103.023.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	630.000.000	630.000.000	306.416.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	160.000.000	160.000.000	2.525.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan#(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000.000	1.900.000.000	1.347.224.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk Honor TP3KS dan Geospasial
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000.000	300.000.000	160.825.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	135.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk operasional kegiatan
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100.000.000	100.000.000	24.925.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 Persen	100 Persen	1.020.000.000	1.035.500.000	602.860.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	700.000.000	700.000.000	312.640.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	4 Laporan	320.000.000	335.500.000	290.220.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 Persen	100.00 Persen	11.978.000.000	14.338.988.064	7.710.002.884	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	100.00 Persen					
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	2.520.000.000	2.582.000.000	1.924.879.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	315.500.000	179.580.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk operasional kegiatan
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	120.000.000	262.700.000	166.914.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000	988.300.000	942.270.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk Honor TP3KS serta Perwal Support Sytem & Lomba Perilaku Destruktif
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	8 Laporan	1.000.000.000	1.015.500.000	636.115.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	100 Persen	3.850.000.000	5.633.488.064	2.871.173.884	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	4 Dokumen	1.975.000.000	1.975.000.000	1.026.560.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk Honor TP3KS dan operasional kegiatan
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	725.000.000	725.000.000	437.325.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengurangan honor Tim Ekraf dan anggaran seremonial Warak
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000	2.883.488.064	1.390.388.884	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengurangan kegiatan seremonial
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	16.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	5.608.000.000	6.123.500.000	2.913.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	7 Dokumen	2.588.000.000	3.103.500.000	1.783.390.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk Ranperwal RP3KP dan operasional kegiatan
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	4 Laporan	500.000.000	500.000.000	256.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penambahan untuk operasional kegiatan
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000.000	1.800.000.000	654.355.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	720.000.000	720.000.000	219.905.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Efisiensi pelaksanaan kegiatan
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				203.521.163.979	226.875.897.779	188.224.776.255		
5.02	KEUANGAN				203.521.163.979	226.875.897.779	188.224.776.255		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	116.866.216.032	116.866.216.032	108.464.274.105	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9	9	121.848.558	121.848.558	87.937.458	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	52.984.996	52.984.996	21.332.996	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi: pembulatan cetak dan narsum ditambah: mamin snack
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.075.254	4.075.254	3.087.354	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi pembulatan ditambah cetak
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.699	4.851.699	3.697.299	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi pembulatan cetak dari 16 menjadi 15
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.865.574	4.865.574	4.075.254	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi cetak
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.081.139	2.081.139	3.004.659	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah cetak
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.989.896	2.989.896	2.989.896	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	49.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi pembulatan ditambah: mamin snack
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100 persen	100 persen	13.907.268.836	13.652.194.756	13.363.330.712	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	13.459.412.000	13.204.337.920	12.917.323.876	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	pergeseran gaji sesuai hasil desk
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	447.360.000	447.360.000	445.510.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	penyesuaian honorarium pengelola keuangan
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	248.418	248.418	248.418	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	248.418	248.418	248.418	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100 persen	100 persen	129.927.900	129.927.900	120.182.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	129.927.900	129.927.900	120.182.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 persen	100 persen	3.917.468.819	3.917.468.819	1.784.646.245	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.026.445	18.026.445	18.026.445	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	547.823.543	547.823.543	200.267.155	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi sewa pakaian, pembulatan atk+cetak, dan belanja modal (kecuali ac) ditambah belanja modal (perubahan rkbmd)
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	154.638.941	154.638.941	173.200.594	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: plastik sampah, ember, kamper, lem tikus, container plastik, handsanitizer
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	103.638.428	103.638.428	59.834.369	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: doos arsip dan remover stapler
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.443.439	28.443.439	22.226.551	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: buku agenda surat, buku kendali, kertas kop surat, stopmap lambang
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1 Dokumen	2.488.509	2.488.509	1.102.441	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi belanja modal buku
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	34 Laporan	62.431.424	62.431.424	65.309.465	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: air galon, air mineral, gula pasir
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	502.178.191	502.178.191	225.759.847	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: Perjalanan dinas
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.985.000	14.985.000	146.781.305	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah untuk kegiatan penataan arsip:
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2.482.814.899	2.482.814.899	872.138.072	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD	100 persen	100 persen	74.406.275	74.406.275	153.573.806	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	42 Unit	74.406.275	74.406.275	153.573.806	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurang belanja modal ditambah: belanja modal (perubahan rkbmd):
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100 persen	100 persen	97.383.280.451	97.638.354.531	91.627.958.762	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	222.000	222.000	222.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.759.944.291	96.759.944.291	90.756.856.522	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: tagihan air
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	623.114.160	878.188.240	870.880.240	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	dikurangi thr
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100 persen	100 persen	1.332.015.193	1.332.015.193	1.326.644.822	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	500.749.965	500.749.965	424.764.810	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	4.035.960	4.035.960	4.035.960	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	42.359.099	42.359.099	42.359.099	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	631.906.128	631.906.128	704.950.237	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah instalasi pdam banjardowo
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	172 Unit	109.004.042	109.004.042	110.624.666	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ditambah: hytalk+kuota
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	0.82 Persen	0.82 Persen	83.388.887.046	106.443.620.846	76.506.724.061	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer		100.00 %				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penambahan Indikator (Pelimpahan dari BAPENDA sesuai dengan RPJMD)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100 persen	100 persen	4.044.665.344	4.044.665.344	2.968.026.003	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	197.192.412	197.192.412	121.944.150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pergeseran Internal (ATK, Cetak, Bahan Komputer)
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	238.298.222	238.298.222	157.246.810	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pergeseran Internal (ATK, Cetak, Bahan Komputer, Honor Pendamping Sidang)
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	22.083.097	22.083.097	3.420.654	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengurangan Belanja Cetak
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	21.912.157	21.912.157	3.045.396	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengurangan Belanja Cetak
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	23.082.000	23.082.000	23.680.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	4.291.000	4.291.000	124.542	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja ATK Karena tidak ada ceremonial, jadi belanja di nol kan semua
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	797.494.013	797.494.013	558.976.848	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penambahan Belanja Cetak, Makan Minum, Honor Pendamping Sidang
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	561.889.093	561.889.093	500.544.456	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penambahan Belanja ATK, Belanja Cetak dan Makan Minum
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	15 Dokumen	1.729.264.712	1.729.264.712	1.409.862.888	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pergeseran Internal
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	1 Dokumen	36.563.292	36.563.292	11.458.581	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penambahan dari Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	117.559.824	117.559.824	43.085.134	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	52.506.171	52.506.171	7.746.085	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengurangan Belanja Cetak, Penambahan Makan Minum
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	242.529.351	242.529.351	126.890.460	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penambahan ATK, Bahan Komputer, dan Mamin
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen	100 persen	1.144.530.519	1.144.530.519	656.431.458	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dokumen	720 Dokumen	234.774.519	234.774.519	106.921.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum Berkurang pada belanja bahan komputer, honor dan pemeliharaan
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	408 Dokumen	176.749.000	176.749.000	131.099.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum Berkurang pada belanja honor narsum
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	180.263.000	180.263.000	86.541.458	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum Berkurang pada belanja honor narsum
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	48641 Dokumen	92.731.000	92.731.000	46.319.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum Berkurang pada belanja ATK dan honor narsum

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan	106.929.000	106.929.000	79.282.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum dan ATK Berkurang pada belanja honor narsum
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	14 Dokumen	112.518.000	112.518.000	65.201.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja Makan minum Berkurang pada belanja honor narsum
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	240.566.000	240.566.000	141.068.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah pada belanja ATK, Makan minum, honor narsum Berkurang pada belanja bahan komputer
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100 persen	100 persen	1.646.449.000	1.646.449.000	1.054.241.559	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	624 Laporan	32.200.000	32.200.000	33.980.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah Makan Minum dan ATK
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	120.200.000	120.200.000	25.070.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang Honor Narsum dan Cetak
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	223.200.000	223.200.000	99.060.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	283.200.000	283.200.000	127.067.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	299.100.000	299.100.000	259.900.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang Cetak
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	1 Dokumen	17.149.000	17.149.000	124.542	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	81.100.000	81.100.000	156.280.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	59.100.000	59.100.000	52.250.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang Cetak
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	153.100.000	153.100.000	107.220.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang Honor Narsum dan Cetak
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	149.100.000	149.100.000	120.947.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bertambah Makan Minum
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	99.500.000	99.500.000	37.723.017	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	39 Lembaga	129.500.000	129.500.000	34.620.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100 persen	100 persen	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	76.553.242.183	99.607.975.983	71.828.025.041	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	efisiensi btt dan tambahan btt dari bappeda
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	100.00 Persen	100.00 Persen	3.266.060.901	3.566.060.901	3.253.778.088	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100 persen	100 persen	3.266.060.901	3.566.060.901	3.253.778.088	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	167.363.461	167.363.461	103.268.152	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan belanja honorarium narasumber. Bertambah pada belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat.
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	71.045.738	71.045.738	31.721.852	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak, belanja honorarium narasumber, dan belanja sewa alat studio lainnya. Bertambah pada belanja bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat.
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	107.737.281	107.737.281	147.948.080	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja benda pos. Bertambah pada belanja alat tulis kantor, belanja honorarium tim dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, honorarium narasumber, belanja makanan dan minuman rapat
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	355.347.188	355.347.188	181.261.418	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak, belanja bahan pos, belanja bahan komputer, belanja honorarium narasumber. Bertambah pada belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan belanja jasa konsultansi non konstruksi.
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	11 Laporan	209.949.430	209.949.430	171.563.755	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak dan belanja honorarium narasumber. Bertambah pada belanja alat tulis kantor, belanja bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	1.248.827.432	1.248.827.432	1.268.532.626	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak, belanja jasa pengukuran tanah. Bertambah pada belanja alat tulis kantor, belanja bahan pos, belanja bahan komputer, belanja makanan dan minuman kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	610.475.044	910.475.044	1.047.926.467	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak, honorarium tim dan sekret tim penilai BMD. Bertambah pada belanja makanan dan minum, kajian penghapusan inventaris, bangunan dan kendaraan
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	105.350.107	105.350.107	44.086.744	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Bertambah pada belanja makanan dan minuman rapat
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	305.798.259	305.798.259	251.318.994	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang di belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja bahan komputer. Bertambah pada belanja makanan dan minuman rapat, honorarium sekret tim pengkaji sewa
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	84.166.961	84.166.961	6.150.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Berkurang pada belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja bahan komputer, honorarium narasumber / pembahas, belanja sewa peralatan dan mesin. Bertambah pada belanja makanan dan minuman rapat
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966		
5.02	KEUANGAN				106.518.898.680	106.518.898.680	77.060.316.966		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen	76.774.448.308	76.774.448.308	51.828.360.507	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	210.800.094	210.800.094	116.620.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	97.600.109	97.600.109	34.989.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengalihan sub kegiatan
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.011.400	9.011.400	5.451.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengalihan sub kegiatan
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.610.900	10.610.900	6.450.900	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengalihan sub kegiatan
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.655.400	8.655.400	8.655.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.954.900	3.954.900	3.954.900	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	30.967.385	30.967.385	7.118.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengalihan sub kegiatan
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	67.840.179.630	67.327.199.910	43.442.710.392	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	66.936.873.000	66.423.893.280	42.651.319.303	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Efisiensi anggaran
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 Dokumen	76 Dokumen	901.623.630	901.623.630	789.708.089	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Efisiensi anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.235.400	1.235.400	1.235.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	223.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100 Persen	100 Persen	272.048.600	272.048.600	129.975.620	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	219.098.610	219.098.610	108.918.610	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	52.949.990	52.949.990	21.057.010	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	472.423.523	472.423.523	291.777.523	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	229.942.523	229.942.523	229.942.523	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	46 Orang	242.481.000	242.481.000	61.835.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Efisiensi untuk pengiriman peserta diklat
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	1.484.034.431	1.484.034.431	1.115.120.475	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	63.670.500	63.670.500	63.670.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	93.391.790	93.391.790	127.368.808	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tambahan anggaran dari sub kegiatan lain (Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN)
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	103.320.646	103.320.646	153.752.198	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tambahan untuk jamuan rapat
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	202.667.510	202.667.510	209.853.810	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penambahan anggaran cetak
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72 Laporan	72 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	687.105.375	687.105.375	325.789.079	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penambahan anggaran sesuai penambahan pagu dari Bappeda
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	62.100.000	62.100.000	62.100.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 Dokumen	70 Dokumen	222.278.610	222.278.610	123.086.080	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Efisiensi belanja modal
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	350.453.318	350.453.318	326.887.140	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	65.029.160	65.029.160	111.126.160	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengadaan kursi
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	282.397.668	282.397.668	215.704.980	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Hold belanja modal
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.026.490	3.026.490	56.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Efisiensi pengadaan
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	3.490.551.446	4.003.531.166	4.146.371.555	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	124.400.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pergeseran sub kegiatan
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	563.926.360	563.926.360	567.926.360	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pergeseran sub kegiatan
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 Laporan	168 Laporan	92.003.903	92.003.903	176.861.042	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pergeseran sub kegiatan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	2.774.621.183	3.287.600.903	3.277.184.153	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Efisiensi anggaran
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	2.653.957.266	2.653.957.266	2.258.897.002	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengurangan kendaraan dinas operasional yang diusulkan penghapusan
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 Unit	131 Unit	1.278.769.910	1.278.769.910	947.088.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	16.143.840	16.143.840	16.143.840	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 Unit	520 Unit	541.223.887	541.223.887	481.895.482	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengurangan volume peralatan yang dipelihara
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	18.394.367	18.394.367	18.394.367	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	755.465.263	755.465.263	755.465.263	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	10 Persen	29.744.450.372	29.744.450.372	25.231.956.459	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	10 Persen	29.744.450.372	29.744.450.372	25.231.956.459	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	10 Dokumen	665.978.554	665.978.554	745.477.586	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Digesor dari sub kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah untuk digunakan penyusunan kajian NPA, penambahan pagu untuk kajian, serta penambahan pagu untuk staf ahli
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	675.038.940	675.038.940	482.858.315	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mengubah rincian belanja
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	5.882.198.800	5.882.198.800	5.358.609.830	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pegeseran Silpa rekening, sisanya dikembalikan ke Sekretariat
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	3.083.008.160	3.083.008.160	3.414.408.160	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Megubah rincian belanja dan penambahan pagu untuk nilai bidang tanah berbasis NOP di 15 Kelurahan
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 Obyek Pajak	86000 Obyek Pajak	424.588.570	424.588.570	177.724.189	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mengubah rincian anggaran untuk digunakan belanja cetak SPOP
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	5.494.398.967	5.494.398.967	5.170.928.257	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pegeseran rekening jasa pelayanan umum ke sub kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	3.965.434.745	3.965.434.745	3.136.152.936	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penambahan sub kegiatan dan anggaran
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen	10 Dokumen	432.069.530	432.069.530	291.921.600	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penambahan pagu anggaran digunakan untuk yustisi pajak daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	7.976.533.490	7.976.533.490	5.911.775.614	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Dialihkan untuk mengkomodir kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	201.208.020	201.208.020	206.751.415	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pegeseran anggaran kegiatan
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	181.965.786	181.965.786	46.712.952	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	762.026.810	762.026.810	288.635.605	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				33.134.453.856	33.134.453.856	33.784.868.700		
5.03	KEPEGAWAIAN				25.742.303.118	25.742.303.118	25.205.686.818		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	100.00 Persen	18.125.034.988	18.125.034.988	17.112.141.016	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen					
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen					
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKPP	82 Nilai	82 Nilai	123.700.705	123.700.705	148.800.705	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	51.163.683	51.163.683	76.788.683	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.075.254	4.075.254	4.075.254	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pegeseran Internal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.075.254	4.075.254	4.075.254	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.907.975	5.907.975	5.907.975	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.042.399	3.042.399	3.042.399	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5.436.140	5.436.140	5.436.140	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	49.475.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	13.287.770.000	13.161.856.560	12.624.798.498	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	12.949.670.000	12.823.756.560	12.297.483.098	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	335.405.400	335.405.400	324.620.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	673.400	673.400	673.400	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	785.800	785.800	785.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.400	1.235.400	1.235.400	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	157.959.400	157.959.400	21.560.650	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	157.959.400	157.959.400	21.560.650	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.088.922.526	1.088.922.526	893.063.120	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	73.326.067	73.326.067	73.326.067	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	194.949.464	194.949.464	457.679.490	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	95.449.188	95.449.188	88.332.598	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.260.669	85.260.669	85.260.669	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	995.404	995.404	508.898	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	85.750.000	85.750.000	85.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	355.100.000	355.100.000	101.696.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	198.091.734	198.091.734	508.898	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	182.340.788	182.340.788	508.898	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	182.340.788	182.340.788	508.898	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.257.556.783	2.383.470.223	2.370.031.097	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	654.116.904	654.116.904	526.733.304	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	248.734.007	248.734.007	395.410.849	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.354.705.872	1.480.619.312	1.447.886.944	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.026.784.786	1.026.784.786	1.053.378.049	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	387.108.164	387.108.164	341.573.840	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	30.269.700	30.269.700	30.269.700	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	565.446.923	565.446.923	641.624.459	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50 Persen	81.50 Persen	7.617.268.130	7.617.268.130	8.093.545.802	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99 Persen	99 Persen					
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	99.00 Persen					
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	275.50 Persen	275.50 Persen					
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.88 Persen	22.88 Persen					
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.692.259.933	1.692.259.933	1.176.642.140	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	276.073.320	276.073.320	131.813.918	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	4 Dokumen	518.939.289	518.939.289	411.555.499	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666 Dokumen	666 Dokumen	440.135.405	440.135.405	301.751.568	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	218.256.750	218.256.750	121.591.088	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 Dokumen	9000 Dokumen	238.855.169	238.855.169	209.930.067	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.464.906.700	2.464.906.700	3.926.213.921	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	350 Dokumen	509.698.900	509.698.900	692.219.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Dokumen	1400 Dokumen	333.160.800	333.160.800	159.132.981	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	1.622.047.000	1.622.047.000	3.074.861.940	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.540.353.297	1.540.353.297	1.428.080.625	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	445.738.906	445.738.906	576.834.246	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	330 Orang	330 Orang	742.777.191	742.777.191	693.030.009	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	300 Orang	296.957.500	296.957.500	126.508.840	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	430 Orang	430 Orang	54.879.700	54.879.700	31.707.530	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.919.748.200	1.919.748.200	1.562.609.116	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	206.887.270	206.887.270	142.551.940	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	365 Orang	365 Orang	1.091.979.710	1.091.979.710	472.327.960	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	1000 Orang	489.773.780	489.773.780	849.056.366	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	115.254.960	115.254.960	85.983.510	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen	15.852.480	15.852.480	12.689.340	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7.392.150.738	7.392.150.738	8.579.181.882		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	50 Persen	50 Persen	7.392.150.738	7.392.150.738	8.579.181.882	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.865.090.596	1.865.090.596	3.620.014.210	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	36.500.000	36.500.000	10.754.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengurangan Belanja
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	254.450.000	254.450.000	69.285.940	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600 Orang	600 Orang	1.361.968.096	1.361.968.096	3.471.615.870	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	212.172.500	212.172.500	68.357.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pergeseran Internal
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.527.060.142	5.527.060.142	4.959.167.672	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	5.527.060.142	5.527.060.142	4.959.167.672	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penambahan Belanja
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.204.705.877	10.204.705.877	11.080.132.578		
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	100 %	5.864.888.312	5.864.888.312	5.081.743.383	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %					
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	155.145.101	155.145.101	90.455.628	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	75.935.101	75.935.101	26.943.995	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	123.654	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	4.100.000	234.099	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000	3.580.000	253.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.610.000	3.610.000	230.880	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.420.000	14.420.000	14.420.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BRIDA	100 %	100 %	4.746.321.000	4.746.321.000	4.536.683.601	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	20 Orang/bulan	4.542.677.000	4.542.677.000	4.309.028.273	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	196.744.000	196.744.000	226.744.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.300.000	2.300.000	303.776	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.300.000	2.300.000	303.776	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000	2.300.000	303.776	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	100 %	96.907.240	96.907.240	14.164.240	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	96.907.240	96.907.240	14.164.240	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	598.889.485	598.889.485	190.960.864	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	89.333.098	89.333.098	18.899.475	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	35.250.000	35.250.000	35.249.360	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	34.000.000	34.000.000	23.906.609	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	23.433.650	23.433.650	9.718.577	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	57.063.460	57.063.460	41.483.580	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	228.181.000	228.181.000	50.098.878	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	131.628.277	131.628.277	11.604.385	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	100 %	93.195.490	93.195.490	93.195.490	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	6.180.000	6.180.000	6.180.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	87.015.490	87.015.490	87.015.490	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	174.429.996	174.429.996	156.283.560	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.959.999	43.959.999	39.910.050	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	130.469.997	130.469.997	116.373.510	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	4.339.817.565	4.339.817.565	5.998.389.195	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	295.000.000	295.000.000	797.974.237	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	8 Laporan	295.000.000	295.000.000	797.974.237	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	730.000.000	730.000.000	612.611.056	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	7 Dokumen	6 Dokumen	730.000.000	730.000.000	612.611.056	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %	100 %	1.589.000.000	1.589.000.000	2.325.333.258	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	8 Dokumen	10 Dokumen	849.000.000	849.000.000	1.584.296.034	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	7 Dokumen	7 Dokumen	740.000.000	740.000.000	741.037.224	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100 %	100 %	1.725.817.565	1.725.817.565	2.262.470.643	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	10 Dokumen	795.817.565	795.817.565	1.664.327.435	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	400.000.000	400.000.000	383.447.743	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	350.000.000	122.492.138	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	2 Laporan	180.000.000	180.000.000	92.203.327	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT				31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.928		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				31.472.005.080	31.472.005.080	22.996.381.928		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	22.415.818.750	22.415.818.750	19.075.410.254	INSPEKTORAT	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 persen	100 persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen					
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	7 Dokumen	7 Dokumen	118.262.859	118.262.859	77.886.800	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	53.740.962	53.740.962	21.328.000	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.671.400	3.671.400	1.780.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.354.099	3.354.099	2.080.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.270.099	3.270.099	2.024.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.770.099	3.770.099	2.080.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	456.200	456.200	344.800	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.250.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat)	14 Dokumen	14 Dokumen	16.274.271.460	16.258.667.580	15.459.702.773	INSPEKTORAT	
		Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100 %	100 %					
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	15.920.847.000	15.905.243.120	15.112.171.313	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	346.584.000	346.584.000	345.360.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	4.857.600	4.857.600	300.000	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.497.168	1.497.168	1.497.168	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	485.692	485.692	374.292	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100 %	100 %	1.861.808.000	1.877.411.880	1.448.963.488	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	66 Orang	1.171.826.000	1.171.826.000	1.147.497.608	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	689.982.000	705.585.880	301.465.880	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100 %	100 %	2.162.480.581	2.162.480.581	940.854.547	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	129.757.604	129.757.604	129.712.649	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	94.681.089	94.681.089	86.335.094	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	117.632.261	117.632.261	44.134.407	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.977.018	4.977.018	224.190	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja modal
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	102.500.000	102.500.000	102.500.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	753.006.000	753.006.000	307.730.500	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran perjalanan dinas
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	263.320.618	263.320.618	246.504.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	696.605.991	696.605.991	23.713.707	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja modal
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100 %	100 %	1.327.565.267	1.327.565.267	521.557.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	1.170.131.005	1.170.131.005	496.667.000	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja modal
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	157.434.262	157.434.262	24.890.000	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja modal
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100 %	100 %	8.623.800	8.623.800	8.623.800	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.623.800	8.623.800	8.623.800	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100 %	100 %	662.806.783	662.806.783	617.821.847	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.625.000	35.625.000	32.342.937	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	434.531.513	434.531.513	381.465.000	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	9.817.200	9.817.200	9.817.200	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	92.755.390	92.755.390	92.755.390	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	90.077.680	90.077.680	101.441.320	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	4.129.485.320	4.129.485.320	1.691.438.343	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100 %	100 %	3.354.474.620	3.354.474.620	1.239.669.960	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	89.00 %	89.00 %					
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	48 Laporan	365.449.000	365.449.000	117.573.000	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	100 Laporan	740.672.760	740.672.760	264.924.800	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	657.361.200	657.361.200	174.300.000	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	155.016.000	155.016.000	61.430.000	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.071.130.960	1.071.130.960	541.538.460	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	60 Dokumen	364.844.700	364.844.700	79.903.700	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	100 %	775.010.700	775.010.700	451.768.383	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	67.879.950	67.879.950	24.350.000	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan	707.130.750	707.130.750	427.418.383	INSPEKTORAT	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.09 Nilai	3.09 Nilai	4.926.701.010	4.926.701.010	2.229.533.331	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	3 indeks	3 indeks	406.776.000	406.776.000	114.250.000	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	76.674.000	76.674.000	11.400.000	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	330.102.000	330.102.000	102.850.000	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	4.519.925.010	4.519.925.010	2.115.283.331	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	870.480.200	870.480.200	868.369.200	INSPEKTORAT	Penambahan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	568.495.000	568.495.000	123.994.000	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.868.549.060	2.868.549.060	1.036.388.631	INSPEKTORAT	Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	50 perangkat daerah	212.400.750	212.400.750	86.531.500	INSPEKTORAT	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				42.725.973.630	42.725.973.630	56.298.309.907		
7.01	KECAMATAN				42.725.973.630	42.725.973.630	56.298.309.907		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	16.978.444.900	16.791.198.340	16.965.452.136	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	69.617.500	69.617.500	52.540.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	53.488.900	53.488.900	48.779.400	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300	2.107.300	327.300	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900	3.488.900	508.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300	2.107.300	327.300	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900	3.488.900	508.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.447.300	1.447.300	323.300	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.488.900	3.488.900	1.764.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	14.599.919.400	14.412.672.840	14.793.354.093	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	14.220.480.000	14.033.233.440	14.005.021.773	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pengurangan perhitungan gaji
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	375.396.000	375.396.000	787.660.920	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran belanja PJLP
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.347.800	1.347.800	223.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.347.800	1.347.800	223.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.800	1.347.800	223.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 persen	100 persen	1.024.792.200	1.024.792.200	855.830.478	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.300.000	33.300.000	33.300.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	207.100.000	207.100.000	135.985.560	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Efisiensi belanja modal
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.800.000	45.800.000	30.055.220	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.225.000	34.225.000	17.274.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	131.163.200	131.163.200	131.163.200	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.424.000	99.424.000	104.900.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tambahan perjalanan dinas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	473.780.000	473.780.000	403.152.498	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Efisiensi belanja modal
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	73.300.000	73.300.000	24.790.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	73.300.000	73.300.000	24.790.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Efisiensi belanja modal
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	256.600.000	256.600.000	256.457.105	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.000.000	139.000.000	138.945.450	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.600.000	117.600.000	117.511.655	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	954.215.800	954.215.800	982.480.460	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	319.400.000	319.400.000	269.591.440	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	426.272.800	426.272.800	426.213.940	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	53.813.000	53.813.000	53.813.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	154.730.000	154.730.000	232.862.080	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pemeliharaan taman kantor
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.402.600.000	3.589.846.560	2.842.954.598	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	614.500.000	614.500.000	728.491.942	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	4.500.000	3.750.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	610.000.000	610.000.000	724.741.942	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Sosialisasi budaya kerja
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.411.800.000	1.599.046.560	1.357.539.435	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	521.800.000	709.046.560	525.959.252	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran gaji PJLP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	63.192.710	KELURAHAN BULUSTALAN	Pergeseran pengadaan AC Ruang Pelayanan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	83.559.323	KELURAHAN BARUSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	88.000.000	KELURAHAN RANDUSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	86.612.949	KELURAHAN MUGASSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	83.521.883	KELURAHAN PLEBURAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	82.724.684	KELURAHAN WONODRI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	85.414.698	KELURAHAN PETERONGAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	83.491.226	KELURAHAN LAMPER LOR	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	82.783.339	KELURAHAN LAMPER KIDUL	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	92.279.371	KELURAHAN LAMPER TENGAH	Pergeseran rincian belanja
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	1.376.300.000	1.376.300.000	756.923.221	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.376.300.000	1.376.300.000	756.923.221	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran gaji PJLP
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.206.760.830	22.206.760.830	36.279.394.743	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.893.610.830	12.170.810.830	11.938.493.503	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	169.600.000	169.600.000	144.755.190	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BARUSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN RANDUSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MUGASSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PLEBURAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	915.000.000	KELURAHAN WONODRI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PETERONGAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH	Pergeseran rincian belanja
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	524.010.830	524.010.830	474.274.230	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	54.675.000	KELURAHAN BULUSTALAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	64.495.360	KELURAHAN BARUSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	62.150.770	KELURAHAN RANDUSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	61.934.800	KELURAHAN MUGASSARI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	62.600.000	52.030.520	KELURAHAN PLEBURAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	78.618.200	KELURAHAN WONODRI	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	70.249.790	KELURAHAN PETERONGAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	60.705.240	KELURAHAN LAMPER LOR	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	63.425.700	KELURAHAN LAMPER KIDUL	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	86.178.703	KELURAHAN LAMPER TENGAH	Tambahan DAU tahun lalu
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	10.313.150.000	10.035.950.000	24.340.901.240	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	120.527.060	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	653.000.000	1.543.540.950	KELURAHAN BULUSTALAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	900.800.000	871.400.000	2.088.766.860	KELURAHAN BARUSARI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	1.011.800.000	2.469.573.200	KELURAHAN RANDUSARI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.105.400.000	2.743.791.470	KELURAHAN MUGASSARI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	965.000.000	2.359.552.100	KELURAHAN PLEBURAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.604.000.000	1.557.800.000	3.875.752.790	KELURAHAN WONODRI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	1.011.800.000	2.455.290.800	KELURAHAN PETERONGAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	809.000.000	1.954.300.000	KELURAHAN LAMPER LOR	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	824.600.000	1.981.271.700	KELURAHAN LAMPER KIDUL	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	1.058.600.000	2.589.384.310	KELURAHAN LAMPER TENGAH	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	7.750.000	7.750.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	32.800.000	32.800.000	151.400.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Bazar
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	107.467.900	107.467.900	106.058.430	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31 angka	31 angka	107.467.900	107.467.900	106.058.430	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	107.467.900	107.467.900	106.058.430	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Pergeseran rincian belanja
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	30.700.000	30.700.000	104.450.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	30.700.000	30.700.000	104.450.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	30.700.000	30.700.000	104.450.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Honor Forkopincom
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA				51.313.567.689	51.313.567.689	70.570.567.197		
7.01	KECAMATAN				51.313.567.689	51.313.567.689	70.570.567.197		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	17.890.133.979	17.532.543.619	17.473.739.041	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	5 dokumen	5 dokumen	52.281.800	52.281.800	49.348.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50.357.600	50.357.600	47.982.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	289.400	289.400	111.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	418.900	418.900	210.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	289.400	289.400	289.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	418.900	418.900	418.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	283.800	283.800	111.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	15.798.350.400	15.440.760.040	15.560.525.050	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	15.181.329.000	14.823.738.640	14.203.609.150	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Pengurangan belanja
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	614.112.000	614.112.000	1.355.045.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	1.758.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	111.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	1.523.385.971	1.523.385.971	1.363.699.656	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	1.280.806.701	1.280.806.701	1.119.308.346	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Pengurangan belanja
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.529.770	30.529.770	32.445.610	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.824.000	3.824.000	6.648.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	62.000.000	62.000.000	73.250.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	117.225.500	117.225.500	116.447.700	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	21.000.000	7.600.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Pengurangan belanja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	186.000.000	186.000.000	186.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	186.000.000	186.000.000	186.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	330.115.808	330.115.808	314.165.935	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	163.819.804	163.819.804	133.884.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	95.363.600	95.363.600	95.363.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	63.108.990	63.108.990	68.108.990	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7.823.414	7.823.414	16.809.345	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.244.970.760	3.602.561.120	2.764.917.050	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	65 Angka	65 Angka	586.500.000	586.500.000	625.403.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	585.000.000	585.000.000	623.903.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	100 Persen	100 Persen	2.658.470.760	3.016.061.120	2.139.514.050	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	2.036.470.760	2.394.061.120	1.463.621.050	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Pengurangan belanja untuk digeser
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	64.000.000	64.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	69.000.000	69.000.000	KELURAHAN BULU LOR	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	64.000.000	64.000.000	KELURAHAN PURWOSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	71.000.000	71.000.000	KELURAHAN KUNINGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	76.000.000	76.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	61.000.000	61.000.000	59.809.600	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	73.000.000	73.000.000	70.631.760	KELURAHAN BANDARHARJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	78.000.000	135.451.640	KELURAHAN TANJUNG MAS	Penambahan belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	66.000.000	66.000.000	66.000.000	KELURAHAN DADAPSARI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	29.896.719.350	29.896.719.350	50.109.539.060	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	321 Kegiatan	321 Kegiatan	15.904.669.350	16.303.669.350	15.860.765.380	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	58.345.010	58.345.010	58.345.010	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.187.000.000	1.187.000.000	1.152.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	1.384.000.000	1.384.000.000	1.349.000.000	KELURAHAN BULU LOR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.035.000.000	1.035.000.000	875.000.000	KELURAHAN PURWOSARI	Efisiensi belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.456.000.000	1.456.000.000	1.421.000.000	KELURAHAN KUNINGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	915.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	1.304.000.000	1.304.000.000	1.269.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	2.663.000.000	2.663.000.000	2.628.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	28 Unit	2.839.000.000	2.839.000.000	2.794.000.000	KELURAHAN TANJUNG MAS	Penambahan belanja
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.152.000.000	1.152.000.000	1.122.000.000	KELURAHAN DADAPSARI	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	301.324.340	301.324.340	304.446.480	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	75.200.000	KELURAHAN PLOMBOKAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	96.200.000	KELURAHAN BULU LOR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	68.450.000	KELURAHAN PURWOSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	92.000.000	KELURAHAN KUNINGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	108.800.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	89.323.890	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Penambahan belanja DAU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	108.800.000	KELURAHAN BANDARHARJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	117.200.000	117.200.000	KELURAHAN TANJUNG MAS	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	92.000.000	KELURAHAN DADAPSARI	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	50 Dokumen	50 Dokumen	13.992.050.000	13.593.050.000	34.248.773.680	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	990.200.000	965.000.000	2.389.150.000	KELURAHAN PLOMBOKAN	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.557.200.000	1.511.000.000	3.812.700.000	KELURAHAN BULU LOR	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	949.400.000	2.286.160.000	KELURAHAN PURWOSARI	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.693.400.000	1.651.400.000	4.206.270.000	KELURAHAN KUNINGAN	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.318.600.000	2.259.800.000	5.847.540.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	655.400.000	621.800.000	1.465.003.680	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.959.800.000	1.901.000.000	4.852.820.000	KELURAHAN BANDARHARJO	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.451.800.000	2.384.600.000	6.154.580.000	KELURAHAN TANJUNG MAS	Penambahan belanja
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.241.000.000	1.199.000.000	2.959.500.000	KELURAHAN DADAPSARI	Penambahan belanja
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	7.750.000	7.750.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	15.300.000	15.300.000	140.300.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Penambahan belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	125.243.600	125.243.600	122.168.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan tertib umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	30 Angka	30 Angka	125.243.600	125.243.600	122.168.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	125.243.600	125.243.600	122.168.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	156.500.000	156.500.000	100.203.446	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10 Angka	10 Angka	156.500.000	156.500.000	100.203.446	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	480 Orang	156.500.000	156.500.000	100.203.446	KECAMATAN SEMARANG UTARA	Pengurangan belanja
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT				68.036.139.800	68.036.139.800	94.139.358.637		
7.01	KECAMATAN				68.036.139.800	68.036.139.800	94.139.358.637		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	25.667.935.950	25.202.417.310	24.812.683.637	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	84.643.200	84.643.200	67.823.200	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	56.931.600	56.931.600	42.711.600	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran di dalam sub kegiatan
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.044.300	5.044.300	4.744.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.863.800	5.863.800	5.563.800	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.421.900	4.421.900	4.121.900	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.121.400	5.121.400	4.821.400	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.758.200	4.758.200	3.658.200	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.502.000	2.502.000	2.202.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	4.00 dokumen	22.704.506.200	22.238.987.560	21.956.980.901	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	21.857.625.000	21.392.106.360	20.378.870.251	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Efisiensi anggaran
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	840.590.600	840.590.600	1.573.020.050	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.573.400	1.573.400	1.273.400	KECAMATAN SEMARANG BARAT	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.144.800	3.144.800	2.544.800	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.572.400	1.572.400	1.272.400	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12,00 bulan	12,00 bulan	802.080.681	802.080.681	412.094.545	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	30.513.672	30.513.672	30.513.672	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	33.022.902	33.022.902	16.208.902	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	68.484.290	68.484.290	51.111.373	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	38.282.450	38.282.450	21.462.803	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	117.888.010	117.888.010	117.888.010	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	135.482.820	135.482.820	79.527.025	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Penambahan pagu anggaran
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	378.406.537	378.406.537	95.382.760	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pengurangan anggaran
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	946.284.911	946.284.911	1.307.467.318	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	513.880.261	513.880.261	661.003.318	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Efisiensi anggaran/pengurangan anggaran belanja yang di hold
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	432.404.650	432.404.650	646.464.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Efisiensi anggaran/pengurangan anggaran belanja yang di hold
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	285.642.722	285.642.722	303.229.082	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	246.804.000	246.804.000	246.804.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran pengurangan anggaran
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	38.838.722	38.838.722	56.425.082	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran pengurangan anggaran
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 persen	100,00 persen	844.778.236	844.778.236	765.088.590	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit	603.716.946	603.716.946	524.746.950	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	123.164.250	123.164.250	122.444.600	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	75.401.640	75.401.640	75.401.640	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	42.495.400	42.495.400	42.495.400	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.264.604.800	4.730.123.440	3.828.454.309	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1,00 angka	1,00 angka	2.052.462.120	2.517.980.760	1.514.312.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	30.878.000	30.878.000	30.006.500	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.021.584.120	2.487.102.760	1.484.305.800	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.688.000.000	1.688.000.000	1.443.982.663	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000	360.000.000	215.207.440	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	74.614.628	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	76.634.223	KELURAHAN MANYARAN	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	73.888.571	KELURAHAN KRAPYAK	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	77.782.894	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	75.663.372	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	74.383.580	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	77.541.941	KELURAHAN GISIKDRONO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	75.394.399	KELURAHAN BONGSARI	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	73.996.944	KELURAHAN BOJONGSALAMAN	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	84.300.558	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	75.470.612	KELURAHAN CABEAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	79.310.276	KELURAHAN KARANGAYU	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	77.023.382	KELURAHAN KROBOKAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	77.179.067	KELURAHAN TAWANGSARI	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	75.580.664	KELURAHAN TAWANGMAS	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	80.010.112	KELURAHAN KEMBANGARUM	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	524.142.680	524.142.680	870.159.346	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diiimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diiimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	524.142.680	524.142.680	870.159.346	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	37.984.964.650	37.984.964.650	65.399.297.091	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 kegiatan	100 kegiatan	18.714.000.000	19.213.800.000	18.894.971.262	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	100.000.000	69.293.920	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	994.000.000	994.000.000	994.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Perubahan titik lokasi dan jenis pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.029.000.000	1.029.000.000	1.029.000.000	KELURAHAN MANYARAN	Perubahan titik lokasi dan jenis pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KRAPYAK	Perubahan jenis pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.191.000.000	1.191.000.000	1.191.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO	Perubahan sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BONGSARI	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN CABEAN	Perubahan sub kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	999.000.000	999.000.000	999.000.000	KELURAHAN KARANGAYU	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.170.000.000	1.170.000.000	1.255.961.328	KELURAHAN KROBOKAN	Perubahan titik lokasi dan alamat pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI	Perubahan titik lokasi pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS	Perubahan titik lokasi pekerjaan dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	500.000.000	500.000.000	351.940.460	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	76.202.430	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	74.345.978	KELURAHAN MANYARAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	71.173.838	KELURAHAN KRAPYAK	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	62.600.000	49.250.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	57.450.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	55.817.048	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	104.600.000	92.185.728	KELURAHAN GISIKDRONO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	72.627.200	KELURAHAN BONGSARI	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	76.080.508	KELURAHAN BOJONGSALAMAN	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	55.600.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	62.600.000	45.101.184	KELURAHAN CABEAN	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	65.443.160	KELURAHAN KARANGAYU	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	104.600.000	95.750.000	KELURAHAN KROBOKAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	54.200.000	37.700.000	KELURAHAN TAWANGSARI	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	56.198.480	KELURAHAN TAWANGMAS	Terdapat pergeseran sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	92.850.000	KELURAHAN KEMBANGARUM	Terdapat pergeseran sub kegiatan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	19.270.964.650	18.771.164.650	46.504.325.829	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	146.564.650	146.564.650	146.564.650	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	1.230.200.000	3.082.497.340	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	1.838.600.000	4.895.426.100	KELURAHAN MANYARAN	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	996.200.000	2.406.537.700	KELURAHAN KRAPYAK	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	590.600.000	1.311.336.760	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	949.400.000	2.340.451.724	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	762.200.000	1.827.471.960	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	1.947.800.000	4.988.708.899	KELURAHAN GISIKDRONO	Penambahan anggaran operasional

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	1.214.600.000	3.035.762.844	KELURAHAN BONGSARI	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	1.152.200.000	2.842.001.608	KELURAHAN BOJONGSALAMAN	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	715.400.000	1.681.560.744	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	543.800.000	1.266.195.448	KELURAHAN CABEAN	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	887.000.000	2.163.407.752	KELURAHAN KARANGAYU	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	1.729.400.000	4.373.036.892	KELURAHAN KROBOKAN	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	1.011.800.000	2.427.174.000	KELURAHAN TAWANGSARI	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	1.043.000.000	2.515.734.558	KELURAHAN TAWANGMAS	Penambahan anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	1.963.400.000	5.027.002.650	KELURAHAN KEMBANGARUM	Penambahan anggaran operasional
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	9.000.000	8.628.500	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	40.000.000	164.825.700	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Penambahan pagu anggaran
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	38.637.200	38.637.200	20.949.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	98.00 persen	98.00 persen	38.637.200	38.637.200	20.949.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00 Angka	15.00 Angka					
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	38.637.200	38.637.200	20.949.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	79.997.200	79.997.200	77.974.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 angka	5.00 angka	79.997.200	79.997.200	77.974.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	79.997.200	79.997.200	77.974.300	KECAMATAN SEMARANG BARAT	Pergeseran anggaran di dalam sub kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR				45.901.066.036	45.901.066.036	61.458.249.997		
7.01	KECAMATAN				45.901.066.036	45.901.066.036	61.458.249.997		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	100.00 Persen	17.557.162.933	17.324.403.613	17.327.017.127	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.Semarang Timur)	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Smg Timur	7 dokumen	7 dokumen	63.538.800	63.538.800	47.631.600	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2 dokumen	2 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	51.368.600	51.368.600	41.223.600	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.728.900	1.728.900	969.900	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.874.900	1.874.900	1.042.900	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.246.900	1.222.900	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.706.900	2.706.900	1.458.900	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.122.000	1.122.000	222.800	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.490.600	1.490.600	1.490.600	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur	3 dokumen	3 dokumen	15.237.303.000	15.004.543.680	15.170.331.219	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	14.687.758.000	14.454.998.680	14.061.644.969	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	547.862.000	547.862.000	1.107.902.450	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	561.000	561.000	561.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	111.400	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200	336.200	111.400	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	975.381.784	791.694.892	784.483.618	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.803.470	14.803.470	14.803.470	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	212.965.522	29.278.630	29.278.630	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	72.364.240	72.364.240	39.417.320	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	40.905.065	40.905.065	9.913.820	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1750 Laporan	1750 Laporan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	221.277.000	221.277.000	146.627.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	400.066.487	400.066.487	531.443.378	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	214.121.864	397.808.756	360.350.663	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	214.121.864	397.808.756	360.350.663	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	442.892.118	442.892.118	383.387.608	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	243.461.941	243.461.941	178.461.941	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	199.430.177	199.430.177	204.925.667	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	623.925.367	623.925.367	580.832.420	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	259.972.947	259.972.947	193.716.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	88.981.070	88.981.070	97.145.070	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	239.971.350	239.971.350	254.971.350	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.497.272.463	3.730.031.783	2.620.946.099	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 angka	1.00 angka	215.077.567	215.077.567	205.053.236	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	7.500.000	7.500.000	3.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	207.577.567	207.577.567	202.053.236	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	2.077.229.206	2.309.988.526	1.748.855.923	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1.181.229.206	1.413.988.526	889.673.026	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	92.413.241	KELURAHAN KEMIJEN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	82.353.237	KELURAHAN REJOMULYO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	86.744.230	KELURAHAN MLATIBARU	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	82.590.514	KELURAHAN MLATIHARJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	81.791.733	KELURAHAN KEBONAGUNG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	82.722.850	KELURAHAN BUGANGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	89.000.000	84.299.580	KELURAHAN SARIREJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	101.000.000	101.000.000	98.545.070	KELURAHAN REJOSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	83.458.150	KELURAHAN KARANGTURI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	84.264.292	KELURAHAN KARANGTEMPEL	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	1.204.965.690	1.204.965.690	667.036.940	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	1.204.965.690	1.204.965.690	667.036.940	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00 Persen	100.00 Persen	24.564.805.090	24.564.805.090	41.228.964.411	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00 kegiatan	327.00 kegiatan	12.881.349.000	13.213.149.000	13.479.098.691	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Lembaga Kemasyarakatan	120 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	65.000.000	36.350.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	1.155.000.000	1.155.000.000	1.355.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.675.000.000	1.675.000.000	1.686.800.000	KELURAHAN KEMIJEN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN REJOMULYO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MLATIBARU	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MLATIHARJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BUGANGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SARIREJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.433.000.000	1.433.000.000	1.433.000.000	KELURAHAN REJOSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGTURI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	453.349.000	453.349.000	636.822.710	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	71.920.000	KELURAHAN KEMIJEN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	63.500.000	KELURAHAN REJOMULYO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	71.450.000	KELURAHAN MLATIBARU	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	71.450.000	KELURAHAN MLATIHARJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	63.050.000	KELURAHAN KEBONAGUNG	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	91.875.000	KELURAHAN BUGANGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	75.500.000	KELURAHAN SARIREJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	105.383.181	KELURAHAN REJOSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	69.625.000	KELURAHAN KARANGTURI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	50.000.000	54.200.000	47.372.800	KELURAHAN KARANGTEMPEL	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	8 dokumen	11.683.456.090	11.351.656.090	27.749.865.720	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	122.494.520	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.573.400.000	3.978.266.160	KELURAHAN KEMIJEN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	855.800.000	2.049.036.370	KELURAHAN REJOMULYO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	1.245.800.000	3.102.193.180	KELURAHAN MLATIBARU	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	840.200.000	2.027.485.000	KELURAHAN MLATIHARJO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	590.600.000	1.372.481.240	KELURAHAN KEBONAGUNG	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.303.400.000	1.261.400.000	3.129.640.000	KELURAHAN BUGANGAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	1.011.800.000	2.469.700.000	KELURAHAN SARIREJO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000	2.384.600.000	6.163.164.990	KELURAHAN REJOSARI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	606.200.000	1.333.512.550	KELURAHAN KARANGTURI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	809.000.000	1.960.086.640	KELURAHAN KARANGTEMPEL	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.050.000	13.050.000	9.900.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	32.806.090	32.806.090	31.905.070	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	182.330.000	182.330.000	184.222.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.00 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	25.00 angka	25.00 angka	182.330.000	182.330.000	184.222.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	182.330.000	182.330.000	184.222.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98.00 Persen	98.00 Persen	99.495.550	99.495.550	97.100.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	4 kegiatan	99.495.550	99.495.550	97.100.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
		Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4.00 kegiatan	4.00 kegiatan					
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	2 Orang	99.495.550	99.495.550	97.100.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				55.520.892.772	55.520.892.772	68.740.255.313		
7.01	KECAMATAN				55.520.892.772	55.520.892.772	68.740.255.313		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00 Persen	100.00 Persen	24.192.189.478	23.886.915.758	24.401.657.810	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	21 dokumen	21 dokumen	94.190.000	94.196.000	65.885.400	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	56.605.000	56.611.000	40.175.200	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Pengurangan belanja
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	4.650.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	4.650.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000	3.580.000	1.766.900	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	3.580.000	3.580.000	1.856.900	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.385.000	16.385.000	9.825.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3.240.000	3.240.000	2.961.400	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)	8 dokumen	8 dokumen	22.515.505.000	22.205.975.280	22.329.492.631	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	21.713.409.000	21.416.935.280	20.908.126.981	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Pengurangan belanja
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	792.566.000	779.510.000	1.414.781.450	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	penambahan belanja
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.660.000	3.660.000	3.261.400	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.540.000	4.540.000	2.511.400	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.330.000	1.330.000	811.400	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100 Persen	100 Persen	232.042.828	236.292.828	225.242.149	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	30.000.000	30.000.000	19.984.414	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.842.828	14.842.828	7.421.414	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	135.975.000	80.325.000	80.325.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	43.725.000	103.625.000	110.011.321	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Penambahan belanja
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah	100 Persen	100 Persen	534.997.613	534.997.613	1.018.647.123	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	534.997.613	534.997.613	1.018.647.123	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Penambahan belanja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100 Persen	100 Persen	269.572.522	269.572.522	269.572.522	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	129.572.522	129.572.522	129.572.522	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100 Persen	100 Persen	545.881.515	545.881.515	492.817.984	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	387.291.590	387.291.590	334.228.059	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	133.589.925	133.589.925	133.589.925	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.476.335.436	3.774.084.156	2.756.602.289	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Persen	1 Persen	20.225.000	21.500.000	13.468.188	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	225.000	1.500.000	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	11.968.188	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	3.426.110.436	3.722.584.156	2.717.034.101	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.076.110.436	2.372.584.156	1.382.930.626	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Pengurangan belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	93.081.300	KELURAHAN MIROTO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.500.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.765.040	KELURAHAN JAGALAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.000.000	KELURAHAN KRANGGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	86.500.000	KELURAHAN GABAHAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.500.000	KELURAHAN KEMBANGSARI	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.427.265	KELURAHAN SEKAYU	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	94.093.100	KELURAHAN PANDANSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	88.000.000	KELURAHAN BANGUNHARJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	88.000.000	KELURAHAN KAUMAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	92.370.100	KELURAHAN PURWODINATAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	88.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	91.370.100	KELURAHAN PEKUNDEN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.500.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	87.996.570	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	26.100.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	30.000.000	26.100.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	94 Persen	27.736.367.858	27.743.892.858	41.467.495.214	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	827 kegiatan	27.555.000.000	27.555.000.000	41.163.808.756	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	58.000.000	42.780.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	1.042.000.000	1.042.000.000	999.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	952.000.000	952.000.000	952.000.000	KELURAHAN MIROTO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN JAGALAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KRANGGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN GABAHAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KEMBANGSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN SEKAYU	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PANDANSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN BANGUNHARJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KAUMAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PURWODINATAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PEKUNDEN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	900.000.000	900.000.000	770.891.597	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Pengurangan belanja

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	907.000.000	907.000.000	2.110.010.472	KELURAHAN MIROTO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	789.400.000	789.400.000	1.806.906.294	KELURAHAN BRUMBUNGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	931.000.000	931.000.000	2.100.782.070	KELURAHAN JAGALAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	711.400.000	711.400.000	1.556.218.300	KELURAHAN KRANGGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	982.000.000	982.000.000	2.253.014.340	KELURAHAN GABAHAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	766.600.000	766.600.000	1.714.859.680	KELURAHAN KEMBANGSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	524.200.000	524.200.000	1.097.212.703	KELURAHAN SEKAYU	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	579.400.000	579.400.000	1.235.812.600	KELURAHAN PANDANSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	606.400.000	606.400.000	1.283.792.800	KELURAHAN BANGUNHARJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	512.800.000	512.800.000	1.014.857.000	KELURAHAN KAUMAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	806.200.000	806.200.000	1.797.567.200	KELURAHAN PURWODINATAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	673.000.000	673.000.000	1.473.685.200	KELURAHAN KARANGKIDUL	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	762.400.000	762.400.000	1.705.252.060	KELURAHAN PEKUNDEN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	786.400.000	786.400.000	1.757.842.240	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	950.800.000	950.800.000	2.177.324.200	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	15 dokumen	181.367.858	188.892.858	303.686.458	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	116.793.600	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	225.000	7.750.000	7.750.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	54.142.858	54.142.858	179.142.858	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Penambahan belanja
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Persen	16 Persen	33.600.000	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27 angka	27 angka	33.600.000	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	33.600.000	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Persen	50 Persen	82.400.000	82.400.000	80.900.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	82.400.000	82.400.000	80.900.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	45 Orang	82.400.000	82.400.000	80.900.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Penambahan belanja
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNG PATI				64.176.920.572	64.176.920.572	77.092.648.583		
7.01	KECAMATAN				64.176.920.572	64.176.920.572	77.092.648.583		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	28.839.718.740	28.343.410.865	27.059.617.780	KECAMATAN GUNUNG PATI	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen	60.428.000	60.380.800	3.014.800	KECAMATAN GUNUNG PATI	
		dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen					
		dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	51.078.400	51.031.200	539.200	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pergeseran dalam sub kegiatan
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.518.000	1.518.000	506.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.788.000	1.788.000	596.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.036.000	3.036.000	506.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	894.000	298.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	562.000	562.000	224.800	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.551.600	1.551.600	344.800	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100 persen	100 persen	24.584.925.900	24.104.258.740	23.961.208.711	KECAMATAN GUNUNG PATI	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen					
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	23.753.433.000	23.268.413.840	22.512.665.461	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengurangan pagu gaji dan pergeseran dalam sub kegiatan
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	830.481.300	834.833.300	1.448.206.050	KECAMATAN GUNUNG PATI	Penambahan anggaran untuk PJLP
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	112.400	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	112.400	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	112.400	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	2.068.964.736	1.439.226.512	1.040.692.527	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.288.812	22.288.812	22.288.812	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	764.236.700	193.422.318	11.350.904	KECAMATAN GUNUNG PATI	Efisiensi belanja modal
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	71.984.568	71.859.772	65.831.129	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	22.185.740	20.649.646	5.164.244	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	19.350.000	19.350.000	19.350.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	183.779.964	183.779.964	85.373.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengalihan anggaran untuk rumah inspirasi
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	985.138.952	927.876.000	831.334.438	KECAMATAN GUNUNG PATI	Efisiensi belanja modal
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	555.885.691	1.170.200.400	383.553.509	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	555.885.691	1.170.200.400	383.553.509	KECAMATAN GUNUNG PATI	Efisiensi belanja modal
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	305.064.455	305.064.455	279.972.325	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210.934.520	210.934.520	210.934.520	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	94.129.935	94.129.935	69.037.805	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengalihan anggaran untuk rumah inspirasi

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	1.264.449.958	1.264.279.958	1.391.175.908	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	378.159.958	378.159.958	315.775.908	KECAMATAN GUNUNG PATI	Penambahan karena mendapat mutasi kendaraan dinas dari OPD lain
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	641.390.000	641.390.000	830.670.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	Penambahan untuk rumah inspirasi
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	159.900.000	159.730.000	159.730.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	85.000.000	85.000.000	85.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.059.518.452	4.555.826.327	3.537.164.009	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	2 angka	2 angka	816.443.887	816.443.887	718.998.457	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	813.943.887	813.943.887	716.498.457	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pergeseran dalam sub kegiatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	2.260.642.705	2.503.934.000	1.905.227.062	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	843.642.705	1.086.934.000	606.396.833	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengurangan anggaran PJP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	93.193.292	KELURAHAN SUKOREJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	92.000.000	92.000.000	81.832.290	KELURAHAN SADENG	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	77.466.230	KELURAHAN KANDRI	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	89.000.000	83.677.664	KELURAHAN SEKARAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	79.924.333	KELURAHAN PONGANGAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	78.662.047	KELURAHAN KALISEGORO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	86.000.000	86.000.000	80.223.237	KELURAHAN JATIREJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	78.442.106	KELURAHAN NGLJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	81.914.967	KELURAHAN PATEMON	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	77.678.055	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	86.000.000	86.000.000	78.742.570	KELURAHAN CEPOKO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	83.471.578	KELURAHAN GUNUNGPATI	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	79.998.242	KELURAHAN MANGUNSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	81.579.531	KELURAHAN PAKINTELAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	87.000.000	79.506.811	KELURAHAN PLALANGAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	90.000.000	82.517.276	KELURAHAN SUMURREJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 persen	100 persen	982.431.860	1.235.448.440	912.938.490	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	982.431.860	1.235.448.440	912.938.490	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengurangan anggaran PJP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	31.052.354.023	31.052.354.023	46.219.710.476	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	200 kegiatan	200 kegiatan	18.269.854.023	18.786.454.023	18.507.022.775	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	196.365.138	196.365.138	108.707.497	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengurangan untuk rumah inspirasi
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.208.700.000	1.208.700.000	1.208.700.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.228.000.000	1.228.000.000	1.228.000.000	KELURAHAN SUKOREJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SADENG	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KANDRI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SEKARAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.145.000.000	1.145.000.000	1.145.000.000	KELURAHAN PONGANGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KALISEGORO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JATIREJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN NGLJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PATEMON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN CEPOKO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	971.000.000	971.000.000	971.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PLALANGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SUMURREJO	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	370.788.885	370.788.885	303.722.194	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengurangan untuk penyelenggaraan kegiatan kecamatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	104.600.000	96.719.654	KELURAHAN SUKOREJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	79.874.172	KELURAHAN SADENG	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	56.347.970	KELURAHAN KANDRI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	87.240.455	KELURAHAN SEKARAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	73.316.527	KELURAHAN PONGANGAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	71.038.700	KELURAHAN KALISEGORO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	73.711.180	KELURAHAN JATIREJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	79.514.800	KELURAHAN NGLJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	80.621.620	KELURAHAN PATEMON	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	61.920.166	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Pergeseran dalam sub kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	63.224.320	KELURAHAN CEPOKO	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	89.606.415	KELURAHAN GUNUNGPATI	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	66.265.836	KELURAHAN MANGUNSARI	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	70.520.649	KELURAHAN PAKINTELAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	66.874.757	KELURAHAN PLALANGAN	Pergeseran dalam sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	75.095.863	KELURAHAN SUMURREJO	Pergeseran dalam sub kegiatan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	12.782.500.000	12.265.900.000	27.712.687.701	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	122.191.417	KECAMATAN GUNUNG PATI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	1.651.400.000	4.171.906.634	KELURAHAN SUKOREJO	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.089.800.000	2.638.138.494	KELURAHAN SADENG	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	575.000.000	1.325.889.228	KELURAHAN KANDRI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	746.600.000	1.741.604.334	KELURAHAN SEKARAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	621.800.000	1.434.777.324	KELURAHAN PONGANGAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	543.800.000	1.237.252.963	KELURAHAN KALISEGORO	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	387.800.000	802.018.435	KELURAHAN JATIREJO	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	543.800.000	1.237.111.160	KELURAHAN NGLJO	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	862.400.000	824.600.000	1.912.715.284	KELURAHAN PATEMON	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	606.200.000	1.391.879.415	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	419.000.000	908.896.290	KELURAHAN CEPOKO	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	965.000.000	2.289.126.367	KELURAHAN GUNUNGPATI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	698.000.000	668.600.000	1.593.242.428	KELURAHAN MANGUNSARI	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	606.200.000	1.370.078.209	KELURAHAN PAKINTELAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	512.600.000	1.106.589.939	KELURAHAN PLALANGAN	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	715.400.000	1.675.305.150	KELURAHAN SUMURREJO	Tambahan Operasional RT, RW, PKK RT, PKK RW
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000	11.300.000	11.300.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	650.000.000	650.000.000	742.664.630	KECAMATAN GUNUNG PATI	Penambahan untuk Bazar
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	111.129.357	111.129.357	135.306.318	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4 angka	4 angka	111.129.357	111.129.357	135.306.318	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	111.129.357	111.129.357	135.306.318	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pengurangan untuk rumah inspirasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	114.200.000	114.200.000	140.850.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan ,Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	114.200.000	114.200.000	140.850.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	114.200.000	114.200.000	140.850.000	KECAMATAN GUNUNG PATI	Pergeseran dalam sub kegiatan
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU				35.107.563.241	35.107.563.241	39.872.230.423		
7.01	KECAMATAN				35.107.563.241	35.107.563.241	39.872.230.423		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	100.00 Persen	14.972.935.350	14.755.346.950	14.184.988.477	KECAMATAN TUGU	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan - Kec. Tugu	4 Dokumen	4 Dokumen	60.053.600	60.053.600	62.790.600	KECAMATAN TUGU	
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Tugu	7 Dokumen	7 Dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	50.868.800	50.868.800	57.878.800	KECAMATAN TUGU	Penambahan Anggaran
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.518.000	1.518.000	1.518.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.788.000	1.788.000	298.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	3.036.000	3.036.000	253.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	894.000	894.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	397.200	397.200	397.200	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.551.600	1.551.600	1.551.600	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	3 Dokumen	3 Dokumen	11.900.514.600	11.682.926.200	11.153.742.218	KECAMATAN TUGU	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	11.535.637.000	11.318.048.600	10.499.391.254	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Belanja Pegawai
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	363.866.000	363.866.000	653.339.364	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Anggaran
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	337.200	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	337.200	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	337.200	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	1.229.411.051	1.115.034.540	879.410.654	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.446.950	10.446.950	5.963.350	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Belanja
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	294.811.748	321.080.118	312.173.123	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Belanja
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	115.442.790	115.442.790	90.777.800	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.141.000	21.141.000	11.066.361	KECAMATAN TUGU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	88.680.000	88.680.000	168.590.400	KECAMATAN TUGU	Penambahan Belanja Mamin
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	135.725.000	135.725.000	63.375.670	KECAMATAN TUGU	Penambahan Perjalanan Dinas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	563.163.563	422.518.682	227.463.950	KECAMATAN TUGU	Efisiensi Belanja Modal
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	933.562.358	1.047.938.869	1.390.307.412	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	933.562.358	1.047.938.869	1.390.307.412	KECAMATAN TUGU	Efisiensi Belanja Modal, Penambahan Anggaran
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	330.102.266	330.102.266	186.011.366	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	234.000.000	234.000.000	109.000.000	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Anggaran
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.102.266	96.102.266	77.011.366	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Anggaran
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	519.291.475	519.291.475	512.726.227	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	240.624.868	240.624.868	212.419.620	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99.494.131	99.494.131	77.134.131	KECAMATAN TUGU	Pengurangan Anggaran
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	105.000.000	105.000.000	100.000.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	74.172.476	74.172.476	123.172.476	KECAMATAN TUGU	Penambahangan Anggaran
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	94 Persen	94 Persen	1.994.373.088	2.211.961.488	2.073.193.554	KECAMATAN TUGU	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Tugu	4 Nilai	4 Nilai	144.940.860	144.940.860	391.585.430	KECAMATAN TUGU	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	5.800.000	5.800.000	5.800.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	139.140.860	139.140.860	385.785.430	KECAMATAN TUGU	Efisiensi Makan Minum
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	1.728.562.228	1.946.150.628	1.536.652.124	KECAMATAN TUGU	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	1.077.562.228	1.295.150.628	925.563.458	KECAMATAN TUGU	Pergeseran Upah PjLP, Pengurangan Anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	KELURAHAN JERAKAH	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	KELURAHAN TUGUREJO	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	83.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	87.977.046	KELURAHAN MANGUNHARJO	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	88.111.620	KELURAHAN MANGKANG KULON	Pergeseran Internal
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	120.870.000	120.870.000	144.956.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	120.870.000	120.870.000	144.956.000	KECAMATAN TUGU	Penyesuaian Belanja
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	17.977.014.803	17.977.014.803	23.458.458.392	KECAMATAN TUGU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu	297 Kegiatan	297 Kegiatan	13.478.328.203	13.688.328.203	13.794.206.902	KECAMATAN TUGU	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	59.924.000	59.924.000	65.612.300	KECAMATAN TUGU	Penyesuaian Belanja
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	9 Unit	1.110.000.000	1.110.000.000	1.293.594.459	KECAMATAN TUGU	Penambahan Anggaran
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JERAKAH	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	KELURAHAN TUGUREJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	14 Unit	1.648.000.000	1.648.000.000	1.648.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	1.191.100.000	1.191.100.000	1.191.100.000	KELURAHAN RANDUGARUT	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.724.000.000	1.724.000.000	1.724.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	16 Unit	2.085.000.000	2.085.000.000	2.085.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	13 Unit	1.921.000.000	1.921.000.000	1.921.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94 Pokmas / Ormas	94 Pokmas / Ormas	993.304.203	993.304.203	940.137.103	KECAMATAN TUGU	Penambahan dan Pengurangan Kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50.000.000	62.600.000	57.600.000	KELURAHAN JERAKAH	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	78.600.000	KELURAHAN TUGUREJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	71.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	65.871.320	KELURAHAN RANDUGARUT	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	91.200.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	91.185.730	KELURAHAN MANGUNHARJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	74.305.990	KELURAHAN MANGKANG KULON	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu	27 Dokumen	27 Dokumen	4.498.686.600	4.288.686.600	9.664.251.490	KECAMATAN TUGU	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	129.940.000	KECAMATAN TUGU	Penambahan dan Pengurangan Kegiatan Kecamatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	450.200.000	984.340.000	KELURAHAN JERAKAH	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	746.600.000	1.795.520.000	KELURAHAN TUGUREJO	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	543.800.000	1.268.660.000	KELURAHAN KARANGANYAR	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	341.000.000	698.550.000	KELURAHAN RANDUGARUT	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	855.800.000	2.059.360.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	653.000.000	1.532.572.500	KELURAHAN MANGUNHARJO	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	528.200.000	1.160.622.390	KELURAHAN MANGKANG KULON	Penambahan Anggaran
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.800.000	5.800.000	4.900.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	37.286.600	37.286.600	29.786.600	KECAMATAN TUGU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	25 Persen	25 Persen	75.540.000	75.540.000	69.690.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Tugu	2 Nilai	2 Nilai	75.540.000	75.540.000	69.690.000	KECAMATAN TUGU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	75.540.000	75.540.000	69.690.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	98 Persen	98 Persen	87.700.000	87.700.000	85.900.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Tugu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	87.700.000	87.700.000	85.900.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	2 Orang	87.700.000	87.700.000	85.900.000	KECAMATAN TUGU	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN				62.087.257.480	62.087.257.480	75.495.090.953		
7.01	KECAMATAN				62.087.257.480	62.087.257.480	75.495.090.953		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	26.525.188.990	26.275.526.910	25.903.352.272	KECAMATAN MIJEN	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	62.829.400	62.829.400	29.550.000	KECAMATAN MIJEN	
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	51.436.000	51.436.000	27.029.400	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.795.000	3.795.000	253.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.470.000	4.470.000	596.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	759.000	759.000	506.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	894.000	894.000	596.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	785.800	785.800	224.800	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	689.600	689.600	344.800	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	22.299.028.800	22.049.366.720	22.047.453.096	KECAMATAN MIJEN	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	21.476.502.000	21.226.839.920	20.705.294.146	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	821.178.000	821.178.000	1.341.821.750	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337.200	337.200	112.400	KECAMATAN MIJEN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	674.400	674.400	112.400	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	337.200	337.200	112.400	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	1.836.826.934	1.836.826.934	2.082.214.414	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.365.250	11.365.250	11.365.250	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	529.813.280	529.813.280	603.854.615	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.243.960	46.243.960	44.081.120	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.041.591	21.041.591	19.965.671	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	30.656.000	30.656.000	25.500.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	148.376.000	148.376.000	149.086.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1.049.330.853	1.049.330.853	1.228.361.758	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	735.128.730	735.128.730	164.118.571	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	735.128.730	735.128.730	164.118.571	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	323.356.661	323.356.661	323.356.661	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	193.623.900	193.623.900	214.260.260	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.732.761	129.732.761	109.096.401	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	1.268.018.465	1.268.018.465	1.256.659.530	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	255.225.200	255.225.200	207.936.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	119.165.265	119.165.265	101.697.530	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	387.628.000	387.628.000	513.026.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	506.000.000	506.000.000	434.000.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.660.619.290	3.910.281.370	2.896.938.180	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	180.831.636	180.831.636	216.294.420	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	176.831.636	176.831.636	212.294.420	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.969.109.264	2.218.771.344	1.753.387.700	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	879.839.264	1.129.501.344	732.860.826	KECAMATAN MIJEN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	79.920.000	79.920.000	74.171.184	KELURAHAN CANGKIRAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.140.000	76.140.000	69.935.304	KELURAHAN BUBAKAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	74.610.000	74.610.000	69.553.464	KELURAHAN KARANGMALANG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	73.710.000	73.710.000	71.627.534	KELURAHAN POLAMAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	75.960.000	75.960.000	71.147.045	KELURAHAN PURWOSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	75.330.000	75.330.000	71.545.586	KELURAHAN TAMBANGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.880.000	83.880.000	77.499.905	KELURAHAN WONOLOPO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.120.000	78.120.000	70.057.231	KELURAHAN MIJEN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.300.000	78.300.000	73.760.960	KELURAHAN JATIBARANG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.590.000	76.590.000	73.499.840	KELURAHAN KEDUNGPANE	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.950.000	76.950.000	71.968.467	KELURAHAN NGADIRGO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	75.510.000	75.510.000	72.990.540	KELURAHAN WONOPLUMBON	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	87.480.000	87.480.000	80.455.980	KELURAHAN JATISARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	76.770.000	76.770.000	72.313.834	KELURAHAN PESANTREN	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	1.510.678.390	1.510.678.390	927.256.060	KECAMATAN MIJEN	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.510.678.390	1.510.678.390	927.256.060	KECAMATAN MIJEN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	31.722.449.200	31.722.449.200	46.502.934.911	KECAMATAN MIJEN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 kegiatan	502 kegiatan	20.310.649.200	20.768.449.200	20.714.769.423	KECAMATAN MIJEN	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	31.244.550	KECAMATAN MIJEN	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	1.240.000.000	1.240.000.000	1.190.000.000	KECAMATAN MIJEN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	958.500.000	KELURAHAN CANGKIRAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BUBAKAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	KELURAHAN KARANGMALANG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	1.153.000.000	1.153.000.000	1.153.000.000	KELURAHAN POLAMAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000	KELURAHAN PURWOSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.654.000.000	1.654.000.000	1.654.000.000	KELURAHAN TAMBANGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.908.000.000	1.908.000.000	1.908.000.000	KELURAHAN WONOLOPO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MIJEN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.943.000.000	1.943.000.000	1.943.000.000	KELURAHAN JATIBARANG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEDUNGPANE	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.415.000.000	1.415.000.000	1.421.716.000	KELURAHAN NGADIRGO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.535.000.000	1.535.000.000	1.535.000.000	KELURAHAN WONOPLUMBON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JATISARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PESANTREN	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	269.649.200	269.649.200	379.683.530	KECAMATAN MIJEN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	78.729.900	KELURAHAN CANGKIRAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	64.400.000	KELURAHAN BUBAKAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	77.391.450	KELURAHAN KARANGMALANG	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	62.600.000	54.211.580	KELURAHAN POLAMAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	64.842.940	KELURAHAN PURWOSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	61.015.610	KELURAHAN TAMBANGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	113.000.000	107.408.763	KELURAHAN WONOLOPO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	82.278.500	KELURAHAN MIJEN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	64.850.000	KELURAHAN JATIBARANG	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	69.198.800	KELURAHAN KEDUNGPANE	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	100.750.000	KELURAHAN NGADIRGO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	56.392.420	KELURAHAN WONOPLUMBON	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	113.000.000	104.900.000	KELURAHAN JATISARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	61.255.380	KELURAHAN PESANTREN	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 dokumen	18 dokumen	11.411.800.000	10.954.000.000	25.788.165.488	KECAMATAN MIJEN	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	109.988.430	KECAMATAN MIJEN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	855.800.000	2.058.000.910	KELURAHAN CANGKIRAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	596.000.000	575.000.000	1.310.773.900	KELURAHAN BUBAKAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	341.000.000	692.801.680	KELURAHAN KARANGMALANG	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	294.200.000	562.104.100	KELURAHAN POLAMAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	512.600.000	1.133.434.630	KELURAHAN PURWOSARI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000	403.400.000	849.893.190	KELURAHAN TAMBANGAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	1.136.600.000	2.774.416.908	KELURAHAN WONOLOPO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	949.400.000	2.317.803.490	KELURAHAN MIJEN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	434.600.000	939.827.850	KELURAHAN JATIBARANG	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	881.000.000	855.800.000	2.069.615.460	KELURAHAN KEDUNGPANE	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	949.400.000	2.270.229.950	KELURAHAN NGADIRGO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	590.600.000	1.371.943.540	KELURAHAN WONOPLUMBON	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	2.057.000.000	5.322.729.900	KELURAHAN JATISARI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	855.800.000	1.992.864.690	KELURAHAN PESANTREN	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000	7.800.000	5.770.880	KECAMATAN MIJEN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	5.965.980	KECAMATAN MIJEN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	87.000.000	87.000.000	106.375.830	KECAMATAN MIJEN	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60 angka	60 angka	87.000.000	87.000.000	106.375.830	KECAMATAN MIJEN	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	87.000.000	87.000.000	106.375.830	KECAMATAN MIJEN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	92.000.000	92.000.000	85.489.760	KECAMATAN MIJEN	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	92.000.000	92.000.000	85.489.760	KECAMATAN MIJEN	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	92.000.000	92.000.000	85.489.760	KECAMATAN MIJEN	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK				62.468.337.286	61.968.337.286	82.332.431.249		
7.01	KECAMATAN				62.468.337.286	61.968.337.286	82.332.431.249		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	23.174.756.885	22.971.906.445	23.004.375.791	KECAMATAN GENUK	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	2 dokumen	2 dokumen	122.832.370	122.832.370	77.602.836	KECAMATAN GENUK	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan- Kecamatan Genuk	5 dokumen	5 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	62.695.030	62.695.030	40.856.836	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.587.400	10.587.400	7.998.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.746.900	10.746.900	8.028.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.696.400	15.696.400	5.238.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.638.900	9.638.900	4.118.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.251.540	11.251.540	9.659.200	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.216.200	2.216.200	1.704.800	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	6 dokumen	6 dokumen	20.635.255.620	20.432.405.180	20.443.085.761	KECAMATAN GENUK	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	121 Orang/bulan	19.976.403.000	19.773.552.560	19.143.392.141	KECAMATAN GENUK	Sesuai pagu belanja pegawai APBD perubahan
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	651.569.220	651.569.220	1.295.793.820	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.416.200	3.416.200	3.192.400	KECAMATAN GENUK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.761.000	2.761.000	112.400	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.106.200	1.106.200	595.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	669.386.246	669.386.246	887.485.579	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	77.309.970	77.309.970	48.508.190	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	133.377.955	133.377.955	222.433.202	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.972.220	50.972.220	19.107.918	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.696.121	26.696.121	11.893.538	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	60.750.000	60.750.000	60.750.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	224.900.000	224.900.000	88.019.382	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	95.379.980	95.379.980	436.773.349	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	443.268.177	443.268.177	288.137.194	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	443.268.177	443.268.177	288.137.194	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	380.776.797	380.776.797	383.597.421	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	181.726.500	181.726.500	184.547.124	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199.050.297	199.050.297	199.050.297	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	923.237.675	923.237.675	924.467.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	445.343.025	445.343.025	366.498.850	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	198.784.600	198.784.600	198.784.600	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	225.600.000	225.600.000	252.823.000	KECAMATAN GENUK	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	53.510.050	53.510.050	106.360.550	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.808.978.936	4.511.829.376	3.438.424.537	KECAMATAN GENUK	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	1 angka	1 angka	1.598.899.930	1.098.899.930	1.250.263.440	KECAMATAN GENUK	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	7.820.960	7.820.960	7.820.960	KECAMATAN GENUK	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.591.078.970	1.091.078.970	1.242.442.480	KECAMATAN GENUK	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	2.003.552.786	2.206.403.226	1.572.806.927	KECAMATAN GENUK	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	794.552.786	997.403.226	551.243.906	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000	96.000.000	80.427.419	KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	94.000.000	84.981.989	KELURAHAN KUDU	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000	102.000.000	97.754.573	KELURAHAN KARANGROTO	Pergeseran anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	97.000.000	97.000.000	75.353.021	KELURAHAN GENUKSARI	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	94.000.000	74.936.921	KELURAHAN BANJAROWO	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	94.000.000	81.265.165	KELURAHAN GEBANGSARI	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	73.106.595	KELURAHAN TRIMULYO	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	90.000.000	77.679.926	KELURAHAN PENGGARON LOR	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	71.943.117	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	99.000.000	99.000.000	77.678.369	KELURAHAN BANGETAYU KULON	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	97.000.000	97.000.000	81.814.895	KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	66.557.522	KELURAHAN TERBOYO KULON	Pergeseran anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	78.063.509	KELURAHAN TERBOYO WETAN	Pergeseran anggaran
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat- di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	1.206.526.220	1.206.526.220	615.354.170	KECAMATAN GENUK	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.206.526.220	1.206.526.220	615.354.170	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	34.271.974.595	34.271.974.595	55.722.879.062	KECAMATAN GENUK	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	232 kegiatan	232 kegiatan	18.856.785.410	19.348.185.410	18.813.834.393	KECAMATAN GENUK	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	141.240.220	141.240.220	141.240.220	KECAMATAN GENUK	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	KECAMATAN GENUK	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.197.000.000	1.197.000.000	1.197.000.000	KELURAHAN KUDU	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.339.000.000	1.339.000.000	1.339.000.000	KELURAHAN KARANGROTO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.392.000.000	1.392.000.000	1.392.000.000	KELURAHAN GENUKSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit	2.019.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	KELURAHAN BANJAROWO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	1.092.000.000	1.092.000.000	1.092.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	1.133.000.000	1.133.000.000	1.133.000.000	KELURAHAN TRIMULYO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.058.000.000	1.058.000.000	1.058.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.078.000.000	1.078.000.000	1.078.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.151.000.000	1.151.000.000	1.175.490.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	1.255.000.000	1.255.000.000	1.255.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.155.545.190	1.155.545.190	912.461.550	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	73.151.770	KELURAHAN SEMBUNGHARJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	60.228.730	KELURAHAN KUDU	Pergeseran anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	89.300.000	KELURAHAN KARANGROTO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	84.586.530	KELURAHAN GENUKSARI	Perubahan dalam 1 sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	78.908.250	KELURAHAN BANJARDOWO	Pergeseran anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	84.002.130	KELURAHAN GEBANGSARI	Pergeseran anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	47.896.640	KELURAHAN TRIMULYO	Perubahan dalam 1 sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	53.302.184	KELURAHAN PENGGARON LOR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	47.157.400	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	113.000.000	85.988.330	KELURAHAN BANGETAYU KULON	Pergeseran anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	70.169.024	KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Pergeseran anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	58.400.000	30.025.000	KELURAHAN TERBOYO KULON	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	58.400.000	20.926.635	KELURAHAN TERBOYO WETAN	Pergeseran anggaran
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk	11 angka	11 angka	15.415.189.185	14.923.789.185	36.909.044.669	KECAMATAN GENUK	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	146.000.000	146.000.000	146.000.000	KECAMATAN GENUK	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.432.400.000	1.386.200.000	3.480.132.090	KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.346.000.000	1.308.200.000	3.286.578.080	KELURAHAN KUDU	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.193.800.000	2.135.000.000	5.511.700.000	KELURAHAN KARANGROTO	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.679.000.000	1.620.200.000	4.118.209.771	KELURAHAN GENUKSARI	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	1.183.400.000	2.929.908.490	KELURAHAN BANJARDOWO	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.214.000.000	1.167.800.000	2.874.001.800	KELURAHAN GEBANGSARI	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	498.200.000	481.400.000	1.067.625.190	KELURAHAN TRIMULYO	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	838.400.000	809.000.000	1.947.598.375	KELURAHAN PENGGARON LOR	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	580.400.000	559.400.000	1.270.157.768	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.057.600.000	1.994.600.000	5.147.350.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.608.200.000	1.557.800.000	3.987.050.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.200.000	231.800.000	419.650.000	KELURAHAN TERBOYO KULON	Penambahan pagu anggaran operasional
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	287.000.000	278.600.000	548.973.920	KELURAHAN TERBOYO WETAN	Penambahan pagu anggaran operasional
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	51.866.285	51.866.285	36.586.285	KECAMATAN GENUK	Penambahan pagu anggaran operasional
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	12.522.900	12.522.900	137.522.900	KECAMATAN GENUK	Penambahan pagu anggaran operasional
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	109.462.510	109.462.510	80.087.499	KECAMATAN GENUK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - di Kecamatan Genuk	26 persen	26 persen	109.462.510	109.462.510	80.087.499	KECAMATAN GENUK	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	109.462.510	109.462.510	80.087.499	KECAMATAN GENUK	Perubahan antar sub kegiatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	103.164.360	103.164.360	86.664.360	KECAMATAN GENUK	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan- di Kecamatan Genuk	6 angka	6 angka	103.164.360	103.164.360	86.664.360	KECAMATAN GENUK	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	103.164.360	103.164.360	86.664.360	KECAMATAN GENUK	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				36.804.736.840	36.804.736.840	45.880.886.740		
7.01	KECAMATAN				36.804.736.840	36.804.736.840	45.880.886.740		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	15.831.003.090	15.674.964.290	16.039.852.665	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihilangkan	06.00 Dokumen	06.00 Dokumen	77.959.700	77.959.700	49.518.082	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	55.754.400	55.754.400	40.271.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.835.400	4.835.400	1.415.484	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.190.900	6.190.900	2.077.463	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.818.200	2.818.200	1.290.839	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.956.000	2.956.000	1.350.896	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.060.000	2.060.000	112.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.344.800	3.344.800	3.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	14.431.164.600	14.275.125.800	14.175.361.709	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	13.953.656.000	13.797.617.200	13.237.464.878	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran belanja pegawai
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	472.000.000	472.000.000	934.984.431	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.723.800	1.723.800	1.500.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.836.200	1.836.200	412.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.948.600	1.948.600	1.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	100.00 Persen	525.447.521	525.447.521	905.579.594	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.925.000	5.925.000	5.925.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	109.134.400	109.134.400	324.861.032	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.500.000	60.500.000	50.500.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	14.935.000	14.935.000	14.935.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	212.360.571	212.360.571	189.974.111	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	111.592.550	111.592.550	308.384.451	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	43.918.526	43.918.526	76.115.486	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	43.918.526	43.918.526	76.115.486	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	280.050.353	280.050.353	280.050.353	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	207.300.000	207.300.000	207.300.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.750.353	72.750.353	72.750.353	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	472.462.390	472.462.390	553.227.441	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	190.000.000	190.000.000	163.871.028	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	148.810.000	148.810.000	265.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	94.737.390	94.737.390	53.963.896	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	38.915.000	38.915.000	70.392.517	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	96 Persen	3.524.842.750	3.680.881.550	2.524.839.698	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00 Angka	01.00 Angka	114.250.000	114.250.000	95.250.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2.250.000	2.250.000	2.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	112.000.000	112.000.000	93.250.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	1.485.000.000	1.485.000.000	1.121.564.798	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	682.000.000	682.000.000	395.125.017	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	89.804.024	KELURAHAN BENDAN DUWUR	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	96.686.844	KELURAHAN BENDAN NGISOR	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000	108.000.000	88.918.813	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	99.000.000	99.000.000	95.916.295	KELURAHAN KARANGREJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	96.344.900	KELURAHAN LEMPONGSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	90.089.325	KELURAHAN PETOMPON	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000	102.000.000	80.215.450	KELURAHAN SAMPANGAN	Pengurangan anggaran belanja modal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	98.000.000	88.464.129	KELURAHAN BENDUNGAN	Pengurangan anggaran belanja modal
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	1.925.592.750	2.081.631.550	1.308.024.900	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	1.925.592.750	2.081.631.550	1.308.024.900	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	17.172.400.000	17.172.400.000	27.041.667.037	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.00 Kegiatan	272.00 Kegiatan	9.752.450.000	9.954.050.000	9.692.477.933	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	83.000.000	83.000.000	39.697.500	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	963.000.000	963.000.000	963.000.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGREJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LEMPONGSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PETOMPON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAMPANGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BENDUNGAN	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	606.450.000	606.450.000	476.525.172	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Pengurangan anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	79.321.640	KELURAHAN BENDAN DUWUR	Penambahan anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	50.622.690	KELURAHAN BENDAN NGISOR	Pengurangan anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	71.234.490	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	64.300.000	KELURAHAN KARANGREJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	68.200.000	KELURAHAN LEMPONGSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	52.672.690	KELURAHAN PETOMPON	Pengurangan anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	68.290.000	KELURAHAN SAMPANGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	58.613.750	KELURAHAN BENDUNGAN	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9,00 Dokumen	9,00 Dokumen	7.419.950.000	7.218.350.000	17.349.189.105	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	118.495.916	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	678.200.000	653.000.000	1.489.868.552	KELURAHAN BENDAN DUWUR	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	674.000.000	653.000.000	1.529.948.200	KELURAHAN BENDAN NGISOR	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.669.400.000	1.635.800.000	4.189.750.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000	731.000.000	1.744.485.000	KELURAHAN KARANGREJO	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	824.600.000	1.942.777.000	KELURAHAN LEMPONGSARI	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	814.400.000	793.400.000	1.919.700.000	KELURAHAN PETOMPON	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.105.400.000	2.757.725.000	KELURAHAN SAMPANGAN	Penambahan anggaran

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	637.400.000	1.481.105.687	KELURAHAN BENDUNGAN	Penambahan anggaran
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	7.750.000	6.703.750	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	50.000.000	168.630.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Penambahan anggaran
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	194.516.000	194.516.000	193.652.340	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	28.00 Angka	28.00 Angka	194.516.000	194.516.000	193.652.340	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	194.516.000	194.516.000	193.652.340	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	81.975.000	81.975.000	80.875.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	04.00 Kegiatan	04.00 Kegiatan	81.975.000	81.975.000	80.875.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	81.975.000	81.975.000	80.875.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG				68.622.926.866	68.622.926.866	102.145.218.209		
7.01	KECAMATAN				68.622.926.866	68.622.926.866	102.145.218.209		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	22.332.817.726	22.068.201.206	22.340.532.504	KECAMATAN TEMBALANG	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100 %					Penambahan indikator sesuai dengan RPJMD, sehingga harus ada dalam target Perubahan
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100 %					Penambahan indikator sesuai dengan RPJMD, sehingga harus ada dalam target Perubahan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	62.083.400	62.083.400	54.958.400	KECAMATAN TEMBALANG	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	51.524.000	51.524.000	44.399.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.728.900	1.728.900	1.728.900	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.998.900	1.998.900	1.998.900	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.246.900	3.246.900	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.998.900	1.998.900	1.998.900	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	784.800	784.800	784.800	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	801.000	801.000	801.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	18.157.811.600	17.893.195.080	18.286.747.808	KECAMATAN TEMBALANG	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	17.510.099.000	17.245.482.480	17.055.033.013	KECAMATAN TEMBALANG	Pengurangan Anggaran Belanja Pegawai
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	646.704.000	646.704.000	1.230.706.195	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Upah PjLP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200	336.200	336.200	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	2.186.500.490	863.176.964	865.054.685	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	59.182.108	59.182.108	59.182.108	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.329.018.714	5.695.188	5.695.188	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.008.837	29.008.837	20.008.837	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.920.535	12.920.535	7.803.435	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	151.750.000	151.750.000	102.750.000	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Anggaran
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	314.000.000	314.000.000	224.244.000	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Anggaran
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	290.620.296	290.620.296	445.371.118	KECAMATAN TEMBALANG	Penambahan Anggaran
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	34.620.456	1.357.943.982	1.200.051.212	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	34.620.456	1.357.943.982	1.200.051.212	KECAMATAN TEMBALANG	Efisiensi Belanja Modal
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	540.000.000	540.000.000	345.396.399	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	280.000.000	280.000.000	164.966.021	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Anggaran
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000	260.000.000	180.430.378	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Anggaran
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	1.351.801.780	1.351.801.780	1.588.324.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	201.801.780	201.801.780	162.324.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	1.276.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	Penambahan Anggaran
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	4.768.688.740	5.033.305.260	3.683.254.827	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec Tembalang	1 angka	1 angka	745.848.900	745.848.900	649.203.500	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	742.848.900	742.848.900	646.203.500	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Anggaran
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	2.628.232.040	2.892.848.560	2.244.147.577	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1.101.232.040	1.365.848.560	798.936.260	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Gaji PJLP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000	144.000.000	137.098.967	KELURAHAN METESEH	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	125.000.000	117.870.543	KELURAHAN MANGUNHARJO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	132.000.000	132.000.000	122.248.289	KELURAHAN TANDANG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000	130.000.000	124.599.664	KELURAHAN SENDANGGUWO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	118.000.000	118.000.000	110.054.475	KELURAHAN JANGLI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	123.000.000	123.000.000	116.878.537	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	117.000.000	117.000.000	112.796.628	KELURAHAN TEMBALANG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	157.000.000	157.000.000	148.214.175	KELURAHAN SENDANGMULYO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	119.000.000	119.000.000	113.540.159	KELURAHAN BULUSAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	116.000.000	116.000.000	110.050.157	KELURAHAN KRAMAS	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	119.000.000	119.000.000	113.852.116	KELURAHAN ROWOSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	127.000.000	127.000.000	118.007.607	KELURAHAN SAMBIROTO	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	1.394.607.800	1.394.607.800	789.903.750	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.394.607.800	1.394.607.800	789.903.750	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Gaji PJLP
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	41.365.120.400	41.365.120.400	75.970.430.878	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425 Kegiatan	425 Kegiatan	17.875.920.400	18.539.520.400	18.298.900.132	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	168.500.000	168.500.000	130.735.000	KECAMATAN TEMBALANG	Pergeseran Anggaran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	1.501.000.000	1.501.000.000	1.501.000.000	KELURAHAN METESEH	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	1.635.000.000	1.635.000.000	1.635.000.000	KELURAHAN TANDANG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.309.000.000	1.309.000.000	1.309.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JANGLI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TEMBALANG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.901.000.000	1.901.000.000	1.901.000.000	KELURAHAN SENDANGMULYO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BULUSAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KRAMAS	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	2.261.000.000	2.261.000.000	2.261.000.000	KELURAHAN ROWOSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	575.420.400	575.420.400	487.735.718	KECAMATAN TEMBALANG	Tambahan Anggaran
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	180.200.000	185.057.553	KELURAHAN METESEH	Tambahan Anggaran DAU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	78.400.000	KELURAHAN MANGUNHARJO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	101.014.809	KELURAHAN TANDANG	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	74.450.000	KELURAHAN SENDANGGUWO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	59.650.000	KELURAHAN JANGLI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	75.100.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	68.925.000	KELURAHAN TEMBALANG	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	197.000.000	177.325.000	KELURAHAN SENDANGMULYO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	69.300.000	KELURAHAN BULUSAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	71.000.000	65.000.000	KELURAHAN KRAMAS	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	83.545.400	KELURAHAN ROWOSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	110.661.653	KELURAHAN SAMBIROTO	Tambahan Anggaran DAU
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	45 Dokumen	45 Dokumen	23.489.200.000	22.825.600.000	57.671.530.746	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	124.494.130	KECAMATAN TEMBALANG	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	3.710.600.000	9.649.543.973	KELURAHAN METESEH	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000	1.620.200.000	4.124.285.950	KELURAHAN MANGUNHARJO	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	2.291.000.000	5.925.330.379	KELURAHAN TANDANG	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	2.119.400.000	5.528.338.309	KELURAHAN SENDANGGUWO	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	887.000.000	2.172.285.612	KELURAHAN JANGLI	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	1.401.800.000	3.535.732.210	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	777.800.000	1.819.006.460	KELURAHAN TEMBALANG	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000	5.067.800.000	13.302.498.299	KELURAHAN SENDANGMULYO	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	918.200.000	2.210.892.425	KELURAHAN BULUSAN	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	637.400.000	1.460.650.000	KELURAHAN KRAMAS	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000	1.136.600.000	2.774.694.503	KELURAHAN ROWOSARI	Penambahan Anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	1.869.800.000	4.782.778.496	KELURAHAN SAMBIROTO	Penambahan Anggaran
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 %	25 %	60.000.000	60.000.000	54.700.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25 Angka	25 Angka	60.000.000	60.000.000	54.700.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	54.700.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 %	80 %	96.300.000	96.300.000	96.300.000	KECAMATAN TEMBALANG	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	96.300.000	96.300.000	96.300.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180 Orang	180 Orang	96.300.000	96.300.000	96.300.000	KECAMATAN TEMBALANG	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI				34.836.828.344	34.836.828.344	47.971.091.178		
7.01	KECAMATAN				34.836.828.344	34.836.828.344	47.971.091.178		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	13.741.675.498	13.493.961.738	14.136.074.852	KECAMATAN CANDISARI	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	72.062.990	72.062.990	64.880.790	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec.Candisari	2 dokumen	2 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	55.204.600	55.204.600	54.133.200	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.996.900	2.996.900	1.025.000	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.900	3.033.900	925.000	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.565.900	3.565.900	2.406.000	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.900	3.449.900	2.589.000	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.780.590	1.780.590	1.482.790	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.031.200	2.031.200	2.319.800	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	11.729.104.200	11.481.390.440	12.219.249.624	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Candisari	3 dokumen	3 dokumen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	11.335.291.000	11.087.577.240	11.111.521.304	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	390.292.000	390.292.000	1.104.966.320	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.911.200	1.911.200	1.374.800	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.386.200	1.386.200	1.274.800	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	112.400	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Candisari	100 persen	100 persen	998.173.786	998.173.786	1.045.912.310	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	21.973.990	21.973.990	27.353.730	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	495.973.024	495.973.024	456.375.500	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran belanja modal
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	80.904.430	80.904.430	34.554.471	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran belanja modal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	15.636.213	15.636.213	4.399.120	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	91.750.000	91.750.000	68.250.000	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran belanja modal
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	116.433.649	116.433.649	89.289.009	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	175.502.480	175.502.480	365.690.480	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	211.313.432	211.313.432	115.784.214	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	211.313.432	211.313.432	115.784.214	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran belanja modal
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	263.082.119	263.082.119	249.321.444	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165.341.468	165.341.468	165.341.468	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.740.651	97.740.651	83.979.976	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	467.938.971	467.938.971	440.926.470	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	222.240.761	222.240.761	195.228.260	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	30.312.960	30.312.960	30.312.960	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	25.385.250	25.385.250	25.385.250	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	2.479.220.086	2.726.933.846	1.784.164.260	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan		2 angka					Penambahan indikator sesuai dengan RPJMD, sehingga harus ada dalam target Perubahan
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1 angka	1 angka	30.049.300	30.049.300	99.974.630	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	900.000	900.000	900.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	29.149.300	29.149.300	99.074.630	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	817.409.216	817.409.216	601.015.420	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	328.844.216	328.844.216	137.612.336	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	69.102.000	69.102.000	62.402.000	KELURAHAN JATINGALEH	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	67.716.000	67.716.000	66.495.830	KELURAHAN WONOTINGAL	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	73.260.000	73.260.000	68.660.000	KELURAHAN TEGALSARI	Penambahan anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	64.944.000	64.944.000	63.294.000	KELURAHAN KALIWIRU	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	67.716.000	67.716.000	65.266.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	70.488.000	70.488.000	66.638.000	KELURAHAN CANDI	Pengurangan anggaran
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	75.339.000	75.339.000	70.647.254	KELURAHAN JOMBLANG	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	1.631.761.570	1.879.475.330	1.083.174.210	KECAMATAN CANDISARI	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.631.761.570	1.879.475.330	1.083.174.210	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18.488.482.760	18.488.482.760	31.932.952.066	KECAMATAN CANDISARI	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100 Persen	0					Duplikasi Indikator, sehingga hanya digunakan salah satu
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari	80 kegiatan	80 kegiatan	9.119.082.760	9.392.082.760	9.275.726.190	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.082.760	38.082.760	9.323.680	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JATINGALEH	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	14 Unit	996.000.000	996.000.000	1.018.728.000	KELURAHAN TEGALSARI	Penambahan anggaran
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KALIWIRU	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	8 Unit	972.000.000	972.000.000	972.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN CANDI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	19 Unit	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000	KELURAHAN JOMBLANG	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	390.000.000	390.000.000	302.344.340	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	87.200.000	KELURAHAN JATINGALEH	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	72.470.170	KELURAHAN WONOTINGAL	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	96.100.000	KELURAHAN TEGALSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	64.000.000	KELURAHAN KALIWIRU	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	75.200.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	91.900.000	KELURAHAN CANDI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	117.200.000	113.460.000	KELURAHAN JOMBLANG	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari	6 kegiatan	6 kegiatan	9.369.400.000	9.096.400.000	22.657.225.876	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN CANDISARI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	1.167.800.000	2.871.440.000	KELURAHAN JATINGALEH	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	933.800.000	2.301.460.000	KELURAHAN WONOTINGAL	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	1.791.800.000	4.555.702.720	KELURAHAN TEGALSARI	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000	528.200.000	1.205.985.440	KELURAHAN KALIWIRU	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	980.600.000	2.432.880.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	1.339.400.000	3.330.770.000	KELURAHAN CANDI	Penambahan anggaran
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	2.213.000.000	5.694.381.746	KELURAHAN JOMBLANG	Penambahan anggaran
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000	4.800.000	4.200.000	KECAMATAN CANDISARI	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	133.405.970	KECAMATAN CANDISARI	Penambahan anggaran
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	53.300.000	53.300.000	44.750.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec.Candisari	31 angka	31 angka	53.300.000	53.300.000	44.750.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	53.300.000	53.300.000	44.750.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	74.150.000	74.150.000	73.150.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec.Candisari	2 kegiatan	2 kegiatan	74.150.000	74.150.000	73.150.000	KECAMATAN CANDISARI	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	70 Orang	74.150.000	74.150.000	73.150.000	KECAMATAN CANDISARI	Pengurangan anggaran
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				56.087.752.962	56.087.752.962	80.251.863.526		
7.01	KECAMATAN				56.087.752.962	56.087.752.962	80.251.863.526		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	0	21.186.671.844	20.999.425.284	21.189.714.369	KECAMATAN BANYUMANIK	Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	0					Tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga harus dihapus dalam target Perubahan
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	7 Dokumen	7 Dokumen	66.345.600	66.345.600	59.506.800	KECAMATAN BANYUMANIK	
		Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	2 Dokumen	2 Dokumen					
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	52.336.800	52.336.800	50.870.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.936.800	1.936.800	1.200.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.800	2.530.800	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.336.800	1.336.800	1.336.800	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.800	2.530.800	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.336.800	4.336.800	2.600.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.336.800	1.336.800	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3 Dokumen	3 Dokumen	18.204.506.800	18.017.260.240	17.679.865.807	KECAMATAN BANYUMANIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100 persen	100 persen					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	17.563.894.000	17.376.647.440	17.038.511.621	KECAMATAN BANYUMANIK	Pengurangan belanja pegawai
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	632.592.000	632.592.000	638.040.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.336.800	1.336.800	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.347.200	5.347.200	1.314.186	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.336.800	1.336.800	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	976.542.791	976.542.791	1.055.398.611	KECAMATAN BANYUMANIK	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	14.900.000	14.900.000	14.900.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	44.995.982	44.995.982	44.995.982	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.909.899	20.909.899	20.909.899	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kuniungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	5.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	353.195.890	353.195.890	274.423.780	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	472.541.020	472.541.020	634.668.950	KECAMATAN BANYUMANIK	Pengurangan karena hold dan penambahan karena pengadaan scanner,dll
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	549.122.306	549.122.306	372.702.578	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	549.122.306	549.122.306	372.702.578	KECAMATAN BANYUMANIK	Pengurangan karena hold
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	443.915.450	443.915.450	1.133.810.073	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	211.000.000	211.000.000	215.003.533	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	87.715.450	87.715.450	87.715.450	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	145.200.000	145.200.000	831.091.090	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	946.238.897	946.238.897	888.430.500	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	265.918.897	265.918.897	241.105.500	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	280.000.000	280.000.000	255.002.500	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	370.320.000	370.320.000	362.322.500	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.484.355.230	3.671.601.790	2.525.710.538	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik	1 Angka	1 Angka	143.025.000	143.025.000	116.959.599	KECAMATAN BANYUMANIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	6.600.000	6.600.000	4.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	136.425.000	136.425.000	112.959.599	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	1.808.477.300	1.995.723.860	1.476.316.859	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	749.477.300	936.723.860	509.278.796	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	92.000.000	92.000.000	87.139.862	KELURAHAN BANYUMANIK	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	94.000.000	85.602.332	KELURAHAN GEDAWANG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	82.641.394	KELURAHAN JABUNGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	97.000.000	97.000.000	86.317.611	KELURAHAN NGESREP	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	88.634.846	KELURAHAN PADANGSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	95.000.000	79.038.348	KELURAHAN PEDALANGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	107.000.000	107.000.000	103.568.734	KELURAHAN PUDAKPAYUNG	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	94.000.000	84.747.967	KELURAHAN SRONDOL KULON	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	105.000.000	96.157.735	KELURAHAN SRONDOL WETAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000	96.000.000	90.831.107	KELURAHAN SUMURBOTO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	91.000.000	82.358.127	KELURAHAN TINJOMOYO	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	1.532.852.930	1.532.852.930	932.434.080	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.532.852.930	1.532.852.930	932.434.080	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	31.147.675.888	31.147.675.888	56.301.938.619	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	455 Kegiatan	455 Kegiatan	13.816.700.000	14.413.100.000	14.738.450.760	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	45.000.000	34.873.950	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.100.000.000	1.100.000.000	1.350.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Penambahan Pagu Anggaran untuk Pembangunan Gedung Parkir Armada Kebersihan dan Pembangunan Sarpras Pilah Sampah di Kelurahan Jabungan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN GEDAWANG	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	1.353.000.000	1.353.000.000	1.376.589.364	KELURAHAN JABUNGAN	Penambahan dana DAU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000	KELURAHAN NGESREP	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PADANGSARI	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	1.267.000.000	1.267.000.000	1.267.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Pergeseran Internal

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.220.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN	Pergeseran Internal
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	973.000.000	973.000.000	973.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	482.700.000	482.700.000	624.440.224	KECAMATAN BANYUMANIK	Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Bazar
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	87.868.483	KELURAHAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	94.070.794	KELURAHAN GEDAWANG	Penambahan DAU Gedawang untuk Kegiatan Non Fisik
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	72.800.000	KELURAHAN JABUNGAN	Penambahan DAU Jabungan untuk Kegiatan Non Fisik
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	104.600.000	92.547.335	KELURAHAN NGESREP	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	117.200.000	108.050.000	KELURAHAN PADANGSARI	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	83.325.730	KELURAHAN PEDALANGAN	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	163.400.000	155.200.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	89.300.000	KELURAHAN SRONDOL KULON	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	146.600.000	139.331.620	KELURAHAN SRONDOL WETAN	Pergeseran Internal
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	64.832.400	KELURAHAN SUMURBOTO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	79.220.860	KELURAHAN TINJOMOYO	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5 Dokumen	5 Dokumen	17.330.975.888	16.734.575.888	41.563.487.859	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	137.000.000	120.520.493	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.163.000.000	1.121.000.000	2.737.900.000	KELURAHAN BANYUMANIK	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.405.400.000	1.355.000.000	3.425.190.000	KELURAHAN GEDAWANG	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	827.000.000	793.400.000	1.880.203.000	KELURAHAN JABUNGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.643.600.000	1.589.000.000	4.028.860.150	KELURAHAN NGESREP	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.968.200.000	1.901.000.000	4.770.927.398	KELURAHAN PADANGSARI	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.373.000.000	1.339.400.000	3.324.192.250	KELURAHAN PEDALANGAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.825.600.000	2.712.200.000	7.103.383.792	KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.401.200.000	1.355.000.000	3.345.926.362	KELURAHAN SRONDOL KULON	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.543.600.000	2.447.000.000	6.271.545.966	KELURAHAN SRONDOL WETAN	Penambahan Pagu Anggaran untuk Honor PKK, Operasional PKK RT RW, Operasional RW, Operasional RT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	927.800.000	902.600.000	2.226.420.378	KELURAHAN SUMURBOTO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	983.000.000	949.400.000	2.299.030.670	KELURAHAN TINJOMOYO	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	8.287.400	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	117.575.888	117.575.888	21.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	45.450.000	45.450.000	32.400.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	27 Angka	27 Angka	45.450.000	45.450.000	32.400.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	45.450.000	45.450.000	32.400.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	223.600.000	223.600.000	202.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	223.600.000	223.600.000	202.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	223.600.000	223.600.000	202.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK	Pergeseran Internal
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				59.337.863.016	59.337.863.016	85.802.172.777		
7.01	KECAMATAN				59.337.863.016	59.337.863.016	85.802.172.777		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	21.545.743.316	21.297.163.634	21.691.003.724	KECAMATAN NGALIYAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	6.00 dokumen	6.00 dokumen	66.368.200	66.368.200	28.605.400	KECAMATAN NGALIYAN	
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen	2.00 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	57.168.600	57.168.600	24.474.100	KECAMATAN NGALIYAN	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.060.400	2.060.400	525.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.900	1.775.900	525.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.400	1.001.400	111.400	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.900	1.250.900	418.900	KECAMATAN NGALIYAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.198.600	2.198.600	1.861.400	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	912.400	912.400	689.600	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	4.00 dokumen	17.552.096.800	17.303.517.118	17.886.678.101	KECAMATAN NGALIYAN	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	16.936.271.000	16.687.691.318	16.695.014.951	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	613.356.000	613.356.000	1.191.328.950	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari Sub Kegiatan lain untuk kebutuhan honor pjlp
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	673.400	673.400	111.400	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.460.200	1.460.200	111.400	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200	336.200	111.400	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	1.411.770.764	1.411.770.764	1.188.922.938	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	19.697.967	19.697.967	19.697.967	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	421.410.000	421.410.000	268.027.520	KECAMATAN NGALIYAN	Dialihkan ke beberapa sub kegiatan untuk langganan listrik, air, koran, perbaikan mebel, dan pembuatan kamar mandi difable
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	23.299.095	23.299.095	20.455.487	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk pembelian ATK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	15.979.135	15.979.135	5.092.937	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk cetak
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	19.720.000	19.720.000	3.610.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	109.920.000	109.920.000	105.198.299	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	801.744.567	801.744.567	766.840.728	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk pembelian printer dan scanner untuk kelurahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	470.689.972	470.689.972	422.198.234	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	470.689.972	470.689.972	422.198.234	KECAMATAN NGALIYAN	Dialihkan ke Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD untuk pembelian printer dan scanner untuk kelurahan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	366.326.905	366.326.905	396.233.015	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	206.729.917	206.729.917	214.596.400	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk langganan listrik, air, koran
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	159.596.988	159.596.988	181.636.615	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk perbaikan mebel
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	1.678.490.675	1.678.490.675	1.768.366.036	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	283.299.972	283.299.972	273.175.333	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	775.000.000	775.000.000	875.000.000	KECAMATAN NGALIYAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk pembuatan kamar mandi difable
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.190.703	20.190.703	20.190.703	KECAMATAN NGALIYAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	600.000.000	600.000.000	600.000.000	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	3.716.382.820	3.964.962.502	2.768.376.546	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan Kelurahan - Kec. Ngalian	1.00 Angka	1.00 Angka	376.790.080	376.790.080	164.025.000	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	4.303.350	4.303.350	3.400.000	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	372.486.730	372.486.730	160.625.000	KECAMATAN NGALIAN	Dialihkan ke Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk perbaikan sarpras kewilayahan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngalian	100.00 persen	100.00 persen	1.308.269.090	1.308.269.090	1.107.138.020	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	378.269.090	378.269.090	240.063.706	KECAMATAN NGALIAN	Dialihkan ke Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk perbaikan sarpras kewilayahan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	89.021.080	KELURAHAN BRINGIN	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	85.151.235	KELURAHAN KALIPANCUR	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	89.837.718	KELURAHAN BAMBANKEREP	Tambahan dari Sub Kegiatan lain untuk kebutuhan bank sampah dan pembelian BBM Genset untuk pelayanan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	91.349.926	KELURAHAN NGALIAN	Tambahan dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	84.880.511	KELURAHAN WATES	Tambahan dari Sub Kegiatan lain untuk kebutuhan bank sampah, BBM Genset, dan servis komputer
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	84.248.900	KELURAHAN TAMBAKAJI	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	89.965.305	KELURAHAN WONOSARI	Tambahan dari Sub Kegiatan lain untuk kebutuhan bank sampah, pemeliharaan diesel dan servis komputer
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	81.520.122	KELURAHAN PODOREJO	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	87.525.119	KELURAHAN PURWOYOSO	Tambahan dari Sub Kegiatan lain untuk kebutuhan bank sampah dan untuk pelayanan masyarakat
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	93.000.000	93.000.000	83.574.398	KELURAHAN GONDORIYO	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat - Kec. Ngalian	100.00 persen	100.00 persen	2.031.323.650	2.279.903.332	1.497.213.526	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	2.031.323.650	2.279.903.332	1.497.213.526	KECAMATAN NGALIAN	Dialihkan ke Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk honor PJLP
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	33.818.554.050	33.818.554.050	61.029.037.416	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngalian	232.00 kegiatan	232.00 kegiatan	15.353.038.040	16.054.438.040	16.377.582.492	KECAMATAN NGALIAN	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.906.040	49.906.040	30.976.790	KECAMATAN NGALIAN	Dialihkan ke Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk perbaikan sarpras kewilayahan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	30 Unit	2.925.000.000	2.925.000.000	3.587.615.422	KECAMATAN NGALIAN	Tambahan dari sub kegiatan lain untuk perbaikan sarpras kewilayahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.037.800.000	1.037.800.000	1.054.519.000	KELURAHAN BRINGIN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.113.950.000	1.113.950.000	1.113.950.000	KELURAHAN KALIPANCUR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	927.500.000	927.500.000	927.500.000	KELURAHAN BAMBANKEREP	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	910.000.000	910.000.000	930.000.000	KELURAHAN NGALIYAN	Tambahan dari Sub Kegiatan Lembaga Masyarakat
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	999.300.000	999.300.000	999.300.000	KELURAHAN WATES	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.208.350.000	1.208.350.000	1.208.350.000	KELURAHAN TAMBAKAJI	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	1.864.247.000	1.864.247.000	1.864.247.000	KELURAHAN WONOSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	906.980.000	906.980.000	906.980.000	KELURAHAN PODOREJO	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.097.824.000	1.097.824.000	1.097.824.000	KELURAHAN PURWOYOSO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	917.181.000	917.181.000	917.181.000	KELURAHAN GONDORIYO	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	895.000.000	895.000.000	682.266.862	KECAMATAN NGALIYAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	150.800.000	139.638.920	KELURAHAN BRINGIN	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	117.200.000	102.500.000	KELURAHAN KALIPANCUR	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	83.600.000	69.465.000	KELURAHAN BAMBANKEREP	Dialihkan ke Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk pembelian kelengkapan bank sampah dan pembelian BBM Genset untuk pelayanan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	83.700.000	KELURAHAN NGALIYAN	Dialihkan ke Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk pembelian kelengkapan bank sampah, urban farming, BBM Genset dan servis printer
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	79.400.000	66.736.000	KELURAHAN WATES	Dialihkan ke Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk pembelian kelengkapan bank sampah, BBM Genset dan servis komputer
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	184.400.000	177.329.186	KELURAHAN TAMBAKAJI	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	163.400.000	143.719.900	KELURAHAN WONOSARI	Dialihkan ke Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk pembelian kelengkapan bank sampah, pemeliharaan diesel dan servis komputer
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	80.237.410	KELURAHAN PODOREJO	Pergeseran dalam satu sub kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	121.400.000	104.962.497	KELURAHAN PURWOYOSO	Dialihkan ke Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan untuk pembelian kelengkapan bank sampah dan pelayanan masyarakat
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	88.583.505	KELURAHAN GONDORIYO	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.465.516.010	17.764.116.010	44.651.454.924	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	126.725.700	KECAMATAN NGALIYAN	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000	2.774.600.000	7.212.647.210	KELURAHAN BRINGIN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000	2.275.400.000	5.905.318.926	KELURAHAN KALIPANCUR	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	764.600.000	731.000.000	1.783.084.793	KELURAHAN BAMBANKEREP	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000	1.698.200.000	4.229.542.988	KELURAHAN NGALIYAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	947.600.000	918.200.000	2.208.491.476	KELURAHAN WATES	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000	2.259.800.000	5.797.688.200	KELURAHAN TAMBAKAJI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000	2.400.200.000	6.189.534.142	KELURAHAN WONOSARI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000	1.245.800.000	3.045.735.279	KELURAHAN PODOREJO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000	1.807.400.000	4.571.134.442	KELURAHAN PURWOYOSO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.389.800.000	1.339.400.000	3.303.028.225	KELURAHAN GONDORIYO	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	48.019.910	48.019.910	18.272.630	KECAMATAN NGALIYAN	Pergeseran dalam satu sub kegiatan
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5 Laporan	139.096.100	139.096.100	260.250.913	KECAMATAN NGALIYAN	Dialihkan ke Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk perbaikan sarpras kewilayahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	176.082.830	176.082.830	219.105.090	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00 Angka	28.00 Angka	176.082.830	176.082.830	219.105.090	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	176.082.830	176.082.830	219.105.090	KECAMATAN NGALIYAN	Dialihkan ke Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk perbaikan sarpras kewilayahan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	81.100.000	81.100.000	94.650.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	81.100.000	81.100.000	94.650.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	81.100.000	81.100.000	94.650.000	KECAMATAN NGALIYAN	Dialihkan ke Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk perbaikan sarpras kewilayahan
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI				35.796.514.330	35.796.514.330	48.316.543.296		
7.01	KECAMATAN				35.796.514.330	35.796.514.330	48.316.543.296		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100.00 Persen	100.00 Persen	14.355.832.121	14.153.631.121	14.333.367.519	KECAMATAN GAYAMSARI	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	64.005.900	64.005.900	63.272.100	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	52.015.800	52.015.800	52.015.800	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.978.600	1.978.600	1.867.200	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.736.600	2.736.600	2.736.600	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.899.500	2.899.500	2.277.100	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.994.200	1.994.200	1.994.200	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.235.400	1.235.400	1.235.400	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.145.800	1.145.800	1.145.800	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	13.038.894.200	12.836.693.200	12.859.751.420	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	12.663.064.000	12.460.863.000	12.024.974.235	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	374.372.000	374.372.000	833.541.785	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	561.000	561.000	449.600	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	448.600	448.600	448.600	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	337.200	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	621.243.382	621.243.382	570.496.028	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	12.345.090	12.345.090	12.345.090	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	200.824.574	200.824.574	210.402.964	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	29.688.320	29.688.320	17.479.685	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	14.118.101	14.118.101	4.294.910	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kuniungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	7.500.000	5.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	130.198.981	130.198.981	70.830.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	226.568.316	226.568.316	250.143.378	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	46.179.996	46.179.996	302.201.496	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	46.179.996	46.179.996	302.201.496	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	212.148.966	212.148.966	200.406.386	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.748.500	150.748.500	154.299.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.400.466	61.400.466	46.107.386	KECAMATAN GAYAMSARI	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	373.359.677	373.359.677	337.240.090	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	111.594.587	111.594.587	110.475.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	142.500.000	142.500.000	117.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	24.265.090	24.265.090	24.265.090	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	95.000.000	95.000.000	85.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	2.366.177.740	2.568.378.740	1.807.467.621	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Angka	1 Angka	123.865.000	123.865.000	120.975.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	2.700.000	2.700.000	2.700.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	121.165.000	121.165.000	118.275.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	1.345.773.200	1.547.974.200	1.123.348.721	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	749.773.200	951.974.200	604.291.936	KECAMATAN GAYAMSARI	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	75.732.390	KELURAHAN TAMBAKREJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	80.689.000	KELURAHAN KALIGAWA	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	66.509.053	KELURAHAN SAWAH BESAR	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	83.000.000	65.606.762	KELURAHAN SIWALAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	63.491.110	KELURAHAN SAMBIREJO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	82.959.190	KELURAHAN PANDEAN LAMPER	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000	84.069.280	KELURAHAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	896.539.540	896.539.540	563.143.900	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	896.539.540	896.539.540	563.143.900	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18.847.102.469	18.847.102.469	31.973.958.306	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	80 Angka	9.675.060.318	9.948.060.318	9.950.106.945	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.310.810	40.310.810	26.038.090	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.289.408.648	1.289.408.648	1.453.358.648	KECAMATAN GAYAMSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.291.000.000	1.291.000.000	1.291.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	1.218.000.000	1.218.000.000	1.218.000.000	KELURAHAN KALIGAWA	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAWAH BESAR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	964.000.000	964.000.000	964.000.000	KELURAHAN SIWALAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	1.169.000.000	1.169.000.000	1.169.000.000	KELURAHAN SAMBIREJO	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	503.340.860	503.340.860	391.486.977	KECAMATAN GAYAMSARI	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	95.384.000	KELURAHAN TAMBAKREJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	86.600.000	KELURAHAN KALIGAWA	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	92.000.000	86.150.000	KELURAHAN SAWAH BESAR	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	66.800.000	56.200.630	KELURAHAN SIWALAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	87.800.000	83.600.000	KELURAHAN SAMBIREJO	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	94.138.600	KELURAHAN PANDEAN LAMPER	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	85.150.000	KELURAHAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	768 Angka	9.172.042.151	8.899.042.151	22.023.851.361	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	119.735.180	KECAMATAN GAYAMSARI	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.089.800.000	2.666.791.370	KELURAHAN TAMBAKREJO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000	1.464.200.000	3.694.954.950	KELURAHAN KALIGAWA	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000	1.105.400.000	2.696.085.000	KELURAHAN SAWAH BESAR	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000	762.200.000	1.854.532.120	KELURAHAN SIWALAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000	1.058.600.000	2.579.975.540	KELURAHAN SAMBIREJO	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000	1.932.200.000	4.968.770.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000	1.308.200.000	3.284.353.440	KELURAHAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.442.151	11.442.151	11.442.151	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	147.211.610	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	153.602.000	153.602.000	129.749.850	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	16 Angka	16 Angka	153.602.000	153.602.000	129.749.850	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	153.602.000	153.602.000	129.749.850	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	98 Persen	73.800.000	73.800.000	72.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	73.800.000	73.800.000	72.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	80 Orang	73.800.000	73.800.000	72.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN				67.088.998.222	66.588.998.222	101.039.080.375		
7.01	KECAMATAN				67.088.998.222	66.588.998.222	101.039.080.375		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	100.00 Persen	22.884.304.442	22.697.274.362	22.695.247.777	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan	5 dokumen	5 dokumen	93.591.900	93.591.900	20.106.550	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan	2 dokumen	2 dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	54.647.000	54.647.000	2.233.087	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.755.900	4.755.900	2.664.370	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.830.900	4.830.900	4.474.900	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.780.900	3.780.900	3.464.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.900	4.080.900	3.764.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	19.570.300	19.570.300	2.590.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.926.000	1.926.000	916.193	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan	4 dokumen	4 dokumen	19.678.513.800	19.491.483.720	19.998.462.336	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan	100 persen	100 persen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	18.940.177.000	18.753.146.920	18.494.592.436	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	731.260.000	731.260.000	1.500.605.500	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.461.200	1.461.200	750.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4.754.400	4.754.400	1.604.400	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	861.200	861.200	910.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan	100 persen	100 persen	1.675.749.614	1.675.749.614	1.257.147.191	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	24.977.386	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	534.349.419	534.349.419	438.249.837	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	45.000.000	30.488.749	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.452.866	16.452.866	4.201.823	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	162.317.800	162.317.800	178.467.800	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	396.574.070	396.574.070	67.931.739	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	496.055.459	496.055.459	512.829.857	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pedurungan	100 persen	100 persen	102.664.699	102.664.699	148.798.900	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	102.664.699	102.664.699	148.798.900	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan	100 persen	100 persen	439.045.711	439.045.711	416.126.800	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000	270.000.000	270.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	169.045.711	169.045.711	146.126.800	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan	100 persen	100 persen	894.738.718	894.738.718	854.606.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	226.738.718	226.738.718	186.606.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	338.000.000	338.000.000	338.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	280.000.000	280.000.000	280.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	94 Persen	4.269.079.180	3.956.109.260	3.359.873.934	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan	1 angka	1 angka	1.116.000.000	616.000.000	937.265.179	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	50.000.000	45.935.220	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107 Dokumen	107 Dokumen	1.066.000.000	566.000.000	891.329.959	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan	100 persen	100 persen	1.748.945.580	1.935.975.660	1.552.192.855	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	518.945.580	705.975.660	463.114.160	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	125.000.000	113.133.779	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Belanja Langganan Surat Kabar dan Belanja listrik,air,telpon dialihkan ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	125.000.000	106.329.951	KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dialihkan ke Belanja Tagihan Listrik , ke Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Pemberdayaan serta ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	76.822.600	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	105.000.000	95.213.250	KELURAHAN TLOGOMULYO	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	95.000.000	85.277.090	KELURAHAN KALICARI	Belanja listrik, dan sewa peralatan umum dialihkan ke Belanja Makanan dan Minuman Rapat , Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	105.000.000	91.998.370	KELURAHAN PLAMONGANSARI	Belanja Tagihan Listrik dialihkan ke Belanja Makanan dan Minuman Rapat
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	105.000.000	96.854.033	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Penambahan dari Belanja Perjalanan Dinas Karang Taruna sebesar 2.250.000 dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar 1.200.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	95.000.000	87.009.520	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	Pengurangan Belanja Tagihan Listrik dijadikan Honor Narsum untuk LPMK dan PP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	105.000.000	88.718.235	KELURAHAN GEMAH	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	85.116.222	KELURAHAN PALEBON	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	82.654.538	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	Belanja Perlengkapan Dinas di alihkan sebagian ke rekening Belanja Tagihan Listrik karena anggaran tagihan listrik yang tersedia tidak mencukupi s.d pembayaran akhir tahun
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	79.951.107	KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas dan makan minum rapat di alihkan ke belanja listrik
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan	100 persen	100 persen	1.404.133.600	1.404.133.600	870.415.900	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	1.404.133.600	1.404.133.600	870.415.900	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	94 Persen	39.435.010.000	39.435.010.000	74.661.178.744	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan	385 kegiatan	385 kegiatan	15.771.810.000	16.485.810.000	16.506.451.133	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	27.906.379	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	1.132.368.000	1.132.368.000	1.132.412.421	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.705.376.000	1.705.376.000	1.705.376.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.677.736.000	1.677.736.000	1.677.736.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON	- Titik Lokasi berubah semula Jl Parang Klitik IV RW 19 dialihkan ke Jl Ratu Ratih I RW 19 - Titik Lokasi berubah semula Jl Syuhada Utara RW 22 dialihkan ke Jl Taman Syuhada III RW 22
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	946.736.000	946.736.000	946.736.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.081.008.000	1.081.008.000	1.081.008.000	KELURAHAN TLOGOMULYO	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	947.552.000	947.552.000	947.552.000	KELURAHAN KALICARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.027.096.000	1.027.096.000	1.027.096.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	946.192.000	946.192.000	946.192.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Belanja Fotocopy dialihkan ke Belanja Alat Tulis Kantor
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	947.280.000	947.280.000	947.280.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.079.464.000	1.079.464.000	1.079.464.000	KELURAHAN GEMAH	Belanja Fotocopy dialihkan ke Belanja Alat Tulis Kantor
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	1.081.280.000	1.081.280.000	1.081.280.000	KELURAHAN PALEBON	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	993.736.000	993.736.000	993.736.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	948.096.000	948.096.000	948.096.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	607.890.000	607.890.000	728.930.219	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	50.000.000	155.000.000	168.965.699	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Tambahan anggaran dau kecamatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	50.000.000	167.600.000	161.625.810	KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Penambahan Honor Narasumber PP
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	65.820.500	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	50.000.000	108.800.000	92.871.550	KELURAHAN TLOGOMULYO	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dialihkan ke Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	83.123.635	KELURAHAN KALICARI	Belanja sewa peralatan umum dan jamuan makan dialihkan ke Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honor Narasumber, dan Fotocopy
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50.000.000	117.200.000	111.185.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Honorarium Narasumber (Pmeberdayaan) dialihkan ke Honorarium Narasumber (Lembaga : PKK, LPMK, FKK, Karang Taruna)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50.000.000	113.000.000	98.663.100	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar 1,200,000 dialihkan ke Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Event (Operasional)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	104.600.000	108.271.680	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	penambahan Honor Narasumber PP, tambahan anggaran DAU kecamatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	50.000.000	100.400.000	94.400.000	KELURAHAN GEMAH	Belanja buah meja dialihkan ke makan minum
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	50.000.000	96.200.000	86.415.260	KELURAHAN PALEBON	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	104.600.000	95.265.280	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	75.200.000	69.042.600	KELURAHAN PENGGARON KIDUL	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan	8 jenis	8 jenis	23.663.200.000	22.949.200.000	58.154.727.611	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	123.661.171	KECAMATAN PEDURUNGAN	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33 Lembaga Kemasyarakatan	33 Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000	3.897.800.000	10.183.616.740	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain dan Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000	4.443.800.000	11.653.475.200	KELURAHAN TLOGOSARI KULON	Penambahan Operasional RT RW PKK RT RW dan Honor PKK RT RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	887.000.000	2.210.300.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	Penambahan Operasional RT RW PKK RT RW dan Honor PKK RT RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000	1.807.400.000	4.634.150.000	KELURAHAN TLOGOMULYO	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain dan Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	1.183.400.000	2.930.750.000	KELURAHAN KALICARI	Sebagian Belanja perjalanan dinas dalam kota dialihkan ke Belanja Honor Narasumber, Penambahan Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain dan Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000	1.776.200.000	4.408.448.950	KELURAHAN PLAMONGANSARI	(1) Penambahan Honor Narsum dari Rekening Pemberdayaan (2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dialihkan ke Belanja Honor Juri dan Hadiah Lomba (3) Honor dan Transport Ketua, Sekretaris dan PKK RT/RW (1 RT yang mulai bulan Mei dihapus) dialihkan ke Honor Narasumber (4) Penambahan Operasional RT/RW dan Honor PKK RT RW (Pajak)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.088.800.000	2.025.800.000	5.134.737.780	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KARANG TARUNA) sebesar 2,250,000 dialihkan ke Belanja Makanan dan Minuman untuk Event (Operasional) dan Penambahan Operasional RT/RW/PKK RT/RW DAN HONOR PKK RT/RW sebesar 3.298.400.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.394.000.000	1.339.400.000	3.351.725.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	revisi rekening honor ketua/skretaris RTRW/LPMK, perubahan manmin makan PKK menjadi snack PKK, penambahan Honor Narasumber LPMK, Penambahan Operasional RT/RW & PKK RT/RW, penambahan Honor PKK RT/RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.733.000.000	1.682.600.000	4.260.925.000	KELURAHAN GEMAH	- Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain dan Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain - Penambahan Operasional RT RW PKK RT RW dan Honor PKK RT RW
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.572.800.000	1.526.600.000	3.845.350.000	KELURAHAN PALEBON	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000	1.433.000.000	3.561.770.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000	762.200.000	1.811.422.150	KELURAHAN PENGGARON KIDUL	Belanja Makan Minum Rapat dialihkan ke Hadiah Lomba PKK dan LPMK
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	19.878.399	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	37.000.000	37.000.000	24.517.221	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	25 Persen	25 Persen	479.604.600	479.604.600	312.873.600	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan	25 angka	25 angka	479.604.600	479.604.600	312.873.600	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	479.604.600	479.604.600	312.873.600	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	50 Persen	50 Persen	21.000.000	21.000.000	9.906.320	KECAMATAN PEDURUNGAN	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan-Pedurungan	2 kegiatan	2 kegiatan	21.000.000	21.000.000	9.906.320	KECAMATAN PEDURUNGAN	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	70 Orang	21.000.000	21.000.000	9.906.320	KECAMATAN PEDURUNGAN	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.612.948.231	30.612.948.231	27.521.387.863		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.612.948.231	30.612.948.231	27.521.387.863		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	9.246.686.000	9.072.012.600	7.550.572.223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen					
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	116.745.000	116.745.000	6.373.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	50.941.000	50.941.000	586.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.672.000	3.672.000	1.602.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.371.000	4.371.000	1.040.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.782.000	2.782.000	1.068.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.331.000	3.331.000	1.040.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	674.000	674.000	113.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	974.000	974.000	172.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	6.883.031.000	6.708.357.600	6.189.537.333	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %					
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.581.718.000	6.407.044.600	5.912.261.733	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyesuaian Gaji hasil desk 25 Juni 2025
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	297.950.000	297.950.000	276.264.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	561.000	561.000	224.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.353.400	2.353.400	674.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	112.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	32.659.800	32.659.800	2.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	32.659.800	32.659.800	2.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.103.253.200	1.103.253.200	438.702.848	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.945.000	4.945.000	4.945.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.009.000	62.009.000	24.572.090	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	66.082.000	66.082.000	48.844.540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyesuaian Anggaran sub Kegiatan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.781.000	15.781.000	9.507.250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0 Dokumen	1.248.000	1.248.000	56.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyesuaian Anggaran sub Kegiatan tidak boleh 0
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	50 Laporan	100.000.000	100.000.000	50.914.068	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	500.257.200	500.257.200	199.275.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	352.931.000	352.931.000	100.588.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	106.573.000	106.573.000	112.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	50.987.000	50.987.000	56.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	55.586.000	55.586.000	56.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyesuaian Anggaran sub Kegiatan tidak boleh 0
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	565.300.000	565.300.000	565.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	275.920.000	275.920.000	275.920.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	289.380.000	289.380.000	289.380.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	439.124.000	439.124.000	347.646.442	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.604.000	39.604.000	35.955.397	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	356.672.000	356.672.000	273.569.845	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	6.982.000	6.982.000	2.255.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	35.866.000	35.866.000	35.866.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 Indeks	2.30 Indeks	5.239.712.760	5.239.712.760	4.121.600.840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota Semarang selama satu tahun	2 kejadian	2 kejadian	5.239.712.760	5.239.712.760	4.121.600.840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dokumen	28 Dokumen	1.372.086.760	1.372.086.760	1.317.221.620	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	10 Dokumen	415.913.000	415.913.000	318.535.030	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang	1500 Orang	155.732.000	155.732.000	38.024.560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240 Orang	240 Orang	114.565.000	114.565.000	126.565.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Laporan	4 Laporan	234.908.000	234.908.000	165.056.480	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	2 Dokumen	917.155.000	917.155.000	602.597.630	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	27 Orang	27 Orang	1.930.556.000	1.930.556.000	1.454.803.520	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	36.813.000	36.813.000	36.813.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	39.438.000	39.438.000	39.438.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 Orang	50 Orang	22.546.000	22.546.000	22.546.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	68.00 angka	68.00 angka	6.668.605.000	6.684.208.880	7.348.550.177	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7000 laporan	7000 laporan	6.668.605.000	6.684.208.880	7.348.550.177	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	44 Dokumen	41 Dokumen	1.307.194.000	1.307.194.000	882.948.840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tambahan Kegiatan dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Pembangunan
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	4.582.460.000	4.582.460.000	6.109.946.667	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	188 Orang	95 Orang	92.285.000	92.285.000	35.444.110	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	135 Orang	516.256.000	516.256.000	179.402.980	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pergeseran di dalam sub kegiatan untuk Honor Narasumber Kegiatan Discussion Competition - Paparan Komisi
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82 Laporan	76 Laporan	170.410.000	186.013.880	140.807.580	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	59.00 indeks	59.00 indeks	2.695.909.260	2.727.982.940	2.602.112.010	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	36 %	36 %	2.695.909.260	2.727.982.940	2.602.112.010	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	1.551.332.000	1.567.368.840	1.537.368.840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	215.000.000	215.000.000	211.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	150 Orang	718.870.260	718.870.260	158.203.610	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pergeseran didalam Sub kegiatan untuk Honorarium Narasumber Kemah Pembauran Ormas - Paparan Komisi
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	85 Laporan	85 Laporan	210.707.000	226.743.840	695.039.560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	71.50 indeks	2.936.000.000	2.967.424.240	2.927.062.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 kejadian	1 kejadian	2.936.000.000	2.967.424.240	2.927.062.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	13 Dokumen	11 Dokumen	229.000.000	229.000.000	147.786.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tambahan Kegiatan dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Pembangunan
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	800 Orang	50.400.000	65.787.400	197.990.760	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pergeseran di dalam sub kegiatan untuk pergeseran Honor Narasumber Penguatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama - Paparan Komisi
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	2360 Orang	2.507.455.000	2.523.491.840	2.532.440.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tambahan Kegiatan dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Pembangunan
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	149.145.000	149.145.000	48.845.740	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84.00 Persen	84.00 Persen	3.826.035.211	3.921.606.811	2.971.489.813	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	22 kejadian	22 kejadian	3.826.035.211	3.921.606.811	2.971.489.813	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	800 Orang	1.025.992.211	1.073.453.291	577.279.543	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2130 Orang	2850 Orang	855.093.000	903.203.520	930.491.110	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pergeseran di dalam Sub Kegiatan Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat -Paparan Komisi Tambahan Kegiatan dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Pembangunan
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365 Laporan	365 Laporan	275.050.000	275.050.000	140.150.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			UNIT PELAKSANA	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025		
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1.669.900.000	1.669.900.000	1.323.569.160	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	pengalihan Belanja Hibah Lanal ke Distaru
JUMLAH					5.577.911.388.674	5.699.427.188.188	6.464.761.394.136		

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk memwadahi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Berbagai dinamika yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini. Konflik geopolitik berkepanjangan Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, ancaman iklim, serta dinamika perekonomian yang terjadi pada level nasional maupun regional mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2025. Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah tingkat nasional dan daerah tahun 2025-2029 juga mempengaruhi perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan adanya dinamika tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan pada Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu-isu strategis terkini.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan hasil penyesuaian pada tahun berjalan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2025 yang ukuran kinerja dan penjabarannya berpangkal dari Perubahan RKPD Tahun 2025. Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001